



PRODUK PEKERTI-AA

Program Pengembangan Keterampilan Dasar
Teknik Instruksional dan *Applied Approach*
(PEKERTI - AA)

**Analisis Instruksional dan Peta Konsep, Profil Lulusan, SK, KD, LO,
Rekonstruksi Mata Kuliah, RPS, SAP, Kontrak Perkuliahan, Bahan Ajar,
Media Pembelajaran, Rancangan Tugas, dan Praktikum, Kisi-Kisi Tes,
Kunci Jawaban, Tes Hasil Belajar, Platform, Video Pembelajaran**

Nama : Muhibbussabry, Lc., M.A.
NIDN : 2118048702
Instansi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Mata Kuliah : Fikih Mawaris

**Unit Layanan PEKERTI-AA
Universitas Negeri Medan 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Pelatihan Program Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional– *Applied Approach*
(PEKERTI-AA)

Oleh

Nama	: Muhibbussabry, Lc., M.A.
NIDN	: 2118048702
Jurusan/Prodi	: Perbandingan Mazhab (PM)
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris

Pembimbing,

Mengetahui,
Medan, 18 September 2021 Peserta
PEKERTI -AA

Prof. Dr. Julaga Sitomorang., M.Pd.
NIP. 19510820 197803 1 002

Muhibbussabry, L.c., M.A.
NIDN. 2118048702

Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Koordinator
PEKERTI-AA UNIMED

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag.
NIP. 19760216 200212 1 002

Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd.
NIP. 19631127 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata' ala atas tersusunnya tugas akhir pada “Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* (PEKERTI-AA) yang diadakan oleh Universitas Negeri Medan berupa produk PEKERTI-AA. Produk PEKERTI-AA ini merupakan tugas terstruktur yang memuat analisis instruksional dan peta konsep, profil lulusan, sk, kd, lo, rekonstruksi mata kuliah, rps, sap, kontrak perkuliahan, bahan ajar, media pembelajaran, rancangan tugas dan praktikum, kisi-kisi tes, kunci jawaban, tes hasil belajar, platform, video pembelajaran

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Medan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pelatihan PEKERTI-AA. Pelatihan ini sangat bermanfaat serta dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas serta profesionalitas dalam proses belajar-mengajar. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Medan serta koordinator PEKERTI-AA dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional Universitas Negeri Medan yaitu Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd. kemudian kepada pembimbing Prof. Dr. Julaga Sitomorang, M.Pd. yang telah membimbing penulis sehingga produk PEKERTI-AA ini bisa diselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Medan, 18 September 2021
Penulis,

Muhibbussabry, Lc., M.A.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN I ANALISIS INSTRUKSIONAL DAN PETA KONSEP	1
Profil Lulusan dan Standar Kompetensi	2
Peta Konsep.....	8
BAGIAN II SILABUS DAN RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER	9
Silabus Mata Kuliah Fikih Mawaris	10
Rencana Perkuliahan Semester (RPS) Mata Kuliah Fikih Mawaris.....	17
BAGIAN III KONTRAK PERKULIAHAN.....	34
BAGIAN IV SATUAN ACARA PENGAJARAN	45
BAGIAN V BAHAN AJAR	89
BAGIAN VI MEDIA PEMBELAJARAN	218
A. Online	219
B. Offline	220
BAGIAN VII DAFTAR TUGAS	222
BAGIAN VIII KISI – KISI TES DAN TES HASIL BELAJAR	237
a. Kisi-kisi Tes	238
b. Tes Hasil Belajar	249
c. Kunci Jawaban.....	249
PLATFORM	238
VIDEO PEMBELAJARAN	283

BAGIAN I

ANALISIS INSTRUKSIONAL DAN PETA

KONSEP

Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Mata Kuliah Fikih Mawaris Tahun Akademik 2020/2021

A. Struktur Kompetensi

Profil lulusan: Sarjana Pebandingan Mazhab (PM) yang sesuai dengan KKNI, yaitu:

1. *Manager* (Manajer): Manajer pelayanan hukum masyarakat, seperti kepala Kantor Urusan Agama, kepala Pengadilan Agama, kepala Mahkamah Syar'iyah, Kepala kejaksaan, ketua bagian Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Kepala Sekolah Agama (MIN, MTsN dan MAN).
2. *Innovator* (Pembaharu): Pembuat inovasi dalam strategi pemecahan masalah kewarisan di tengah masyarakat, seperti tim penyuluhan hukum waris, tim pemberdayaan masyarakat baik di instansi pemerintah maupun swasta (LSM bidang hukum kewarisan).
3. *Researcher* (Peneliti): Pengkaji permasalahan di bidang hukum waris dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah kewarisan yang terjadi di Indonesia dan internasional, seperti peneliti kasus-kasus kewarisan, peneliti kebijakan hukum waris, dan lain-lain.
4. *Apprenticer* (Pembelajar): Profesional yang selalu belajar sepanjang hayat berdasarkan ilmu kewarisan Islam klasik dan modern.
5. *Communitarian* (Komunikator): Pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kewarisan, seperti konsultan hukum waris.
6. *Leader* (Pemimpin Masyarakat): Pemimpin dan memberi teladan yang baik dalam penyelesaian masalah hukum kewarisan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
7. *Educator* (Pendidik): Pendidik materi-materi hukum waris Islam baik di masyarakat umum maupun masyarakat khusus seperti pendidikan hukum waris Islam di sekolah. Pendidik juga dapat sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan.

Dengan adanya profil lulusan di atas, maka standar kompetensi yang diharapkan dari lulusan Sarjana Hukum Islam (dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan) sebagai berikut :

DIMENSI	KODE	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
Pengetahuan	P1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan Globalisasi.
	P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja
	P3	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia Kerja

	P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik
	P5	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>
	P6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan
	P7	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global
	P8	Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran
	P9	Memberikan layanan pembelajaran Fikih Mawaris yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan Karakteristiknya.
	P10	Memfasilitasi pengembangan potensi relegius peserta didik secara optimal
	P11	Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Fikih Mawaris.
	P12	Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran Fikih Mawaris.
	P13	Menguasai teori belajar dan pembelajaran Fikih Mawaris.
	P14	Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran Fikih Mawaris.
	P15	Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran Fikih Mawaris.
	P16	Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar Fikih Mawaris.
	P17	Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran Fikih Mawaris.
	P18	Melakukan pendalaman bidang kajian Fikih Mawaris sesuai dengan lingkungan dan perkembangan Zaman
	P19	Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran Fikih Mawaris.

	P20	Mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran Fikih Mawaris sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan
	P21	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-Qur'an-Hadits sebagai sub keilmuan dari Fikih Mawaris.
	P22	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Fikih Mawaris sebagai sub keilmuan dari Perbandingan Mazhab (PM)
	P23	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Ushul Fikih-Fikih sebagai sub keilmuan dari Perbandingan Mazhab.
	P24	Menguasai teori <i>maqāṣid syar'iyah</i> dalam kerangka pengembangan pembelajaran Fikih Mawaris yang kreatif dan inovatif
	P25	Menguasai teori pemecahan masalah untuk memposisikan dan mengembangkan Fikih Mawaris sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.
Keterampilan Khusus	KK1	Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Fikih Mawaris di kantor, sekolah dan layanan umum lainnya sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum
	KK2	Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Fikih Mawaris disekolah/madrasah, kantor dan layanan umum lainnya secara baik dan tepat
	KK3	Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Fikih Mawaris.
	KK4	Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif di sekolah/madrasah, kantor dan layanan umum lainnya.
	KK5	Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan/atau jurnal Bereputasi.
	KK6	Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Fikih Mawaris.
	KK7	Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di Masyarakat
	KK8	Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas di sekolah/madrasah, di komunitas akademik dan di masyarakat
	KK9	Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Fikih Mawaris secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran

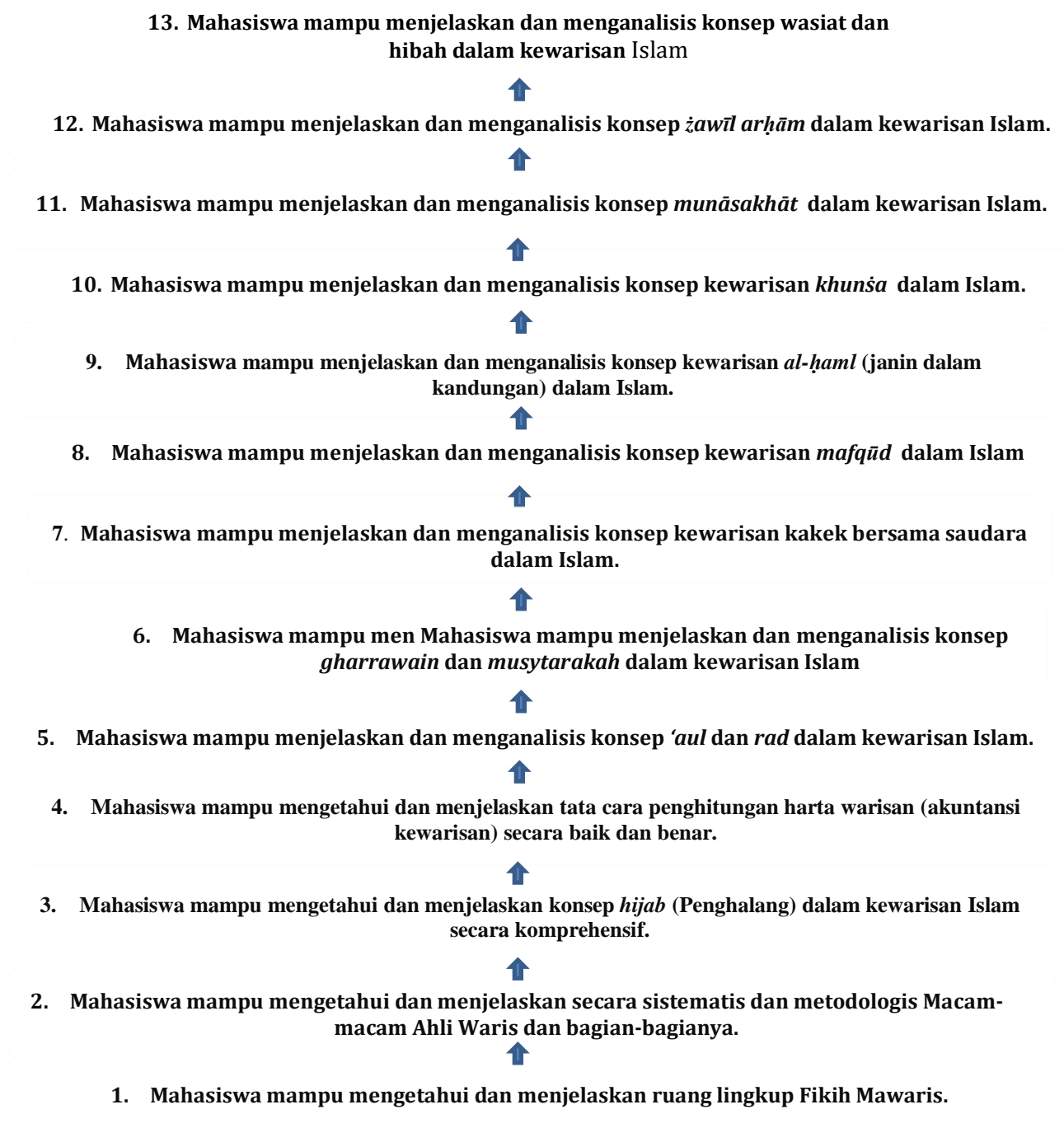
	KK10	Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas pembelajaran Fikih Mawaris di sekolah/madrasah
	KK11	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai Pelayan masyarakat, pendidik dan pembelajar.
	KK12	Mampu memecahkan berbagai permasalahan kewarisan yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sikap dan Tata Nilai	ST1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious
	ST2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	ST3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
	ST4	Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan Negara
	ST5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang Lain
	ST6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
	ST7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
	ST8	Menginternalisasi nilai-nilai Islam, norma, dan etika Akademik
	ST9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
	ST10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
	ST11	Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Hukum Islam
	ST12	Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia
	ST13	Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarism
	ST14	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas
	ST15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi

Keterampilan Umum	ST16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pakar fikih mawaris baik di sekolah, instansi pemerintahan, instansi swasta, dan di masyarakat.
	ST17	Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang fikih mawaris secara mandiri baik di sekolah, instansi pemerintahan, instansi swasta, dan di masyarakat.
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Keahliannya
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti dan pengembang bahan ajar Fikih Mawaris.
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
	KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
	KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
	KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi
	KU10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja
	KU11	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja

	KU12	Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja
	KU13	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid
	KU14	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma) dan juz pilihan lainnya
	KU15	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik

Peta Konsep

Peta konsep pada mata kuliah Fikih Mawaris, yaitu:



BAGIAN II
SILABUS DAN
RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER

Silabus Mata Kuliah Fikih Mawaris

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)			Kode Dokumen:
KODE	MATA KULIAH	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
	Fikih Mawaris	2	2	
OTORISASI	Pengembang RPS:	Koordinator MK:	Ketua Prodi:	
	(Muhibbussabry, Lc.,M.A.)	(Muhibbussabry, Lc.,M.A.)	(Aripin Marpaung, MA)	
Profil Lulusan	<div>1. <i>Manager</i> (Manajer)</div> <div>2. <i>Innovator</i> (Pembaharu)</div> <div>3. <i>Researcher</i> (Peneliti)</div> <div>4. <i>Apprenticer</i> (Pembelajar)</div> <div>5. <i>Communitarian</i> (Komunikator)</div> <div>6. <i>Leader</i> (Pemimpin Masyarakat)</div> <div>7. <i>Educator</i> (Pendidik)</div>			
Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan kepada matakuliah	<div>1. Sikap<div>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</div><div>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</div><div>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</div><div>4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</div></div> <div>2. Pengetahuan<div>1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan fikih mawaris secara umum dan khusus secara mendalam;</div></div>			

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural terkait hukum kewarisan; 3. Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap berbagai macam kasus dan fenomena fikih kewarisan berdasarkan analisis informasi dan data; 4. Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok untuk mencerahkan masyarakat terhadap kasus-kasus fikih mawaris. <p>3. Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. <p>4. Keterampilan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami fikih mawaris secara komprehensif ; 2. Mahasiswa mampu menerapkan ilmunya dalam menyelesaikan kasus kewarisan ditengah-tengah masyarakat; 3. Mahasiswa mampu melakukan <i>mini research terbatas</i> secara individu terhadap dinamika persoalan kewarisan untuk pengembangan ilmu dan masyarakat.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Fikih Mawaris merupakan Mata Kuliah yang harus dikuasai oleh setiap Mahasiswa guna menjawab berbagai persoalan dan problem dalam masyarakat. Dalam mata kuliah ini dibahas berbagai materi yang berkaitan dengan aturan pewarisan dalam Islam menurut al-Qur'an, Hadis dan ijtiha. Untuk mendukung integrasi dan interkoneksi, dilakukan perbandingan dengan hukum/tata aturan kewarisan yang lain, misalnya hukum perdata, hukum adat dan hukum positif.
Prasyarat Mata Kuliah	Mata kuliah ini mempersyaratkan mahasiswa sudah lulus dalam mata kuliah Hukum Waris Islam.

<p>Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Lingkup Fikih Mawaris. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Fikih Mawaris b. Objek Ilmu Fikih Mawaris c. Sumber Hukum Fikih Mawaris d. Sejarah Fikih Mawaris e. Urgensi Belajar dan Mengajarkan Fikih Mawaris 2. Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya. <ol style="list-style-type: none"> a. Rukun Waris b. Syarat Waris c. Sebab Mendapatkan Waris d. Penghalang Dalam Hukum Waris e. Defenisi dan Unsur-Unsur <i>Tirkah</i> f. Hak-hak yang Terkait dengan <i>Tirkah</i>. 3. Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Aṣḥābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan) b. <i>Aṣḥābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan) 4. Mewarisi Secara '<i>Aṣabah</i> Dan Konsep Hijab (<i>Al-Hajb</i>) Dalam Waris Islam <ol style="list-style-type: none"> a. Definisi '<i>Aṣabah</i> b. Pembagian '<i>Aṣabah</i> c. Pengertian <i>Hijab</i> d. Macam-macam <i>Hijab</i> e. Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i> 5. Akuntansi Kewarisan <ol style="list-style-type: none"> a. Asal Masalah (<i>aṣl al-mas'alah</i>), metode dan patokannya b. <i>Tashīḥ Mas'alah</i> dalam waris. 6. '<i>Aul</i> Dan <i>Rad</i> Dalam Kewarisan. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian '<i>Aul</i> b. Latar Belakang Terjadinya '<i>Aul</i> c. Perselisihan Pendapat Tentang '<i>Aul</i> d. Asal Masalah yang Dapat di '<i>Aulkan</i> dan yang Tidak e. Pengertian <i>Rad</i> f. Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i>
--	---

- g. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Rad*
- h. Syarat-syarat Terjadinya *Rad*
- i. Ahli waris yang Berhak Mendapat *Rad*
- j. Ahli Waris yang Tidak Mendapat *Rad*
- k. Macam-Macam Kasus *Rad* dan Metode Penyelesaiannya
- 7. *Gharrawain* Dan *Musytarakah*
 - a. Pengertian *Gharrawain*
 - b. Pembagian *Gharrawain*
 - c. Cara Penyelesaian *Gharrawain*
 - d. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Gharrawain*
 - e. Pengertian *Musytarakah* (berserikat) atau *Hajariyyah* (terhalang)
 - f. Rukun Masalah *Musytarakah*
 - g. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Musytarakah*
 - h. Cara Pembagian Warisan *Musytarakah*
- 8. Kewarisan Kakek Bersama Saudara
 - a. Pengertian Kakek dan Saudara
 - b. Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara
 - c. Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara
 - d. Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara
- 9. Kewarisan *Mafqūd* (Orang Hilang)
 - a. Pengertian *Mafqūd*
 - b. Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu *Mafqūd*
 - c. Hak Waris *Mafqūd*
 - d. Metode Penyelesaian Kasus *Mafqūd*
 - e. Contoh dan Penyelesaian Pembagian Harta Untuk *Mafqūd*
 - f. Hukum Jika *Mafqūd* kembali Dalam Keadaan Hidup Setelah Dihukum Meninggal
 - g. Cara Menyelesaikan Kasus *Mafqūd* Yang Lebih Dari Satu Orang
- 10. Kewarisan *Al-Ḥaml* (Anak Dalam Kandungan)
 - a. Pengertian *al-Ḥaml*
 - b. Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi
 - c. Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris Hamil
 - d. Bagian yang Harus Ditangguhkan Untuk Ahli Waris Hamil
 - e. Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil
 - f. Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil
- 11. Kewarisan *Khunṣa*

	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian <i>Khunṣa</i> b. Jalur-jalur Keturunan <i>Khunṣa</i> c. Keadaan <i>Khunṣa</i> dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan d. Metode Penyelesaian Kasus <i>Khunṣa</i>
	<p>12. <i>Munāsakhāt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian <i>Munāsakhāt</i> b. Keadaan-keadaan kasus <i>Munāsakhāt</i>
	<p>13. <i>Ẓawīl Arḥām</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian <i>Ẓawīl Arḥām</i> b. Pengelompokan <i>Ẓawīl Arḥām</i> c. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan <i>Ẓawīl Arḥām</i> d. Cara <i>Ẓawīl Arḥām</i> Mewarisi
	<p>14. Wasiat Dan Hibah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Wasiat b. Dasar Hukum Wasiat c. Hukum Wasiat d. Rukun dan Syarat Wasiat e. Kadar Wasiat f. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat g. Mekanisme Pencabutan Wasiat..... h. Wasiat Dalam Keadaan Tertutup i. Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat j. Larangan-larangan Wasiat k. Wasiat Wajibah l. Pengertian Hibah m. Dasar Hukum Hibah n. Hukum Hibah o. Rukun dan Syarat Hibah p. Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat q. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

	r. Hikmah Disyariatkan Hibah
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 2. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i>, Bandung, Bulan Bintang, 1978. 3. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i>, Beirut: Dar al-Fikr, tt 4. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i>, Beirut: Alam al-kutub, tt. 5. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i>, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 6. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 7. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i>, Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 8. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i>, Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 9. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i>, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001 10. Acep Sugiri, "Wasiat untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-Hadis Larangan Wasiat Untuk Ahli Waris", dalam <i>Al-Jami'ah</i>, Vol. 42, No. 2, 2004, hlm. 465-494 11. Ali Parman, <i>Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik</i>, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995) 12. Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Waris Islam</i>, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001). 13. Abdul Ghofur Anshori, <i>Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitasnya</i>, Cet. 1 (Yogyakarta: Ekonosia, 2002). 14. David S. Powers, <i>Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance</i>, (London: University of California Press, 1979). 15. Hartono Soerjopratiknjo, <i>Hukum Waris Tanpa Wasiat</i>, (Yogyakarta, Mustika Wikasa, 1994).

16. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
17. Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
18. Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, terj. Syarmin Syukur dan Luluk Rodliyah, dari buku *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah 'ala Mazahib al-Arba'ah* bab *Mirats*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1988).
19. Muh Arif, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
20. M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Huku Perdata (BW)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
21. Muhammad Musthafa Syalaby, *Ahkam Al-Mawarits Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1978).
22. Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah 'ala Mazahib li A'immah Al-Arba'ah*, Cet. 1, (t.n.t: Dar al-Kutub al-'Araby, 1984).
23. Rahmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
24. Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).
25. Sukris Sarmadi, *Transendensi Hukum Waris Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
26. Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.dan *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 2, (t.t.p.: Darul Ulum Press, 1993)
27. Thaha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih, tt.
28. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Rencana Perkuliahan Semester (RPS) Mata Kuliah Fikih Mawaris

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menjelaskan kontrak perkuliahan, urgensi mata kuliah, strategi pembelajaran - Mampu menunjukkan sikap partisipatif dan bertanggung jawab terhadap kontrak yang disepakati - Mengajar dan mempresentasikan konsep dasar fikih mawaris 	Penjelasan silabus, kontrak perkuliahan. Ruang Lingkup Fikih Mawaris. a. Pengertian Fikih Mawaris b. Objek Ilmu Fikih Mawaris c. Sumber Hukum Fikih Mawaris d. Sejarah Fikih Mawaris e. Urgensi Belajar dan Mengajarkan Fikih Mawaris.	Ceramah, Diskusi, Tanya-Jawab, <i>brainstorming</i>	2 x50 menit	Mahasiswa dan dosen berdiskusi tentang kontrak perkuliahan dan obyek kajian mata kuliah fikih mawaris dengan narasumber utama dosen	Keterlibatan mahasiswa (sikap) - Kepedulian/respon - Keterlibatan dlm penyampaian ide/gagasan	2%
II	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan sebab, rukun, syarat-syarat kewarisan, harta peninggalan dan hak-hak yang terkait dengannya.	Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya. a. Rukun Waris b. Syarat Waris c. Sebab Mendapatkan Waris d. Penghalang Dalam Hukum Waris e. Defenisi dan Unsur-Unsur <i>Tirkah</i>	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab.	2 x50 menit	Dosen dan mahasiswa berdiskusi tentang topik yang dibahas dengan narasumber utama dosen	Sikap - Berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran - Kesantunan	2%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Hak-hak yang Terkait dengan <i>Tirkah</i> .					
III	Mampu Menjelaskan Ahli waris yang mendapatkan warisan secara sistematis dan metodologis.	<p>Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan</p> <p>a. <i>Aṣḥābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan)</p> <p>b. <i>Aṣḥābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan)</p>	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab.	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok I sebagai narasumber utama	<p>Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan</p> <p>Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi</p> <p>Membuat Pertanyaan:</p>	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya</p> <p>Sikap Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademi</p>	
IV	Mampu mendeskripsikan konsep 'aşabah dan hijab secara komprehensif.	<p>Mewarisi Secara 'Aşabah Dan Konsep Hijab (<i>Al-Ḥajb</i>) Dalam Waris Islam</p> <p>a. Definisi 'Aşabah b. Pembagian 'Aşabah c. Pengertian <i>Hijab</i> d. Macam-macam <i>Hijab</i> e. Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i></p>	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok II sebagai narasumber utama	<p>Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan</p> <p>Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi,</p>	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi</p> <p>Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya</p> <p>Sikap Menghargai pendapat teman</p>	
V	Mampu menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.	<p>Akuntansi Kewarisan</p> <p>a. Asal Masalah (<i>aṣl al-mas'alah</i>), metode dan patokannya</p> <p>b. <i>Tashīḥ Mas'alah</i> dalam waris.</p>	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok III sebagai narasumber utama	<p>Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan</p>	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>laporan</p> <p>Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi</p> <p>Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya</p> <p>Sikap Bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri</p>	
VI	Mampu mendeskripsikan dan menyelesaikan kasus-	<i>'Aul Dan Rad</i> Dalam Kewarisan.	Telaah literatur	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah	Makalah: Kesesuaian Topik,	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kasus ' <i>Aul</i> Dan <i>Rad</i> Dalam Kewarisan.	a. Pengertian ' <i>Aul</i> b. Latar Belakang Terjadinya ' <i>Aul</i> c. Perselisihan Pendapat Tentang ' <i>Aul</i> d. Asal Masalah yang Dapat di ' <i>Aul</i> kan dan yang Tidak e. Pengertian <i>Rad</i> f. Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i> g. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i> h. Syarat-syarat Terjadinya <i>Rad</i> i. Ahli waris yang Berhak Mendapat <i>Rad</i> j. Ahli Waris yang Tidak Mendapat <i>Rad</i> k. Macam-Macam Kasus <i>Rad</i> dan Metode Penyelesaiannya	Penugasan, presentasi, tanya jawab		berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok IV sebagai narasumber utama	Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan;	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Ketepatan metode bertanya Sikap Menginternalisasi semangat kemandirian	
VII	Mampu menjelaskan dan menyelesaikan kasus-kasus <i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i> Dalam Kewarisan.	<i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i> a. Pengertian <i>Gharrawain</i> b. Pembagian <i>Gharrawain</i> c. Cara Penyelesaian <i>Gharrawain</i> d. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Gharrawain</i> e. Pengertian <i>Musytarakah</i> (berserikat) atau <i>Hajariyyah</i> (terhalang) f. Rukun Masalah <i>Musytarakah</i> g. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Musytarakah</i> h. Cara Pembagian Warisan <i>Musytarakah</i>		2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok V sebagai narasumber utama	Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						peraga dalam presentasi Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya Sikap Memiliki kesungguhan hati dalam bekerja	
VIII	Ujian Tengah Semester						20%
IX	Mampu Menjelaskan dan menyelesaikan secara sistematis dan metodologis kasus-kasus kewarisan kakek bersama saudara	Kewarisan Kakek Bersama Saudara a. Pengertian Kakek dan Saudara b. Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara c. Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara d. Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan mengajukan dan dipresentasikan. Kelompok VI sebagai narasumber utama	Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan Presentasi:	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi</p> <p>Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya</p> <p>Sikap Komitmen terhadap pekerjaan atau tugasnya</p>	
X	Mampu Menjelaskan dan menyelesaikan secara sistematis dan	Kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang) a. Pengertian <i>Mafqūd</i>	Telaah literatur Penugasan,	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan	Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data,	3%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	metodologis kasus-kasus kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang).	b. Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu <i>Mafqūd</i> c. Hak Waris <i>Mafqūd</i> d. Metode Penyelesaian Kasus <i>Mafqūd</i> e. Contoh dan Penyelesaian Pembagian Harta Untuk <i>Mafqūd</i> f. Hukum Jika <i>Mafqūd</i> kembali Dalam Keadaan Hidup Setelah Dihukum Meninggal g. Cara Menyelesaikan Kasus <i>Mafqūd</i> Yang Lebih Dari Satu Orang	presentasi, tanya jawab		membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok VII sebagai narasumber utama	Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						bertanya	
XI	Mampu Menjelaskan dan menyelesaikan secara sistematis dan metodologis kasus-kasus kewarisan <i>Al-Haml</i> (Anak Dalam Kandungan).	Kewarisan <i>Al-Haml</i> (Anak Dalam Kandungan) a. Pengertian <i>al-Haml</i> b. Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi c. Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris Hamil d. Bagian yang Harus Ditanggungkan Untuk Ahli Waris Hamil e. Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil f. Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok VIII sebagai narasumber utama	Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi Membuat	3%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya	
XII	Mampu menjelaskan dan menghitung Kewarisan <i>Khunsa</i> .	Kewarisan <i>Khunsa</i> a. Pengertian <i>Khunsa</i> b. Jalur-jalur Keturunan <i>Khunsa</i> c. Keadaan <i>Khunsa</i> dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan d. Metode Penyelesaian Kasus <i>Khunsa</i>	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok IX sebagai narasumber utama	Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat	3%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						peraga dalam presentasi Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya Sikap Komitmen dan kesungguhan Kekompakan kelompok	
XIII	Mampu mendeskripsikan dan menghitung Kewarisan <i>Munāsakhāt</i> .	<i>Munāsakhāt</i> a. Pengertian <i>Munāsakhāt</i> b. Keadaan-keadaan kasus <i>Munāsakhāt</i>	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok X sebagai narasumber utama	Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan Presentasi:	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi</p> <p>Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya</p> <p>Sikap Disiplin dalam penggunaan waktu</p>	
XIV	Mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah <i>Żawīl Arḥām</i>	<i>Żawīl Arḥām</i> a. Pengertian <i>Żawīl Arḥām</i> b. Pengelompokan <i>Żawīl Arḥām</i> c. Pandangan Ulama	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan	<p>Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data,</p>	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Mazhab Tentang Warisan <i>Żawīl Arḥām</i></p> <p>d. Cara <i>Żawīl Arḥām</i> Mewarisi</p>			<p>dipresentasikan.</p> <p>Kelompok XI sebagai narasumber utama</p>	<p>Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan</p> <p>Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi</p> <p>Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya</p>	
XV	Mampu menjelaskan secara komprehensif	<p>Wasiat Dan Hibah</p> <p>a. Pengertian Wasiat</p>	Telaah literatur Penugasan,	2 x50 menit	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah	Makalah: Kesesuaian Topik,	4%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Wasiat Dan Hibah.	b. Dasar Hukum Wasiat c. Hukum Wasiat d. Rukun dan Syarat Wasiat e. Kadar Wasiat f. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat g. Mekanisme Pencabutan Wasiat h. Wasiat Dalam Keadaan Tertutup i. Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat j. Larangan-larangan Wasiat k. Wasiat Wajibah l. Pengertian Hibah m. Dasar Hukum Hibah n. Hukum Hibah o. Rukun dan Syarat Hibah p. Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat q. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam r. Hikmah Disyariatkan Hibah	presentasi, tanya jawab		berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok XII sebagai narasumber utama	Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan laporan Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan alat peraga dalam presentasi Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan;	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran (Metode)	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Ketepatan metode bertanya	
XVI	<i>Ujian Akhir Semester</i>						25%

BAGIAN III

KONTRAK PERKULIAHAN

Kontrak Perkuliahan

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi	: Perbandingan Mazhab (PM)
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris
Kode	:
Semester	: II
Sks	: 2 Sks
Prasayarat	:
Dosen Penampu	: Muhibbussabry, Lc, MA

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Sikap

- S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- S4 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

B. Pengetahuan

- P1 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan fikih mawaris secara umum dan khusus secara mendalam
- P2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural terkait hukum kewarisan
- P3 Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap berbagai macam kasus dan fenomena fikih kewarisan berdasarkan analisis informasi dan data
- P4 Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok untuk mencerahkan masyarakat terhadap kasus-kasus fikih mawaris

C. Keterampilan Umum

- KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data

D. Keterampilan khusus

- KK1 Mahasiswa mampu memahami fikih mawaris secara komprehensif
- KK2 Mahasiswa mampu menerapkan ilmunya dalam menyelesaikan kasus kewarisan ditengah-tengah masyarakat
- KK3 Mahasiswa mampu melakukan *mini research terbatas* secara individu terhadap dinamika persoalan kewarisan untuk pengembangan ilmu dan masyarakat.

III. DESKRIPSI MATA KULIAH :

Mata kuliah Fikih Mawaris merupakan Mata Kuliah yang harus dikuasai oleh setiap Mahasiswa guna menjawab berbagai persoalan dan problem dalam masyarakat. Dalam mata kuliah ini dibahas berbagai materi yang berkaitan dengan aturan pewarisan dalam Islam menurut al-Qur'an, Hadis dan ijtihad. Untuk mendukung integrasi dan interkoneksi, dilakukan perbandingan dengan hukum/tata aturan kewarisan yang lain, misalnya hukum perdata, hukum adat dan hukum positif.

IV. METODE PEMBELAJARAN:

Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan Ceramah, Diskusi Kelompok, Penugasan (individu/kelompok), Presentasi, Workshop dan Praktek/Demonstrasi.

V. MATERI AJAR

1. Ruang Lingkup Fikih Mawaris.
2. Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, *Tirkah* (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya.
3. Kewarisan Secara *Farḍu* Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan
4. Mewarisi Secara '*Aṣabah* Dan Konsep Hijab (*Al-Ḥajb*) Dalam Waris Islam
5. Akuntansi Kewarisan
6. '*Aul* Dan *Rad* Dalam Kewarisan.
7. *Gharrawain* Dan *Musytarakah*
8. Kewarisan Kakek Bersama Saudara
9. Kewarisan *Maḥqūd* (Orang Hilang)
10. Kewarisan *Al-Ḥaml* (Anak Dalam Kandungan)
11. Kewarisan *Khunṣa*
12. *Munāsakhāt*
13. *Ẓawīl Arḥām*
14. Wasiat Dan Hibah

VI. SUMBER BACAAN UTAMA

1. Dosen-dosen fikih, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010).
2. Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Bulan Bintang, 1978.
3. Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam at-Tirkah wa al-Miras*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
4. Muh. Ali ash-Shabuni, *al-Mawaris fi Syari'at al-Islam*, Beirut: Alam al-kutub, tt.
5. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
6. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*

7. Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt)
8. Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984)
9. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
10. Acep Sugiri, “Wasiat untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-Hadis Larangan Wasiat Untuk Ahli Waris”, dalam *Al-Jami'ah*, Vol. 42, No. 2, 2004, hlm. 465-494
11. Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995)
12. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
13. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitasnya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Ekonosia, 2002).
14. David S. Powers, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*, (London: University of California Press, 1979).
15. Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta, Mustika Wikasa, 1994).
16. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
17. Ismuha, *Pencahiran Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
18. Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, terj. Syarmin Syukur dan Luluk Rodliyah, dari buku *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah 'ala Mazahib al-Arba'ah bab Mirats*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1988).
19. Muh Arif, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
20. M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Huku Perdata (BW)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
21. Muhammad Musthafa Syalaby, *Ahkam Al-Mawarits Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1978).
22. Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah 'ala Mazahib li A'immah Al-Arba'ah*, Cet. 1, (t.n.t: Dar al-Kutub al-'Araby, 1984).
23. Rahmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
24. Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).
25. Sukris Sarmadi, *Transendensi Hukum Waris Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
26. Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.dan *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 2, (t.t.p.: Darul Ulum Press, 1993)
27. Thaha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih, tt.
28. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

VII. TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Anda diwajibkan untuk mengikuti test hasil belajar (UTS dan UAS) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Fakultas.
2. Anda diwajibkan untuk membuat makalah secara individual dan kelompok dengan materi yang akan ditentukan oleh dosen.

3. Anda diwajibkan melakukan mini riset sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
4. Anda diwajibkan mentaati ketentuan selama perkuliahan sebagai berikut :
 - a. Mengikuti perkuliahan dengan baik dan tertib (terlambat maks.15 menit)
 - b. Berpakaian dengan sopan dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal
 - c. Dilarang berkomunikasi dengan HP di dalam kelas saat perkuliahan berlangsung dan pesawat dimatikan atau di-set nada getar
 - d. Setiap pelanggaran akan ketentuan tersebut akan diberikan sanksi berupa (1) teguran, (2) peringatan dan (3) tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada saat terjadi pelanggaran.
 - e. Jika ada hal yang mendesak (telepon) mahasiswa wajib minta izin keluar
 - f. Jika Dosen terlambat 15 menit tanpa pemberitahuan kepada mahasiswa, mahasiswa boleh meninggalkan kelas.
 - g. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jumlah jam tatap muka.

VIII. PENILAIAN (KRITERIA, INDIKATOR, DAN BOBOT)

- A. Penilaian Proses (bobot 60 %)
 1. Sikap (mengacu pada penjabaran deskripsi umum)= (10%)
 2. Partisipasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran (Perkuliahan, Praktek , Workshop) = 30%
 3. Penyelesaian Tugas-tugas (makalah dan laporan mini riset) = 20%
- B. Penilaian Akhir (bobot 40 %)
 1. Ujian Tengah Semester (20%)
 2. Ujian Akhir Semester (20%)
- C. Acuan Penilaian
 1. Kisaran Skala Lima

Skor Persentil	Nilai Skala	Nilai Huruf
80 – 100	4	A
70 – 79	3	B
60 – 69	2	C
50 – 59	1	D
0 – 49	0	E

- D. Penilaian laporan hasil Mini Riset (*Take-home*)
 - Originalitas Ide dan konteks sosialnya
 - Perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi
 - Ide turunan dan konteks sosialnya

- a) Peluang keterwujudan
 - b) Nilai-nilai inovasi
 - c) Perkiraan dampak
 - Kesimpulan dan saran
 - Pustaka
- E. Ketentuan Makalah/Laporan mini riset
- a. Diketik 1,5 Spasi dengan jenis huruf Times News Romans “12”
 - b. menggunakan minimal 5 literatur yang berbeda
 - c. Panjang halaman minimal 8 halaman
 - d. Isi makalah terdiri dari : cover dengan menggunakan logo UIN, daftar isi, kata pengantar , pembahasan dan kesimpulan
 - e. Dicitak pada kertas A4

IX. MATERI DAN DISPLAY KEGIATAN PERKULIAHAN

Pert. Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan kajian	Metode	Pengalaman Belajar
I	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menjelaskan kontrak perkuliahan, urgensi mata kuliah, strategi pembelajaran - Mampu menunjukkan sikap partisipatif dan bertanggung jawab terhadap kontrak yang disepakati - Mengajar dan mempresentasikan konsep dasar fikih mawaris 	Penjelasan silabus, kontrak perkuliahan. Ruang Lingkup Fikih Mawaris. <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Fikih Mawaris b. Objek Ilmu Fikih Mawaris c. Sumber Hukum Fikih Mawaris d. Sejarah Fikih Mawaris e. Urgensi Belajar dan Mengajarkan Fikih Mawaris. 	Ceramah, Diskusi, Tanya-Jawab, <i>brainstorming</i>	Mahasiswa dan dosen berdiskusi tentang kontrak perkuliahan dan obyek kajian mata kuliah fikih mawaris dengan narasumber utama dosen
II	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan sebab, rukun, syarat-syarat kewarisan, harta peninggalan dan hak-hak yang terkait dengannya.	Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya. <ul style="list-style-type: none"> a. Rukun Waris b. Syarat Waris c. Sebab Mendapatkan Waris d. Penghalang Dalam Hukum Waris e. Defenisi dan Unsur-Unsur <i>Tirkah</i> 	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab.	Dosen dan mahasiswa berdiskusi tentang topik yang dibahas dengan narasumber utama dosen

		f. Hak-hak yang Terkait dengan <i>Tirkah</i> .		
III	Mampu Menjelaskan Ahli waris yang mendapatkan warisan secara sistematis dan metodologis.	Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan a. <i>Aṣḥābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan) b. <i>Aṣḥābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan)	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab.	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok I sebagai narasumber utama
IV	Mampu mendeskripsikan konsep ' <i>aṣabah</i> dan hijab secara komprehensif.	Mewarisi Secara ' <i>Aṣabah</i> Dan Konsep Hijab (<i>Al-Ḥajb</i>) Dalam Waris Islam a. Definisi ' <i>Aṣabah</i> b. Pembagian ' <i>Aṣabah</i> c. Pengertian <i>Hijab</i> d. Macam-macam <i>Hijab</i> e. Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i>	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok II sebagai narasumber utama
V	Mampu menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.	Akuntansi Kewarisan a. Asal Masalah (<i>aṣl al-mas'alah</i>), metode dan patokannya b. <i>Tashīḥ Mas'alah</i> dalam waris.	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok III sebagai narasumber utama
VI	Mampu mendeskripsikan dan menyelesaikan kasus-kasus ' <i>Aul</i> Dan <i>Rad</i> Dalam Kewarisan.	' <i>Aul</i> Dan <i>Rad</i> Dalam Kewarisan. a. Pengertian ' <i>Aul</i> b. Latar Belakang Terjadinya ' <i>Aul</i>	Telaah literatur Penugasan, presentasi,	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam

		c. Perselisihan Pendapat Tentang ' <i>Aul</i> d. Asal Masalah yang Dapat di ' <i>Aul</i> kan dan yang Tidak e. Pengertian <i>Rad</i> f. Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i> g. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i> h. Syarat-syarat Terjadinya <i>Rad</i> i. Ahli waris yang Berhak Mendapat <i>Rad</i> j. Ahli Waris yang Tidak Mendapat <i>Rad</i> k. Macam-Macam Kasus <i>Rad</i> dan Metode Penyelesaiannya	tanya jawab	bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok IV sebagai narasumber utama
VII	Mampu menjelaskan dan menyelesaikan kasus-kasus <i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i> Dalam Kewarisan.	<i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i> a. Pengertian <i>Gharrawain</i> b. Pembagian <i>Gharrawain</i> c. Cara Penyelesaian <i>Gharrawain</i> d. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Gharrawain</i> e. Pengertian <i>Musytarakah</i> (berserikat) atau <i>Hajariyyah</i> (terhalang) f. Rukun Masalah <i>Musytarakah</i> g. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Musytarakah</i> h. Cara Pembagian Warisan <i>Musytarakah</i>		Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok V sebagai narasumber utama
VIII	Ujian Tengah Semester			
IX	Mampu Menjelaskan dan menyelesaikan secara sistematis dan metodologis kasus-kasus kewarisan kakek bersama saudara	Kewarisan Kakek Bersama Saudara a. Pengertian Kakek dan Saudara b. Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara c. Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara d. Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah/buku resume, membuat pertanyaan dan

		Bersama Saudara		mengajukan dan dipresentasikan. Kelompok VI sebagai narasumber utama
X	Mampu Menjelaskan dan menyelesaikan secara sistematis dan metodologis kasus-kasus kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang).	Kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang) <ol style="list-style-type: none"> Pengertian <i>Mafqūd</i> Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu <i>Mafqūd</i> Hak Waris <i>Mafqūd</i> Metode Penyelesaian Kasus <i>Mafqūd</i> Contoh dan Penyelesaian Pembagian Harta Untuk <i>Mafqūd</i> Hukum Jika <i>Mafqūd</i> kembali Dalam Keadaan Hidup Setelah Dihukum Meninggal Cara Menyelesaikan Kasus <i>Mafqūd</i> Yang Lebih Dari Satu Orang 	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok VII sebagai narasumber utama
XI	Mampu Menjelaskan dan menyelesaikan secara sistematis dan metodologis kasus-kasus kewarisan <i>Al-Ḥaml</i> (Anak Dalam Kandungan).	Kewarisan <i>Al-Ḥaml</i> (Anak Dalam Kandungan) <ol style="list-style-type: none"> Pengertian <i>al-Ḥaml</i> Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris Hamil Bagian yang Harus Ditanggungkan Untuk Ahli Waris Hamil Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil 	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok VIII sebagai narasumber utama
XII	Mampu menjelaskan dan menghitung Kewarisan <i>Khunṣa</i> .	Kewarisan <i>Khunṣa</i> <ol style="list-style-type: none"> Pengertian <i>Khunṣa</i> Jalur-jalur Keturunan <i>Khunṣa</i> Keadaan <i>Khunṣa</i> dan Tata Cara Mendapatkan 	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam

		Waris Pada Setiap Keadaan d. Metode Penyelesaian Kasus <i>Khunṣa</i>	jawab	bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok IX sebagai narasumber utama
XIII	Mampu mendeskripsikan dan menghitung Kewarisan <i>Munāsakhāt</i> .	<i>Munāsakhāt</i> a. Pengertian <i>Munāsakhāt</i> b. Keadaan-keadaan kasus <i>Munāsakhāt</i>	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok X sebagai narasumber utama
XIV	Mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah <i>Żawīl Arḥām</i>	<i>Żawīl Arḥām</i> a. Pengertian <i>Żawīl Arḥām</i> b. Pengelompokan <i>Żawīl Arḥām</i> c. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan <i>Żawīl Arḥām</i> d. Cara <i>Żawīl Arḥām</i> Mewarisi	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok XI sebagai narasumber utama
XV	Mampu menjelaskan secara komprehensif Wasiat Dan Hibah.	Wasiat Dan Hibah a. Pengertian Wasiat b. Dasar Hukum Wasiat c. Hukum Wasiat d. Rukun dan Syarat Wasiat e. Kadar Wasiat f. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat g. Mekanisme Pencabutan Wasiat	Telaah literatur Penugasan, presentasi, tanya jawab	Secara berkelompok Mahasiswa Menelaah berbagai literatur dan membuat resume dalam bentuk makalah /buku resume, membuat pertanyaan dan dipresentasikan. Kelompok XII sebagai narasumber utama


	<ul style="list-style-type: none"> h. Wasiat Dalam Keadaan Tertutup i. Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat j. Larangan-larangan Wasiat k. Wasiat Wajibah l. Pengertian Hibah m. Dasar Hukum Hibah n. Hukum Hibah o. Rukun dan Syarat Hibah p. Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat q. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam r. Hikmah Disyariatkan Hibah 		
XVI	UJIAN AKHIR SEMESTER		

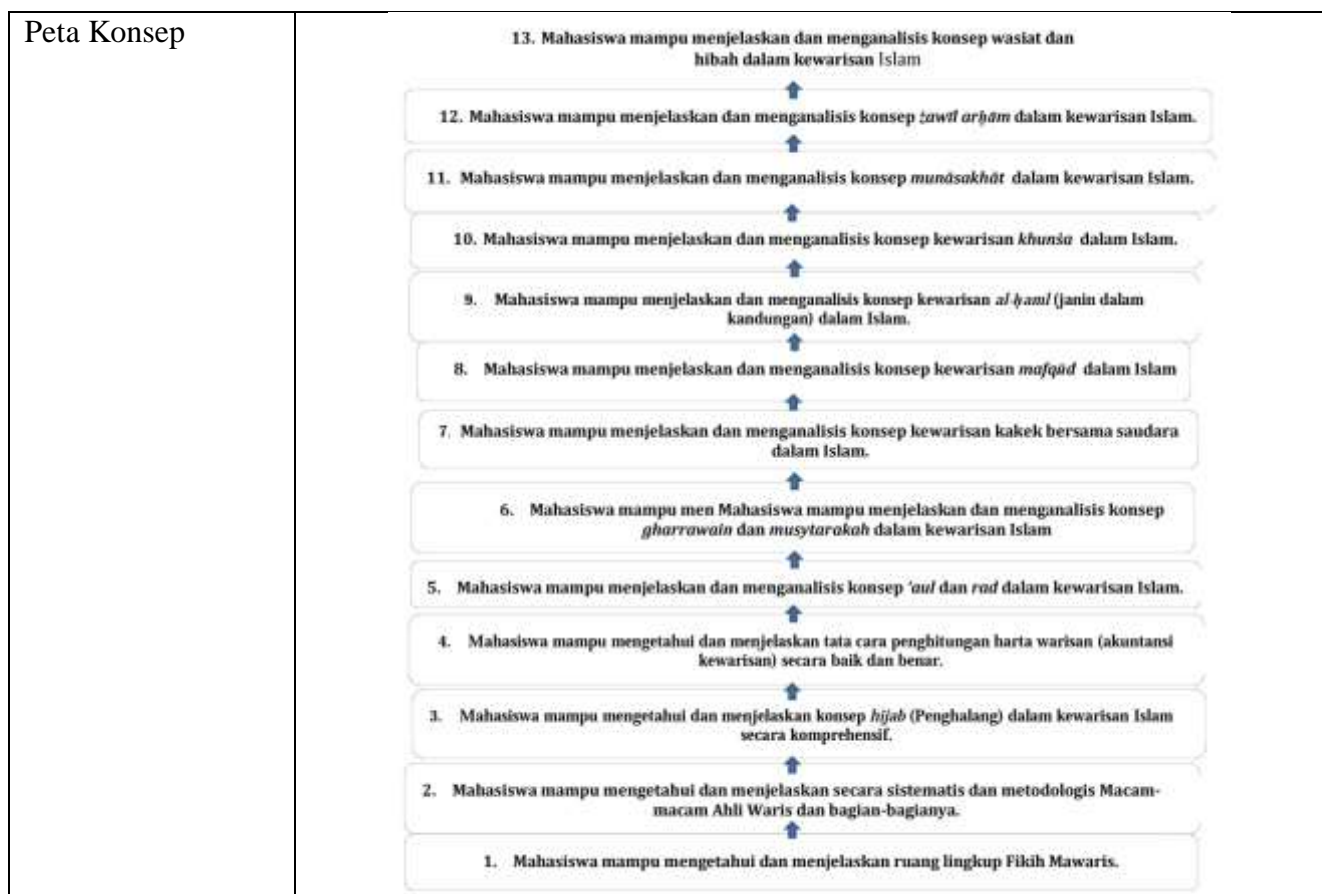
Dosen Pengampu	Mengetahui: Ketua Prodi	Persetujuan Wakil Mhs. 1. 2.
Muhibbussabry, Lc, MA.	Aripin Marpaung, M.A.	3.

BAGIAN IV

SATUAN ACARA PENGAJARAN

Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)
SATUAN ACARA PERKULIAHAN	
Disusun Oleh:	Disetujui Oleh:
 Muhibbussabry, Lc., M.A.	 Aripin Marpaung, MA
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris
Kode	:
SKS	: 2
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.
Pertemuan Ke	1 (Satu)
Pokok Bahasan	Penjelasan silabus, kontrak perkuliahan. Ruang Lingkup Fikih Mawaris.
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Perkuliahan - RPS - Pengertian Fikih Mawaris - Objek Ilmu Fikih Mawaris - Sumber Hukum Fikih Mawaris - Sejarah Fikih Mawaris - Urgensi Belajar dan Mengajarkan Fikih Mawaris.
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup fikih mawaris
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup fikih mawaris
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengertian fikih mawaris; - Menjelaskan objek kajian ilmu fikih mawaris; - Menjelaskan sumber hukum fikih mawaris; - Menjelaskan sejarah fikih mawaris; dan - Menjelaskan urgensi belajar dan mengajar fikih mawaris.
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan pengertian, objek kajian, sumber hukum, sejarah dan uregensi mempelajari fikih mawaris. Materi ini dirasa urgen mengingat kajian fikih mawaris lazimnya dibahas secara runtut. Maka akan lebih baik jika mahasiswa mampu menjelaskan sub-sub topik bahasan ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya.



Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa			
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang kontrak perkuliahan, tata kelola perkuliahan dan sistem evaluasi	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. Slide 2. Buku Ajar 3. Buku Penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan pengertian fikih mawaris; 2. Menjelaskan objek kajian ilmu fikih mawaris; 3. Menjelaskan sumber hukum fikih mawaris;	Mendengarkan penjelasan tentang ruang lingkup fikih mawaris serta memberi tanggapan,	50 menit		

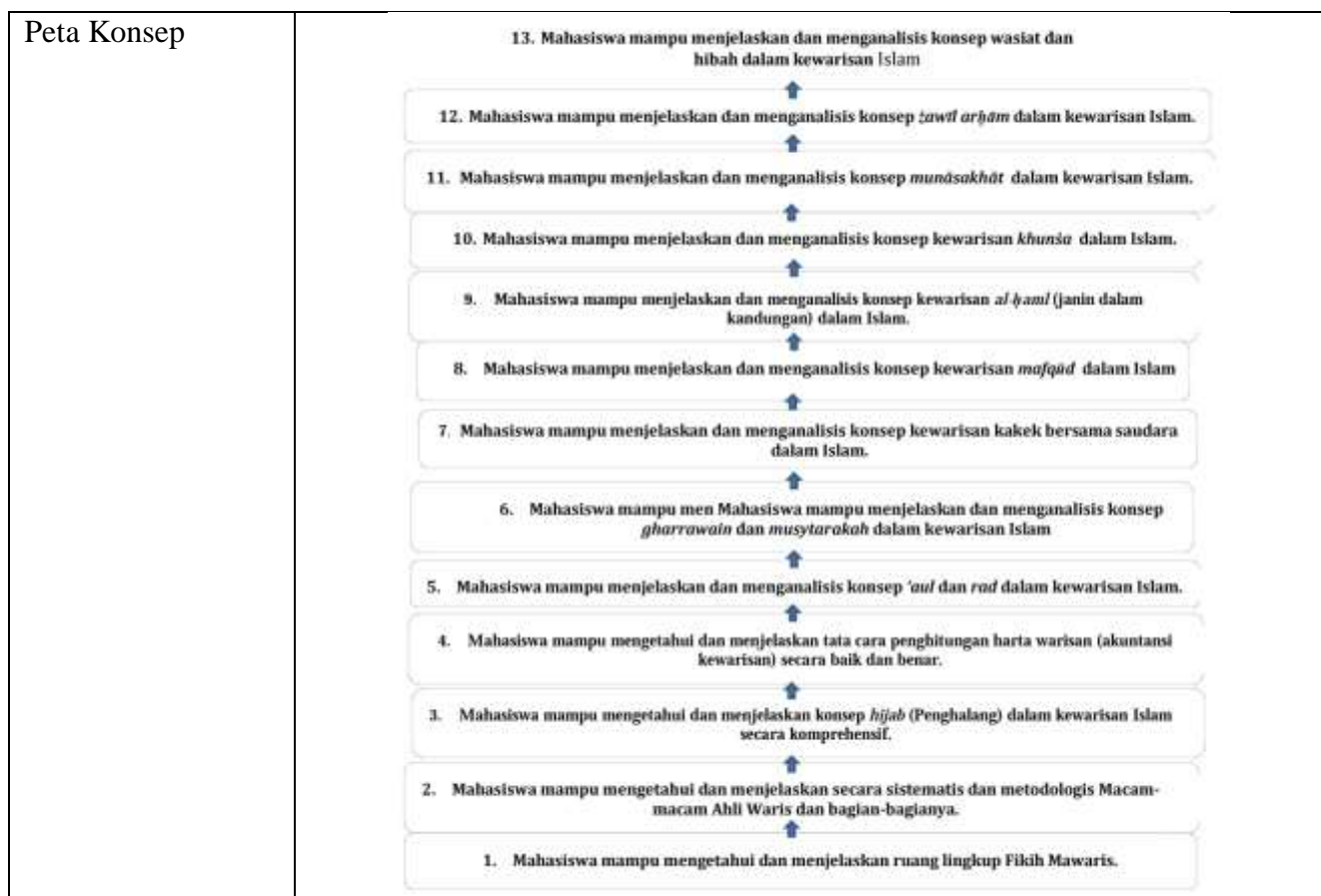
	4. Menjelaskan sejarah fikih mawaris; dan 5. Menjelaskan urgensi belajar dan mengajar fikih mawaris.				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Pertemuan Ke	2 (Dua)		
Pokok Bahasan	Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya.		
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Rukun Waris- Syarat Waris- Sebab Mendapatkan Waris- Penghalang Dalam Hukum Waris- Defenisi dan Unsur-Unsur <i>Tirkah</i>- Hak-hak yang Terkait dengan <i>Tirkah</i>.		
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya.		
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya.		
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan rukun waris;- Menjelaskan syarat waris;- Menjelaskan sebab mendapatkan waris;- Menjelaskan penghalang dalam hukum waris; dan- Menjelaskan konsep tirkah dan hak-hak yang terkait dengannya.		
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya. Materi ini dirasa urgen sehingga mahasiswa mampu menjelaskan sub-sub topik bahasan ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya.		



Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa	Teori		
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya.	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. Slide 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan rukun waris; 2. Menjelaskan syarat waris; 3. Menjelaskan sebab mendapatkan waris;	Mendengarkan penjelasan tentang Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya, serta memberi tanggapan.	50 menit		

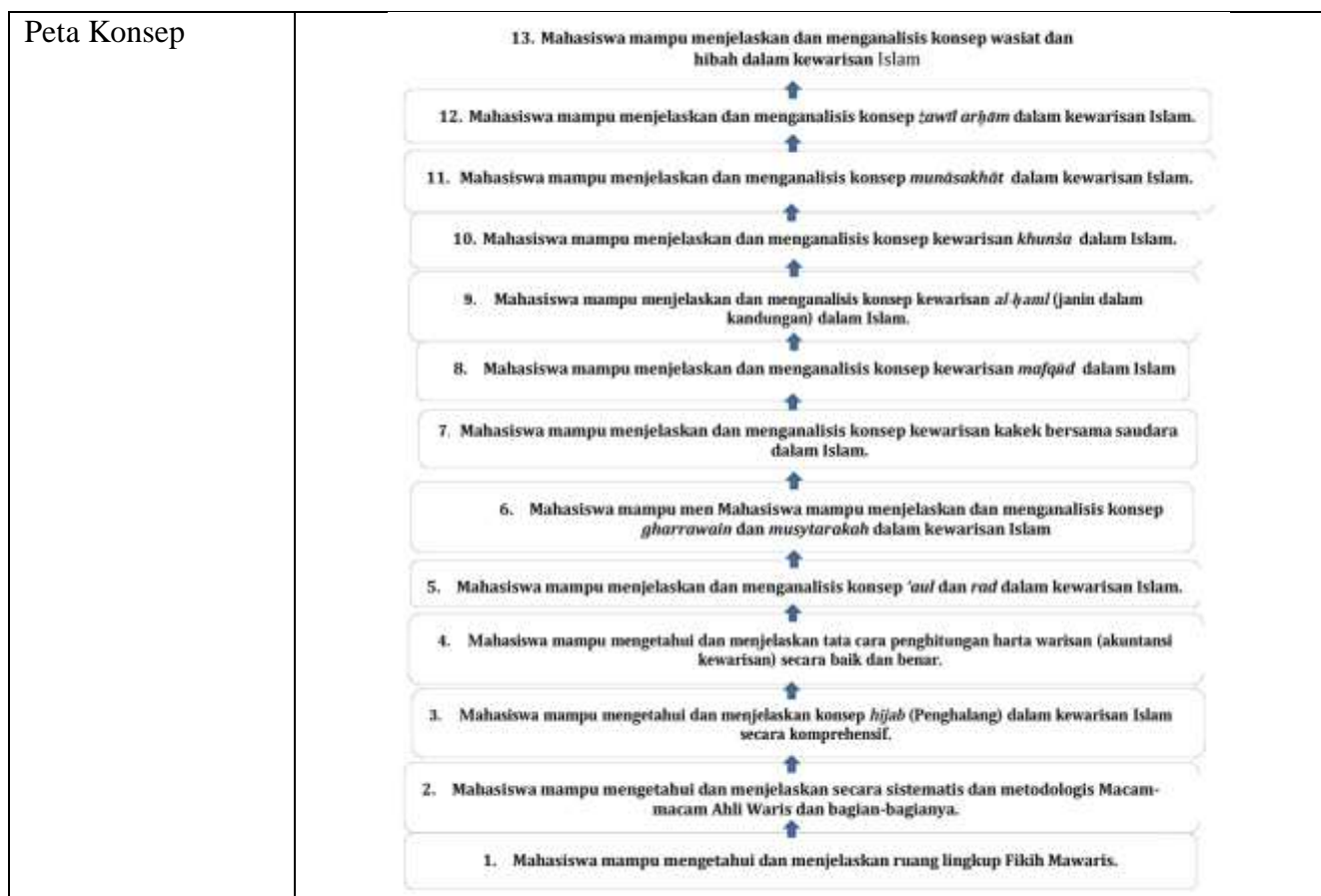
	4. Menjelaskan penghalang dalam hukum waris; dan 5. Menjelaskan konsep tirkah dan hak-hak yang terkait dengannya.				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN


Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Pertemuan Ke	3 (Tiga)		
Pokok Bahasan	Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan		
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- <i>Aṣḥābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan)- <i>Aṣḥābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan)		
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan		
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan		
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan <i>Aṣḥābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan); dan- Menjelaskan <i>Aṣḥābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan)		
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan ahli waris yang menerima bagian tetap karena sebab pernikahan dan keturunan/kekerabatan. Materi ini dirasa urgen mengingat sebuah keniscayaan mahasiswa harus mampu menguasai seluruh ahli waris dan bagian mereka masing-masing secara konprehensif.		

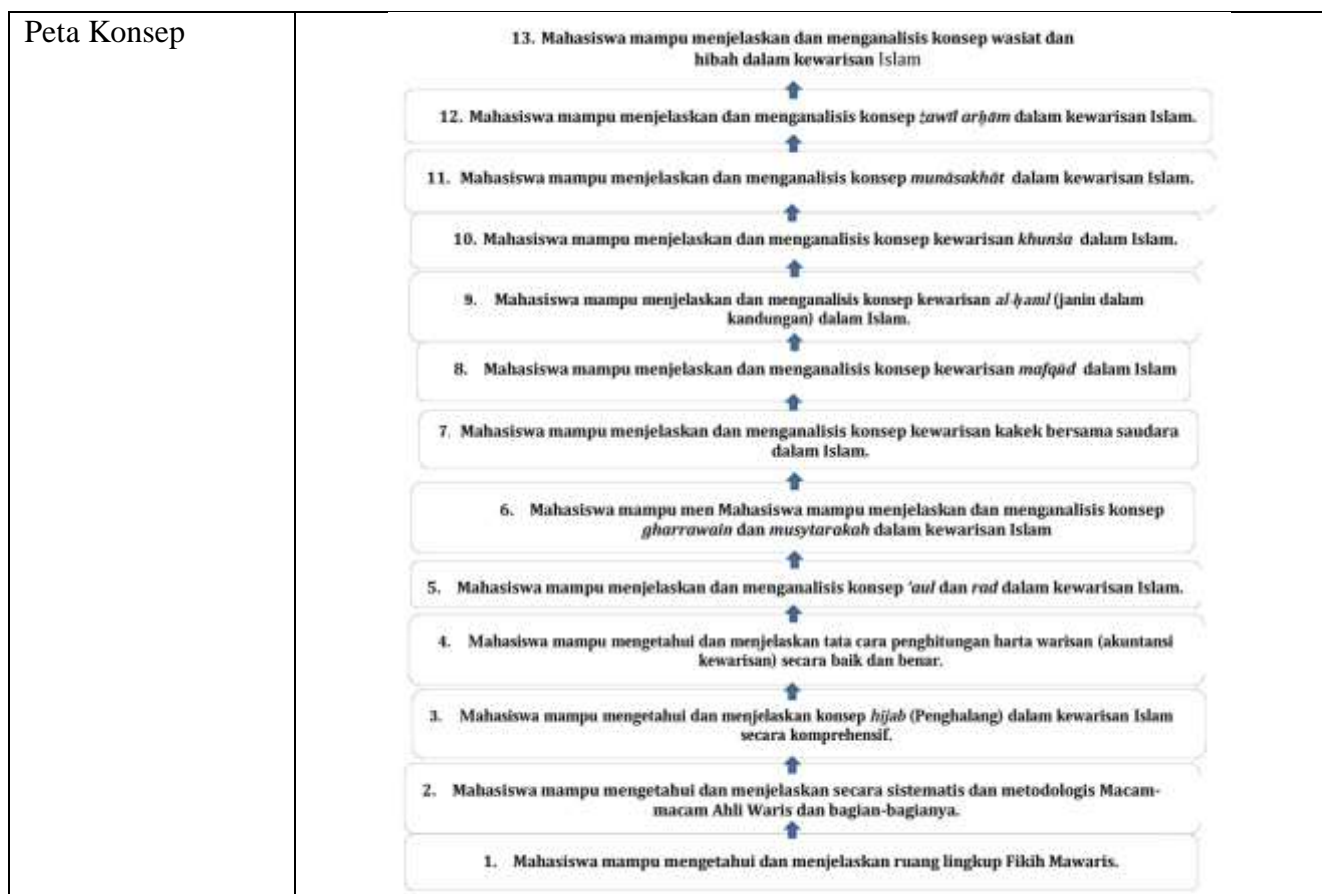


Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa			
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. <i>Slide Powe Point</i> 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan <i>Ashābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan); dan 2. Menjelaskan <i>Ashābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan).	Mendengarkan penjelasan tentang Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaan-Keadaannya Dalam Warisan serta memberi tanggapan,	50 menit		

Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 Menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				

	<div>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA</div> <div>MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</div> <div>PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)</div>	
SATUAN ACARA PERKULIAHAN		
Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA
Program Studi	: Perbandingan Mazhab	
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris	
Kode	:	
SKS	: 2	
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.	
Pertemuan Ke	4 (Empat)	
Pokok Bahasan	Mewarisi Secara <i>'Aṣabah</i> Dan Konsep Hijab (<i>Al-Ḥajb</i>) Dalam Waris Islam	
Sub Pokok Bahasan	<div><div>- Definisi <i>'Aṣabah</i></div><div>- Pembagian <i>'Aṣabah</i></div><div>- Pengertian <i>Hijab</i></div><div>- Macam-macam <i>Hijab</i></div><div>- Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i></div></div>	
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>'Aṣabah</i> Dan Hijab (<i>Al-Ḥajb</i>) Dalam Waris Islam	
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep <i>'Aṣabah</i> Dan Hijab (<i>Al-Ḥajb</i>) Dalam Waris Islam	
Indikator Keberhasilan	<div><div>- Menjelaskan pengertian <i>'Aṣabah</i>;</div><div>- Menjelaskan Pembagian <i>'Aṣabah</i>;</div><div>- Menjelaskan Macam-macam <i>Hijab</i>; dan</div><div>- Menjelaskan Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i></div></div>	
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan konsep <i>'Aṣabah</i> Dan Hijab (<i>Al-Ḥajb</i>) Dalam Waris Islam. Materi ini dirasa urgen sehingga akan lebih baik jika mahasiswa mampu menjelaskan sub-sub topik bahasan ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya.	

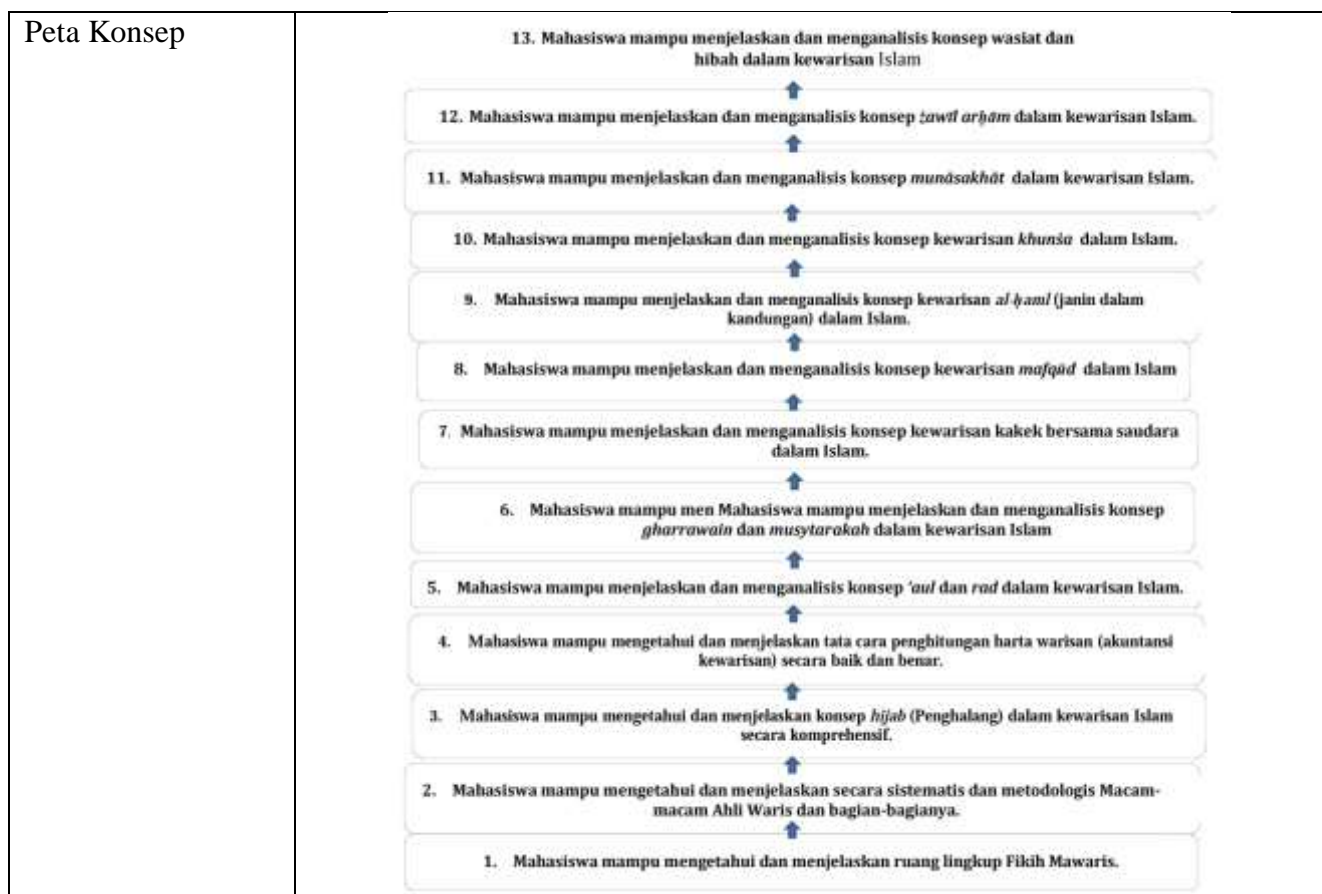


Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa	Teori		
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep 'Aṣabah Dan Hijab (Al-Ḥajb) Dalam Waris Islam	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. <i>Slide Power Point</i> 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan pengertian 'Aṣabah; 2. Menjelaskan pembagia 'Aṣabah; 3. Menjelaskan Macam-macam Hijab; dan	Mendengarkan penjelasan tentang konsep konsep 'Aṣabah Dan Hijab (Al-Ḥajb) Dalam Waris Islam serta memberi tanggapan.	50 menit		

	4. Menjelaskan Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i> .				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				


	<div>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA</div> <div>MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</div> <div>PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)</div>	
SATUAN ACARA PERKULIAHAN		
Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA
Program Studi	: Perbandingan Mazhab	
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris	
Kode	:	
SKS	: 2	
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.	
Pertemuan Ke	5 (Lima)	
Pokok Bahasan	Akuntansi Kewarisan	
Sub Pokok Bahasan	<div><div>- Asal Masalah (<i>aṣl al-mas'alah</i>), metode dan patokannya</div><div>- <i>Tashīḥ Mas'alah</i> dalam waris.</div></div>	
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan Akuntansi Kewarisan	
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan Akuntansi Kewarisan	
Indikator Keberhasilan	<div><div>- Menjelaskan Asal Masalah (<i>aṣl al-mas'alah</i>), metode dan patokannya;dan</div><div>- Menjelaskan <i>Tashīḥ Mas'alah</i> dalam waris.</div></div>	
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan akuntansi kewarisan dalam Islam. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Sehingga akan lebih baik jika mahasiswa mampu menjelaskan sub-sub topik bahasan ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya.	

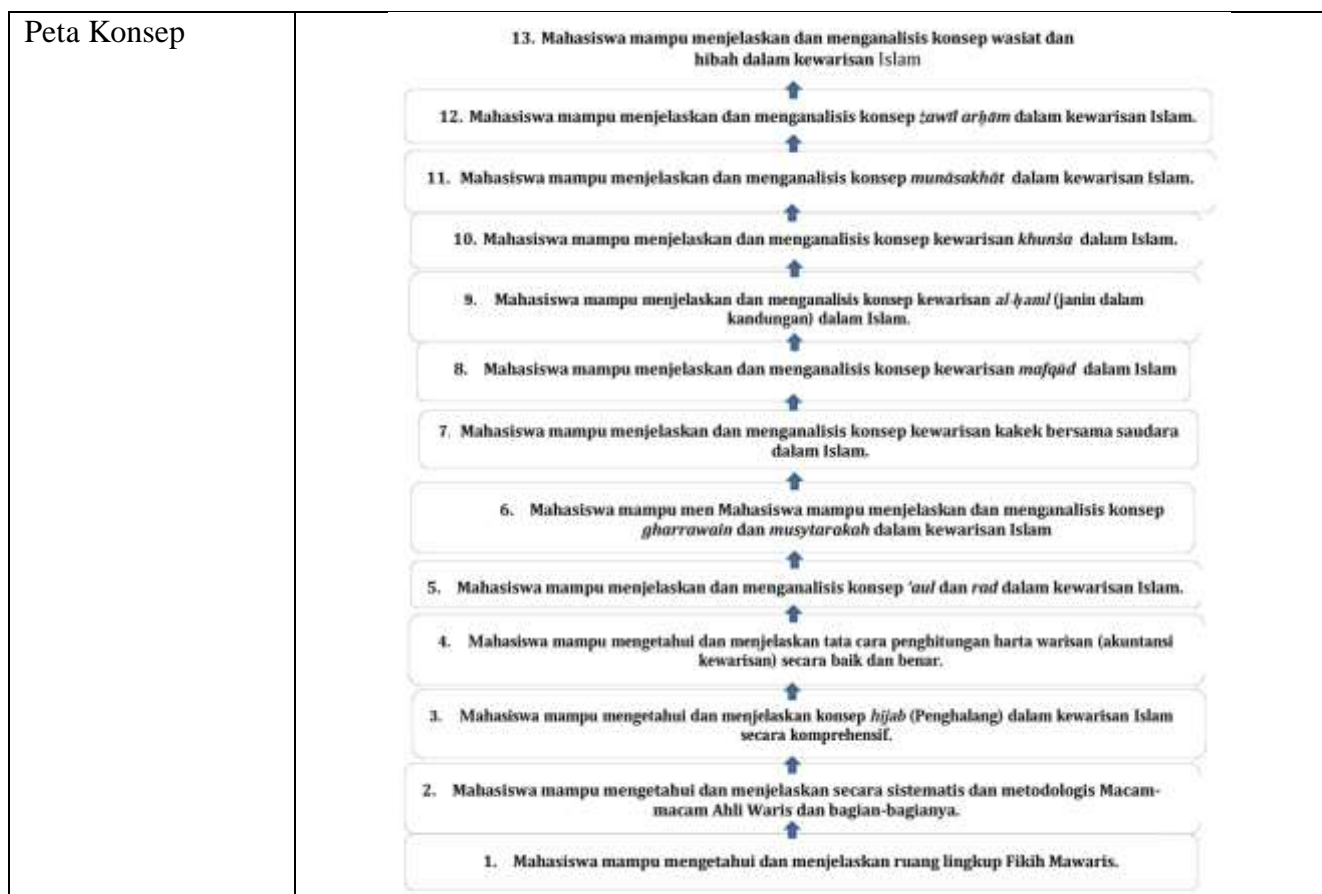


Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa			
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang Akuntansi Kewarisan.	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. <i>Slide Powe Point</i> 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan Asal Masalah (<i>asl al-mas'alah</i>), metode dan patokannya; dan 2. Menjelaskan <i>Tashīh Mas'alah</i> dalam waris.;	Mendengarkan penjelasan tentang Akuntansi Kewarisan serta memberi tanggapan.	50 menit		

Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				

	<div>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA</div> <div>MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</div> <div>PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)</div>	
SATUAN ACARA PERKULIAHAN		
Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA
Program Studi	: Perbandingan Mazhab	
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris	
Kode	:	
SKS	: 2	
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.	
Pertemuan Ke	6 (Enam)	
Pokok Bahasan	Konsep <i>'Aul Dan Rad</i> Dalam Kewarisan.	
Sub Pokok Bahasan	<div><div>- Pengertian <i>'Aul</i></div><div>- Latar Belakang Terjadinya <i>'Aul</i></div><div>- Perselisihan Pendapat Tentang <i>'Aul</i></div><div>- Asal Masalah yang Dapat di <i>'Aul</i>kan dan yang Tidak</div><div>- Pengertian <i>Rad</i></div><div>- Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i></div><div>- Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i></div><div>- Syarat-syarat Terjadinya <i>Rad</i></div><div>- Ahli waris yang Berhak Mendapat <i>Rad</i></div><div>- Ahli Waris yang Tidak Mendapat <i>Rad</i></div><div>- Macam-Macam Kasus <i>Rad</i> dan Metode Penyelesaiannya</div></div>	
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>'Aul Dan Rad</i> Dalam Kewarisan.	
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep <i>'Aul Dan Rad</i> Dalam Kewarisan.	
Indikator Keberhasilan	<div><div>- Menjelaskan pengertian <i>'Aul</i>;</div><div>- Menjelaskan Latar Belakang Terjadinya <i>'Aul</i>;</div><div>- Menjelaskan Perselisihan Pendapat Tentang <i>'Aul</i>;</div><div>- Menjelaskan Asal Masalah yang Dapat di <i>'Aul</i>kan dan yang Tidak;</div><div>- Menjelaskan Pengertian <i>Rad</i>;</div><div>- Menjelaskan Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i>;</div><div>- Menjelaskan Syarat-syarat Terjadinya <i>Rad</i>;</div><div>- Menjelaskan Ahli waris yang Berhak Mendapat <i>Rad</i>;</div><div>- Menjelaskan Ahli Waris yang Tidak Mendapat <i>Rad</i>; dan</div><div>- Menjelaskan Macam-Macam Kasus <i>Rad</i> dan Metode Penyelesaiannya</div></div>	
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan konsep <i>'aul dan rad</i> dalam kewarisan. Materi ini dirasa urgen mengingat mahasiswa harus mampu menyelesaikan kasus-kasus khusus dalam kewarisan secara tepat dan menghasilkan jawaban-jawaban konkrit bagi pihak-pihak yang membutuhkan.	



Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa			
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep 'Aul Dan Rad Dalam Kewarisan.	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. Slide 2. Buku Ajar 3. Buku Penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan pengertian 'aul, latar belakang terjadinya 'aul, perbedaan pendapat ulama tentang 'aul, asala masalah yang dapat di'aulkan dan yang tidak serta metode perhitungan 'aul;	Mendengarkan penjelasan tentang konsep 'Aul Dan Rad Dalam Kewarisan. serta memberi tanggapan,.	50 menit		

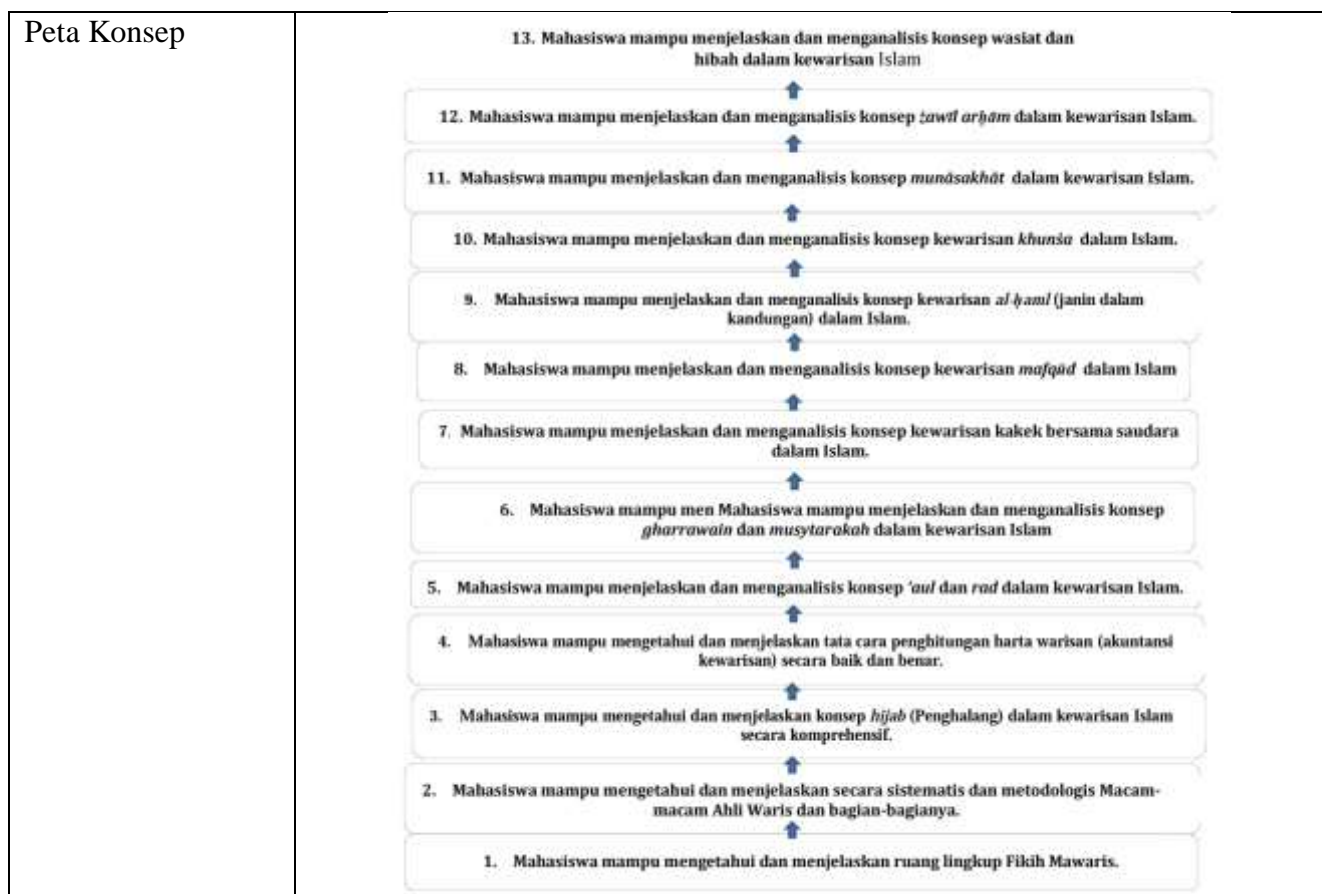
	2. Menjelaskan pengertian rad, pendapat ulama tentang rad, syarat terjadinya rad, ahli waris yang berhak mendapatkan rad dan yang tidak, serta macam-macam kasus rad serta metode penyelesaiannya.				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Pertemuan Ke	7 (Tujuh)		
Pokok Bahasan	Konsep <i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i>		
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian <i>Gharrawain</i>- Pembagian <i>Gharrawain</i>- Cara Penyelesaian <i>Gharrawain</i>- Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Gharrawain</i>- Pengertian <i>Musytarakah</i> (berserikat) atau <i>Hajariyyah</i> (terhalang)- Rukun Masalah <i>Musytarakah</i>- Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Musytarakah</i>- Cara Pembagian Warisan <i>Musytarakah</i>		
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i>		
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep <i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i>		
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan Pengertian <i>Gharrawain</i>- Menjelaskan Pembagian <i>Gharrawain</i>- Menjelaskan Cara Penyelesaian <i>Gharrawain</i>- Menjelaskan Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Gharrawain</i>- Menjelaskan Pengertian <i>Musytarakah</i>- Menjelaskan Rukun Masalah <i>Musytarakah</i>- Menjelaskan Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Musytarakah</i>- Menjelaskan Cara Pembagian Warisan <i>Musytarakah</i>		
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan konsep <i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i> dalam kewarisan. Materi ini dirasa urgen mengingat mahasiswa harus mampu menyelesaikan kasus-kasus khusus dalam kewarisan secara tepat dan menghasilkan jawaban-jawaban konkrit bagi pihak-pihak yang membutuhkan.		



Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa			
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep <i>Gharrawain</i> Dan <i>Musytarakah</i>	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. <i>Slide Power Point</i> 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang

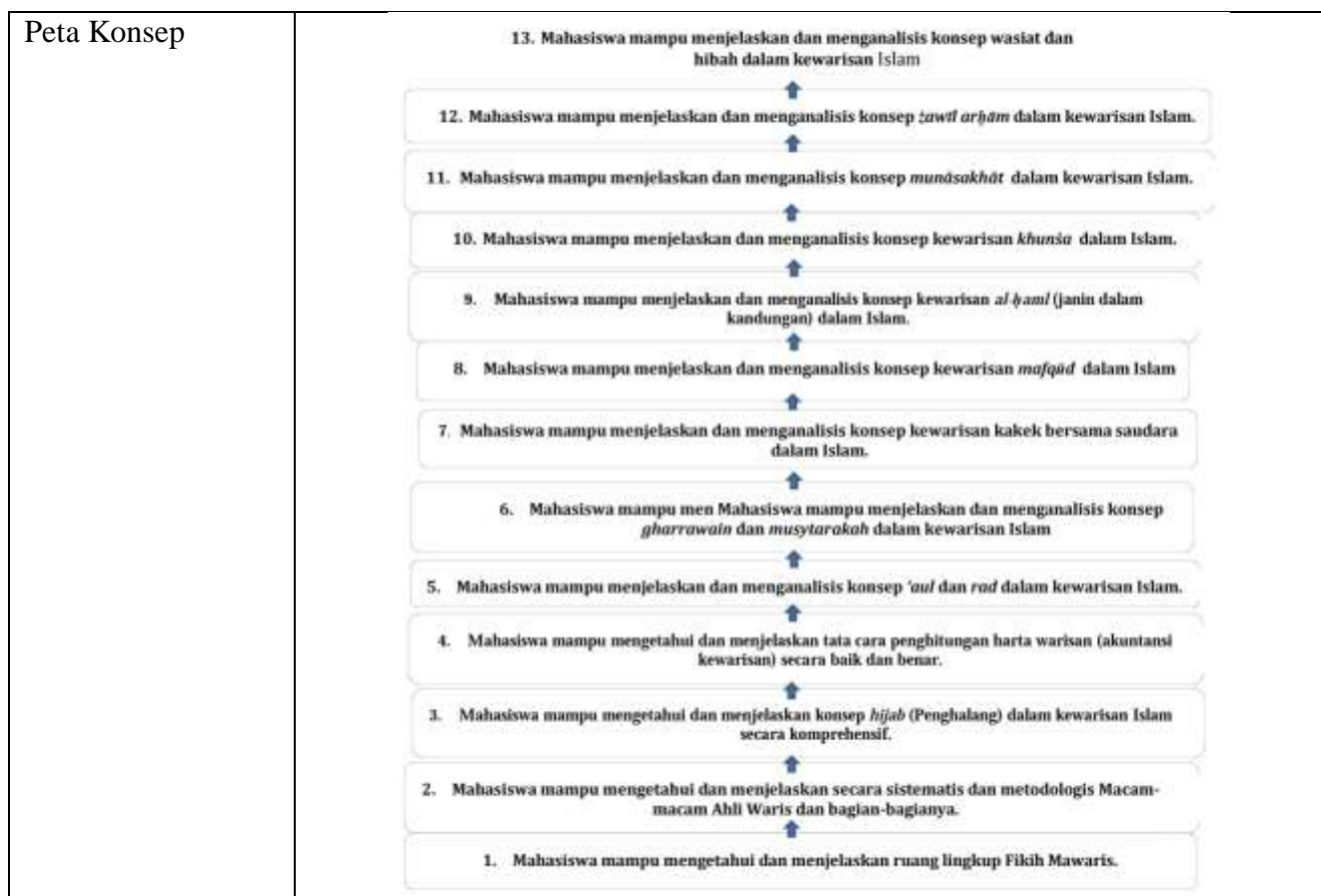
	3. Menjelaskan pengertian dan rukun <i>Musytarakah</i> ; dan 4. Menjelaskan perbedaan pendapat ualama dan cara pembagian warisan <i>Musytarakah</i> .				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusedikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN


Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Pertemuan Ke	8 (Delapan)		
Pokok Bahasan	Kewarisan Kakek Bersama Saudara		
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Kakek dan Saudara- Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara- Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara- Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara		
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara		
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara		
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan Pengertian Kakek dan Saudara- Menjelaskan Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara- Menjelaskan Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara- Menjelaskan Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara		
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara. Materi ini dirasa urgen mengingat adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menyelesaikan kasus kewarisan kakak bersama saudara dengan metode penyelesaian yang berbeda-beda pula. Maka akan lebih baik jika mahasiswa mampu menjelaskan sub-sub topik bahasan ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya.		

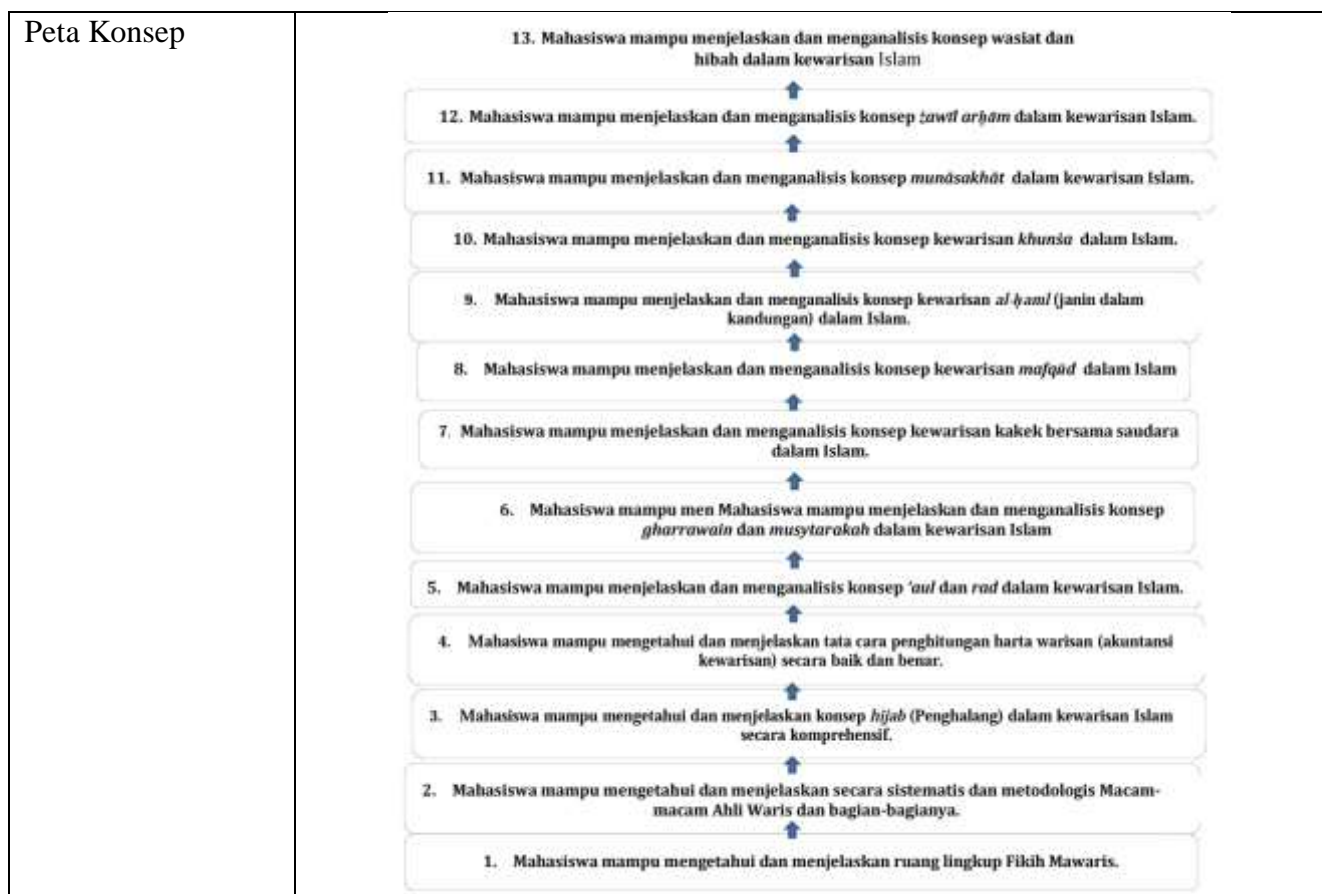


Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa	Teori		
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara	30 Menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. <i>Slide Powe Point</i> 2. Buku Ajar 3. Buku Penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan Pengertian Kakek dan Saudara; 2. Menjelaskan Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara; 3. Menjelaskan Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara;	Mendengarkan penjelasan tentang konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara serta memberi tanggapan,	50 Menit		

	4. Menjelaskan Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara.				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)</p>	
<p style="text-align: center;">SATUAN ACARA PERKULIAHAN</p>		
<p style="text-align: center;">Disusun Oleh:</p>		<p style="text-align: center;">Disetujui Oleh:</p>
<p style="text-align: center;">Muhibbussabry, Lc., M.A.</p>		<p style="text-align: center;">Aripin Marpaung, MA</p>
Program Studi	: Perbandingan Mazhab	
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris	
Kode	:	
SKS	: 2	
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.	
Pertemuan Ke	9 (Sembilan)	
Pokok Bahasan	Kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang)	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Mafqūd- Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu Mafqūd- Hak Waris Mafqūd- Metode Penyelesaian Kasus Mafqūd- Contoh dan Penyelesaian Pembagian Harta Untuk Mafqūd- Hukum Jika Mafqūd kembali Dalam Keadaan Hidup Setelah Dihukum Meninggal- Cara Menyelesaikan Kasus Mafqūd Yang Lebih Dari Satu Orang	
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan Kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang)	
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan Kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang)	
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan Pengertian Mafqūd- Menjelaskan Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu Mafqūd- Menjelaskan Hak Waris Mafqūd- Menjelaskan Metode Penyelesaian Kasus Mafqūd- Menjelaskan Contoh dan Penyelesaian Pembagian Harta Untuk Mafqūd- Menjelaskan Hukum Jika Mafqūd kembali Dalam Keadaan Hidup Setelah Dihukum Meninggal- Menjelaskan Cara Menyelesaikan Kasus Mafqūd Yang Lebih Dari Satu Orang	
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan pengertian, perbedaan pendapat para ulama tentang masa tunggu orang yang hilang, hak waris mafqud, dan penyelesaian kasus waris mafqūd (orang hilang). Sehingga mahasiswa nantinyaampu menguasai materi tersebut secar komprehensif dan siap menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat terkait kewarisan orang hilang.	



Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa	Teori		
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang Kewarisan Mafqud (Orang Hilang)	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. <i>Slide Powe Point</i> 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan pengertian mafqud; 2. Menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang masa tunggu mafqud; 3. Menjelaskan hak waris mafqud; 4. Menjelaskan metode penyelesaian kasus mafqud;	Mendengarkan penjelasan tentang Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) serta memberi tanggapan.	50 menit		

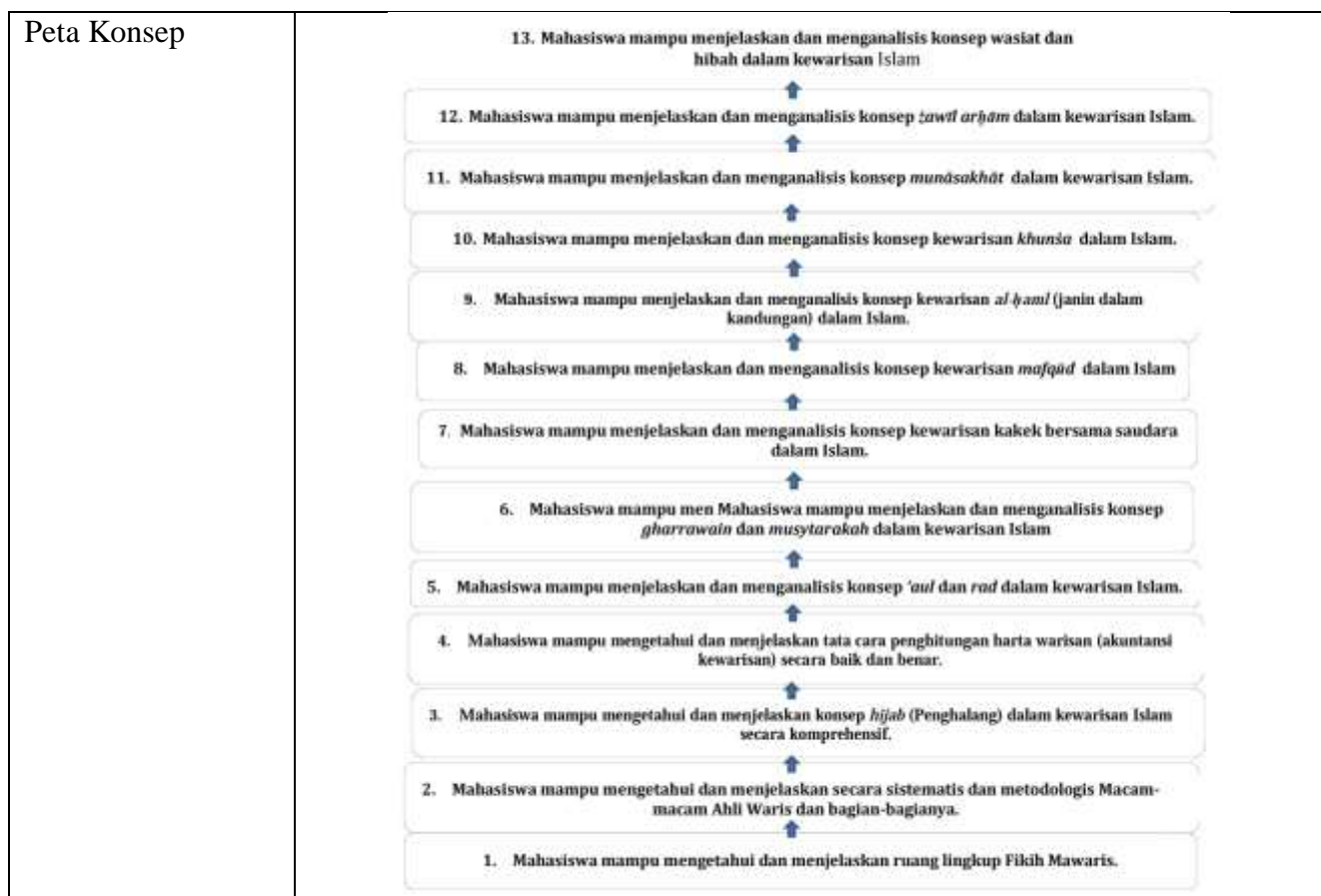
	5. Menjelaskan contoh dan penyelesaian pembagian harta untuk mafqūd; dan 6. Menjelaskan hukum jika mafqūd kembali dalam keadaan hidup setelah dihukum meninggal.				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN


Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Pertemuan Ke	10 (Sepuluh)		
Pokok Bahasan	Kewarisan <i>Al-Ḥaml</i> (Anak Dalam Kandungan)		
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian <i>al-Ḥaml</i>- Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi- Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris Hamil- Bagian yang Harus Ditangguhkan Untuk Ahli Waris Hamil- Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil- Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil		
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kewarisan <i>Al-Ḥaml</i> (Anak Dalam Kandungan)		
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Kewarisan <i>Al-Ḥaml</i> (Anak Dalam Kandungan)		
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan Pengertian <i>al-Ḥaml</i>- Menjelaskan Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi- Menjelaskan Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris Hamil- Menjelaskan Bagian yang Harus Ditangguhkan Untuk Ahli Waris Hamil- Menjelaskan Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil- Menjelaskan Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil		
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan pengertian, syarat, mekanisme, keadaan dan metode penyelesaian kasus waris hamil. Sehingga mahasiswa nantinya mampu menguasai materi tersebut secara komprehensif dan siap menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat terkait kewarisan orang hilang.		

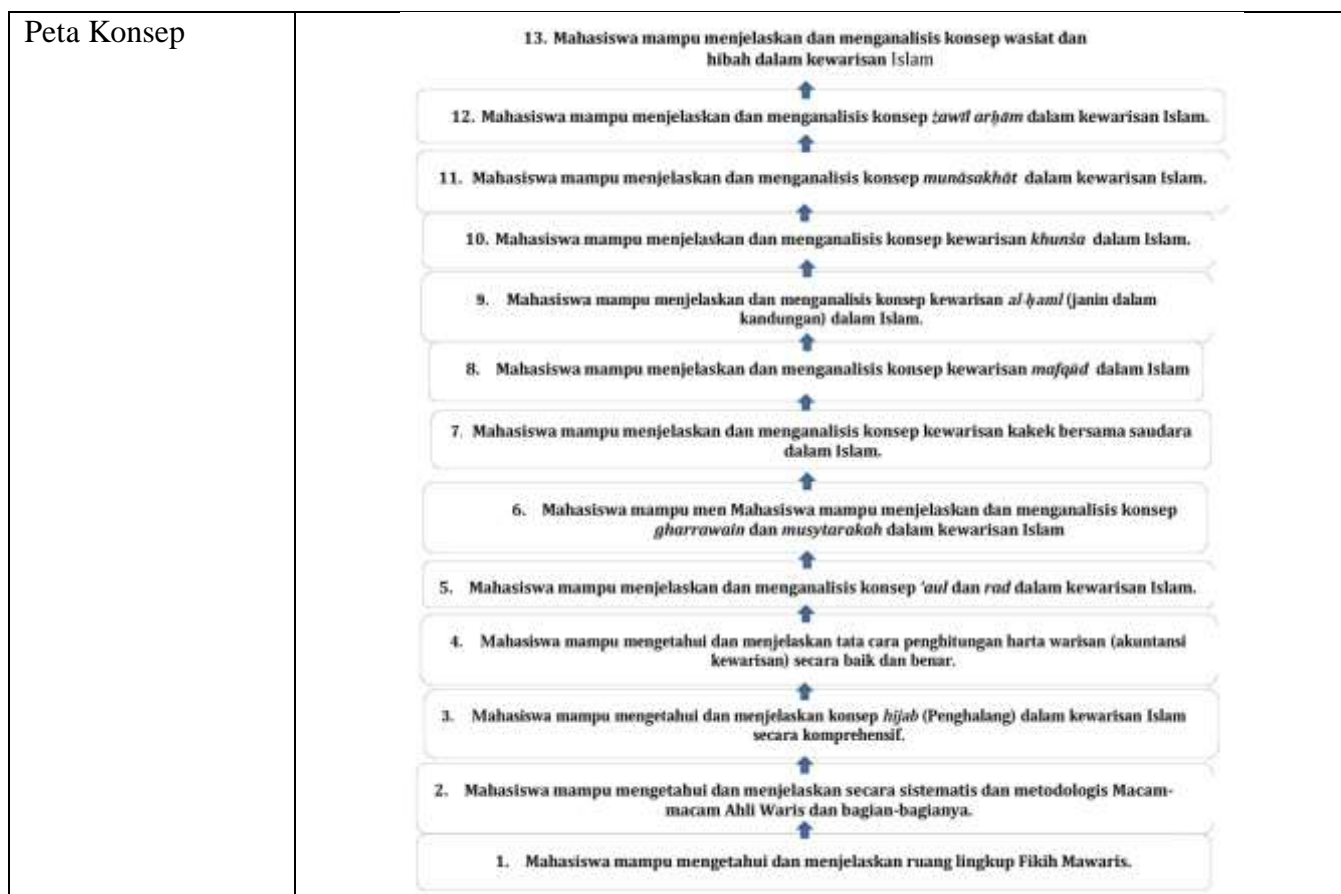


Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa	Teori		
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep Kewarisan Al-Ḥaml (Anak Dalam Kandungan)	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. <i>Slide Powe Point</i> 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan Pengertian <i>al-Haml</i> ; 2. Menjelaskan Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi; 3. Menjelaskan Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris Hamil	Mendengarkan penjelasan tentang konsep konsep Kewarisan Al-Ḥaml (Anak Dalam Kandungan) serta memberi tanggapan.	50 menit		

	4. Menjelaskan Bagian yang Harus Ditangguhkan Untuk Ahli Waris Hamil; 5. Menjelaskan Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil 6. Menjelaskan Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				


	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)</p>	
<p style="text-align: center;">SATUAN ACARA PERKULIAHAN</p>		
Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA
Program Studi	: Perbandingan Mazhab	
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris	
Kode	:	
SKS	: 2	
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.	
Pertemuan Ke	11 (Sebelas)	
Pokok Bahasan	Kewarisan <i>Khunsa</i>	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian <i>Khunsa</i>- Jalur-jalur Keturunan <i>Khunsa</i>- Keadaan <i>Khunsa</i> dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan- Metode Penyelesaian Kasus <i>Khunsa</i>	
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kewarisan <i>Khunsa</i>	
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Kewarisan <i>Khunsa</i>	
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan Pengertian <i>Khunsa</i>- Menjelaskan Jalur-jalur Keturunan <i>Khunsa</i>- Menjelaskan Keadaan <i>Khunsa</i> dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan- Menjelaskan Metode Penyelesaian Kasus <i>Khunsa</i>	
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan pengertian, keadaan, jalur keturunan dan metode penyelesaian kasus <i>khunsa</i> . Sehingga mahasiswa nantinya mampu menjelaskan dan menguasai secara baik bahkan cakap di dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan kewarisan <i>khunsa</i> .	

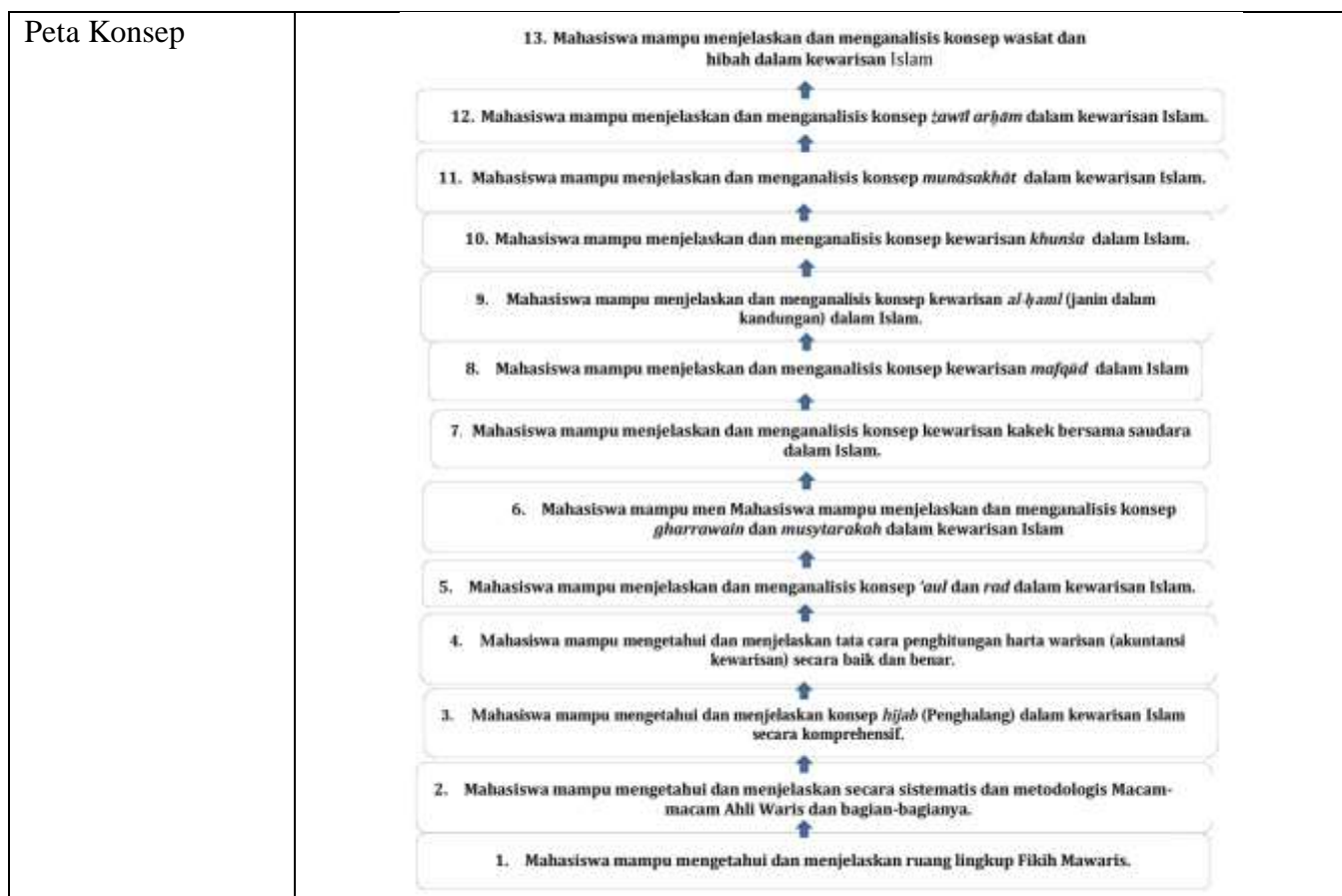


Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa			
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep Kewarisan Khunsa	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. Slide 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan Pengertian Khunsa; 2. Jalur-jalur Keturunan Khunsa; 3. Menjelaskan Keadaan Khunsa dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan	Mendengarkan penjelasan tentang konsep Kewarisan <i>Khunsa</i> serta memberi tanggapan.	50 menit		

	4. Menjelaskan Metode Penyelesaian Kasus Khunsa				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				

	<div>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA</div> <div>MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</div> <div>PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)</div>	
SATUAN ACARA PERKULIAHAN		
Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA
Program Studi	: Perbandingan Mazhab	
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris	
Kode	:	
SKS	: 2	
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.	
Pertemuan Ke	12 (Dua Belas)	
Pokok Bahasan	Munāsakhāt	
Sub Pokok Bahasan	<div><div>-</div> Pengertian Munāsakhāt</div> <div><div>-</div> Keadaan-keadaan kasus Munāsakhāt</div>	
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Munāsakhāt	
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Munāsakhāt	
Indikator Keberhasilan	<div><div>-</div> Menjelaskan Pengertian Munāsakhāt</div> <div><div>-</div> Menjelaskan Keadaan-keadaan kasus Munāsakhāt</div>	
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan pengertian, keadaan-keadaan kasus Munāsakhāt. Diharapkan mahasiswa nantinya mampu menjelaskan dan menguasai secara baik bahkan cakap di dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan kewarisan Munāsakhāt.	



Strategi Pembelajaran					
Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa	Teori		
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep <i>Munāsakhāt</i>	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. <i>Slide Powe Point</i> 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan Pengertian <i>Munāsakhāt</i> ; 2. Menjelaskan Keadaan-keadaan kasus <i>Munāsakhāt</i> ;	Mendengarkan penjelasan tentang konsep <i>Munāsakhāt</i> serta memberi tanggapan.	50 menit		

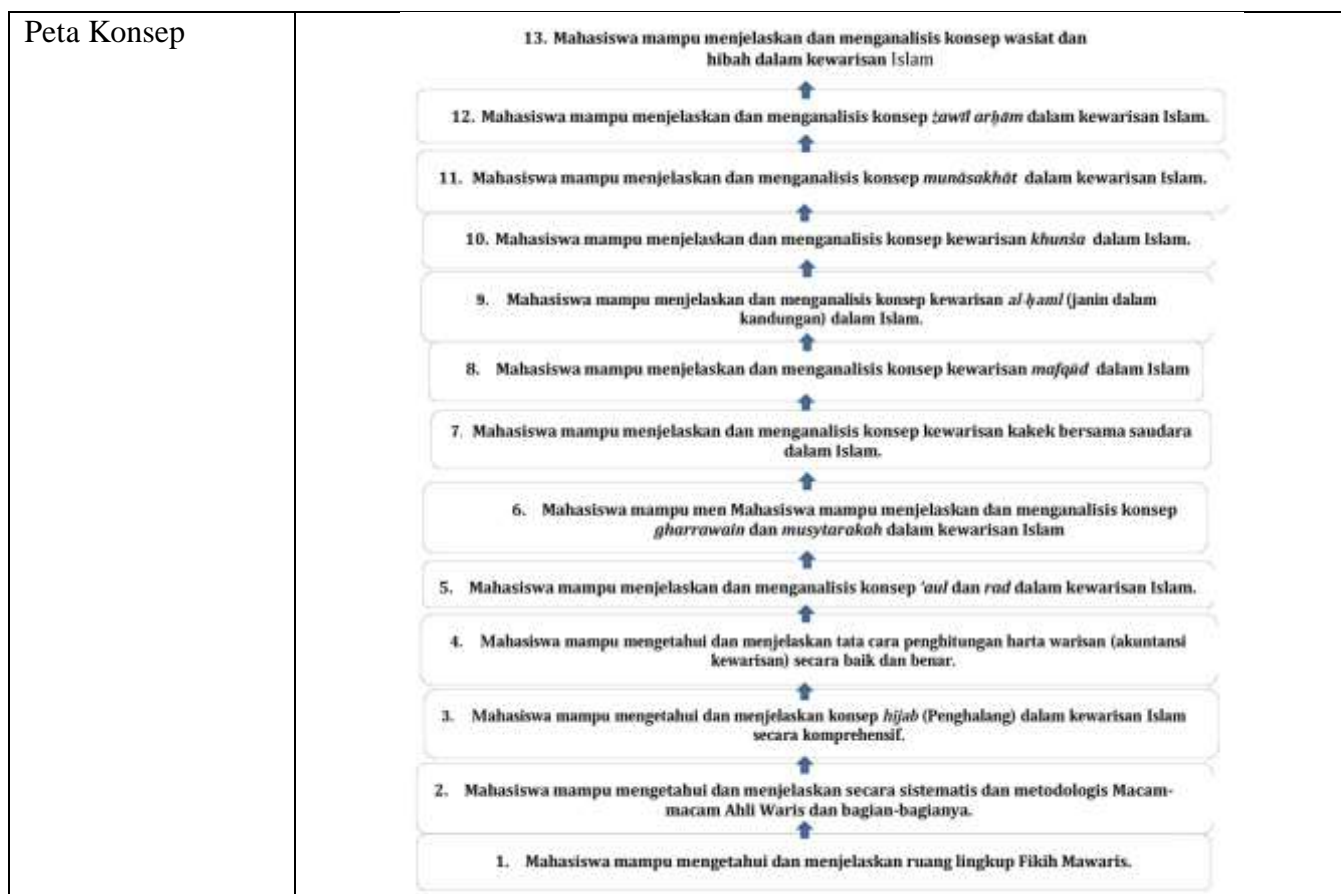
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Pertemuan Ke	13 (Tiga Belas)		
Pokok Bahasan	Żawīl Arḥām		
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Żawīl Arḥām- Pengelompokan Żawīl Arḥām- Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan Żawīl Arḥām- Cara Żawīl Arḥām Mewarisi		
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Żawīl Arḥām		
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Żawīl Arḥām		
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan Pengertian Żawīl Arḥām- Menjelaskan Pengelompokan Żawīl Arḥām- Menjelaskan Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan Żawīl Arḥām- Menjelaskan Cara Żawīl Arḥām Mewarisi		
Deskripsi Materi Pembelajaran	Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan pengertian, pengelompokan, pendapat para ulama dan mekanisme pembagian warisan untuk Żawīl Arḥām. Diharapkan mahasiswa mampu menguasai dengan baik tatacara pembagian warisan bagi ahli waris dari golongan Żawīl Arḥām.		



Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa			
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep Żawīl Arḥām	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. Slide 2. Powe Point 3. Buku Ajar 4. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b. Contoh c. Latihan	1. Menjelaskan Pengertian Żawīl Arḥām; 2. Menjelaskan Pengelompokan Żawīl Arḥām; 3. Menjelaskan Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan Żawīl Arḥām	Mendengarkan penjelasan tentang konsep Żawīl Arḥām serta memberi tanggapan.	50 menit		

	4. Menjelaskan Cara <i>Ẓawīl Arḥām</i> Mewarisi				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				

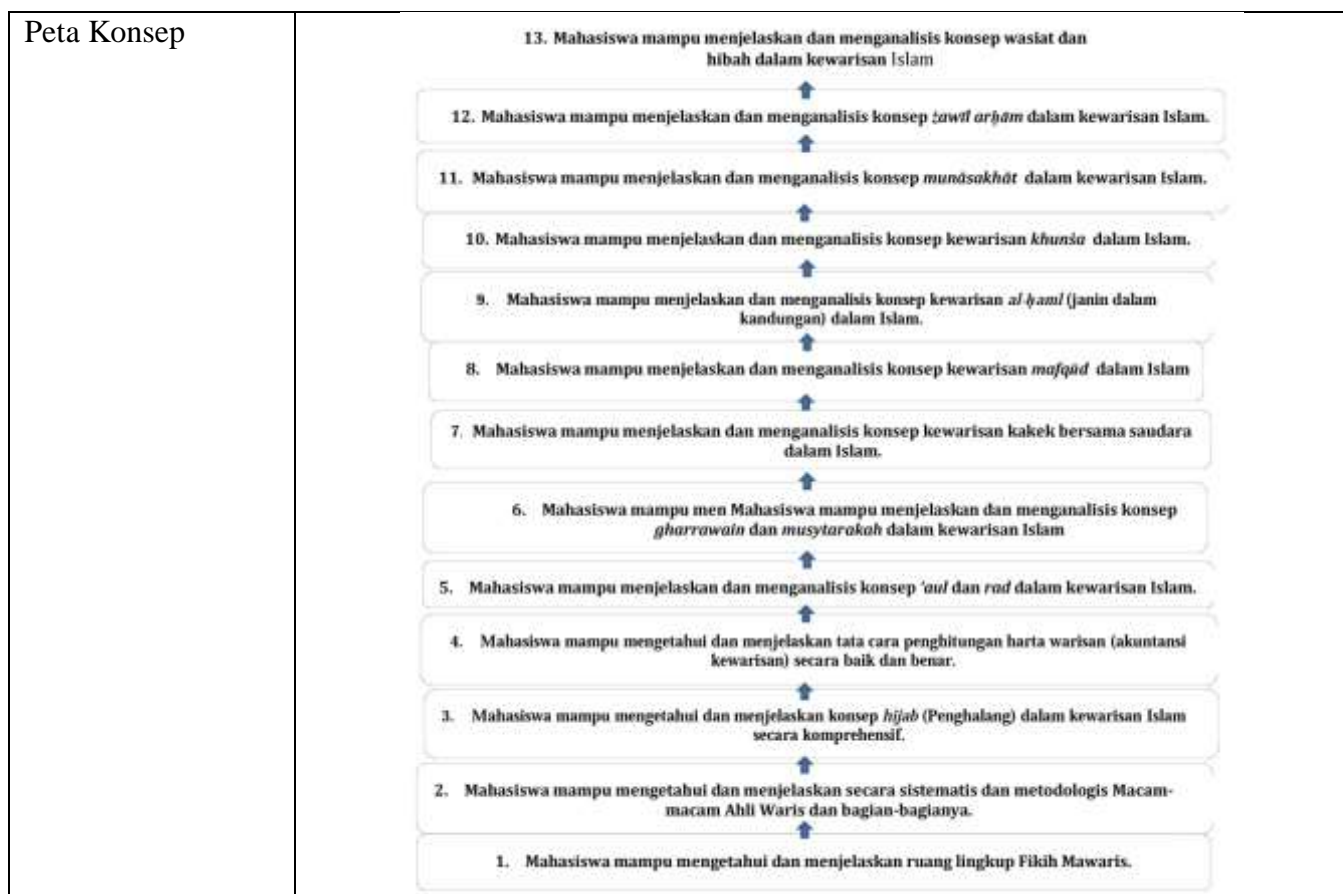


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB (PM)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, MA	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Pertemuan Ke	14 (Empat Belas)		
Pokok Bahasan	Wasiat Dan Hibah		
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Wasiat- Dasar Hukum Wasiat- Hukum Wasiat- Rukun dan Syarat Wasiat- Kadar Wasiat- Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat- Mekanisme Pencabutan Wasiat- Wasiat Dalam Keadaan Tertutup- Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat- Larangan-larangan Wasiat- Wasiat Wajibah- Pengertian Hibah- Dasar Hukum Hibah- Hukum Hibah- Rukun dan Syarat Hibah- Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat- Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam- Hikmah Disyariatkan Hibah		
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Wasiat Dan Hibah		
Kompetensi Dasar	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Wasiat Dan Hibah		

<p>Indikator Keberhasilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Pengertian Wasiat - Menjelaskan Dasar Hukum Wasiat - Menjelaskan Hukum Wasiat - Menjelaskan Rukun dan Syarat Wasiat - Menjelaskan Kadar Wasiat - Menjelaskan Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat - Menjelaskan Mekanisme Pencabutan Wasiat - Menjelaskan Wasiat Dalam Keadaan Tertutup - Menjelaskan Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat - Menjelaskan Larangan-larangan Wasiat - Menjelaskan Wasiat Wajibah - Menjelaskan Pengertian Hibah - Menjelaskan Dasar Hukum Hibah - Menjelaskan Hukum Hibah - Menjelaskan Rukun dan Syarat Hibah - Menjelaskan Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat - Menjelaskan Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam - Menjelaskan Hikmah Disyariatkan Hibah
<p>Deskripsi Materi Pembelajaran</p>	<p>Materi ini berupaya menjelaskan kajian terkait dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, kadar, hal-hal yang membatalkan, mekanisme, ketentuan teknis, larangan dan hikmah wasiat dan hibah. Diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep wasiat dan hibah secara komprehensif.</p>



Strategi Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Perkuliahan		Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
	Dosen	Mahasiswa			
Pendahuluan	1. Salam, doa sebelum perkuliahan dan pengenalan 2. Menjelaskan materi kuliah dan kontrak perkuliahan serta evaluasi pembelajaran 3. Menjelaskan kompetensi dasar dan peta konsep	Mendengarkan uraian tentang konsep Wasiat Dan Hibah	30 menit	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Belajar terstruktur dan mandiri	1. Slide Powe Point 2. Buku Ajar 3. Buku penunjang
Penyajian (kegiatan inti): a. Uraian b.Contoh c.Latihan	1. Menjelaskan Pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, kadar, hal-hal yang membatalkan, mekanisme, ketentuan-ketentuan teknis, larangan-larangan wasiat dan wasiat wajibah;	Mendengarkan penjelasan tentang konsep Wasiat Dan Hibah serta memberi tanggapan.	50 menit		

	2. Menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, ketentuan dan hikmah hibah.				
Penutup	1. Merangkum materi yang telah disampaikan 2. Meminta mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur di rumah ataupun perpustakaan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Mengabsensi mahasiswa dan mengisi berita acara perkuliahan 4. Menutup perkuliahan dengan doa bersama dan mengucapkan salam	Menandatangani Presensi	20 menit		
Sumber Belajar	1. Muhibbussabry, <i>Fikih Mawaris</i> (Medan: Pusdikra MJ, 2020) 2. Dosen-dosen fikih, <i>Fiqh Al-Mawarits</i> (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010). 3. Fathurrahman, <i>Ilmu Waris</i> , Bandung, Bulan Bintang, 1978. 4. Muhammad Yusuf Musa, <i>Ahkam at-Tirkah wa al-Miras</i> , Beirut: Dar al-Fikr, tt 5. Muh. Ali ash-Shabuni, <i>al-Mawaris fi Syari'at al-Islam</i> , Beirut: Alam al-kutub, tt. 6. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993. 7. Sayyid Sabiq, <i>Fiqh as-Sunnah</i> 8. Amir Syarifuddin, <i>Pembaruan Pemikiran dalam Islam</i> , Cet. 2, (Padang: Angkasa Raya, 1993) dan <i>Hukum Kewarisan Islam</i> (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tt) 9. Abdullah Siddik, <i>Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia</i> , Cet. 1, (Bandung: Bina Pustaka, 1984) 10. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Fiqhul Mawaris</i> , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001				

BAGIAN V

BAHAN AJAR

MATERI 1. RUANG LINGKUP ILMU FARĀID

Penulis : Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. Definisi Ilmu *Farāid*.

Secara etimologi *lafaz farāid* adalah bentuk jamak dari *farīdah* (sesuatu yang diwajibkan), diambil dari kata *al-farḍu* (kewajiban) yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi kata *al-farḍu* memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: *al-wājibu* (wajib), *al-muqaddaru* (diperkirakan), *al-ḥazzu* (pembatasan), *al-taqdīru* (ketentuan), *al-qaṭ'u* (ketetapan/kepastian), *al-inzālu* (menurunkan), *at-tabyīnu* (penjelasan), *al-Naṣību al-muqaddaru al-mafrūdu* (bagian yang ditentukan). Dan dinamakan *al-farḍu* sebagai *farḍan* karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah swt.¹

Sementara secara terminologi, ilmu *farāid* memiliki beberapa definisi, yaitu:

1. Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.²
2. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqh dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.³
3. Disebut juga dengan *fiqh al-Mawāris* dan '*ilmu al-hisāb* untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.⁴
4. Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *farāid* atau ilmu mawāris, yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur'an, sunnah, Ijma' Ulama dan Ijtihad Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.

B. Objek Ilmu *Farāid*

Objek ilmu *farāid* adalah harta peninggalan pewaris. Dari segi adanya penjelasan terhadap bagian-bagian untuk ahli waris yang berhak menerimanya, tatacara penghitungan harta waris, sampai jumlah bagian harta yang diterima oleh seluruh ahli waris, sesuai dengan al-Quran, sunah, ijma' dan ijtihad ulama.

C. Sumber Hukum Ilmu *Farāid*

Sumber-sumber hukum ilmu *farāid* adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' para sahabat dan Ijtihad para sahabat pada sebagian kasus waris, seperti kasus kewarisan kakek bersama saudara, sepertiga dari sisa untuk ibu setelah diambil oleh salah seorang dari suami atau istri pada masalah '*umariyatain*, kewarisan *zawil arhām* dan lainnya dari masalah-masalah yang telah diijtihatkan oleh para sahabat.

1. Al-Qur'an.

Dari sumber hukum pertama yaitu al-Qur'an ada empat ayat yang memuat tentang hukum waris secara detail:

- a. Surah an-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً

¹ Ahmad bin Fāris al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-lughah* (Beirut: Dār al-Jīl, t.th), Jilid IV, h. 488-489. Lihat Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-Islāmī, 1403), Jilid X, h. 230-232.

² 'Ali Bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1413), h. 213

³ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, h. 757

⁴ 'Abdullah bin Muhammad asy-Syansyurī, *Al-Fawāid al-Syansyuriyah Fi Syarhi al-Manzumah al-Ruḥbiyyah* (Mekah: Dār 'Ālim al-Fawāid, 1422), h. 25

⁵ Defenisi menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pasal 171 butir (a).

فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan⁶; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua⁷, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 11)

Ayat di atas menjelaskan tentang warisan bagi (Furū dan Uṣūl), yaitu anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya ke bawah, serta warisan ayah dan ibu dan seterusnya ke atas, keadaan-keadaan mereka dalam warisan dan syarat-syarat mendapatkan warisan.

b. Surah an-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperedelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi

⁶ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An-Nisa' ayat 34).

⁷ Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

*mudharat (kepada ahli waris)*⁸. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. an-Nisa': 12)

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bagian warisan untuk suami-istri, dan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, keadaan-keadaan mereka dalam kewarisan serta syarat untuk mendapatkan warisan.

c. Surah an-Nisa' ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

*mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).*⁹ Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa': 176)

Ayat di atas menjelaskan tentang bagian warisan untuk saudara laki-laki dan perempuan baik kandung maupun seayah, dan keadaan mereka dalam warisan, serta syarat untuk mendapatkannya.

d. Surah al-Anfāl ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَابِ جُرُوءٍ وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِينَكُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

*dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)*¹⁰ *di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal:75)*

Ini adalah dalil warisan *ẓawil arhām*, yaitu seluruh kerabat pewaris yang tidak termasuk sebagai penerima *aṣḥābul furūd* dan juga *‘aṣabah*. Mereka baru bisa dapat warisan jika pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan juga *‘aṣabah*.

2. Sunnah Nabi Saw.

Terdapat banyak hadis yang menunjukkan hukum waris, sebagai perinci terhadap al-Qur'an dan penjasar makna-maknanya, serta mendeskripsikan hukum yang belum dijelaskan oleh al-Qur'an. Di antaranya adalah:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁸ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

⁹ Kalalah ialah: seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan ayah dan anak.

¹⁰ Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR. Bukhari)¹¹

Hadis ini menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris (*aṣḥābul furūd*), kemudian diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris sebagai penerima sisa bagian (*‘aṣabah*).

b. Hadis dari Usamah bin Zaid.

حَدَّثَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Hadis Usamah Bin Zaid, Rasulullah saw. Bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, demikian juga orang Kafir tidak mewarisi dari orang Muslim. (H.R. Bukhari).¹²

Dari hadis di atas, menjelaskan bahwa perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk bisa mendapatkan warisan.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ubadah Bin Sāmit.

مَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِلْجَدِّ تَيْنٍ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ.

Diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin Sāmit ra. Bahwa Nabi saw. memberikan bagian untuk dua orang nenek dalam warisan seperenam, dibagi sama rata.¹³

Hadis di atas merupakan dalil kewarisan nenek baik seorang atau banyak, menerima bagian seperenam. Dan berkongsi dengan bagian tersebut jika mereka banyak.

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud.

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَتِ النِّصْفَ وَلِابْنَتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.¹⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan satu orang anak perempuan penerima bagian setengah, maka mendapatkan bagian seperenam sebagai penyempurna bagian terbesar perempuan dua pertiga. Dalam hadis tersebut juga menjelaskan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah) jika bersama dengan *furu’ muannas* (anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya ke bawah) mendapatkan bagian *‘aṣabah ma’al ghairi* (penerima sisa).

3. Ijma’

Para sahabat, *tabi’in*, dan *tabi’ tabi’in* telah berijma’ atau bersepakat tentang legalitas ilmu *farāiḍ* dan tidak ada seorangpun yang menyalahi ijma’ tersebut.

4. Ijtihad Sahabat.

Para Sahabat telah berijtihad dalam ilmu *farāiḍ* pada kasus-kasus tertentu. Seperti *‘umariyatain*, *musyarakah*, kewarisan kakek bersama saudara, kewarisan *ẓawil arhām*, *khunsa’*, kewarisan bayi dalam kandungan, *mafquḍ* (orang hilang), dan lain sebagainya yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya dalam buku ini.

D. Sejarah Ilmu Farāiḍ

1. Sistem Waris Bangsa Arab Sebelum Islam

¹¹ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāiḍ, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṣ, 1409), h. 12

¹² Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāiḍ, bab Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir dan orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim, no hadis 6764, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII,... h. 51

¹³ Tahqīq Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Dār al-Mā’rif, t.th.), Jilid XXXVII h. 436.

¹⁴ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāiḍ, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII,... h. 18-19.

Sistem waris merupakan salah satu sebab adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarriṣ*), setelah yang bersangkutan meninggal, kepada para penerima warisan (*warasah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'.

Orang Arab jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukan melalui dua sebab yaitu:

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (*al-nasab*), adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan mereka memberikan kepada ahli waris '*ashabah* yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara lelaki, paman, anak lelaki paman dan lainnya. Dengan demikian bangsa Arab jahiliyah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁵
2. Berdasarkan sebab atau alasan tertentu, adalah warisan yang diberikan kepada ahli waris melalui jalur adopsi (*al-tabannā*). Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang mewarisi dari ayahnya. Adopsi ditetapkan pada waktu itu melalui dua cara; *Pertama*, menjadikan adopsi sebagai salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan istri atau dengan anak perempuan dari orang tua yang mengadopsinya. *Kedua*, menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris.

Selain itu, sebab untuk saling mewarisi pada masa Arab Jahiliyah adalah adanya perjanjian (*al-mu'āhadah*). Misalnya dua pihak saling berjanji dengan mengatakan, "*Darahku adalah darahmu, penyeranganku adalah penyeranganmu, kamu menolongku aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu.*" Sebagai akibat, jika salah satu pihak meninggal dunia maka pihak lainnya yang masih hidup berhak mendapatkan harta peninggalannya.¹⁶

Dengan demikian, orang-orang Arab sebelum Islam tidak memberikan warisan kepada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Alasan mereka, kaum perempuan dan anak kecil tidak dapat bergulat melawan musuh di medan perang dan tidak dapat memiliki harta rampasan perang.

2. Pandangan Islam Terhadap Sistem Waris Bangsa Arab.

Ketika Islam datang, orang-orang Arab dengan cepat meninggalkan kebiasaan mereka tentang warisan. Kemudian, Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi (*al-tabanna*). Seperti dalam firman Allah:

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)...Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu¹⁷. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)

Dengan demikian, Islam telah membatalkan hak waris anak yang diadopsi, yang ditetapkan oleh orang-orang Arab. Islam juga membolehkan anak yang diadopsi menikahi istri atau anak perempuan ayah angkatnya yang diceraikan atau ditinggal mati. Hukum ini telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau menikahi Zainab binti Jahsy yang diceraikan oleh Zaid bin Haritsah yang

¹⁵ Nashir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khudaṛā, 2007), h. 44

¹⁶ Nashir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 49-50

¹⁷ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

notabennya adalah anak angkat Rasulullah saw. Perhatikan firman Allah swt.

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia¹⁸ supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Aḥzab: 37)

Seperti diketahui bahwa Islam mebatalkan pengangkatan anak sebagai salah satu sebab penerimaan warisan karena anak angkat bukan keturunan orang tua angkatnya.

Adapun persoalan mewarisi karena adanya perjanjian (*al-mu'āhadah*), yang terdapat dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 33; “*dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya*”. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukum waris seperti ini telah dinasakh oleh surah an-Nisa' ayat yang sama 33, “*bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya*.”¹⁹ Dengan turunnya ayat ini, Allah perintahkan untuk memberi hadiah kepada mereka yang membuat perjanjian dan perjanjian tidak bisa menjadi alasan untuk mewarisi lagi, setelah salah satu diantara yang membuat perjanjian meninggal dunia.²⁰

Pada masa awal Islam, *muākhāh* atau persaudaraan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Terhadap kaum Muhajirin dan Anshar juga menjadi sebab terjadinya pewarisan. Kemudian Islam menghapus hijrah dan persaudaraan sebagai sebab terjadinya pewarisan, sebagaimana firman Allah. Q.S Al-Ahzab: 6:

dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik²¹ kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Dengan demikian, persoalan warisan menurut Islam didasarkan atas tiga sebab yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan dan al-walā, sesuai keterangan yang terperinci dalam al-Quran dan sunnah Nabi saw. serta penjelasan pembagiannya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.²²

Itulah prinsip dasar hukum waris yang diajarkan Islam kepada perempuan sejak 14 Abad lalu. Hukum yang memberi hak waris kepada mereka, seperti hak waris kaum lelaki. Islam juga memberi waris kepada anak-anak kecil atau yang belum dewasa, yang pada masa jahiliyah mereka dizalimi dan dirampas hak-haknya.

Keistimewaan hukum Islam dalam masalah waris, bagaikan keistimewaan hukum Islam dalam setiap peraturan hidup. Seluruhnya tampak jelas dihadapan mata laksana benda yang terlihat di siang hari. Islam menyampaikan hak-hak waris kepada orang yang memang benar-benar berhak menerimanya (*mustahiqqīn*). Pada masa Jahiliyah, hak waris hanya diberikan kepada kalangan kuat saja, tidak untuk kaum yang lemah. Namun di masa Islam tidak demikian, Islam mengayomi kaum yang lemah (*mustaḍ'afīn*) karena lebih berhak mendapatkan kasih sayang dan pertolongan, sebagaimana sabda Nabi saw.

إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“*Sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik*

¹⁸ Maksudnya: setelah habis 'idahnya.

¹⁹ Lihat orang-orang yang Termasuk ahli waris dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan 12.

²⁰ Abu 'Abīd al-Qāsim bin Sallām al-Harawī, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī Al-Qurān al-'Azīz*, (Riyāz: Maktabah al-Rasyad, 1418), h. 224.

²¹ Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

²² Lihat surah an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Lihat juga Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010), h. 8-9

daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.²³

Begitu juga, apabila orang Arab jahiliyah memberikan hak waris atas pertimbangan kemanfaatan, yaitu kepada orang-orang yang bisa memacu kuda dan memiliki harta rampasan perang, semestinya nilai manfaat itu juga harus diterima oleh golongan selain mereka, karena sejalan dengan firman Allah:

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. (Q.S. An-Nisā: 11)

Dalam hal warisan, Islam memiliki aturan atau sistem yang adil, menyejukkan hati dan penuh kasih sayang. Senada dengan firmanNya.

yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (Q.S. Fushilat :42)

E. Urgensi Belajar dan Mengajarkan Ilmu *Farā'id*.

Ilmu *Farā'id* merupakan ilmu yang digunakan untuk mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Ini karena ilmu *farā'id* merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qurani dan produk agama. Hanya Allah lah yang menguasai ketentuan *farā'id* secara detail, Allah tidak menyerahkan hal tersebut kepada seorang raja maupun kepada para Nabi-Nya.

Terdapat banyak hadis-hadis Rasul saw. yang menjelaskan urgensi dan keutamaan ilmu *farā'id*, dan mengajak umatnya supaya cinta dalam mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain, di antaranya adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

قوله صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَ عِلْمُهَا، فَإِنَّهُ يَصْنَفُ الْعِلْمَ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَغُ مِنْ أُمَّتِي. Rasulullah saw. bersabda, “Wahai Abu Hurairah! pelajirlah ilmu *farā'id* dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu²⁴ dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku”. (HR. Ibnu Majah)²⁵

2. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Amrū bin al-‘Āṣ

ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ، آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ.

Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Amrū bin al-‘Āṣ ra. Bahwa Rasul saw. bersabda: “Ilmu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayah muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu *farā'id*.²⁶

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعِلْمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعِلْمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُفْقِضُ وَتُظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلَفَ الْإِنْتَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا

Dari Ibnu Mas’ud ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Pelajirlah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Dan pelajirlah ilmu *farā'id* dan ajarkan kepada manusia. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa

²³ Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitab wasiat bab wasiat sepertiga harta. Hadis no. 2744. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhāri*,... Jilid V, h. 434-435.

²⁴ Para ulama berselisih pendapat tentang ungkapan “ilmu *farā'id* adalah setengah dari ilmu”. Sebagian berpendapat bahwa dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan kepada dua keadaan yaitu kehidupan dan kematian. Dengan demikian, ilmu *farā'id* erat kaitannya dengan kematian. Sedangkan ilmu yang lain berhubungan dengan kehidupan. Menurut pendapat lain dikatakan bahwa maksud dari setengah ilmu adalah salah satu dari dua bagian, sekalipun keduanya tidak sama. *Farā'id* adalah bagian dari ilmu, sedangkan sisa ilmu yang lainnya bagian yang lain pula.

²⁵ Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab *Farā'id*, bab motivasi untuk mempelajari ilmu *farā'id*, hadis no. 2719. Lihat Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Dār al-Salām, 1420), h. 391

²⁶ Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab *farā'id*, bab mempelajari ilmu *farā'id*, hadis no. 2882. Lihat Syamsul Haq al-‘Azīm Abādī, *Aun al-Ma’būt Syarah Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415), jilid VIII, h. 66

menjawabny”. (HR. Al-Hakim)²⁷

Daftar Pustaka

- ‘Abdullah bin Muhammad asy-Syansyurī, *Al-Fawāid al-Syansyuriyah Fi Syarḥi al-Manzumah al-Ruḥbiyyah* (Mekah: Dār ‘Ālim al-Fawāid, 1422)
- Abu ‘Abīd al-Qāsim bin Sallām al-Harawī, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī Al-Qurān al-‘Azīz*, (Riyāz: Maktabah al-Rasyad, 1418)
- Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṣ, 1409)
- Ahmad bin Fāris al-Rāzī, *Mu’jam Maqāyīs al-lughah* (Beirut: Dār al-Jīl, t.th), Jilid IV
- ‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1413)
- Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010)
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
- Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007)
- Tahqīq Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Dār al-Mā’rif, t.th.), Jilid XXXVII

²⁷ Dikeluarkan oleh Hakim dalam kitab farāid, hadīṣ no. 7950, dan diṣaḥiḥkan oleh az-zahabī. Lihat Syamsuddin al-Zahabī, *al-Mustadrak*, (Beirut:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), jilid IV, h. 369-370.

MATERI 2. RUKUN, SYARAT, SEBAB, PENGHALANG DALAM HUKUM WARIS, TIRKAH (HARTA PENINGGALAN) DAN HAK-HAK YANG TERKAIT DENGANNYA.

Penulis : Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. Rukun Waris.

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

1. **Al-Muwarriṣ** (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun hukmī (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti mafqūd (orang yang hilang).
2. **Al-Wāris** (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
3. **Al-Maurūs** (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qisāṣ* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Inilah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.

B. Syarat Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki*²⁸, *hukmī*²⁹, dan *taqdirī*.³⁰
2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *hukmī*.
3. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala'* (pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta *hajib* (yang menghalang) dan *mahjub* (terhalang) untuk mendapatkan warisan.³¹

C. Sebab Mendapatkan Waris

²⁸ Meninggal *hakiki* adalah kematian yang benar-benar terjadi, dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya, atau dengan bukti-bukti lainnya.

²⁹ Meninggal *hukmī* adalah kematian atas putusan hakim, seperti seorang yang hilang dalam jangka waktu yang lama dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan yang kuat (kepastian).

³⁰ Meninggal *taqdirī* adalah kematian yang disebabkan/diikutkan kepada orang lain. Seperti seorang wanita hamil disiksa kemudian lahir janin dalam keadaan meninggal, maka janin ini berhak mendapatkan *diat* sebab meninggal karena ibu yang mengandungnya disiksa. Sementara apakah janin tersebut berhak mewarisi dan mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal karena disiksa terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Abu Hanifah, janin tersebut dapat mewarisi dan dapat mewariskan (sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal, dan ia meninggal sebab kematian ibunya. Jumhur ulama berpendapat janin tersebut belum tentu hidup dan tidak mewariskan, kecuali harta *diyatnya*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), Jilid X, h. 7708.

³¹ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415), Jilid IV, h. 10

Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. **Pernikahan.**

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua). Barangsiapa yang akad tanpa ada wali maka ini adalah nikah batil/tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri.³²

Masalah yang mungkin akan dijumpai dari sebab saling mewarisi karena pernikahan sah adalah bagaimana ketika terjadi kasus perceraian (*ṭalaq*) diantara mereka, apakah memutuskan sebab mewarisi atau tidak. Dalam hal ini *ṭalaq* terbagi dua, pertama, *ṭalaq raj'ī*, yaitu suami menceraikan istrinya yang masih ada masa untuk kembali (*'iddah raj'ī*), baik satu kali talak atau dua. Maka suami memiliki hak untuk kembali (*ruju'*) kepada istrinya apabila masih dalam masa *'iddah*. Dalam masalah ini, sepakat para ulama bahwa antara suami dan istri masih tetap bisa saling mewarisi selama dalam masa *'iddah*.³³ Kedua, *ṭalaq bā'in*³⁴, yaitu talak tiga, dalam hal ini sepakat para ulama menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi antara suami dan istri, baik diceraikan ketika suami dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit parah, namun bukan dengan tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan.³⁵

Adapun jika tujuan suami menjatuhkan *ṭalaq ba'in* pada waktu sakit parah dengan tujuan menghalangi istri untuk dapat warisan, ulama berbeda pendapat:

- a. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa istri tidak bisa mendapatkan warisan dari suami secara mutlak, karena terputus hubungan pernikahan yang merupakan salah satu sebab untuk saling mewarisi.³⁶
- b. Mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suaminya jika ketika suaminya meninggal iddahnya belum habis. Jika iddahnya sudah habis maka tidak dapat mewarisi.³⁷
- c. Mazhab Hanabilah, berpendapat bahwa istrinya tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa *'iddah*, dengan catatan bahwa suami menceraikannya karena tidak ingin memberikan warisan untuknya, istrinya belum menikah dengan lelaki lain, dan merupakan orang yang berhak menerima waris pada waktu ditalak bain oleh suaminya.³⁸

³² Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 762.

³³ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid III, h. 288.

³⁴ *Ṭalaq bain* terbagi dua, *bain kubra* adalah terjadinya talak tiga. Tidak dibolehkan suami kembali kepada istri yang ditalak, kecuali istrinya sudah menikah dengan lelaki lain. *Bain sughra* adalah talak yang tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali karena berakhirnya masa iddah. Jika ingin rujuk harus dengan akad nikah yang baru dan tidak harus dinikahi dulu oleh lelaki lain.

³⁵ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid III, h. 286-287.

³⁶ Abū Ishāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Imam al-Syafī'*, (Damaskus: D al-Qalam, 1417), Jilid III, h. 81

³⁷ Syamsuddin Muhammad bin Abi Sahal al-Ṣarakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1324), Jilid VI, h. 155

³⁸ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX, h. 195

- d. Mazhab malikiyyah, berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa 'iddah atau belum, istrinya sudah menikah lagi dengan lelaki lain satu orang atau lebih.³⁹

2. *Qarabah* (kekerabatan).

Hubungan *qarabah* atau disebut juga hubungan *nasab* (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan pewaris (*furu' al-waris*), kedua orang tua pewaris (*ushul al-waris*), saudara-saudara pewaris (*Hawasyi*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris ('*Umumah*) baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta pemerdeka budak (*wala'*) laki-laki atau perempuan. Atau dengan sebab *rahm* (*zawil arḥām*) seperti anak laki-laki dan perempuan dari anak perempuan dan lain-lain.

3. *Wala'* (memerdekakan budak)

Para ulama sepakat bahwa *wala'* (memerdekakan budak) merupakan sebab untuk saling mewarisi. Sehingga orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan warisan dari yang dimerdekakan, jika yang dimerdekakan tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali baik berdasarkan hubungan pernikahan atau kekerabatan.

D. Penghalang Dalam Hukum Waris

Penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi. Jadi, yang diharamkan untuk mendapatkan warisan adalah seorang ahli waris yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Oleh karena itu, keberadaannya bagaikan tiada, dan tidak dapat menghalangi ahli waris lainnya, baik secara *hirman* (tidak dapat warisan) atau secara *nuqṣan* (pengurangan). Sebab-sebab yang menghalangi untuk mendapatkan waris yang telah disepakati oleh ulama ada tiga, yaitu:

1. *Al-Riqqu* (perbudakan)

Perbudakan secara etimologi berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sementara dalam terminologi adalah kelemahan secara hukum yang ada pada diri manusia disebabkan kekufurannya kepada Allah.⁴⁰

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi; *pertama*, budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya. sebab, jika budak tersebut mendapatkan harta dari ahli warisnya, maka yang memiliki harta tersebut adalah tuannya, karena budak merupakan orang asing (bukan anggota keluarga tuannya). *Kedua*, budak tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak mempunyai sesuatu. Kalaupun budak tersebut mempunyai sesuatu maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna dan akan beralih kepada tuannya.⁴¹ Selaras dengan hadis Nabi saw. “*Siapa yang menjual seorang hamba sedangkan dia memiliki harta, maka hartanya tersebut menjadi milik pembelinya, kecuali jika hamba tersebut mensyaratkannya (untuk tidak menjadi milik tuannya)*”.⁴²

2. *Al-Qatlu* (Pembunuhan)

³⁹ Al-Imam Malik Bin Anas, *Muwāṭa' Imam Malik* (Mesir: Dār Ihya al-Kitāb al-'Arabiyah, t.th), Jilid II, h. 571-572

⁴⁰ Orang kafir yang menjadi tawanan kaum muslimin dan tidak ditebus, statusnya menjadi hamba sahaya. Lihat 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1413), h.148-149.

⁴¹ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*,...Jilid III, h. 41-42

⁴² Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab minum dan sedekah, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, hadis no. 2379, Jilid V..., h. 60

Sepakat para ulama fikih bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mendapatkan warisan. Dengan demikian, ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan menerima harta peninggalannya, berdasarkan hadis:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

Seorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta sedikitpun. (H.R. Malik)

Alasan yang mendasari pembunuh tidak bisa mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuh karena ditakutkan akan terjadinya kerusakan di muka bumi ini, para ahli waris akan termotivasi untuk mempercepat proses penerimaan harta warisan dengan cara membunuh pewaris, tentunya banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan dengan latar belakang ingin segera mendapatkan warisan. Sehingga untuk menghindari terjadinya hal ini, Islam menetapkan dengan tegas bahwa pembunuh tidak bisa mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuh. Dikuatkan juga dengan kaidah fiqh:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ غُوبَ بِحَرْمَانِهِ

“Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram”.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang menerima waris, sebagai berikut;

- a. Mazhab Syafi’iyyah berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi harta peninggalan. Baik pembunuhan sengaja, mirip sengaja, *khilaf* (baik dengan hak atau tidak), atau dihukum telah membunuhnya, atau tindakan yang menyebabkan pembunuhan disaksikan oleh orang lain, atau tidak ada yang menyaksikan pembunuhan tersebut sekalipun tidak disengaja, seperti pelakunya orang yang sedang tidur, orang gila dan anak kecil, atau bertujuan demi kemaslahatan, seperti ayah memukul anaknya dalam rangka mendidik. Berdasarkan keumuman hadis larangan membunuh untuk mendapatkan warisan.⁴³
- b. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang diharamkan, yaitu pembunuhan yang mewajibkan *qisas* atau *kafarat*. Meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan salah sasaran.⁴⁴
- c. Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja saja, baik langsung atau tidak langsung.⁴⁵
- d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang menggugurkan hak waris adalah pembunuhan terhadap pewaris yang tidak ada hak, setiap pembunuhan yang mengakibatkan hukuman *qisas*, *diat*, atau *kafarat*. Termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang tidur.⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 173 tentang penghalang seseorang mendapatkan warisan, yaitu pada poin (a) disebutkan bahwa seseorang terbukti mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, tidak sampai menghilangkan nyawanya, dan pada poin (b) disebutkan bahwa menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan.

⁴³ Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī’ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāid*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1421), h. 37

⁴⁴ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 766-767.

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Ḥafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Maktabah al-‘Ilmi, 1415), Jilid IV, h. 220

⁴⁶ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 152

Rumusan Kompilasi Hukum Islam tentang penghalang seseorang untuk dapat mewarisi, berlandaskan kepada *sadd al-ẓari'ah*, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat membawa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang diharamkan Allah seperti membunuh, maka tindakan seorang pewaris yang menfitnah, menganiaya pewaris yang tidak sampai nyawanya hilang, oleh KHI dikategorikan sebagai penghalang seseorang mendapatkan warisan.

3. *Ikhtilāf al-Dīn* (Berbeda Agama)

Jumhur ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya seorang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah, atau perkawinan, atau karena memerdekakan budak (*wala'*).⁴⁷ Senada dengan sabda Rasul saw.

حَدَّثَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Hadīth Usamah Bin Zaid, Rasulullah saw. Bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, demikian juga orang Kafir tidak mewarisi dari orang Muslim. (H.R. Bukhari).⁴⁸

Namun sebagian ulama salaf, berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang Islam. Dalil yang menjadi acuannya, bahwa ketika Mu'az bin Jabal berada di Yaman, ada seorang yahudi bertanya kepada beliau tentang kewarisan beda agama, dimana seorang Yahudi meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris saudaranya Muslim, maka Mu'az berkata sesungguhnya saya mendengar Rasul saw. bersabda: "*Islam bertambah dan tidak berkurang*" kemudian beliau memberi warisan kepada seorang Muslim.⁴⁹

Meskipun demikian, pendapat yang kuat adalah tidak saling mewarisi antara Islam dan Kafir, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, karena didasarkan pada naṣṣ hadīṣ yang jelas. Tujuannya adalah untuk mencegah seseorang dengan mudah berpindah-pindah agama karena motif ekonomi, hanya untuk mendapatkan harta warisan dari seorang kafir, memilih untuk memeluk agama kafir begitu juga sebaliknya dan perkara ini sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Selain itu, Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, dengan aturan yang tegas, bahwa bila ingin mendapatkan warisan peluklah agama Islam, karena agama yang diridhai disisi Allah adalah agama Islam.

E. Defenisi dan Unsur-Unsur *Tirkah*

Tirkah secara etimologi adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sementara secara terminologi adalah seluruh yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Dengan demikian *tirkah* mencakup empat hal berikut:

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan tetap.
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Termasuk juga hak menafaatan, seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Begitu juga hak yang bukan kebendaan seperti, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat

⁴⁷ Merupakan pendapat mazhab Khulafa al-Rasyidīn, Jumhur Ṣahabah dan Tabi'īn, dan Empat Imam Mazhab, serta seluruh para Fuqaha, mereka beramal seperti pendapat tersebut. Lihat Naṣhīr bin Muḥammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Farā'id*,... h. 150

⁴⁸ Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Askalānī, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*,... Jilid XII, h. 51

⁴⁹ Hadīṣ diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab al-Farā'id, bab apakah seorang Muslim mendapatkan Warisan dari Kafir, hadīṣ no. 2909, Lihat Syamsul Haq al-'Aẓīm Abādī, *'Aun al-Ma'būt Syarah Sunan Abi Dawud*,... Jilid VIII, h. 87-88.

atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya), dan hak khiyar seperti khiyar syarat.

3. Sesuatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal. Seperti *khamar* yang telah menjadi cuka dan jerat yang menghasilkan binatang buruan. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
4. *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf.

F. Hak-hak yang Terkait Dengan *Tirkah*.

Ketika seseorang meninggal dunia, tentu meninggalkan harta, lantas harta ini tidak serta merta menjadi harta warisan yang dibagikan untuk seluruh para ahli warisnya, ada hak-hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu terhadap *tirkah* (harta peninggalan) pewaris, yang selanjutnya baru harta tersebut bisa dibagikan untuk seluruh ahli waris. Para jumhur fuqaha sepakat bahwa hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* itu ada empat yang harus dilaksanakan secara berurutan (*tartib*), yaitu sebagai berikut:

1. *Tajhīz al-Mayyit* (biaya-biaya pengurusan mayit)

Biaya pengurusan mayit adalah segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak meninggal dunia sampai dikebumikan, yaitu berupa biaya untuk memandikan, mengafani, mengusung, menggali kuburan dan menguburkan. Biaya ini diambil menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan dan dikurang-kurangi, dengan tetap menjaga perintah dan larangan agama.⁵⁰

Jika pewaris tidak meninggalkan *tirkah*, maka biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada keluarganya yang menanggung nafkah, seperti jika anak laki-laki meninggal tidak meninggalkan harta maka biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada ayahnya. Jika sama sekali dalam keluarga tersebut tidak memiliki kemampuan finansial terhadap proses pengurusan jenazah, dalam hal ini dibebankan kepada baitul mal dari kaum Muslimin.

Terdapat permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, terhadap biaya pengurusan jenazah istri, apakah dibebankan kepada harta kekayaan suami atau tidak.

- a. Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa biaya pengurusan jenazah istri secara mutlak dibebankan kepada suami, baik dalam keadaan mampu atau tidak, begitu juga istrinya kaya atau miskin.⁵¹
- b. Mazhab Hanabilah, berpendapat bahwa suami tidak wajib membiayai pengurusan jenazah istrinya,⁵² baik suaminya dalam keadaan mampu atau tidak, istrinya merupakan orang miskin atau kaya, akan tetapi sepenuhnya ditanggung dari harta istrinya, jika tidak ada harta maka ditanggung oleh yang menafkahnya selama hidup, jika tidak ada juga maka ditanggung oleh baitul mal, jika tidak ada juga maka bagi dermawan yang mengetahui keadaannya.⁵³
- c. Mazhab Syafi'iyah, berpendapat bahwa biaya pengurusan jenazah istri dibebankan kepada suaminya jika mampu, tapi jika tidak mampu maka pembiayaan tersebut menjadi tidak wajib baginya.⁵⁴
- d. Mazhab Malikiyyah, berpendapat bahwa jika istrinya mampu, tidak dibebankan biaya pengurusan jenazahnya kepada suami, tapi jika tidak mampu, suami dibebankan untuk membiayai proses pengurusan jenazahnya. Jika suami tidak mampu, diambil dari baitul mal atau melalui bantuan kaum Muslimin yang mengetahui keadaannya.⁵⁵

⁵⁰ Naṣīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 58

⁵¹ Muḥammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid II, h. 206.

⁵² Alasannya adalah hartanya yang berasal dari nafkah suami telah terputus akibat kematiannya.

⁵³ Maṣūr bin Yūsuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'*, (Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub, 1403) Jilid II, h. 104

⁵⁴ Syamsuddin Muḥammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*,...Jilid IV, h. 7

⁵⁵ Jalāl al-Dīn 'Abdullāh bin Najmū bin Syās al-Mālikī, *Aqd al-Jawāhir al-Saminah*, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1415), Jilid I, h. 260

2. *Qaḍā al-Duyūn* (Pelunasan Utang)

a. Utang yang terkait dengan Harta Waris.

Termasuk dalam hak-hak ini adalah utang yang digadaikan, utang pembelian suatu barang, zakat yang diwajibkan atas harta benda sebelum jadi *tirkah*. Hak-hak ini semua lebih didahulukan daripada biaya pengurusan jenazah, menurut pendapat Imam Hanafi, Malik dan Syafi'i. Sementara menurut imam Hanbali, biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan daripada melunasi utang-utangnya.⁵⁶ Karena seorang yang pailit, mengutamakan dirinya daripada kreditor, dan pakaian orang yang pailit lebih utama daripada melunasi utang, begitu juga mengafani mayit lebih didahulukan daripada melunasi utangnya. Disebabkan menutup aurat semasa hidup adalah kewajiban, demikian pula setelah meninggal dunia.

b. Utang yang terkait dengan Tanggungan Pewaris.

Utang-utang berupa utang kepada Allah, seperti *kifarat*, zakat, haji yang wajib, nazar dan utangnya kepada manusia, seperti utang *qirad*, harga, upah, dan lain sebagainya.

Permasalahannya adalah jika utang yang dimiliki oleh seorang pewaris yaitu, utang dengan Allah dan manusia, lebih banyak dari harta peninggalannya, mana yang harus didahulukan untuk dilunasi. Berbeda pendapat para ulama, sebagai berikut:

- a) Mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa utang sesama manusia lebih didahulukan pelunasannya daripada utang dengan Allah. Sebab, manusia sangat memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedangkan Allah adalah zat yang Maha Kaya, tidak perlu pelunasan kepadaNya.⁵⁷
- b) Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa yang harus didahulukan adalah utang kepada Allah ketimbang utang pada manusia. Sebagaimana sabda Rasul saw. "*Hutang kepada Allah lebih utama untuk dilunasi*".(H.R. Bukhari)⁵⁸
- c) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa kedudukan pelunasan utang terhadap Allah sama dengan pelunasan terhadap manusia. Maksudnya, harta waris dibagi menurut perbandingan kedua macam utang tersebut, seperti pembagian harta orang yang pailit semasa hidupnya.⁵⁹

3. *Al-Waṣiyyah* (wasiat)

Ulama mazhab Hanafiyyah mendefinisikan wasiat adalah pemberian yang dilakukan seseorang setelah kematian, dengan jalan *tabarru'* (sedekah), baik dalam bentuk harta benda ataupun manfaat.⁶⁰ Menurut Mazhab Malikiyyah, wasiat adalah akad yang mengalihkan kepemilikan harta kepada orang lain dengan batasan sepertiga dari harta kekayaan yang dimilikinya, dilakukan setelah meninggal pewasiat.⁶¹ Sementara menurut mazhab Syafi'iyah, wasiat merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain setelah meninggal dunia.⁶² Sedangkan mazhab Hanabilah mendefinisikan wasiat sebagai suatu perkara untuk mengalihkan harta bendanya setelah kematian.⁶³

Syarat-syarat pelaksanaan wasiat ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Sebagaimana Rasul saw. Bersabda: "*Hendaklah engkau berwasiat sepertiga saja dari hartamu, karena sepertiga itu sudah cukup banyak. Bila engkau pergi meninggalkan ahli warismu yang kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan*

⁵⁶ Naṣīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 66

⁵⁷ Muḥammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 760-761.

⁵⁸ Syamsuddin Muḥammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*,...Jilid IV, h. 7

⁵⁹ Maṣūr bin Yūsuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'*,... Jilid IV, h. 404

⁶⁰ 'Alī bin Muḥammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*,...h. 326

⁶¹ Riṣā' al-Tūnisī, *Syarah Hudūd Ibnu 'Urfah*, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1993), Jilid II, h. 681

⁶² Syamsuddin Muḥammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*,...Jilid IV, h. 66

⁶³ Maṣūr bin Yūsuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'*,... Jilid IV, h. 335

mereka dalam kondisi tidak punya apa-apa, menjadi beban orang lain dan selalu tengadahkan tangan memohon belas kasihan orang”.⁶⁴

2. Wasiat harus ditujukan kepada selain ahli waris, menurut para ulama wasiat untuk ahli waris tidak dibolehkan, kecuali mendapat izin dari ahli waris yang ada. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul pada masa Haji *wada'*, setelah turun ayat-ayat waris: “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap orang haknya masing-masing, tidak ada wasiat untuk ahli waris*”⁶⁵
3. Wasiat untuk perkara yang dibolehkan syara', seperti berwasiat untuk pembangunan masjid, rumah sakit, membangun perpustakaan, jalan umum dan lain sebagainya. Sedangkan wasiat tidak dibolehkan untuk perkara yang diharamkan, seperti berwasiat untuk membangun diskotik, berwasiat untuk orang kafir, tempat perjudian dan lain sebagainya.

4. *Al-Mīrās* (Pembagian Waris)

Setelah selesai seluruh hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris, mulai dari pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat, maka sisa harta tersebut baru dibagikan kepada ahli waris yang ada.

Dimulai dengan memberikan bagian kepada ahli waris penerima *aṣḥabul furūd* (bagian yang telah ditentukan), kemudian sisanya diberikan kepada *aṣḥabul 'aṣabah* (penerima sisa), jika tidak ada penerima sisa maka sisa diberikan kepada ahli waris penerima *rad* (*aṣḥabul rad*), walaupun dalam sebuah kasus tidak dijumpai *aṣḥabul furūd* dan *'aṣabah*, maka diberikan bagian kepada *ẓawil arḥām*, jika tidak ada juga maka harta akan beralih ke *baitul mal* kaum Muslimin untuk dipergunakan bagi kepentingan umat manusia.

Daftar Pustaka

- Abū Ishāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: D al-Qalam, 1417), Jilid III
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, hadis no. 2379, Jilid V
- Al-Imam Malik Bin Anas, *Muwaṭṭa' Imam Malik* (Mesir: Dār Ihya al-Kitāb al-'Arabīyah, t.th), Jilid II
- 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1413)
- Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX
- Jalal al-Dīn 'Abdullah bin Najmu bin Syās al-Mālikī, *Aqd al-Jawāhir al-Ṣaminah*, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1415), Jilid I
- Maṣūr bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'*, (Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub, 1403) Jilid II
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Maktabah al-'Ilmi, 1415), Jilid IV

⁶⁴ Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitab wasiat bab wasiat sepertiga harta. Hadis no. 2744. Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*,... Jilid V, h. 434-435.

⁶⁵ Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab wasiat, bab tidak ada wasiat untuk ahli waris, hadis no. 2713. Lihat Muhammad bin Yazid bin Mājāh, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Dār al-Salām, 1420), h. 390-391

- Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī'ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāid*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1421)
- Muhammad bin Yazid bin Mājah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Dār al-Salām, 1420)
- Riṣā' al-Tūnisī, *Syarah Hudūd Ibnu 'Urfah*, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1993), Jilid II
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Sahal al-Ṣarakḥṣī, *Al-Mabsūṭ* (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1324), Jilid VI
- Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), Jilid IV
- Syamsul Haq al-'Aẓīm Abādī, *'Aun al-Ma'būt Syarah Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), jilid VIII
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), Jilid X

MATERI 3. KEWARISAN SECARA *FARDU* DAN KEADAAN-KEADAANNYA DALAM WARISAN

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. *Ashābul Furūd Sababiyah* (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan)

Ashābul furūd sababiyah ada dua orang yaitu suami dan istri.

1. Bagian Suami (الزوج)

Suami mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan istrinya:

- a. **Setengah (1/2)**: Jika tidak meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).

Contohnya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, dan ayah. Maka bagian suami adalah 1/2 (karena tidak meninggalkan anak), ayah mendapatkan 'asabah (karena laki-laki yang paling dekat dengan pewaris).

- b. **Seperempat (1/4)**: Jika meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman Allah saw. Q.S. An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ...

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...(Q.S. an-Nisa': 12)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, anak perempuan dan anak laki-laki. Maka bagian suami 1/4 (karena ada anak), anak perempuan dan laki-laki mendapatkan 'asabah bil ghair (dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 dari bagian perempuan).

2. Bagian Istri (الزوجة)

Istri mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan suaminya:

- a. **Seperempat (1/4)**: Jika tidak meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah istri dan saudara laki-laki kandung. Maka, bagian istri adalah 1/4 (karena tidak ada anak), saudara laki-laki kandung mendapatkan bagian 'asabah (karena laki-laki paling dekat dengan pewaris).

- b. **Seperdelapan (1/8)**: Jika meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman Allah saw. Q.S. An-Nisa' ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ...

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...(Q.S. an-Nisa': 12)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, dan anak laki-laki. Maka, bagian istri adalah 1/8 (karena ada anak laki-laki) dan anak laki-laki mendapat 'asabah binnafsi.

B. *Ashābul Furūd Nasabiyah* (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan)

Aṣḥābul furūd nasabiyyah ada sembilan orang, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Anak Perempuan (البنت) .

Anak perempuan adalah ahli waris yang tidak akan pernah *terhijab* (terhalang) dalam keadaan apapun. Ada tiga bagian untuk anak perempuan, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. **Setengah (1/2):** anak perempuan berhak memperoleh bagian 1/2 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Sendiri.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*).

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... ﴿١١﴾

jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta....(Q.S.An-Nisa': 11)

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan dan ayah. Maka, suami mendapat 1/4 (karena ada anak perempuan), anak perempuan 1/2 (karena sendiri) dan ayah mendapat 1/6+'aṣabah (karena bersama anak perempuan).

b. **Dua per tiga (2/3) :** anak perempuan berhak memperoleh bagian 2/3 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*).

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... ﴿١٢﴾

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua⁶⁶, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan... (Q.S.An-Nisa': 11)

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri dan dua anak perempuan. Maka, istri mendapat bagian 1/8 (karena ada anak perempuan) dan dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 (dua orang atau lebih).

c. **'Aṣabah bil Ghair (penerima sisa):** Anak perempuan satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan 'aṣabah bil ghairi, dengan syarat:

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan. Sebagaimana firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١٣﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan⁶⁷; ... (Q.S.An-Nisa': 11)

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan dan saudara laki-laki seayah. Maka, anak laki-laki dan perempuan dapat 'aṣabah bil ghair (dengan ketentuan 2:1), dan saudara laki-laki seayah terhijab oleh anak laki-laki.

2. Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki dan Seterusnya ke Bawah (بنت الإبن)

Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mewarisi harta peninggalan pewaris dengan lima bagian, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. **Setengah (1/2):** cucu perempuan berhak mendapatkan setengah dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Sendiri.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*),

⁶⁶ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

⁶⁷ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisa' ayat 34).

- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan anak perempuan.

Dalil kewarisannya adalah sama seperti dalil kewarisan anak perempuan, melalui metode qiyas. Dimana para ulama telah sepakat ketika menafsirkan surah an-nisa' ayat 11, bahwa cucu perempuan dari keturunan laki-laki menggantikan kedudukan anak perempuan, begitu juga cucu laki-laki dari anak laki-laki menggantikan posisi anak laki-laki, jika pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki atau perempuan.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami dan cucu perempuan. Maka, bagian suami adalah 1/4 (karena ada cucu perempuan), dan cucu perempuan dapat bagian 1/2 (karena sendiri dan tidak ada saudara laki-lakinya)

b. Dua Per Tiga (2/3): cucu perempuan berhak mendapatkan bagian dua per tiga, dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan anak perempuan.

Dalil kewarisannya adalah sama seperti dalil kewarisan anak perempuan, melalui metode qiyas. Karena Ijma' para ulama bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan anak perempuan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, 3 cucu perempuan dan kakek. Maka, bagian istri 1/8 (karena ada cucu perempuan), 3 cucu perempuan mendapat 2/3 (karena dua orang atau lebih), dan kakek dapat 1/6+*'asabah* (karena ada cucu perempuan).

c. 'Aṣabah bil Ghair (penerima sisa): Cucu perempuan dari anak laki-laki, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan *'aṣabah bil ghairi*,

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'asib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan anak perempuan. Dalil kewarisannya adalah sama seperti dalil kewarisan anak perempuan, melalui metode qiyas. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan.

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan paman seayah. Maka, cucu laki-laki dan cucu perempuan dapat bagian *'aṣabah bil ghair* (ketentuan 2:1), ibu dapat bagian 1/6 (karena ada cucu laki-laki dan perempuan) dan paman seayah terhibab oleh cucu laki-laki.

d. Seperenam (1/6): Cucu perempuan dari anak laki-laki, bisa mendapatkan bagian seperenam, dengan tiga syarat:

- 1) Jika bersama dengan satu orang anak perempuan (*far'ul 'Alā*), penerima bagian seperdua (1/2). Karena bagian terbesar perempuan adalah 2/3, setelah diambil oleh satu orang anak perempuan 1/2, masih ada sisa 1/6 lagi untuk melengkapi bagian 2/3.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan dua orang atau lebih anak perempuan, penerima bagian 2/3.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِنْتِ الْيَصْفُ وَلَا يَنْتِ ابْنُ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ.

Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi

saudara perempuan.⁶⁸

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan, dan cucu perempuan. Maka, bagian suami adalah 1/4 (karena ada anak perempuan), anak perempuan dapat bagian 1/2 (karena sendiri dan tidak ada saudara laki-lakinya), dan cucu perempuan dapat bagian 1/6 (melengkapi bagian 2/3).

- e. **Al-hajbu (terhijab):** cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab hirman, dalam dua keadaan:
- 1) Ada *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu, anak lelaki dan cucu lelaki yang di atasnya.
 - 2) Ada dua orang atau lebih *far'ul waris* (cabang waris) yang di atasnya yaitu anak perempuan, kecuali cucu tersebut bersama dengan *mu'aşibnya*/ saudaranya yang laki-laki. Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka, bagian anak laki-laki adalah 'aşabah binnafsi, cucu perempuan terhijab oleh anak laki-laki.

3. Bagian Ayah (الأب) .

Ayah adalah ahli waris yang tidak akan pernah *terhijab* (terhalang) dalam keadaan apapun. Ada tiga bagian untuk ayah, yaitu:

- a. **Seperenam (1/6):** ayah berhak memperoleh bagian 1/6 dengan syarat, yaitu:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki, baik itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jalur lelaki. Atau jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seterusnya kebawah.

Sebagaimana firman Allah:

وَلَا يُوْثِرُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَلْشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . ﴿١١﴾

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ...(Q.S.An-Nisa': 11)

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki, ayah dan ibu. Maka, bagian dua orang anak laki-laki adalah 'aşabah binnafsi, ayah mendapat bagian 1/6 (karena ada anak laki-laki), dan ibu mendapatkan bagian 1/6 (karena ada anak laki-laki).

- b. **Seperenam dan 'Ashabah (1/6+sis) :** ayah mendapatkan 1/6+sis dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yang perempuan, satu orang atau lebih. Baik itu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 2) Jika tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki, baik itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jalur lelaki. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا يُوْثِرُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَلْشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . ﴿١٢﴾

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ...(Q.S.An-Nisa': 11)

Dan dalil dari sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa Rasul bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa

⁶⁸ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhāri*, Jilid XII... h. 18-19.

menjadi hak laki-laki yang paling utama. " (HR. Bukhari)⁶⁹

Contoh, seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris istri, 4 cucu perempuan dan ayah. Maka, istri dapat bagian 1/8 (karena ada cucu perempuan), 4 cucu perempuan dapat bagian 2/3 (dua orang atau lebih) dan ayah 1/6+ 'aşabah (karena ada cucu perempuan).

c. **'Aşabah:** Ayah akan mendapatkan bagian 'aşabah dengan satu syarat:

- 1) Jika sama sekali tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki dan perempuan seterusnya kebawah. Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... ﴿١١﴾

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; ... (Q.S.An-Nisa': 11)

Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, ayah dan paman kandung. Maka, bagian ibu adalah 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang atau lebih saudara), ayah mendapat 'aşabah binnafsi (karena tidak ada anak laki-laki) dan paman kandung terhibab oleh ayah.

4. Bagian Ibu (الأم) .

Ibu adalah ahli waris yang tidak akan pernah *terhibab* (terhalang) dalam keadaan apapun. Ada tiga bagian untuk ibu, yaitu:

a. **Sepertiga (1/3):** ibu berhak memperoleh bagian sepertiga dengan tiga syarat, yaitu:

- 1) Jika sama sekali tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki dan perempuan seterusnya kebawah.
- 2) Jika tidak ada dua orang atau lebih saudara, baik sekandung, seayah dan seibu, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... ﴿١١﴾

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga... (Q.S.An-Nisa': 11)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, ayah dan saudara laki-laki seayah. Maka, bagian ibu 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang saudara atau lebih), ayah mendapat 'aşabah (tidak ada anak) dan saudara laki-laki seayah terhibab oleh ayah.

b. **Seperenam (1/6):** ibu mendapatkan 1/6 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki dan perempuan seterusnya kebawah.
- 2) Jika ada dua orang atau lebih saudara, baik sekandung, seayah dan seibu, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . ﴿١٢﴾

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ... (Q.S.An-Nisa': 11)

Dan lanjutan surah an-nisa' ayat 11:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ... ﴿١٢﴾

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Q.S.An-Nisa': 11).

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ibu dan anak laki-

⁶⁹ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhāri*, Jilid XII ..., h. 12

laki. Maka, bagian istri 1/8 (karena ada anak), ibu 1/6 (karena ada anak) dan anak laki-laki mendapatkan bagian 'asabah.

c. Sepertiga (1/3) dari sisa harta: ibu mendapat 1/3 dari sisa harta merupakan masalah *umariyatain*, karena merupakan pendapat Zaid bin Šabit yang disetujui oleh mayoritas sahabat dan dijadikan keputusan oleh Umar bin al-Khattab atau disebut dengan masalah *gharawain*⁷⁰. Ibu akan mendapatkan 1/3 dari sisa harta jika dijumpai salah satu dari dua keadaan berikut:

- 1) Jika dalam satu kasus hanya ditinggalkan suami, ibu dan ayah, atau;
- 2) Jika dalam satu kasus hanya ditinggalkan istri, ibu dan ayah.

5. Bagian Kakek (الجد) .

Yang dimaksud dengan kakek disini adalah kakek *ṣaḥīḥ*, yaitu kakek yang hubungan nasabnya dengan pewaris tidak diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ayah, ayah dari ayahnya ayah dan seterusnya ke atas.⁷¹ Kewarisan kakek sama seperti kewarisan ayah, kecuali pada kasus *gharrawain*.⁷² Kakek dalam warisan memiliki empat bagian, yaitu:

a. Seperenam (1/6): kakek berhak memperoleh bagian 1/6 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki, baik itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jalur lelaki. Atau jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seterusnya kebawah.
- 2) Tidak ada ayah.

Sebagaimana firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ .

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ... (Q.S. An-Nisa': 11)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah kakek dan anak laki-laki. Maka, bagian kakek 1/6 (karena ada anak laki-laki) dan anak laki-laki mendapatkan 'asabah.

b. Seperenam dan 'Ashabah (1/6+sisa): kakek mendapatkan 1/6+sisa dengan tiga syarat, yaitu:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yang perempuan, satu orang atau lebih. Baik itu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 2) Jika tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki, baik itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jalur lelaki.
- 3) Tidak ada ayah.

Sebagaimana firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ .

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ... (Q.S. An-Nisa': 11)

Dan dalil dari sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa Rasul bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa

⁷⁰ Akan dibahas secara detail pada bab berikutnya di dalam buku ini

⁷¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, h. 169

⁷² Kasus dimana yang ditinggalkan hanya suami, ayah dan ibu atau istri, ayah dan ibu. Dalam kasus ini ibu mengambil 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh suami atau istri. Sementara jika posisi ayah digantikan oleh kakek, maka ibu tetap mengambil bagian 1/3. Perbedaan kakek dengan ayah yang lainnya adalah sepakat para ulama, saudara kandung dan saudara seayah terhibab oleh ayah, tapi mereka berbeda pendapat mengenai apakah kakek bisa menghibab saudara sekandung atau seayah. Sebagian mengatakan terhibab dan sebagian lagi kakek tidak bisa menghibabnya. Perbedaan lain yaitu ayah tidak akan pernah terhibab hirman, sedangkan kekek terhibab hirman oleh ayah. Perbedaan lain lagi, bahwa ibunya ayah (nenek dari ayah) terhibab oleh ayah, dan tidak terhibab oleh kakek.

menjadi hak laki-laki yang paling utama. " (HR. Bukhari)⁷³

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, anak perempuan dan kakek. Maka, bagian istri 1/8 (karena ada anak), anak perempuan 1/2 (karena sendiri dan tidak ada saudara laki-lakinya), dan kakek dapat 1/6+'aşabah (karena bersama anak perempuan).

c. **'Aşabah:** kakek akan mendapatkan bagian 'aşabah dengan dua syarat:

- 1) Jika sama sekali tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki dan perempuan seterusnya kebawah.
- 2) Tidak ada ayah. Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... ﴿١١﴾

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; ... (Q.S.An-Nisa': 11)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami dan kakek. Maka, suami mendapat 1/2 (karena tidak ada anak) dan kakek mendapat 'aşabah (karena laki-laki paling dekat dengan pewaris).

d. **Al-hajbu (terhijab):** Kakek terhijab hirman oleh ayah dan setiap kakek yang lebih dekat pertaliannya dengan pewaris. Dalilnya adalah *ijma'* sahabat bahwa kakek mendapatkan warisan ketika tidak ada ayah.

Contoh, seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ayah, kakek dan ibu. Maka ayah mendapatkan 'aşabah (karena tidak ada anak), kakek terhijab oleh ayah dan ibu dapat 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang atau lebih saudara).

6. Bagian Nenek (الجدّة) .

yang dimaksud dengan nenek disini adalah nenek *ṣaḥīḥah*, yaitu yang tidak ada kakek satu rahim dalam hubungannya dengan si mayit. Dia adalah ibu dari salah satu orang tua si mayit, seperti ibunya ibu, ibunya ayah, ibu dari ibunya ibu, ibu dari ayahnya ayah, atau ibu dari ibunya ayah.⁷⁴ Nenek mendapatkan warisan dengan dua bagian yaitu:

a. **Seperenam (1/6):** Nenek mendapatkan 1/6 sendiri atau banyak, dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Tidak ada ibu. Baik nenek dari pihak ibu atau pihak ayah, atau dari pihak keduanya. Jika mereka lebih dari satu dan mereka sederajat, misalnya ibunya ibu dengan ibunya ayah, maka bagian 1/6 diberikan untuk mereka berdua. Namun jika berbeda-beda, yang lebih dekat derajatnya bisa menghalangi yang jauh.

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, cucu perempuan dan nenek dari ibu. Maka, bagian suami 1/4 (karena ada anak perempuan), cucu perempuan dapat 1/2 (karena sendiri) dan nenek dari ibu mendapatkan bagian 1/6 (karena tidak ada ibu).

b. **Al-hajbu (terhijab):** Nenek, baik dari pihak ibu atau pihak ayah, menjadi terhalang mendapatkan warisan karena adanya ibu. Menurut jumhur ulama, nenek dari pihak ayah, terhalang oleh ayah dan ibu, sementara nenek dari pihak ibu hanya terhalang oleh ibu saja tidak oleh ayah.

Dalil kewarisan nenek adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Ṣāmit.

مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِلْجَدَّةِ ثَنَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ.
*Diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Ṣāmit ra. Bahwa Nabi saw. memberikan bagian untuk dua orang nenek dalam warisan seperenam, dibagi sama rata.*⁷⁵

⁷³ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, Jilid 12 ..., h. 12

⁷⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, h. 170.

⁷⁵ Tahqiq Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad bin Hanbal*,... Jilid XXXVII, h. 436.

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ayah, dan nenek dari ayah. Maka, bagian suami 1/2 (karena tidak ada anak), ayah mendapatkan 'aṣabah, sementara nenek dari ayah terhibah oleh ayah.

7. Saudara Perempuan Kandung (الأخت الشقيقة)

Saudara perempuan kandung akan mewarisi harta peninggalan pewaris dengan lima bagian, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Setengah (1/2): saudara perempuan kandung berhak mendapatkan setengah dengan empat syarat yaitu:

- 1) Sendiri.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muṣakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Dalil kewarisannya adalah:

﴿... مَا تَرَكَ ...﴾

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,...(Q.S. an-Nisa': 176)

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan saudara perempuan kandung. Maka, bagian suami adalah 1/2 (karena tidak ada anak), ibu mendapatkan bagian 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang atau lebih saudara), serta saudara perempuan kandung dapat bagian 1/2 (karena sendiri).

b. Dua Per Tiga (2/3): saudara perempuan kandung berhak mendapatkan bagian dua per tiga, dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muṣakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Sebagaimana firman Allah:

﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...﴾

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...(Q.S. an-Nisa': 176)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 orang saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seibu. Maka, bagian 4 saudara perempuan kandung adalah 2/3 (karena dua orang atau lebih), dan saudara perempuan seibu mendapat bagian 1/6 (karena sendiri, tidak ada anak dan ayah serta kakek).

c. 'Aṣabah bil Ghair (penerima sisa): saudara perempuan kandung, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan 'aṣabah bil ghairi, yang ketentuannya 2:1, dengan tiga syarat:

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.

- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١٧٦﴾

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan... (Q.S. an-Nisa': 176)

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, dan paman kandung. Maka, saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung mendapat bagian 'aṣabah bil ghair (ketentuan 2:1), paman kandung terhibab oleh saudara laki-laki kandung.

d. 'Aṣabah Ma'al Ghair (penerima sisa): saudara perempuan kandung, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan 'aṣabah ma'al ghair, dengan empat syarat:

- 1) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris muzakkar* (cabang waris laki-laki) yaitu, anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 4) Bersama dengan *far'ul waris muannas* (cabang waris perempuan) satu orang atau lebih yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأَبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.⁷⁶

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Maka, bagian istri adalah 1/8 (karena ada anak), anak perempuan dapat bagian 1/2 (karena sendiri), cucu perempuan dapat bagian 1/6 (menyempurnakan bagian 2/3) dan saudara perempuan kandung mendapat bagian 'aṣabah ma'al ghair (karena bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan).

e. Al-hajbu (terhibab): saudara perempuan kandung terhibab dengan dua keadaan, yaitu:

- 1) Ada *far'ul waris muzakkar* (cabang waris laki-laki) yaitu, anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya ke bawah.
- 2) Ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah ayah dan saudara perempuan kandung. Maka, ayah mendapat bagian 'aṣabah (karena laki-laki terdekat dengan pewaris) dan saudara perempuan kandung terhibab oleh ayah.

8. Saudara Perempuan Seayah (الأخت لأب)

Saudara perempuan seayah akan mewarisi harta peninggalan pewaris dengan enam bagian,

⁷⁶ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII... h. 18-19.

sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Setengah (1/2): saudara perempuan seayah berhak mendapatkan setengah dengan lima syarat yaitu:

- 1) Sendiri.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muḏakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 5) Tidak ada saudara perempuan kandung.

Dalil kewarisannya adalah:

﴿١٧٦﴾ ... إِنَّ أَمْوَالَهُمْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,...(Q.S. an-Nisa': 176)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan saudara perempuan seayah. Maka, suami dapat bagian 1/2 (karena tidak ada anak), ibu dapat 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang atau lebih saudara) dan saudara perempuan seayah dapat bagian 1/2.

b. Dua Per Tiga (2/3): saudara perempuan seayah berhak mendapatkan bagian dua per tiga, dengan lima syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),
- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muḏakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 5) Tidak ada saudara perempuan kandung.

Sebagaimana firman Allah:

﴿١٧٦﴾ ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...(Q.S. an-Nisa': 176)

Contoh, seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris, nenek dari ayah dan 2 orang saudara perempuan seayah. Maka, nenek dari ayah mendapat bagian 1/6 (karena tidak ada ibu dan ayah), dan 2 saudara perempuan seayah dapat bagian 2/3 (karena dua orang atau lebih dan tidak ada yang menghijabnya).

c. Seperenam (1/6): saudara perempuan seayah berhak mendapatkan bagian seperenam, dengan empat syarat yaitu:

- 1) Bersama dengan satu orang saudara perempuan kandung, penerima bagian 1/2. Bagian terbesar perempuan adalah 2/3 setelah diambil oleh seorang saudara perempuan kandung 1/2, terdapat sisa 1/6 yang diberikan untuk saudara perempuan seayah, menyempurnakan bagian 2/3.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),

- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muṣakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَتِ النِّصْفَ وَلِلْبَنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.⁷⁷

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan anak laki-laki paman kandung. Maka, saudara perempuan kandung dapat bagian 1/2 (karena sendiri, tidak ada yang menghibanya), saudara perempuan seayah dapat bagian 1/6 (menyempurnakan bagian 2/3) dan anak laki-laki paman kandung dapat bagian 'aṣabah (karena laki-laki paling dekat dengan pewaris).

d. 'Aṣabah bil Ghair (penerima sisa): saudara perempuan seayah, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan 'aṣabah bil ghairi, yang ketentuannya 2:1, dengan empat syarat:

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muṣakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 4) Tidak ada saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan... (Q.S. an-Nisa': 176).

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan suami, anak perempuan, saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Maka, bagian suami 1/4 (karena ada anak), anak perempuan 1/2 (karena sendiri), saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah dapat bagian 'aṣabah bil ghair (dengan ketentuan 2:1).

e. 'Aṣabah Ma'al Ghair (penerima sisa): saudara perempuan seayah, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan bagian 'aṣabah ma'al ghair, dengan lima syarat:

- 1) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris muṣakkar* (cabang waris laki-laki) yaitu, anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muṣakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 4) Tidak ada saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung.
- 5) Bersama dengan *far'ul waris muannaṣ* (cabang waris perempuan) satu orang atau lebih yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

⁷⁷ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII... h. 18-19.

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.⁷⁸

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan seayah. Maka, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat bagian 1/2 (karena sendiri), ibu dapat bagian 1/3 (karena tidak ada anak dan dua orang atau lebih saudara) dan saudara perempuan seayah dapat 'aṣabah ma'al ghair (karena bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki).

f. **Al-hajbu (terhijab):** saudara perempuan seayah terhijab dengan lima keadaan, yaitu:

- 1) Ada far'ul waris muzakkar (cabang waris laki-laki) yaitu, anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya ke bawah.
- 2) Ada uṣūl muzakkar (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 3) Ada saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, penerima bagian 'aṣabah bil ghair.
- 4) Ada dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, mengambil bagian (2/3)
- 5) Jika ada saudara perempuan kandung mengambil bagian 'aṣabah ma'al ghair, bersama far'ul waris muannaṣ (cabang waris perempuan) satu orang atau lebih yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, dua orang saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah. Maka, suami dapat 1/2 (karena tidak ada anak), dua saudara perempuan kandung dapat 2/3 (dua orang atau lebih) dan saudara perempuan seayah terhijab oleh saudara perempuan kandung.

9. Saudara Seibu (الإخوة لأم)

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan waris dalam tiga bagian, yaitu:

a. **Seperenam (1/6):** saudara seibu (laki-laki atau perempuan) berhak mendapatkan seperenam dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Sendiri, artinya ahli waris boleh jadi satu orang saudara laki-laki seibu, atau satu orang saudara perempuan seibu.
- 2) Tidak ada far'ul waris (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada uṣūl muzakkar (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah dan kakek seterusnya ke atas.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ... ﴿١٢﴾

jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta... (Q.S. an-Nisa': 12)

⁷⁸ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII... h. 18-19.

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, nenek dari ibu, dan saudara perempuan seibu. Maka, istri dapat bagian 1/4 (karena tidak ada anak), nenek dari ibu dapat 1/6 (karena tidak ada ibu) dan saudara perempuan seibu dapat 1/6 (karena sendiri dan tidak ada yang menghijabnya).

b. Sepertiga (1/3): saudara seibu (laki-laki atau perempuan) berhak mendapatkan sepertiga dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih, artinya ahli waris boleh jadi dua saudara laki-laki seibu, atau dua orang saudara perempuan seibu atau mereka bersama-sama (laki-laki dan perempuan).
- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muṣakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah dan kakek seterusnya ke atas.

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... ﴿١٢﴾

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.... (Q.S. an-Nisa': 12).

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan 3 orang saudara laki-laki seibu. Maka, saudara kandung dapat bagian 1/2 (karena sendiri, tidak ada yang menghijabnya), saudara perempuan seayah dapat bagian 1/6 (karena menyempurnakan 2/3) dan 3 saudara laki-laki seibu dapat bagian 1/3 (karena dua orang atau lebih tidak ada yang menghijabnya).

c. Al-hajbu (terhijab): saudara seibu (laki-laki atau perempuan) terhijab oleh dua keadaan:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 2) Jika ada *uṣūl muṣakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah dan kakek seterusnya ke atas. Dalilnya adalah Allah menjadikan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan dengan jalur *kalalah*, dimana menurut jumhur ulama *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan ayah, sementara anak mencakup di dalamnya laki-laki dan perempuan seterusnya ke bawah. Begitu juga ayah mencakup di dalamnya ayah dan kakek seterusnya ke atas.⁷⁹

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami, kakek dan 5 saudara laki-laki seibu. Maka, bagian suami adalah 1/2 (karena tidak ada anak), kakek dapat bagian 'aṣabah (karena laki-laki terdekat dengan pewaris), sedangkan 5 saudara laki-laki seibu terhijab oleh kakek.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṣ, 1409), Jilid XII, Jilid V
Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX
Komite Fakutas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010)
Tahqīq Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Dār al-Mā'rif, t.th.), Jilid XXXVII

⁷⁹ Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughnī*, Jilid IX..., h. 7

MATERI 4. MEWARISI SECARA ‘AŞABAH DAN KONSEP HIJAB (AL-ĤAJB) DALAM WARIS ISLAM

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. Definisi ‘Aşabah.

Secara etimologi, ‘*ashabah* adalah laki-laki dari kerabat pewaris, yang nisabnya kepada pewaris tidak ada perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris seapak.⁸⁰ Sedangkan ‘*aşabah* menurut terminologi adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil, dari segi jika sendiri mengambil seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima *aşhabul furud*, mengambil sisa setelah diambil oleh *aşhabul furud*, jika seluruh harta telah diambil oleh *aşhabul furud*, maka penerima ‘*aşabah* tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan.⁸¹

B. Pembagian ‘Aşabah.

‘*aşabah* terbagi kepada dua, yaitu:

1. ‘**Aşabah Nasabiyah**, yaitu ‘*aşabah* yang ditetapkan karena sebab nasab (keturunan), seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dan qarabah (kekerabatan), seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah.
2. ‘**Aşabah Sababiyah**, yaitu ‘*aşabah* yang terjadi karena sebab memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut para ulama, pembagian pertama ‘*aşabah nasabiyah* lebih didahulukan dari pada ‘*aşabah sababiyah*, karena nasab (keturunan) lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan *sabab* (sebab).⁸²

❖ Hukum ‘Aşabah Nasabiyah.

‘*Aşabah nasabiyah*, terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut: 1) ‘*aşabah binnafsi*, 2) ‘*aşabah bil ghair*, dan 3) ‘*aşabah ma’al ghair*. Semua macam pembagian ini, memiliki hukum dan masalah-masalah khusus tersendiri, yang akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) ‘**Aşabah Binnafsi**, setiap laki-laki yang sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, yang tidak diselingi oleh perempuan.

a. **Jumlah penerima *aşabah bin nafsi***; secara tertib⁸³ berjumlah 12 orang, yaitu:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi di bawahnya.
3. Ayah.
4. Kakek serta generasi di atasnya.
5. Saudara kandung
6. Saudara seayah.
7. Anak laki-laki saudara kandung.
8. Anak laki-laki saudara seayah dan generasi di bawahnya
9. Paman kandung.
10. Paman seayah.
11. Anak laki-laki paman kandung.

⁸⁰ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 204-205

⁸¹ Kecuali anak laki-laki dan ayah mereka tidak akan pernah luput dari penerimaan harta. Lihat Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773.

⁸² Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773-777.

⁸³ Maksudnya adalah sesuai kedekatannya dengan pewaris, sehingga berlaku ketentuan yang dekat menghibab yang jauh, baik secara hijab hirman atau nuqsan. Karena tidak ada dua penerima ‘*aşabah* dalam satu kasus kewarisan.

12. Anak laki-laki paman seayah dan generasi di bawahnya.⁸⁴

b. Dalil ‘Aṣabah Binnaḥsi.

1. Surah an-Nisa’ ayat 11

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... ﴿١١﴾

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;(Q.S.An-Nisa’: 11)

2. Surah an-Nisa’ ayat 176

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ هَا وَلَدٌ ... ﴿١٧٦﴾

dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; (Q.S. an-Nisa’: 176)

3. Hadis Abdullah bin ‘Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. " (HR. Bukhari)⁸⁵

c. Hukum-hukum ‘Aṣabah Binnaḥsi.

‘Aṣabah binnaḥsi, memiliki tiga hukum, yaitu:⁸⁶

1. Jika hanya sendiri, mengambil seluruh harta. Contohnya yang ditinggalkan hanya seorang anak laki-laki, maka seluruh harta waris diberikan untuknya.
2. Mengambil sisa harta setelah diambil oleh aṣhabul furuḍ (penerima bagian tertentu), contohnya ahli waris yang ditinggalkan anak ayah dan ibu, maka ibu dapat bagian 1/3 sementara ayah mengambil 2/3 sebagai sisa dari bagian yang telah diambil oleh ibu.
3. Tidak mendapatkan warisan apapun karena seluruhnya telah diambil oleh aṣhabul furuḍ, contohnya ditinggalkan suami, saudara perempuan kandung dan paman kandung, maka bagian suami 1/2, saudara perempuan kandung 1/2, paman tidak dapat apa-apa, karena bagian seluruhnya telah diambil oleh aṣhabul furuḍ

d. Jalur ‘Aṣabah Binnaḥsi.

Menurut Imam Hanafi, ada lima jalur ‘aṣabah binnaḥsi, yaitu: *al-bunuwwah* (jalur hubungan anak), *al-ubuwwah* (jalur hubungan orang tua), *al-ukhuwwah* (jalur hubungan saudara), *al-‘umumah* (jalur hubungan paman) dan *al-wala’* (jalur hubungan karena memerdekakan budak).⁸⁷ Sementara Abu Yusuf dan Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa ada enam jalur, yaitu *al-bunuwwah*, *al-ubuwwah*, *al-jududah* (jalur hubungan kakek) bersama *al-ukhuwwah*, *banu al-ukhuwwah* (jalur anak-anak saudara), ‘*umumah*, serta *al-wala’*.⁸⁸ Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah ada tujuh, yaitu *al-bunuwwah*, *al-ubuwwah*, *al-jududah* dan *al-ukhuwwah*, *banu al-ukhuwwah*, *al-‘umumah*, *al-wala’* serta baitul mal.⁸⁹

Jalur-jalur ‘aṣabah binnaḥsi ini penting untuk diketahui, karena didasarkan pada urutan dan tingkatan pada masing-masing jalur ahli waris, sehingga jalur *al-bunuwwah* lebih didahulukan untuk mendapatkan ‘aṣabah daripada jalur *al-ubuwwah*, jalur *al-ukhuwwah* lebih

⁸⁴ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773-774.

⁸⁵ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāiḍ, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadīṣ 6732, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII,... h. 12

⁸⁶ Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 208-209.

⁸⁷ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773-775

⁸⁸ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773-775

⁸⁹ Jalal al-Dīn ‘Abdullah bin Najmu bin Syās al-Mālikī, *Aqd al-Jawāhir al-Šaminah*, Jilid III,..., h. 436-437

didahulukan dari *al-ukhuwwah*, jalur *al-ukhuwwah* lebih didahulukan dari jalur *al-'umumah*, jalur *al-'umumah* lebih didahulukan daripada jalur *al-wala'*. Begitu juga, jalur *al-wala'* lebih didahulukan dari jalur baitul mal.

e. Hukum berkumpulnya dua 'Aṣabah atau lebih dalam Satu Masalah.

Apabila dalam sebuah kasus kewarisan berkumpul beberapa orang penerima 'aṣabah, maka untuk memutuskan siapa yang lebih berhak diantara mereka adalah sebagai berikut:

Pertama, melihat jalur (*jihah*) kedekatannya dengan pewaris. Jika dalam kasus di dalamnya ada penerima 'aṣabah dari jalur *al-bunuwwah* (anak) dan jalur *al-ubuwwah* (ayah), maka didahulukan jalur *al-bunuwwah* (anak) daripada *al-ubuwwah*. Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan anak laki-laki dan ayah, maka anak laki-laki mendapat 'aṣabah *binnaḥsi*, sementara ayah mendapat $\frac{1}{6}$. Begitu juga ketika yang ditinggalkan oleh pewaris ayah dan saudara laki-laki kandung, dalam hal ini, ayah merupakan jalur (*al-ubuwwah*) didahulukan dari pada saudara laki-laki kandung dari jalur (*al-ukhuwwah*), berarti ayah mendapatkan 'aṣabah *binnaḥsi*, sedangkan saudara laki-laki kandung terhibab oleh ayah.

Kedua, melihat derajat (*darajah*) kedekatannya dengan pewaris. Sehingga siapa saja yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris, didahulukan daripada yang lebih jauh. Misalnya dalam sebuah kasus, terdapat ahli waris anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dalam hal ini anak laki-laki derajatnya lebih dekat dengan pewaris ketimbang cucu laki-laki dari anak laki-laki, sehingga anak laki-laki dapat bagian 'aṣabah *binnaḥsi*, sementara cucu laki-laki dari anak laki-laki terhibab oleh anak laki-laki. Begitu juga ayah lebih didahulukan daripada kakek, saudara laki-laki kandung didahulukan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah didahulukan dari anak laki-laki saudara seayah, paman kandung didahulukan dari paman seayah.

Ketiga, melihat kedekatan hubungan kekerabatan (*quwwatil qarabah*) dengan pewaris. Misalnya, saudara laki-laki kandung lebih didahulukan dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung lebih didahulukan dari anak laki-laki saudara seayah, paman kandung lebih didahulukan dari paman seayah, anak laki-laki paman kandung lebih didahulukan daripada anak laki-laki paman seayah.

Inilah tiga cara dalam memutuskan siapa yang lebih berhak mendapatkan 'aṣabah jika terdapat beberapa penerima 'aṣabah dalam satu kasus kewarisan.

2) 'Aṣabah Bil Ghair, yaitu setiap perempuan yang memiliki bagian tertentu (jika sendiri mendapat bagian $\frac{1}{2}$, dua orang atau lebih mendapat bagian $\frac{2}{3}$), apabila mereka bersama dengan laki-laki yang sederajat dengannya/saudara kandungnya. Dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 dengan perempuan.

a. Jumlah ahli waris penerima 'aṣabah bil Ghair, ada empat kelompok, yaitu:

1. Satu orang anak perempuan atau lebih, jika bersama dengan saudara kandungnya yang laki-laki, yaitu anak laki-laki. Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah 2 anak perempuan dan anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 'aṣabah *bil ghair*, dimana bagian laki-laki 2:1 dengan perempuan.
2. Satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki (saudara kandungnya)
3. Satu orang saudara perempuan kandung atau lebih jika bersama dengan saudara laki-laki kandung.
4. Satu orang saudara perempuan seayah atau lebih jika bersama dengan saudara laki-laki seayah.

b. Dalil 'Aṣabah Bil Ghair

1. Surah an-Nisa' ayat 11

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (Q.S. An-Nisa': 11).

2. Surah an-Nisa' ayat 176

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. ... (Q.S. an-Nisa': 176)

c. Hukum-hukum Mengenai 'Aṣabah Bil Ghair.

'Aṣabah bil Ghair, memiliki dua hukum yaitu:

1. Mengambil sisa harta setelah diambil oleh *aṣhabul furud* (penerima bagian tertentu), contohnya ahli waris yang ditinggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan ibu. Maka, ibu mendapatkan bagian 1/6, sementara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian 'aṣabah bil ghair, dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 dari bagian perempuan.
 2. Tidak mendapatkan warisan apapun karena seluruhnya telah diambil oleh *aṣhabul furudh*, contohnya ditinggalkan suami, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah, maka bagian suami 1/2, saudara perempuan kandung 1/2, saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah sebagai penerima 'aṣabah bil ghair, tidak mendapatkan apa-apa, karena bagian seluruhnya telah diambil oleh *aṣhabul furud*.
- 3) 'Aṣabah Ma'al Ghair, yaitu setiap saudara perempuan yang memiliki bagian tertentu (jika sendiri 1/2, dan dua orang atau lebih 2/3), apabila bersama dengan *far'ul waris muannaṣ* (cabang waris perempuan), anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

a. Jumlah ahli waris penerima 'aṣabah ma'al ghair, ada dua orang, yaitu:

1. Satu orang saudara perempuan kandung atau lebih, jika bersama dengan *far'ul waris muannaṣ* (cabang waris perempuan), anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Contoh ahli waris yang ditinggal adalah suami, anak perempuan, nenek dan saudara perempuan kandung. Maka, bagian suami 1/4, anak perempuan 1/2, nenek 1/6 dan saudara perempuan kandung mendapatkan 'aṣabah ma'al ghair.
2. Satu orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika bersama dengan *far'ul waris muannaṣ* (cabang waris perempuan), anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Contohnya, jika ditinggalkan ahli waris, istri, anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan seayah. Maka, bagian istri 1/8, anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6, dan saudara perempuan seayah mendapatkan 'aṣabah ma'al ghair.

b. Dalil 'Aṣabah Ma'al Ghair

Hadiṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِنْتِ الْنِصْفُ وَلِابْنَتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

*Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.*⁹⁰

⁹⁰ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farā'id, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadiṣ 6736, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII... h. 18-19.

C. Pengertian *Hijab*.

Hijab secara etimologi adalah *al-man'u* (terhalang), seperti firman Allah: “*Sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. (Q.S.Al-Muṭaffifin:15)*”, artinya mereka terhalang untuk melihat Allah pada hari akhirat kelak. Jadi, *hijab* secara bahasa adalah mencegah atau menutupi.⁹¹

Sedangkan *hijab* menurut terminologi adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh atau sebagian.⁹²

D. Macam-macam *Hijab*

Hijab terbagi kepada dua macam yaitu:

1. ***Hajbu Auṣāf*** (hijab karena sifat), yaitu menghalangi orang yang mempunyai sebab untuk mendapatkan warisan secara total, karena melakukan sesuatu perbuatan yang menjadi penghalang mendapat warisan, seperti membunuh pewaris dan murtad. Hal ini, berlaku untuk seluruh ahli waris, laki-laki atau perempuan, baik *aṣhabul furūd* atau *‘aṣabah*. Dan jika seseorang masuk dalam kategori ini, tentu “*keberadaannya bagaikan tiada, tidak mendapat warisan dan tidak bisa membawa dampak bagi ahli waris lainnya dalam kewarisan*”.⁹³
2. ***Hajbu Asykhāṣī*** (hijab karena ada orang lain), yaitu menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan secara total atau dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.⁹⁴ Hijab ini dibagi kepada dua:
 - a. ***Hijab Nuqṣan***, yaitu menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya yang sempurna. Seperti, suami seharusnya mendapatkan bagian terbanyak 1/2, tapi karena mempunyai keturunan (anak), maka menjadi 1/4, istri yang seharusnya mendapatkan bagian 1/4 menjadi 1/8, karena pewaris mempunyai keturunan (anak).⁹⁵
Hijab nuqṣan dibagi dua, yaitu:⁹⁶
 - 1) *Hijab nuqṣan* karena sebab *intiḡāl* (perpindahan) dari satu bagian tetap menjadi bagian tetap lainnya, karena ada ahli waris lain. Yaitu terjadi pada empat keadaan:
 - a) Perpindahan dari satu *farḍ* (bagian tetap) menjadi *farḍ* (bagian tetap) lainnya yang lebih sedikit. Seperti perpindahan bagian suami dari 1/2 menjadi 1/4, karena meninggalkan keturunan (anak).
 - b) Perpindahan dari *‘aṣabah* menjadi *‘aṣabah* yang lebih sedikit. Seperti perpindahan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dari *‘aṣabah ma’al ghair* menjadi *‘aṣabah bil ghair*.
 - c) Perpindahan dari *farḍ* (bagian tetap) menjadi *‘aṣabah* yang lebih sedikit. Seperti, perpindahan para ahli waris perempuan yang menerima bagian 1/2 menjadi *‘aṣabah bil ghair*.
 - d) Perpindahan dari *‘aṣabah* menjadi *farḍ* (bagian tetap) yang lebih sedikit. Seperti, perpindahan ayah dan kakek dari *‘aṣabah* menjadi *farḍ* (bagian tetap), ketika pewaris meninggalkan keturunan.
 - 2) *Hijab Nuqṣan* karena sebab *izdiḡām* (terlalu banyak). Yaitu terlalu banyak ahli waris penerima *farḍ* (bagian tetap), atau penerima *‘aṣabah*, hal ini terjadi dalam tiga keadaan:

⁹¹ Ibnu Manẓūr al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-Islāmī, 1419), Jilid III, h. 50-51

⁹² Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 780

⁹³ Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughnī*, Jilid IX, h. 175-176

⁹⁴ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 779-780

⁹⁵ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 227.

⁹⁶ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 228-229.

- a) Terlalu banyak pada *fard* (bagian tetap). Seperti terlalu banyak dua orang anak perempuan pada bagian 2/3, terlalu banyak istri pada bagian 1/4 dan 1/8.
 - b) Terlalu banyak pada *'asabah*. Seperti, terlalu banyak penerima *'asabah* terhadap harta waris atau terhadap harta yang tersisa dari *fard* (bagian tetap).
 - c) Terlalu banyak sebab adanya *'aul*. Seperti terlalu banyak *aṣḥabul furūd* dalam pokok masalah yang dimasuki oleh masalah *'aul*. Karnanya, bagian tetap yang masing-masing mereka dapatkan menjadi berkurang.
- b. **Hijab Hirman**, yaitu menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya secara keseluruhan, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Seperti, kakek yang terhalang karena adanya ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki, dan lain sebagainya.⁹⁷

Para ahli waris dalam *hijab hirman* ada dua kelompok, yaitu:

Pertama, ahli waris yang tidak pernah terhalang secara *hijab hirman*, ahli waris ini ada 6 (enam) orang yaitu, tiga orang dari pihak laki-laki, mereka adalah suami, anak laki-laki dan ayah. Dan tiga orang dari pihak perempuan, yaitu istri, anak perempuan dan ibu. Menurut para ulama mereka tidak *terhijab hirman* karena hubungan mereka dengan pewaris langsung melalui *nasab* atau nikah, bukan dari keturunan orang lain.⁹⁸

Kedua, ahli waris yang terhalang secara *hijab hirman*, berjumlah 19 (sembilan belas) orang, terdiri dari ahli waris laki-laki 12 orang dan dari ahli waris perempuan 9 orang, yaitu sebagai berikut:⁹⁹

a) Dua belas ahli waris yang *terhijab hirman* adalah:

1. **Cucu laki-laki dari anak laki-laki:** terhalang oleh anak laki-laki, atau oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang kedudukannya lebih dekat kepada pewaris.
2. **Kakek dan generasi di atasnya:** terhalang oleh ayah.
3. **Saudara laki-laki kandung:** terhalang oleh tiga orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah.
4. **Saudara laki-laki seayah:** terhalang oleh empat orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara kandung.
5. **Saudara laki-laki seibu:** terhalang oleh empat orang, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah dan kakek.
6. **Anak laki-laki saudara kandung:** terhalang oleh enam orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah.
7. **Anak laki-laki saudara seayah:** terhalang oleh tujuh orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki saudara kandung.
8. **Paman kandung:** terhalang oleh delapan orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung dan anak laki-laki saudara seayah.
9. **Paman seayah:** terhalang oleh sembilan orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah dan paman kandung.

⁹⁷ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 229.

⁹⁸ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 229.

⁹⁹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 230

10. Anak laki-laki paman kandung: terhalang oleh sepuluh orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung dan paman seayah.

11. Anak laki-laki paman seayah: terhalang oleh sebelas orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki paman kandung.

12. Al-mu'tiq (pemerdeka budak laki-laki): terhalang oleh '*aṣabah nasab* menurut *ijma*' para ulama.

b) Tujuh ahli waris perempuan yang *terhijab hirman* adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Cucu perempuan dari anak laki-laki: terhalang oleh anak laki-laki, dua orang anak perempuan atau lebih.

2. Nenek dari ibu: terhalang oleh ibu.

3. Nenek dari ayah: terhalang oleh ibu dan ayah.

4. Saudara perempuan kandung: terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki dan ayah.

5. Saudara perempuan seayah: terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung ('*ashabah bil ghairi*') dan dua orang atau lebih saudara perempuan kandung.

6. Saudara perempuan seibu: terhalang oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, ayah dan kakek.

7. Mu'tiqah (pemerdeka budak perempuan): terhalang oleh '*aṣabah nasab*, karena nasab lebih kuat dari *wala*'.

E. Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam *Hijab Hirman*.¹⁰¹

Terdapat lima kaidah yang berlaku dalam *hijab hirman*, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang berhubungan dengan pewaris karena adanya perantara, penghalangnya adalah perantara itu, seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki, seperti kakek terhijab oleh ayah.

2. Setiap orang yang jalur keturunannya lebih dekat, dapat menghalangi yang jalurnya lebih jauh. Seperti, ayah menghalangi saudara laki-laki atau saudara perempuan, saudara laki-laki dan perempuan menghalangi paman.

3. Setiap orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris, menghalangi yang lebih jauh. Seperti anak laki-laki dapat menghalangi cucu laki-laki, ayah dapat menghalangi kakek.

4. Orang yang paling kuat kekerabatannya dapat menghalangi yang lemah. Seperti, saudara kandung menghalangi saudara seayah, paman kandung menghalangi paman seayah.

5. Tidak ada yang menghalangi *uṣul* kecuali *uṣul* pula, tidak ada yang menghalangi *furu'* kecuali *furu'* pula. Dan *hawasyi* (para saudara pewaris) dihalangi oleh *uṣul*, *furu'* dan *hawasyi*. Seperti kakek tidak terhijab kecuali oleh ayah, cucu laki-laki tidak terhijab kecuali oleh anak laki-laki, saudara kandung terhijab oleh anak laki-laki dan ayah.

¹⁰⁰ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, 231-232

¹⁰¹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, 233

Daftar Pustaka

- Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṣ, 1409), Jilid XII, Jilid V
- Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṣ al-Islāmī, 1419), Jilid III
- Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX
- Jalal al-Dīn ‘Abdullah bin Najmu bin Syās al-Mālikī, *‘Aqd al-Jawāhir al-Šaminah*, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1415), Jilid I, III
- Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010)
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III

MATERI 5. AKUNTANSI KEWARISAN

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. Asal Masalah (*aṣl al-mas'alah*), metode dan patokannya.

1. Pengertian Asal Masalah (*aṣl al-mas'alah*)

Asal masalah adalah bilangan yang paling kecil atau kelipatan persekutuan terkecil, yang bisa diambil darinya bagian para ahli waris secara benar tanpa ada bilangan pecahan, dan besarnya bagian itu berbeda sesuai dengan perbedaan para ahli waris yang ada.¹⁰²

2. Asal masalah dari *farā'idh* (bagian tetap).

Asal masalah yang telah disepakati oleh para ulama *farā'idh* ada tujuh. Yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.¹⁰³ Asal masalah ini berlaku jika dalam satu kasus terdapat satu orang penerima bagian tetap (*aṣhabul furūd*), atau lebih. Berbeda halnya jika yang ditinggalkan adalah penerima bagian *'aṣabah*, maka asal masalahnya tidak ada batasan, karena mengikuti jumlah mereka (*'adadur ruus*), dengan ketentuan perempuan satu bagian dan laki-laki 2 bagian.

3. Metode dalam menentukan asal masalah.

Terdapat dua metode untuk bisa mendapatkan asal masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Metode dengan melihat kepada ahli waris, baik itu penerima *'aṣabah* atau bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan bagian mereka masing-masing, sebagai berikut:

Kaidah pertama, masalah yang berhubungan dengan penerima bagian *'aṣabah* dan asal masalahnya masing-masing.

- a) Jika penerima *'aṣabah* sendiri saja, maka tidak perlu lagi mengeluarkan asal masalah, karena tidak ada orang lain yang bersamanya yang mengambil harta waris. Contohnya jika ditinggalkan ayah maka harta peninggalan semua untuknya dan tidak perlu mencari asal masalah lagi.
- b) Jika terdapat banyak penerima *'aṣabah*, dan mereka dari kelompok laki-laki, maka asal masalahnya adalah dari jumlah mereka (*'adadur ruus*). Contohnya jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, 5 orang anak laki-laki, atau 5 saudara laki-laki, maka asal masalahnya sudah jelas, yaitu 5 sesuai jumlahnya. Dimana setiap mereka mendapatkan 1 bagian.
- c) Jika terdapat banyak penerima *'aṣabah*, dan mereka dari kelompok laki-laki dan perempuan, penerima *'aṣabah bil ghair*. Maka asal masalahnya adalah dari jumlah mereka (*'adadur ruus*), dengan perhitungan laki-laki 2 bagian, dan perempuan 1 bagian. Sesuai dengan kaidah laki-laki 2:1 dengan perempuan. Contohnya jika ditinggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, asal masalahnya adalah 3, dimana anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Contoh lain, seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris 1 orang saudara laki-laki kandung dan 4 orang saudara perempuan kandung, maka asal masalahnya adalah 6, dimana bagian 1 orang saudara laki-laki kandung adalah 2 dan 4 saudara perempuan kandung bagiannya adalah 4, setiap 1 orang dari mereka menerima 1 bagian, berlaku ketentuan 2:1.

Kaidah kedua, masalah yang berhubungan dengan penerima bagian tetap (*aṣhabul furūd*).

- a) Jika penerima bagian tetap (*aṣhabul furūd*) sendiri saja. Maka asal masalahnya adalah dari bagian tetapnya tersebut, dengan melihat *maqām* (penyebut) terkecil dari bagian tetap tadi.

¹⁰² Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 242

¹⁰³ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 803-805.

Kemudian perhatikan, jika penerima bagian tetap hanya sendiri tanpa ada *'aṣabah*, maka penyebut terkecil dari bagian tetap dijadikan sebagai asal masalah, sementara sisanya nanti juga menjadi haknya melalui jalur *rad*¹⁰⁴. Contohnya jika yang ditinggalkan adalah ibu, maka bagiannya $\frac{1}{3}$, asal masalah adalah 3 (bilangan terkecil dari penyebut bagian tetapnya) dan sisa $\frac{2}{3}$ bagian lagi juga di berikan untuk ibu karena merupakan penerima *rad* (sisa). Artinya ibu mengambil bagian tetap dan juga *rad* (sisa).

- b) Jika penerima bagian tetap (*aṣhabul furūd*) bersama dengan penerima *'aṣabah*, maka asal masalah diambil dari *maqām* (penyebut) terkecil dari bagian tetap dan sisanya diberikan kepada penerima *'aṣabah*. Contohnya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, istri dan anak laki-laki, maka bagian istri adalah $\frac{1}{8}$, anak laki-laki mendapatkan *'aṣabah binnaḥsi*. Asal masalahnya 8 (dari penyebut terkecil bagian tetap), sehingga ibu mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya $\frac{7}{8}$ diberikan untuk anak laki-laki.

Kaidah ketiga, masalah yang berhubungan dengan banyaknya penerima bagian tetap (*aṣhabul furūd*), baik di dalamnya terdapat penerima *'aṣabah* atau tidak. Penyelesaiannya adalah dengan melihat jenis bagian tetap, jenis bagian tetap terbagi kepada dua kelompok yaitu:

- 1) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$
- 2) $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

Untuk mengetahui asal masalah dari dua kelompok tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Jika penerima bagian tetap berasal dari satu kelompok, baik kelompok pertama ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$) atau kelompok kedua ($\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$), maka asal masalahnya adalah penyebut (*maqām*) terbesar dari kelompok tersebut. Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan, istri, dan saudara perempuan kandung. Maka, anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$, dan saudara perempuan mendapatkan *'aṣabah maal ghair*. Jadi asal masalahnya adalah 8. Contoh lain jika yang ditinggalkan adalah ibu, 2 saudara perempuan kandung, dan 2 saudara perempuan seibu. Maka, bagian ibu $\frac{1}{6}$, 2 saudara perempuan kandung $\frac{2}{3}$, dan 2 saudara perempuan seibu $\frac{1}{3}$. Berarti asal masalahnya adalah 6.
- 2) Jika penerima bagian tetap bercampur antara dua jenis kelompok tadi, maka penentuan asal masalahnya adalah sebagai berikut:

Patokan pertama, jika bagian $\frac{1}{2}$ dari kelompok pertama, berjumpa dengan kelompok kedua ($\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$), sebagian atau seluruhnya, maka asal masalah adalah 6. Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan 2 saudara perempuan seibu, maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$, dan 2 saudara perempuan seibu $\frac{1}{3}$. Jadi, asal masalahnya adalah 6.

Patokan kedua, jika bagian $\frac{1}{4}$ dari kelompok pertama, berjumpa dengan kelompok kedua ($\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$), sebagian atau seluruhnya, maka asal masalah adalah 12. Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, ibu, dan 2 saudara perempuan seayah. Maka istri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{6}$ dan 2 saudara perempuan seayah $\frac{2}{3}$. Jadi, asal masalahnya adalah 12.

Patokan ketiga, jika bagian $\frac{1}{8}$ dari kelompok pertama, berjumpa dengan kelompok kedua ($\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$), sebagian atau seluruhnya, maka asal masalah adalah 24. Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, 2 cucu perempuan, ibu dan saudara laki-laki kandung.

¹⁰⁴ Yaitu suatu masalah ketika terdapat kelebihan asal masalah/harta, maka sisa tersebut diberikan untuk ahli waris penerima *rad*.

Maka, istri mendapat $\frac{1}{8}$, 2 cucu perempuan $\frac{2}{3}$, ibu $\frac{1}{6}$ dan saudara laki-laki kandung 'aṣabah binnaḥsi. Jadi, asal masalahnya adalah 24.

2. Metode kedua yang bisa digunakan untuk mengetahui asal masalah adalah dengan cara membandingkan *maqāmāt* (penyebut-penyebut) yang ada dalam bagian tetap. Terdapat empat pola perbandingan yang digunakan yaitu *al-tamāṣṣul* (*al-mumāṣalah*), *al-tawāfuq* (*al-muwāfaqah*), *al-tadākhul* (*al-mudākhalah*) dan *al-tabāyun* (*al-mubāyanah*). Lengkapnya akan diuraikan satu persatu dari keempat pola tersebut:

- a) ***Al-tamāṣṣul*** yaitu bilangan-bilangan yang sama dalam nilai. Seperti (2,2), (3,3), (4,4), (6,6) dan sebagainya. Contoh kasus seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ibu, saudara seibu dan saudara seayah, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$, saudara seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan saudara seayah mendapatkan 'aṣabah binnaḥsi. Asal masalah adalah 6 (*al-tamāṣṣul*).
- b) ***Al-tabāyun***, yaitu bilangan-bilangan yang berbeda dan tidak bisa disatukan, maka harus dikalikan antara keduanya dan hasilnya menjadi asal masalah. Seperti (2,3), (3,4), (3,8) dan sebagainya. Contoh kasus jika ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, istri dan paman kandung. Maka ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, istri $\frac{1}{4}$, dan paman kandung mengambil 'aṣabah binnaḥsi. Asal masalahnya adalah $3 \times 4 = 12$.
- c) ***Al-tawāfuq***, yaitu bilangan-bilangan yang saling menyesuaikan, dimana penyebutnya bisa menerima angka lain dengan hasil pembagian yang genap, asal masalahnya adalah hasil pembagian dengan angka tersebut kemudian dikalikan dengan bilangan penyebut. Contohnya, jika dalam satu kasus ada bagian $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{6}$, dua bilangan penyebut itu (8 dan 6), bisa dibagi dengan satu angka yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah bilangan tidak tersisa ($8:2=4$) dan ($6:2=3$), kemudian hasilnya (4 dan 3) dikalikan penyebut (*maqām*) bilangan pecahan lawannya ($4 \times 6 = 24$) dan ($3 \times 8 = 24$). Dengan demikian asal masalah adalah 24.
- d) ***Al-tadākhul***, yaitu bilangan-bilangan yang lebih besar bisa dibagi oleh bilangan yang lebih kecil, dengan hasil pembagian yang tidak menyisakan bilangan pecah. Contohnya, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan dan saudara kandung. Maka anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan saudara kandung menerima bagian 'aṣabah binnaḥsi. Jika diperhatikan penyebut bilangan tersebut yaitu 2 masuk ke 6, karena 2 merupakan bagian dari 6. Sehingga ini merupakan *al-tadākhul* dan asal masalahnya dari bilangan yang paling besar yaitu 6.

Inilah dua metode yang bisa kita gunakan untuk mengetahui asal masalah. Boleh digunakan metode pertama yaitu dengan melihat kepada ahli waris, baik itu penerima 'aṣabah atau bagian tetap (*aṣḥābul furūd*), dan boleh juga dengan metode kedua dengan cara membandingkan *maqāmāt* (penyebut-penyebut) yang ada dalam bagian tetap.

B. Tashīḥ Mas'alah dalam waris.

1. Pengertian Tashīḥ Mas'alah.

Tashīḥ mas'alah adalah mencari bilangan asal masalah terkecil yang dapat menghasilkan bagian-bagian ahli waris tanpa bilangan pecah.

2. Metode menyelesaikan inkisār (bilangan pecah) dalam kasus waris.

Dalam pembagian waris, harus dihindari agar tidak terjadi pembagian *inkisār* (bilangan pecah) terhadap ahli waris. Hal ini sangat penting karena untuk memberikan kepastian bagian yang diterima secara benar. Terdapat beberapa keadaan yang menjadikan bagian *saham* ahli waris tidak bisa dibagi secara genap, akan tetapi menghasilkan bilangan pecah. Yaitu sebagai berikut:

- a. **Taṣḥīh** bilangan pecah yang terjadi pada satu kelompok penerima waris. Maksudnya adalah dalam sebuah kasus bagian *saham*nya tidak bisa dibagi genap untuk satu kelompok ahli waris tersebut, karena pembagiannya menghasilkan bilangan pecah. Maka untuk menyelesaikan kasus ini dengan metode taṣḥīh harus mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

- 1) Lihatlah berapa banyak jumlah mereka (*'adadur ruus*) dan berapa *saham* (bagian) yang mereka terima, kemudian bandingkan keduanya apakah masuk ke dalam *tabāyun*, *tawāfuq*, atau *tadākhul*.
- 2) Jika masuk dalam *tabāyun*, berarti *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka (*'adadur ruus*), jika masuk kedalam *tawāfuq*, maka *juzu' saham*nya adalah hasil bagi jumlah mereka (*'adadur ruus*) dengan persekutuan pembagi yang sama. atau jika masuk dalam *tadākhul*, berarti *juzu' saham*nya adalah hasil bagi dari jumlah mereka (*'adadur ruus*) dibagi oleh jumlah *saham*nya.
- 3) Mengambil *juzu' saham* dari yang telah ditetapkan tadi, dan mengalikannya dengan asal masalah, atau meng'aulkannya jika dalam kasus *'aul*.
- 4) Mengalikan *juzu' saham* yang telah ditetapkan tadi dengan *saham* (bagian) seluruh ahli waris dalam kasus tersebut.

Contoh pertama, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan istri, anak perempuan, anak laki-laki. Bagian mereka masing-masing adalah:

Ahli Waris	Bagian	8×3	24	
Istri	1/8	1	3	
Anak laki-laki	Aṣabah bil ghair	7	21	4
Anak Perempuan				7

Keterangan:

1. Jumlah anak laki-laki dan perempuan dalam kasus ini adalah 3 (2 laki-laki, 1 perempuan dari kaidah 2:1) dan bagian *saham* mereka adalah 7. Dimana 7 tidak habis dibagi dengan 3 (menghasilkan bilangan pecah), maka perlu di *taṣḥīh*.
2. 3 dan 7 merupakan bentuk *tabāyun*. Maka *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka (*'adadur ruus*) yaitu 3.
3. Kemudian *juzu' saham* 3 dikalikan dengan asal masalah 8 hasilnya adalah 24 (asal masalah baru).
4. *Juzu' saham* 3 dikalikan dengan semua bagian ahli waris, yaitu $3 \times 1 = 3$ untuk bagian istri, $3 \times 7 = 21$ untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dapat 14 bagian, sementara anak perempuan dapat 7 bagian. Sesuai dengan kaidah 2:1.

Contoh kedua, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, 4 orang istri, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seibu dan ibu. Bagian mereka adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	12	3×4	52
4 istri	1/4	3	3	12
Saudara Pr.kandung	1/2	6	6	24
Saudara Lk. Seibu	1/6	2	2	8
Ibu	1/6	2	2	8

Keterangan:

1. Jumlah istri dalam kasus ini adalah 4 dan bagian *saham* mereka adalah 3. Dimana 3 tidak habis dibagi dengan 4 (menghasilkan bilangan pecah), maka perlu di *taṣḥīh*.

2. 4 dan 3 merupakan bentuk *tabāyun*. Maka *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka ('*adadur ruus*) yaitu 4.
3. Kemudian *juzu' saham* 4 dikalikan dengan asal masalah setelah di'aulkan 13 (karena ini merupakan kasus '*aul*) hasilnya adalah 52 (asal masalah baru).
4. *Juzu' saham* 4 dikalikan dengan semua bagian ahli waris, yaitu $4 \times 3 = 12$ untuk bagian 4 orang istri, setiap satu orang diantara mereka mendapatkan 3 bagian, $4 \times 6 = 24$ untuk bagian saudara perempuan kandung, $4 \times 2 = 8$ untuk bagian saudara laki-laki seibu dan $4 \times 2 = 8$ untuk bagian ibu.

Contoh ketiga, seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ayah dan 6 anak perempuan. Bagian mereka adalah:

Ahli Waris	Bagian	24^{x3}	72
Istri	1/8	3	9
Ayah	1/6+sisa	$4+1=5$	15
6 Anak Perempuan	2/3	16	48

Keterangan:

1. Jumlah anak perempuan dalam kasus ini adalah 6 dan bagian *saham* mereka adalah 16. Dimana 16 tidak habis dibagi dengan 6 (menghasilkan bilangan pecah), maka perlu di *taṣhīh*.
 2. 6 dan 16 merupakan bentuk *tawāfuq* ($6:2=3$ dan $16:2=8$), Maka *juzu' saham* diambil dari hasil bagi jumlah mereka ('*adadur ruus*) dengan persekutuan pembagi yang sama, yaitu $6:2=3$.
 3. Kemudian *juzu' saham* 3 dikalikan dengan asal masalah 24, hasilnya adalah 72 (asal masalah baru).
 4. *Juzu' saham* 3 dikalikan dengan semua bagian ahli waris, yaitu $3 \times 3 = 9$ untuk bagian istri, $3 \times 5 = 15$ untuk bagian ayah, $3 \times 16 = 48$ untuk bagian 6 anak perempuan, dimana setiap satu orang mendapatkan 8 bagian.
- b. **Taṣhīh bilangan pecah (*al-inkisār*) yang terjadi pada banyak kelompok penerima waris.** maksudnya adalah jika terdapat dalam satu kasus, dua kelompok atau lebih yang tidak bisa dibagikan *saham* mereka kepada jumlah mereka ('*adadur ruus*), kecuali dengan bilangan pecah. Untuk mentaṣhīh bentuk yang kedua ini, dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
- 1) Lihatlah berapa banyak jumlah mereka ('*adadur ruus*) dan berapa *saham* (bagian) yang mereka terima, kemudian bandingkan keduanya apakah masuk ke dalam *tabāyun*, *tawāfuq*, atau *tadākhul*.
 - 2) Jika masuk dalam *tabāyun*, berarti *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka ('*adadur ruus*), jika masuk kedalam *tawāfuq*, maka *juzu' sahamnya* adalah hasil bagi jumlah mereka ('*adadur ruus*) dengan persekutuan pembagi yang sama. atau jika masuk dalam *tadākhul*, berarti *juzu' sahamnya* adalah hasil bagi dari jumlah mereka ('*adadur ruus*) dibagi oleh jumlah *sahamnya*, jika masuk kedalam *tamāṣsul* berarti *juzu' saham* cukup salah satu di antaranya.
 - 3) Kemudian *juzu' saham* dari setiap perbandingan tersebut, digabungkan dan dianalisa masuk dalam pola jenis perhitungan yang mana. Apakah pola *tamāṣsul*, *al-tawāfuq*, *al-tadākhul* atau *al-tabāyun*. Sehingga dapat diketahui *juzu' saham musytaraknya*.
 - 4) Mengambil *juzu' saham* dari yang telah ditetapkan tadi, dan mengalikannya dengan asal masalah, atau meng'aulkannya jika dalam kasus '*aul*.

- 5) Mengalikan *juzu' saham* yang telah ditetapkan tadi dengan *saham* (bagian) seluruh ahli waris dalam kasus tersebut.

Contoh pertama, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ibu, 6 anak perempuan dan 3 saudara perempuan seayah. Bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	6^x3	18
Ibu	1/6	1	3
6 Anak Perempuan	2/3	4	12
saudara Pr.Seayah	Aṣabah ma'al ghair	1	3

Keterangan:

- Jumlah anak perempuan dalam kasus ini adalah 6 dan bagian *saham* mereka adalah 4. Dimana 4 tidak habis dibagi dengan 6 (menghasilkan bilangan pecah), dan begitu juga dengan jumlah saudara perempuan seayah dalam kasus ini adalah 3 dan bagian *saham* mereka adalah 1. Dimana 1 tidak habis dibagi dengan 3 (menghasilkan bilangan pecah), maka perlu di *taṣḥīḥ*.
- 6 dan 4 merupakan bentuk *tawāfiq* ($6:2=3$ dan $4:2=2$), Maka *juzu' saham* diambil dari hasil bagi jumlah mereka (*'adadur ruus*) dengan persekutuan pembagi yang sama, yaitu $6:2=3$. Kemudian, 3 dan 1 merupakan bentuk *tabāyun*. Maka *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka (*'adadur ruus*) yaitu 3.
- Kemudian *juzu' sahamnya* digabungkan secara berurutan, yaitu 3 dan 3, merupakan bentuk *tamaṣul*, oleh karena itu, *juzu' saham* musytaraknya adalah 3.
- Selanjutnya, *juzu' saham* 3 dikalikan dengan asal masalah 6, hasilnya adalah 18 (asal masalah baru).
- Juzu' saham* 3 dikalikan dengan semua bagian ahli waris, yaitu $3 \times 1 = 3$ untuk bagian ibu, $3 \times 4 = 12$ untuk bagian 6 anak perempuan, dimana setiap satu orang diantara mereka mendapat 2 bagian. Dan $3 \times 1 = 3$ untuk bagian 3 saudara perempuan seayah, dimana setiap satu orang mendapatkan 1 bagian.

Contoh kedua, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 orang istri, 3 nenek, anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian mereka adalah:

Ahli Waris	Bagian	24 ^{x12}	288	
4 Istri	1/8	3	36	
3 Nenek	1/6	4	48	
Anak laki-laki	‘Aṣabah bil ghair	17	204	36
Anak Perempuan				68

Keterangan:

- Jumlah istri dalam kasus ini adalah 4 dan bagian *saham* mereka adalah 3. Dimana 3 tidak habis dibagi dengan 4 (menghasilkan bilangan pecah), sementara jumlah nenek adalah 3 dan bagian *saham* mereka adalah 4. Dimana 4 tidak habis dibagi dengan 3 (menghasilkan bilangan pecah), dan begitu juga dengan jumlah jumlah anak laki-laki dan perempuan dalam kasus ini adalah 3 (2 laki-laki, 1 perempuan dari kaidah 2:1) dan bagian *saham* mereka adalah 17. Dimana 17 tidak habis dibagi dengan 3 (menghasilkan bilangan pecah), maka perlu di *taṣḥīḥ*.
- 4 dan 3 merupakan bentuk bentuk *tabāyun*. Maka *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka (*'adadur ruus*) yaitu 4. Kemudian, 3 dan 4 merupakan bentuk *tabāyun*. Maka *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka (*'adadur ruus*) yaitu 3. Kemudian 3 dan 17

juga merupakan bentuk *tabāyun*. Maka *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka (*'adadur ruus*) yaitu 3.

3. Kemudian *juzu' sahamnya* digabungkan secara berurutan, yaitu 4, 3 dan 3, merupakan bentuk *tabāyun*, oleh karena itu, *juzu' saham* musytaraknya adalah $4 \times 3 = 12$.
4. Selanjutnya, *juzu' saham* 12 dikalikan dengan asal masalah 24, hasilnya adalah 288 (asal masalah baru).
5. *Juzu' saham* 12 dikalikan dengan semua bagian ahli waris, yaitu $12 \times 3 = 36$ untuk bagian 4 istri, berarti setiap satu orang mendapatkan 9 bagian. Kemudian $12 \times 4 = 48$ untuk bagian 3 orang nenek, dimana setiap satu orang diantara mereka mendapat 16 bagian. Dan $12 \times 17 = 204$ untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan, Anak laki-laki dapat 136 bagian, sementara anak perempuan dapat 68 bagian. Sesuai dengan kaidah 2:1.

Daftar Pustaka

Komite Fakutas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010)

Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II

MATERI 6. 'AUL DAN RAD DALAM KEWARISAN

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. Pengertian 'Aul

'Aul secara etimologi mempunyai beberapa arti, di antaranya: *al-mailu* 'anil haq wa al-jaūr (kecenderungan untuk takut dan tidak adil), *al-ziyādah* (bertambah), *al-irtifā'* (naik/meluap), seperti dalam kata '*āla al-māu izā zāda wa irtafa'a 'an ḥaddihi* (air yang naik jika ditambah dan melampaui batasannya), dan 'aul dalam *farā'id* yaitu bertambahnya hitungan dalam *farā'id* dengan bertambah *sahamnya*, maka berkuranglah bagian bagi ahli *farā'id*.¹⁰⁵

Sedangkan 'aul secara terminologi adalah bertambahnya *saham* (bagian) masalah dari aslinya, yang menjadikan berkurangnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris.¹⁰⁶ Dikatakan 'aul karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil, karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 192, disebutkan bahwa "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris *ẓawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagikan secara 'aul menurut angka pembilang". Dengan demikian, berarti tidak ada perbedaan antara definisi terminologi yang telah dirumuskan oleh para ulama *farā'id* dengan kompilasi hukum islam di Indonesia.

B. Latar Belakang Terjadinya 'Aul

Pada zaman Rasulullah saw. sampai dengan kekhalifahan Abu Bakar, masalah 'aul ini belum pernah timbul.¹⁰⁷ Ini berarti bahwa pada masa-masa ini kemungkinan besar memang tidak didapati peristiwa kematian dengan meninggalkan struktur kewarisan seperti yang terdapat dalam masalah-masalah 'aul. Atau boleh jadi karena pada masa-masa itu tidak ada kasus yang menuntut penyelesaian secara 'aul.¹⁰⁸

Wajar kiranya kalau ijihad ini baru muncul ketika kekhalifahan II di masa pemerintahan *Khulafa al-Rāsyidūn*, sekaligus menandai bahwa kasus 'aul merupakan salah satu produk hukum yang dilahirkan lewat ijihad sahabat yang kemudian menjadi *ijma'* ulama (*fuqaha*). Sehingga wajar pula jika di dalamnya terdapat pro kontra terhadap masalah ini.

Para ahli hukum memperselisihkan siapa diantara para sahabat yang pertama kalinya mempelopori pembagian harta warisan secara 'aul ini? Sebagian mereka menyatakan bahwa orang yang pertama memecahkan persoalan kewarisan dengan 'aul ini adalah Umar bin Khattab, sebagian lagi mengatakan Abbas bin Abdul Muthalib, di lain pihak bahwa Zaid bin Tsabitlah orangnya.¹⁰⁹

Pengarang kitab *Al-Mabsuṭ* menyatakan bahwa orang yang pertama kali membicarakan tentang 'aul ini adalah Abbas. Karena sayyidina Abbas mengatakan kepada Umar tentang suatu kejadian yang terdapat lebihnya bagian waris daripada harta peninggalan. Kemudian di 'aulkanlah bagian-bagian mereka itu. Di lain pihak dikatakan bahwa Ibnu Abbas ditanya seseorang: "Siapakah yang pertama kali membicarakan 'aul dalam masalah *farā'id*? Ibnu Abbas pun berkata: "Sayyidina Umar."¹¹⁰ Hal itu beliau lakukan ketika *farḍ* (bagian tetap) yang harus diberikan kepada ahli waris

¹⁰⁵ Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*,...Jilid IX, h.478-480

¹⁰⁶ 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*,...h. 205

¹⁰⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1975), h. 409.

¹⁰⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 426-427

¹⁰⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fī al- Islam*. (Kairo: Dār al-Ma'rifah,1967), h. 322

¹¹⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fī al Islam*...h. 322.

bertambah banyak.

Bukanlah merupakan persoalan siapa diantara mereka yang pertama kali menetapkan cara-cara 'aul ini, yang jelas kasus ini muncul di saat khalifah Umar menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai orang penentu, maka tepatlah kiranya kalau dikatakan bahwa beliaulah orang yang pertama menyelesaikan kasus 'aul tersebut. Sebab dalam riwayat disebutkan bahwa beliau pernah didatangi salah seorang sahabat yang menanyakan penyelesaian suatu masalah "Seseorang meninggal, meninggalkan waris-warisan yang terdiri dari seorang suami, dan dua orang saudara perempuan kandung. Beliau kemudian bermusyawarah dengan Zaid dan Abbas dengan perkataan: "Jika kumulai dengan memberikan kepada suami atau kepada dua orang saudara perempuan, niscaya tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain."¹¹¹

Yang demikian itu dimaksudkan dengan *farḍ* (bagian tetap) suami sebanyak seperduanya, sedangkan saudara perempuan dua pertiga. Kalau dibagikan sesuai *farḍ* (bagian tetap) mereka, harta warisan tidak akan cukup karena lebih dari satu. Padahal harta warisan selalu dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam permusyawaratan itu, kemudian Abbas mengatakan dengan: اعيلوا الفرائض ('aulkan *Faraid*), artinya berikan sesuai dengan jumlah *saham* yang mereka punya, meskipun asal masalah menjadi berkurang. Lantas khalifah Umar memutuskan permasalahan tersebut dengan cara meng'aulkan yang semula masih beliau ragukan. Dari latar belakang terjadinya 'aul ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa:

1. Kasus 'aul ini terjadi di kekhalifahan II masa-masa Khulafa al-Rasyidun, disebabkan tidak pernah munculnya persoalan dimaksud di masa Nabi dan khalifah Abu Bakar. Sebab seandainya ini terjadi, pastilah ada keterangan ataupun hadits Nabi saw. yang berkenaan dengan masalah penyelesaian kasus tersebut, dan ada kemungkinan pula Abu Bakar menerapkan persoalan tersebut di masa pemerintahan beliau. Sementara 'aul itu sendiri merupakan satu diantara produk hukum dari hasil ijtihad.
2. Kasus 'aul yang pertama kali terjadi adalah asal masalah 6 'aul ke 7, sebab warisnya terdiri dari seorang suami dan dua orang saudara perempuan kandung, yang masing-masing memiliki *farḍ* (bagian tetap) $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$.

C. Perselisihan Pendapat Tentang 'Aul

Dengan memperhatikan uraian mengenai latar belakang terjadinya 'aul, khalifah Umar menyelesaikan kasus tersebut dengan cara memperbesar asal masalahnya yang mengakibatkan berkurangnya bagian yang harus diterima para waris, seperti dalam kasus pertamanya seorang suami yang berhak $\frac{1}{2}$ harta warisan, justru hanya bisa mendapatkan sebesar $\frac{3}{7}$ nya saja dari seluruh harta warisan. Begitu juga dengan dua orang saudara perempuan kandung yang hanya mendapatkan $\frac{4}{7}$, padahal sebelumnya ia memiliki *farḍ* $\frac{2}{3}$.

Hasil penyelesaian yang diterapkan ini, kemudian menjadi perbincangan para fuqaha khususnya di masa itu, dan bahkan telah menjadi satu diantara masalah-masalah yang diperselisihkan secara meluas di kalangan mereka.¹¹² Dalam artian telah terjadi pro dan kontranya sebagian mereka dalam menanggapi masalah demikian. Ini dapat dilihat pada alasan yang dikemukakan dengan para pelopor serta pendukungnya masing-masing, yang pada prinsipnya terdapat dua kelompok besar, yakni:

1. Ibnu Abbas menyatakan bahwa pada lahirnya, ayat-ayat kewarisan itu telah menjelaskan *furūdul muqaddarah* (bagian tetap) secara sempurna, karena itu setiap *aṣhab* (ahli waris) haknya harus

¹¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,...h. 410

¹¹² Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al- Islam*....h. 321

dipenuhi selagi keadaan memungkinkan, jika tidak, maka hak sebagian waris, seperti anak-anak perempuan atau saudara perempuan hendaknya tidak dipenuhi haknya. Ini disebabkan karena mereka statusnya dapat berubah (dalam suatu keadaan) menjadi ahli waris *aṣabah*.

Alasan pertama, bahwa tidak selamanya yang namanya *aṣhabul furūd* bisa bertindak sebagai orang yang tertentu bagiannya, sebab dalam keadaan tertentu pula ia bisa saja tampil sebagai *‘aṣabah*. Karena sebagai waris *‘aṣabah* ada kemungkinan bagian mereka ini lebih sedikit atau sebaliknya, sesuai dengan fungsinya sebagai waris penerima sisa. Menurut keadilan, sebenarnya yang berhak menerima sisa itu ialah orang-orang perempuan, karena laki-laki itu lebih kuat daripada mereka.¹¹³

Hanya saja, di dalam kasus-kasus *‘aul* itu tidak didapati orang-orang yang bisa menjadikan anak atau saudara perempuan tersebut berstatus sebagai *‘aṣabah*, baik *‘aṣabah bil ghair* atau *‘aṣabah ma’al ghair*. Sehingga pada keadaan ini tentulah mereka berkedudukan sebagai waris kelompok *aṣḥābul furūd*.

Adapun alasan kedua dari pendapat kelompok pertama ini adalah bahwa jika keadaan harta peninggalan itu tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan, maka harus diutamakan lebih dahulu untuk memenuhi hak-hak yang lebih penting, misalnya masalah *tajhīz al-mayit* (pengurusan jenazah) lebih didahulukan daripada pelunasan hutang, dan seterusnya. Sehingga jika harta tersebut tidak mencukupi untuk dibagi secara sempurna akan *farḍ-farḍ* (bagian tetap) waris yang ada, maka hendaklah dipenuhi hak-hak mereka yang lebih penting.

Karenanya para waris yang bagiannya dapat berpindah dari satu *farḍ muqaddarah* ke *farḍ muqaddarah* yang lain tentunya lebih utama daripada waris yang hanya perpindahannya itu dari *farḍ muqaddarah* kepada *farḍ ghairu muqaddarah* yakni *‘aṣabah*. Sehingga pembebanan pengurangan kepada mereka lebih baik, disebabkan *aṣḥābul furūd* harus lebih didahulukan daripada kelompok waris yang tergabung dalam *‘aṣabah*.¹¹⁴

Pendapat pertama ini diakui dan didukung oleh ulama-ulama madzhab Syi’ah Imamiyah atau Ja’fariyah serta madzhab Ṣāhiriyyah, terutama sekali pemimpin mereka yang bernama Ibnu Hasan. Ia begitu tegas dan keras menolak serta mengingkari akan keberadaan *‘aul* ini.¹¹⁵ Sesuai dengan pendapat yang mereka ikuti dari Ibnu Abbas.

Berkenaan dengan riwayat yang menyatakan tentang itu, setelah berakhirnya kekuasaan khalifah Umar, Ibnu Abbas mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan putusan khalifah Umar dan ayahnya sendiri dalam kasus kewarisan yang struktur ahli warisnya terdiri dari seorang suami, ibu, dan saudara perempuan seayah, beliauapun kemudian berujar dengan: “*Demi Allah, andaikata didahulukan orang yang didahulukan oleh Allah, dan diakhirkan orang yang diakhirkan oleh Allah, niscaya tidak terjadi peng’aulan sama sekali.*”

Atas dasar pernyataan beliau ini, kemudian seseorang sahabat yang bernama Za’far, telah menegur dengan tegurannya: Siapakah orang yang didahulukan oleh Allah itu wahai Ibnu Abbas.? Beliau menjawab: “Orang yang dipindahkan oleh Allah dari suatu *farḍ muqaddarah* ke suatu *farḍ muqaddarah* yang lain (seperti suami, isteri, atau ibu), sedang orang yang diakhirkan itu adalah waris yang bagiannya itu dapat dipindahkan dari suatu *farḍ muqaddarah* kepada *farḍ ghairu muqaddarah* seperti anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kandung.”¹¹⁶

Satu hal barangkali yang perlu digaris bawahi terkait dengan pernyataan Ibnu Abbas ini, yakni mereka yang disebut sebagai waris yang *farḍnya* itu bisa dipindahkan kepada *farḍ ghairu*

¹¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,...h. 412

¹¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,...h. 412

¹¹⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al- Islam*....h. 321

¹¹⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al- Islam*....h. 322-323

muqaddarah. Sependapat saja, bahwa waris *aṣḥābul furūd* itu terkadang bisa berkedudukan sebagai ‘*aṣabah*, hanya saja dalam kasus ‘*aul* ini tidak didapati orang-orang yang bisa menjadikan anak atau saudara perempuan tersebut bisa berstatus sebagai ‘*aṣbah*. Statusnya cukup jelas, (dalam kasus tersebut) mereka adalah para waris kelompok *aṣḥābul furūd* yang berhak atas bagian tertentu.

Satu lagi pernyataan Ibnu Abbas berkenaan dengan masalah ini: “*Katakanlah kepada mereka yang berpendapat ada ‘aul, untuk berkumpul dengan kita. Kemudian kita sama-sama mengadu dan memohon agar laknat Allah diturunkan bagi para pendusta. Sesungguhnya Zat yang dapat menghitung pasir ‘alaj tidak pernah menjadikan separuh (1/2), separuh (1/2), dan sepertiga (1/3) dalam masalah waris. Jika dua orang mengambil haknya yang setengah (1/2) itu, dimanakah bagian yang sepertiga (1/3)?*”¹¹⁷

Mendengar ucapan Ibnu Abbas itu, seseorang tadi kemudian bertanya kembali “mengapa tuan tidak nyatakan itu kepada khalifah Umar”?, beliau menjawab bahwa Umar adalah orang yang ditakuti oleh rakyatnya, karenanya aku segan dan salut kepadanya.¹¹⁸

2. Kelompok kedua merupakan pendapat Umar bin Khattab. Sebaliknya, mereka mengemukakan argumentasi bahwa *naṣ-naṣ* yang menjelaskan hak-hak waris tidak mengutamakan sebagian *aṣḥābul furūd* atas yang lainnya dan tidak membedakan antara harta warisan yang mepet dengan yang longgar. Sehingga mendahulukan salah seorang dari *aṣḥābul furūd* dan mengakhirkannya dengan mengurangi hak anak perempuan atau saudara perempuan berarti membuat hukum baru dengan jalan mentarjihkan suatu ketentuan *nash* tanpa alat tarjih yang kuat. Di samping itu, perintah Rasul:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Rasulullah saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR. Bukhari)¹¹⁹

Alasan pertama, dari pendapat ini adalah tidak dibenarkan mengistimewakan sebagian waris untuk dipenuhi haknya dengan menganak tirikan waris lainnya untuk dikurangi bagiannya. Atas dasar itulah, setiap waris harus dipenuhi haknya jika harta warisan longgar. Jika mepet, maka hendaknya semua waris mendapat pengurangan seimbang dengan *farḍ*nya. Sungguh tidak adil kalau yang dapat pengurangan itu hanya waris tertentu, sedang yang lain tidak, padahal mereka semua adalah *aṣḥābul furūd*.¹²⁰

Alasan kedua, ‘*Aṣābul furūd* dalam kondisi ini, seperti orang yang berutang. Jika harta yang diwariskan itu tidak bisa menutupi semua utang mereka, harta itu dibagi sesuai jumlah utang mereka. Begitu juga, seperti orang yang berwasiat, jika wasiat tersebut melebihi kadar sepertiga (1/3), sementara ahli waris tidak menyetujui kelebihan tersebut, maka mereka membatasinya dengan bagian sepertiga (1/3).¹²¹

Ibnu Abbas menentang pendapat mengenai ‘*aul ini, sementara kasus ini sudah merupakan *ijma*’, karena telah disepakati fuqaha. Di sisi lain, pendapat beliau tidak didasarkan pada *naṣ* yang *ṣariḥ*. *Furūdul muqaddarah* merupakan sesuatu yang telah disepakati seluruh umat Islam tentang kewajiban melaksanakannya. Maka untuk memenuhi *farḍ-farḍ* (bagian tetap) para waris terhadap harta peninggalan yang mepet, hendaklah ditempuh jalan melalui ‘*aul dengan cara mengurangi bagian setiap waris secara berimbang sesuai kadar atau *farḍ* mereka masing-masing. Keberadaan ‘aul ini**

¹¹⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al- Islam*....h. 323

¹¹⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al- Islam*....h. 323

¹¹⁹ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāid, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, Jilid XII..., h. 12

¹²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,...h. 413

¹²¹ Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*,... h. 351.

diakui oleh mayoritas (jumhur) fuqaha, sahabat, *thabi'in*, dan ulama madzhab yang empat, serta madzhab Syiah Zaidiyah.¹²²

D. Asal Masalah yang Dapat di 'Aulkan dan yang Tidak.

Asal masalah yang telah disepakati para ulama ada tujuh macam, yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Asal masalah yang tidak bisa di 'aulkan ada empat, adalah 2,3,4 dan 8. Sementara asal masalah yang bisa di 'aulkan ada 3 yaitu 6, 12 dan 24. Penjelasanannya sebagaimana di bawah ini:

1. 'Aul dengan asal masalah enam (6).

Asal masalah 6 di 'aulkan empat kali, dan ini ditetapkan melalui *istqra'* (penelitian yang mendalam) yaitu di 'aul ke 7, 8, 9 dan 10. Contohnya dalah sebagai berikut:

Contoh asal masalah 6 ter'aul ke 7, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, saudara perempuan kandung dan nenek. Bagian mereka adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	6	7
Suami	1/2	3	3
Saudara Pr.kandung	1/2	3	3
Nenek	1/6	1	1

Keterangan: untuk mengetahui asal masalah, pertama dengan melihat penyebut (*maqām*) ketiga ahli waris tersebut, yaitu: 2, 2, dan 6, merupakan bentuk *tadākhul*, sehingga asal masalahnya adalah 6 (bilangan terkecil yang bisa membagi dengan seluruh penyebut yang ada), kemudian bagian suami $1/2 \times 6$ (asal masalah)= 3, bagian saudara perempuan kandung $1/2 \times 6=3$, dan bagian nenek $1/6 \times 6=1$. Selanjutnya *saham-saham* dari ahli waris dijumlahkan yaitu $(3+3+1=7)$. Karena lebih banyak jumlah *saham* dari pada asal masalah diketahui adalah kasus 'aul dari asal masalah 6 menajdi 7 (setiap kekurangan bagian ditanggung oleh seluruh ahli waris).

Contoh 'Aul asal masalah 6 ke 8, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan dua saudara perempuan kandung. Bagian mereka adalah:

Ahli Waris	Bagian	6	8
Suami	1/2	3	3
Ibu	1/6	1	1
2 Saudara Pr. Kandung	2/3	4	4

Keterangan: untuk mengetahui asal masalah, pertama dengan melihat penyebut (*maqām*) ketiga ahli waris tersebut, yaitu: 2, 6, dan 3, merupakan bentuk *tadākhul*, sehingga asal masalahnya adalah 6. (bilangan terkecil yang bisa membagi dengan seluruh penyebut yang ada), kemudian bagian suami $1/2 \times 6$ (asal masalah)=3 bagian, bagian ibu $1/6 \times 6=1$ bagian dan bagian dua saudara perempuan kandung $2/3 \times 6=4$, setiap satu orang dapat 2 bagian. Selanjutnya *saham-saham* dari ahli waris dijumlahkan yaitu $(3+1+4=8)$. Karena lebih banyak jumlah *saham* dari pada asal masalah, diketahui adalah kasus 'aul dari asal masalah 6 menajdi 8 (setiap kekurangan bagian ditanggung oleh seluruh ahli waris).

Kasus ini, dinamakan **mubāhalah** karena terjadi pada masa ibnu 'Abbas. *Mubāhalah* artinya saling melaknat setelah ibnu 'Abbas memutuskan waris ini, ada yang mengur bahwa putusnya bertentangan dengan kebanyakan orang.¹²³

Contoh 'Aul asal masalah 6 ke 9, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan dua saudara perempuan kandung. Bagian mereka adalah:

Ahli Waris	Bagian	6	9
Suami	1/2	3	3

¹²² Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fī al- Islam...*h. 321

¹²³ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Musyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fī 'Ilmi al-Farā'id*,... h. 353.

2 Saudara Pr. Kandung	2/3	4	4
2 Saudara Lk. Seibu	1/3	2	2

Keterangan: untuk mengetahui asal masalah, pertama dengan melihat penyebut (*maqām*) ketiga ahli waris tersebut, yaitu: 2, 3, dan 3, merupakan bentuk *tabāyun*, sehingga asal masalahnya adalah $3 \times 2 = 6$. kemudian bagian suami $1/2 \times 6$ (asal masalah) = 3, bagian 2 saudara Perempuan kandung $2/3 \times 6 = 4$, setiap satu orang dapat 2 bagian, dan bagian dua saudara laki-laki seibu $1/3 \times 6 = 2$, setiap satu orang dapat 1 bagian. Selanjutnya *saham-saham* dari ahli waris dijumlahkan yaitu $(3+4+2=9)$. Karena lebih banyak jumlah *saham* dari pada asal masalah, ini adalah kasus ‘*aul*’ dari asal masalah 6 menjadi 9 (setiap kekurangan bagian ditanggung oleh seluruh ahli waris).

Kasus ini, dinamakan ***al-Gharrā'*** karena terjadi pada masa sahabat. Kisah yang masyhur ketika qādi Syuraiḥ bin al-Hārīs al-kindī memutuskan masalah ini, sampai menjadi populer seperti bintang yang cemerlang. Dan dinamakan juga dengan ***Syuraiḥiyyah***, karena beliau yang memutuskan perkara tersebut. Dinamakan juga dengan ***Marwaniyyah***, karena terjadi pada masa bani Umayyah Marwan bin Hakam, atau Abdul Malik bin Marwan, ada yang bertanya mengenai kasus ini, dan beliau memberikan jawaban seperti itu, atau karena suami dalam kasus tersebut merupakan keturunan bani Marwan.¹²⁴

Contoh ‘Aul asal masalah 6 ke 10, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, dua saudara perempuan kandung, ibu dan dua saudara perempuan seibu. Harta yang ditinggalkan adalah 200 juta. Bagian mereka adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	6	10
Suami	1/2	3	3
2 Saudara Pr. Kandung	2/3	4	4
Ibu	1/6	1	1
2 Saudara perempuan Seibu	1/3	2	2

Kadar satu bagian = harta:asal masalah
= 200 juta:10 = 20 juta.

Bagian suami = 3×20 juta = 60 juta
 Bagian 2 saudara Pr.kndg. = 4×20 juta = 80 juta
 Bagian ibu = 1×20 juta = 20 juta
 Bagian 2 Sdr. Pr. Seibu = 2×20 juta = 40 juta
200 juta

Jadi, Setiap 1 saudara Pr. kandung 40 juta, dan setiap 1 saudara Pr. Seibu menerima 20 juta.

Kasus ini dinamakan dengan ***Ummi al-Farūkh***, karena terlalu banyak penurunan bagian untuk ibu sampai duapertiganya, sehingga merupakan kasus terbesar yang terjadi ‘*aul*’ dalam waris. Sebagian ahli ilmu juga menyerupakan kasus ini dengan seperti seekor burung yang disekelilingnya banyak anak burung.¹²⁵

2. ‘Aul dengan asal masalah enam (12).

Asal masalah 12 di ‘*aul*’kan tiga kali, yaitu di ‘*aul*’ ke 12, 15 dan 17. Contohnya di bawah ini.

Contoh ‘Aul asal masalah 12 ke 13, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, dua orang saudara perempuan kandung, ibu. Harta yang ditinggalkan 390 juta.

Ahli Waris	Bagian	12	13
Istri	1/4	3	3
2 Saudara Pr. Kandung	2/3	8	8

¹²⁴ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Farāid*,... h. 354.

¹²⁵ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Farāid*,... h. 354-355

Ibu	1/6	2	2
-----	-----	---	---

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

= 390 juta: 13 = 30 juta.

Bagian istri = 3 x 30 juta = 90 juta

Bagian 2 saudara Pr. kandg. = 8 x 30 juta = 240 juta

Bagian ibu = 2 x 30 juta = 60 juta

390 juta

Jadi, Setiap 1 saudara Pr. kandung 120 juta.

Contoh 'Aul asal masalah 12 ke 15, ahli waris yang ditinggalkan istri, dua orang saudara perempuan kandung, ibu dan saudara perempuan seibu. Harta yang ditinggalkan 150 hektar.

Ahli Waris	Bagian	12	15
Istri	1/4	3	3
2 Saudara Pr. Kandung	2/3	8	8
Ibu	1/6	2	2
Saudara perempuan Seibu	1/6	2	2

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

= 150 hektar: 15 = 10 hektar.

Bagian suami = 3 x 10 hektar = 30 hektar

Bagian 2 saudara Pr. kandg. = 8 x 10 hektar = 80 hektar

Bagian ibu = 2 x 10 hektar = 20 hektar

Bagian Sdr. Pr. Seibu = 2 x 10 hektar = 20 hektar

150 hektar

Jadi, Setiap 1 saudara Pr. kandung 40 hektar.

Contoh 'Aul asal masalah 12 ke 17, ahli waris yang ditinggalkan adalah tiga orang istri, dua orang nenek, delapan saudara perempuan kandung, dan empat orang saudara perempuan seibu.

Ahli Waris	Bagian	12	17
3 Istri	1/4	3	3
2 Nenek	1/6	2	2
8 saudara Pr. Kandung	2/3	8	8
4 Saudara Pr. Seibu	1/3	4	4

Kasus ini dinamakan dengan *sab'ata 'asyriyyah*, karena 'aul ke 17, dimana jumlah mereka 17 orang, dan dibagi dengan asal masalah setelah 'aul 17, sementara harta yang ditinggalkan juga 17 dinar. Dinamakan juga dengan *ummi al-Furūj*, *ummi al-Armāl*, karena ahli waris seluruhnya perempuan, yaitu seluruhnya janda. Sebagaimana juga dinamakan *dīnariyyah al-ṣugra*, karena terjadi pada masa sahabat, dan harta yang ditinggalkan 17 dinar.¹²⁶

3. 'Aul dengan asal masalah enam (24).

Asal masalah 24 di 'aulkan hanya satu kali, yaitu ke 27. Karenanya di namakan dengan *bakhīl* (kikir) karena masalah 24 hanya di 'aul sekali saja menjadi 27.¹²⁷

Contoh 'Aul asal masalah 24 ke 27, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, ayah, ibu, dan dua orang anak perempuan.

Ahli Waris	Bagian	24	27
Istri	1/8	3	3
Ayah	1/6	4	4

¹²⁶ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Farā'id*,... h. 357.

¹²⁷ Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 39

Ibu	1/6	4	4
2 Anak Perempuan	2/3	16	16

Kasus ini dinamakan dengan *minbariyyah*, karena Ali bin Abi Thalib, ditanyakan oleh seseorang sementara beliau sedang berada diatas mimbar Kufah berkhotbah, dan beliau putuskan dengan mengatakan bagian istri menjadi sepersembilan. Atau dinamakan juga dengan kasus *haidariyyah*, dinisbatkan kepada gelar Ali ra.¹²⁸

E. Pengertian Rad

Rad secara etimologi memiliki beberapa makna, di antaranya: *al-ṣarf* (pertukaran), *al-irjā'u* (pengembalian), *al-i'ādah* (penambahan), *al-rafd* (penolakan) dan *al-man'u* (pencegahan).¹²⁹

Sementara *rad* secara terminologi adalah kebalikan dari *'aul*, yaitu berkurangnya jumlah *saham* (bagian) ahli waris dan bertambahnya asal masalah waris.¹³⁰ Atau *rad* adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian tetap (*aṣḥāb al-furuḍ*) kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada *aṣḥāb al- 'aṣabah* (penerima sisa).¹³¹

F. Pendapat Ulama Tentang Rad

Tidak ada naṣ khusus yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadīṣ tentang *rad*. Karena itu, para sahabat, *tabi'in* dan para imam mazhab fikih berbeda pendapat tentangnya. Perbedaan mereka dapat dikelompokkan menjadi dua, sebagaimana pembahasan berikut ini.

1. Pendapat Zaid bin Ṣabit, Urwah, az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Ḥazmin al-Žāhirī, bahwa tidak ada *rad* dalam waris mewarisi dan harta yang tersisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥāb al-furuḍ*), diserahkan ke baitul mal.¹³²

Alasan mereka adalah Allah telah menetapkan setiap bagian tetap (*aṣḥāb al-furuḍ*) kepada seluruh ahli waris. Oleh karena itu tidak boleh ditambah dengan bagian yang lain, sebab merupakan perbuatan yang melampaui batas terhadap ketentuan Allah. Dimana setelah menerangkan bagian untuk *aṣḥāb al-furuḍ*, Allah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 13 dan 14, sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٣﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Dan Rasul juga bersabda setelah turun ayat waris,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya”¹³³

Ayat dan hadīṣ di atas menunjukkan bahwa barangsiapa yang melampaui batas yang telah disyariatkan dan terhadap bagian yang telah ditetapkan, akan mendapatkan sanksi keras. Setiap perbuatan yang ada sanksi adalah haram. Oleh karenanya, *rad* haram dan tidak boleh dilakukan.

¹²⁸ Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 359.

¹²⁹ Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al- 'Arab*,...Jilid V, h. 184

¹³⁰ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 787.

¹³¹ 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*,...h. 147

¹³² Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 265

¹³³ Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab wasiat, bab tidak ada wasiat untuk ahli waris, hadis no. 2713. Lihat Muhammad bin Yazid bin Mājah, *Sunan Ibnu Majah*,..., h. 390-391

Sehingga sisa harta setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*), jika tidak terdapat ‘*aṣabah*’ (penerima sisa) dikembalikan ke baitul mal.

2. Pendapat Jumhur Shabat dan *tabi’in* yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Usman bin ‘Affan, dan ‘Abdullah bin Mas’ud, demikian juga mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa sisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*), jika tidak ada ‘*aṣabah*’ maka dikembalikan kepada *aṣḥābul furūd* sesuai dengan bagian mereka masing-masing.¹³⁴

Alasan mereka adalah firman Allah surah al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ...

orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).

Ayat ini mempunyai makna umum, yaitu setiap orang yang terikat dengan hubungan rahim lebih utama untuk menerima warisan daripada yang lain. Dengan demikian, mereka berhak mengambil sisa dari harta waris.

Alasan lain yang dijadikan landasan pendapat jumhur ulama adalah, ‘*aṣḥābul furūd*’ (penerima bagian tetap) lebih berhak daripada baitul mal, sebab posisi ‘*aṣḥābul furūd*’ lebih kuat dengan dua keadaan, yaitu hubungan kekerabatan dengan agama dan *nasab*. Sementara menyerahkan sisa ke baitul mal itu hanya karena satu sebab, yaitu kekerabatan dengan agama. Sehingga sisa bagian setelah diambil oleh penerima bagian tetap lebih berhak dan utama diberikan kepada mereka penerima bagian tetap (‘*aṣḥābul furūd*’) daripada ke baitul mal.

G. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Rad*.

Meskipun sebagian ulama sepakat mengenai *rad* yaitu ketika terdapat sisa harta, dikembalikan kepada ‘*aṣḥābul furūd*’ jika tidak ada penerima ‘*aṣabah*’, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ‘*aṣḥābul furūd*’ mana saja yang berhak untuk menerima sisa setelah mereka mengambil bagiannya tersebut. Terbagi kepada empat pendapat para ulama, yaitu:

1. Pendapat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, jumhur sahabat dan *tabi’in*, Hanafiyah, Hanābilah dan ulama-ulama Syafi’iyyah generasi berikutnya, bahwa sisa harta *rad* tidak diserahkan kecuali kepada ‘*aṣḥābul furūd*’ secara *nasab*, dan tidak boleh diserahkan untuk ‘*aṣḥābul furūd*’ karena *sabab* (sebab) yaitu suami atau istri.¹³⁵

Pendapat ini berdasarkan surah al-anfal ayat 75, “*orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).*”. oleh karenanya, suami dan istri dapat mewarisi bukan karena *nasab*, melainkan karena sebab perkawinan, dan ini terputus jika salah seorang diantara mereka meninggal dunia. Sehingga jika mereka mewarisi berarti menyalahi *qiyas naṣ*. Karena itu, bagian warisan untuk suami dan istri hanya apa yang ada dalam *naṣ*, dan tidak ada pengembalian sisa kepada mereka karena tidak ada dasarnya. Berbeda halnya dengan pewarisan karena sebab *nasab*, tentu akan tetap kekal walaupun ahli waris telah meninggal dunia. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak memberikan sisa bagian bagi ahli waris sebab *nasab* untuk mewarisi dengan jalur *rad* disebabkan mereka lebih berhak mewarisi daripada orang lain.

2. Pendapat Usman bin ‘Affan bahwa pengembalian sisa diserahkan kepada seluruh penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) tanpa terkecuali. Beliau beralasan bahwa suami atau istri juga menanggung

¹³⁴ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, 266.

¹³⁵ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, 268.

kekurangan pada bagian mereka ketika terjadi kasus *'aul*, mereka juga wajib menerima tambahan ketika ada pengembalian sisa, karena memberikan utang pasti selalu ada pengembaliannya.¹³⁶

3. Pendapat Ibnu 'Abbas, bahwa pengembalian sisa *rad* diserahkan kepada *aṣḥābul furūd* selain suami istri dan nenek, jika nenek bersama dengan penerima bagian tetap yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab. Jika tidak ada, nenek bisa mendapatkan pengembalian sisa melalui jalur *rad*. Dalil yang digunakan Ibnu Abbas adalah sabda Rasul saw. "*Beri makanlah para nenek dengan bagian seperenam (1/6)*". Sehingga nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari yang ditetapkan, kecuali jika tidak ada *aṣḥābul furūd* yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab.¹³⁷
4. Pendapat Ibnu Mas'ud, 'Alqamah, Imam Ahmad bin Hanbal dalam beberapa riwayat yang tidak terkenal, bahwa tidak ada pengembalian sisa kepada enam kelompok *aṣḥābul furūd*, yaitu suami, istri, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seapak dan saudara-saudara seibu.¹³⁸

Dasar pendapat ini adalah mewarisi sisa setelah *aṣḥābul furūd*, dengan jalan pengembalian sama hukumnya seperti *'aṣabah*. Oleh karena itu didahulukan yang lebih dekat kemudian yang agak dekat. Ada tiga orang yang tersebut di atas tidak bisa mewarisi karena ada orang yang lebih dekat dengan pewaris daripada mereka.

❖ Tinjauan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketika terjadi kasus *rad* maka diselesaikan sebagaimana bunyi pasal 193 yaitu "*Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *ṣawīl furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *'aṣabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka*". Dengan demikian hal ini senada dengan pendapat Usman bin 'Affan yang mengembalikan sisa *rad* kepada seluruh ahli waris yang ada tanpa terkecuali.

H. Syarat-syarat Terjadinya *Rad*

Rad tidak akan terjadi pada suatu keadaan, kecuali bila bisa terwujud tiga syarat seperti di bawah ini:

1. Adanya sisa harta waris setelah diambil oleh *aṣḥābul furūd*.
2. Tidak adanya *'aṣabah* (penerima sisa), karena jika ada akan mengambil sisa harta seluruhnya.
3. Adanya *aṣḥābul furūd* penerima *rad*, kecuali suami dan istri.¹³⁹

Bila dalam pembagian harta waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus *rad* tidak akan terjadi.

I. Ahli waris yang Berhak Mendapat *Rad*

Rad dapat terjadi dan melibatkan semua *aṣḥābul furūd*, kecuali suami dan istri. Artinya, suami dan istri, bagaimanapun keadaannya, tidak mendapat bagian tambahan dari sisa harta waris yang ada.

Aṣḥābul furūd yang dapat menerima *rad* hanya delapan orang, yaitu:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan kandung
4. Saudara perempuan seayah

¹³⁶ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 266.

¹³⁷ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 266.

¹³⁸ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 269.

¹³⁹ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullāṣah Fi 'Ilmi al-Farā'id*,... h. 381.

5. Ibu
6. Nenek dari pihak ayah atau ibu
7. Saudara perempuan seibu
8. Saudara laki-laki seibu.

Adapun mengenai ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk *aṣḥābul furūd* dalam keadaan tertentu, mereka tidak bisa mendapatkan *rad*. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya, maka tidak mungkin ada *rad*, karena keduanya menerima waris sebagai *‘aṣabah*, merekalah yang akan mendapatkan sisa dari harta waris.

J. Ahli Waris yang Tidak Mendapat *Rad*

Adapun ahli waris penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) yang tidak bisa mendapat *rad* hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukan karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan *sababiyah* (karena sebab), yaitu adanya ikatan tali pernikahan.

Dan kekerabatan ini akan putus karena meninggal dunia, maka dari itu (suami dan istri) tidak berhak mendapatkan *rad*. Mereka hanya mendapat bagian sesuai bagian yang menjadi hak masing-masing. Maka apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris, suami dan istri tidak mendapat bagian sebagai tambahan.

K. Macam-Macam Kasus *Rad* dan Metode Penyelesaiannya.

Masalah *rad* terbagi kepada dua macam, dan pada setiap jenis ini terdapat banyak keadaan-keadaan, dimana pada setiap keadaan ada metode tersendiri dalam penyelesaiannya. Sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. **Dalam suatu kasus tidak ada suami atau istri**, dan kasus ini merupakan ragam dari masalah *rad*, tidak terlepas dari tiga keadaan.

- a. ***Aṣḥābul furūd* hanya satu orang**, maka seluruh harta diwarisi untuknya dengan jalur *farḍan wa raddan* (menerima bagian tetap terlebih dahulu kemudian sisa).

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris satu orang anak perempuan.

Ahli Waris	Bagian	2	1
Anak perempuan	1/2	1	1

Keterangan: satu orang anak perempuan mendapatkan bagian tetap 1/2, kemudian ada sisa 1/2 lagi juga dikembalikan untuknya dengan jalur *rad*.

- b. ***Aṣḥābul furūd* banyak, akan tetapi mereka memiliki bagian tetap yang sama**. Maka metode penyelesaiannya sebagai berikut:

- 1) Asal masalah diambil dari **jumlah ahli waris**, dan harta peninggalan sisa untuk mereka seluruhnya dengan jalur *farḍan wa raddan* (mengambil bagian tetap terlebih dahulu kemudian sisa).

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan 5 orang saudara perempuan kandung.

Ahli Waris	Bagian	3	5
5 Saudara Pr.Kandung	2/3	2	1

Keterangan: 5 orang saudara mendapatkan bagian 2/3, asal masalah adalah 3. Bagian yang mereka ambil 2 sehingga masih tersisa 1 bagian lagi. Diketahui ini adalah kasus *rad*. Maka penyelesaiannya langsung melihat jumlah ahli waris dan dijadikan sebagai asal masalah yaitu 5, setiap satu orang dari saudara perempuan dapat bagian 1, melalui jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

- c. ***Aṣḥābul furūd* banyak, akan tetapi mereka memiliki bagian tetap yang berbeda**. Metode penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan bagian untuk seluruh ahli waris yang ada.

- 2) Kemudian menentukan asal masalahnya, dan memberikan pengembalian sisa kepada *aṣḥābul furūd*, dengan asal masalah baru yang diambil dari *majmū' siham* (penjumlahan *saham*) mereka.
- 3) *Mentaṣḥīh* jika kasus tersebut perlu untuk *ditaṣḥīh*.

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan, ibu dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Ahli Waris	Bagian	6	5
Anak Perempuan	1/2	3	3
Cucu Perempuan	1/6	1	1
Ibu	1/6	1	1

Keterangan: anak perempuan dapat bagian 1/2, cucu perempuan dapat bagian 1/6 dan ibu 1/6. Asal masalahnya adalah 6 karena *tadākhul*. Setelah dibagi dengan seluruh ahli waris ternyata masih ada sisa 1. Sehingga diketahui ini merupakan kasus *rad*. Dan penyelesaiannya dengan cara jumlah *saham* seluruh pewaris dalam kasus ini yaitu 5, dijadikan asal masalah baru. Dan setiap ahli waris mendapatkan *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

Contoh lain, ahli waris yang ditinggalkan adalah, anak perempuan dan dua orang cucu perempuan.

Ahli Waris	Bagian	6	4 ²	8
Anak Perempuan	1/2	3	3	6
2 Cucu Perempuan	1/6	1	1	2

Keterangan: anak perempuan dapat bagian 1/2, dua cucu perempuan dapat bagian 1/6, merupakan bentuk *tadākhul*. Jadi, asal masalahnya adalah 6. Setelah dibagi dengan setiap bagian ternyata ada sisa 2. Maka diketahui ini adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya adalah dengan menjadikan jumlah *saham* mereka 4, sebagai asal masalah baru. Sehingga anak perempuan dapat bagian 3, dan 2 cucu perempuan dapat bagian 1. Karena cucu perempuan berjumlah 2 orang sementara bagian mereka 1, jika dibagi akan menghasilkan bilangan pecah. Oleh karena itu, diperlukan *tashīh al-masalah* yaitu dengan mengalikan asal masalah 4 dengan jumlah mereka 2 hasilnya adalah 8. Kemudian 2 dikalikan dengan bagian ahli waris yang ada yaitu bagian anak perempuan $3 \times 2 = 6$, dan dua cucu perempuan $1 \times 2 = 2$, setia satu orang dapat 1 bagian.

2. **Dalam suatu kasus ada suami atau istri**, dan kasus ini merupakan ragam dari masalah *rad*, juga tidak terlepas dari tiga keadaan.

a. Ada suami atau istri bersama dengan *aṣḥābul furūd* hanya satu orang, penyelesaiannya mengikuti langkah berikut ini:

- 1) Asal masalah diambil dari **penyebut (*maqām*) suami atau istri**. dan memberikan bagian suami atau istri sesuai dengan bagian tetapnya.
- 2) Sisa setelah diambil oleh suami atau istri, diberikan untuk ahli waris yang ada, melalui jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).
- 3) Pada sebagian kasus perlu untuk di *taṣḥīh*, seperti jika banyaknya jumlah istri, dan *saham* mereka tidak bisa dibagikan karena menghasilkan bilangan pecah. Maka diselesaikan secara *taṣḥīh*.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri dan anak perempuan.

Ahli Waris	Bagian	8	8
Istri	1/8	1	1
Anak perempuan	1/2	4	7

Keterangan: bagian istri adalah 1/8, anak perempuan 1/2, merupakan bentuk *tadākhul*, jadi asal masalahnya adalah 8. Setelah dibagi dengan setiap bagian ternyata ada sisa 3. Dan diketahui adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya dengan mengambil penyebut (*maqām*) istri yaitu 8 sebagai asal masalah

baru. Dan istri mengambil bagian tetapnya yaitu $1/8$, sementara sisa $7/8$ diberikan untuk anak perempuan dengan jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

Contoh lain, ahli waris yang ditinggalkan adalah 3 orang istri dan saudara perempuan seayah.

Ahli Waris	Bagian	8	4^x3	12
3 Istri	$1/4$	2	1	3
Saudara Pr. Seayah	$1/2$	4	3	9

Keterangan: bagian 3 istri adalah $1/4$, saudara perempuan seayah $1/2$, merupakan bentuk *tadākhul*, asal masalahnya adalah 8, setelah dibagi dengan setiap bagian ternyata ada sisa 2. Sehingga diketahui ini adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya dengan mengambil penyebut (*maqām*) dari 3 orang istri yaitu 4. Bagian 3 istri $1/4 \times 4 = 1$, dan bagian saudara perempuan seayah sisa setelah diambil oleh 3 orang istri yaitu 3. Namun dalam kasus ini *saham* 3 orang istri adalah 1, tidak bisa dibagi untuk 3 orang, akan menghasilkan bilangan pecah, akhirnya harus di *taṣḥīh* dengan mengalikan asal masalah dengan jumlah mereka (*‘adadur ruus*); $4 \times 3 = 12$. Dan bagian ahli waris semuanya dikalikan dengan 3, yaitu $1 \times 3 = 3$ untuk bagian 3 orang istri, dimana satu orang mendapatkan 1 bagian. Kemudian $3 \times 3 = 9$ untuk bagian saudara perempuan seayah, dengan jalur mengambil *farḍ* terlebih dahulu kemudian baru sisa (*farḍan wa raddan*).

b. Ada suami atau istri dengan aṣḥābul furūd banyak, akan tetapi mereka memiliki bagian tetap yang sama. Maka metode penyelesaiannya dengan langkah-langkah di bawah ini:

- 1) Asal masalah diambil dari penyebut (*maqām*) suami atau istri dan memberikan bagian suami atau istri sesuai dengan bagian tetapnya.
- 2) Sisa setelah diambil oleh suami atau istri, diberikan untuk ahli waris yang ada, melalui jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).
- 3) Pada sebagian kasus perlu untuk di *taṣḥīh*, maka diselesaikan secara *taṣḥīh*.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami dan 3 anak perempuan. Bagian mereka adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	12	4
Suami	$1/4$	3	1
3 Anak Pr.	$2/3$	8	3

Keterangan: suami dapat bagian $1/4$ dan 3 anak perempuan $2/3$, merupakan bentuk *tabāyun*, jadi asal masalahnya adalah 12. Setelah dibagi dengan setiap bagian maka ada sisa 1. Diketahui ini adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya, mengambil penyebut suami yaitu 4 sebagai asal masalah baru. Dan suami mengambil bagian $1/4 \times 4 = 1$, sementara sisanya dikembalikan kepada 3 anak perempuan yaitu 3 bagian, satu orang mendapatkan 1 bagian, secara *farḍan wa raddan*.

c. Ada suami atau istri bersama aṣḥābul furūd banyak, akan tetapi mereka memiliki bagian tetap yang berbeda. untuk menyelesaikannya dengan mengikuti langkah berikut:

- 1) Membagikan bagian seperti kasus biasa
- 2) Jika jelas bahwa kasus tersebut adalah *rad* (lebih harta), maka asal masalah diambil dari penyebut (*maqām*) suami atau istri yang bukan penerima *rad*. Sisanya kemudian diberikan untuk *aṣḥābul rad* (penerima *rad*)
- 3) Selanjutnya mencari bagian penerima *rad*, yang asal masalahnya diambil dari bagian mereka, dan dilakukan penjumlahan pada *saham* mereka sehingga menjadi asal masalah baru.
- 4) Kemudian dilakukan perkalian silang untuk menggabungkan keduanya (*jāmi’ah al-masalatain*).
- 5) *Mentaṣḥīh* jika kasus tersebut perlu untuk *ditaṣḥīh*.

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Ahli Waris	Bagian	24	8	6	4	8 ^{x4}	32
Istri	1/8	3	1	X	X	1	4
Anak perempuan	1/2	2	7	3	3	3	21
Cucu perempuan	1/6	4		1	1	1	7

Keterangan: istri mendapat bagian 1/8, anak perempuan 1/2, dan cucu perempuan 1/6, merupakan bentuk *tawafuq*, asal masalahnya adalah 24. Setelah dibagi dengan setiap bagiannya ada sisa 5. Jadi diketahui ini adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya dengan mengambil penyebut dari istri yaitu 8 sebagai asal masalah, hasilnya istri tetap mengambil bagian *farḍnya* 1/8. Sisa 7/8 untuk penerima *rad*. Selanjutnya diselesaikan untuk bagian penerima *rad* dengan melihat penyebut bagian mereka 2 dan 6 adalah bentuk *tadākhul*, maka asal masalahnya adalah 6. Setelah dibagi dengan bagian masing-masing, diperoleh anak perempuan 3 bagian dan cucu perempuan 1 bagian, untuk mendapatkan asal masalah baru *saham* keduanya dijumlah 3+1=4. Selanjutnya dilakukan perkalian silang yaitu asal masalah bagian istri 8 dikali dengan jumlah *saham* penerima *rad* 4, (8x4=32), merupakan asal masalah baru. Untuk mendapatkan bagian istri maka jumlah *saham* penerima *rad* 4 dikali dengan bagian istri 1 (4x1=4), jadi istri mendapatkan 4/32=1/8 (tetap mengambil bagian *farḍnya*). Kemudian untuk mendapatkan bagian penerima *rad* anak perempuan, yaitu sisa dari bagian istri 7 bagian dikali dengan bagian anak perempuan 3 (7x3=21), dan cucu perempuan (7x1=7). Mereka mendapatkan *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

Contoh lain, ahli waris yang ditinggalkan adalah, 4 orang istri, 3 orang nenek dan 8 orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 960 juta.

Ahli Waris	Bagian	24	8	6	5	8 ^{x5}	40 ^{x12}	480
4 Istri	1/8	3	1	X	X	1	5	60
3 Nenek	1/6	4	7	1	1	1	7	84
8 Anak Pr.	2/3	16		4	4	4	28	336

Keterangan: 4 istri mendapatkan bagian 60/480=1/8 (tetap mengambil bagian *farḍnya*), setiap satu orang 60:4=15 bagian. Kemudian 3 nenek mendapat bagian 84/480 (mengambil *farḍ* dan *rad*), setiap satu orang dapat 84:3=28 bagian. Sementara 8 anak perempuan dapat bagian 336/480 (mengambil *farḍ* dan *rad*), setiap satu orang 336:8=42 bagian.

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=960 \text{ juta}:480 =2 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian 4 istri} = 60 \times 2 \text{ juta} = 120 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian 3 nenek} = 84 \times 2 \text{ juta} = 168 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian 8 anak Pr.} = 336 \times 2 \text{ juta} = \underline{672 \text{ juta}}$$

Jadi, Setiap 1 istri dapat 30 juta.

Setiap 1 orang nenek dapat 56 juta, dan

Setiap 1 orang anak perempuan dapat 84 juta.

- ❖ Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kasus *rad*, setelah diambil bagian *farḍ* masing-masing ahli waris maka sisanya dibagikan secara berimbang sesuai dengan bagian mereka masing-masing, tanpa membedakan antara suami atau istri. Hal ini merujuk kepada pendapat Usman bin 'Affan.

Contohnya, ahli waris istri, ibu dan 2 saudara laki-laki seibu. Harta yang ditinggalkan adalah 450 juta.

Ahli Waris	Bagian	2	9
Istri	1/4	3	3
Ibu	1/6	2	2
2 Sdr. Lk. Seibu	1/3	4	4

Keterangan: setelah mengetahui kasus ini adalah *rad*, maka asal masalah diperoleh dari penjumlahan *saham*

(bagian) seluruh ahli waris yang ada yaitu (3+2+4=9).

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

= 450 juta: 9 = 50 juta.

Bagian istri = 3x50 juta = 150 juta

Bagian ibu = 2x50 juta = 100 juta

Bagian 2 Sdr. Lk. Seibu = 4x50 juta = 200 juta
450 juta

Jadi, Setiap 1 saudara laki-laki seibu dapat 100 juta.

Daftar Pustaka

Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhāri*, (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṣ, 1409), Jilid XII, Jilid V

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)

‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1413)

Ibnu Manẓūr al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṣ al-Islāmī, 1419), Jilid III, V, IX, X, XIV

Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma’arif, 1975)

Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010)

Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II

Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyaḍ: Dār al-Salām, 1420)

Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al- Islam*. (Kairo: Dār al-Ma’rifah, 1967)

Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraiḍ*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007)

MATERI 7. GHARRAWAIN DAN MUSYTARAKAH

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. *Gharrawain* dan Pembahasannya.

1. Pengertian *Gharrawain*

Lafaz *gharrawain* adalah bentuk *tašniyyah* dari lafaz *gharra* yang berarti cemerlang, *gharrawain* berarti dua hal yang cemerlang, yaitu dua masalah waris yang sangat populer seperti bintang yang bersinar terang benderang.¹⁴⁰

Gharrawain disebut juga dengan *gharibatain*, karena kedua hal ini sangat jarang ditemukan dalam kasus waris, juga disebut dengan *gharimatain*, karena setiap istri bagaikan orang yang berhutang, dan ayah bagaikan ahli waris yang mengambil bagian lebih dari bagian waris mereka. Disebut juga dengan *Umariyatain*, karena Umar bin Khattab, orang pertama yang memutuskan bagian untuk ibu adalah 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Kemudian hal ini disepakati oleh jumur sahabat, dan ulama-ulama setelahnya.¹⁴¹

2. Pembagian *Gharrawain*.

Kasus *Gharrawain* ini hanya terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan saja, yaitu:¹⁴²

1. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris:

- 1) Suami
- 2) Ibu, dan
- 3) Ayah.

2. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris:

- 1) Istri
- 2) Ibu, dan
- 3) Ayah.

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang tinggal disini adalah ahli waris yang tidak *terhijab*, karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada, akan tetapi mereka *terhijab* oleh ayah.

Jadi apakah sesuatu kasus warisan itu merupakan kasus *gharrawain* atau tidak, dapat diketahui setelah menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari si pewaris, kemudian siapa-siapa yang *terhijab*, dan ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapat waris hanyalah (terdiri dari), suami, ibu dan ayah atau istri, ibu, dan ayah.

Apabila ternyata ahli waris yang berhak mendapatkan warisan hanya terdiri dari suami, ibu dan ayah atau istri, ibu, dan ayah, maka dapat dipastikan bahwa persoalan kewarisan tersebut adalah persoalan yang khusus (istimewa) yang diistilahkan dengan *Gharrawain*.

3. Cara Penyelesaian *Gharrawain*.

Adapun cara penyelesaian kasus dalam masalah *gharrawain*, tidaklah seperti penyelesaian kasus-kasus kewarisan pada umumnya, sebab apabila diselesaikan secara biasa maka hasilnya sebagai berikut:

Contoh Kemungkinan Pertama, dimana dalam sebuah kasus yang ditinggalkan oleh pewaris adalah suami, ibu dan ayah.

¹⁴⁰ Muhammad bin Muhammad Sabt al-Mārdīnī al-Syafī'ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāid*..., h. 62

¹⁴¹ Muhammad bin Muhammad Sabt al-Mārdīnī al-Syafī'ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāid*..., h. 62

¹⁴² Naṣhīr bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Farāid*,... h. 198.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Ayah	'Aṣabah binnaḥsi	1

Jika melihat pada penyelesaian kasus di atas, maka disitu dijumpai kejanggalan yaitu bagian ibu lebih besar atau 2:1 dari pada bagian ayah, sehingga hal ini tidak sesuai dengan kaidah al-Qur'an "*bagian laki-laki 2:1 dari pada bagian perempuan*", artinya seharusnya ayah mendapatkan 2 bagian dan ibu mendapatkan 1 bagian. Justru yang terjadi adalah sebaliknya.

Maka menyikapi hal tersebut, khusus untuk kasus ini, Umar memutuskan dengan memberikan bagian untuk ibu 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh suami. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3 dari Sisa	1
Ayah	'Aṣabah binnaḥsi	2

Keterangan: suami mendapat bagian 1/2, ibu 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh suami, dan ayah mendapatkan bagian 'aṣabah (sisa), penyebut 2 dan 3 merupakan bentuk *tabayun*, maka untuk mendapatkan asal masalah dikalikan keduanya $2 \times 3 = 6$ (menjadi asal masalah). Kemudian bagian suami $1/2 \times 6 = 3$, bagian ibu 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami, berarti $6 - 3 = 3$ (sisa), jadi bagian ibu adalah $1/3 \times 3$ (sisa) = 1, sedangkan bagian ayah adalah mengambil seluruh sisa yang ada setelah diambil oleh suami dan ibu yaitu 2 bagian.

Contoh Kemungkinan Kedua, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ibu dan ayah.

Ahli Waris	Bagian	12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3	4
Ayah	'Aṣabah binnaḥsi	5

Penyelesaian kasus di atas, juga menunjukkan bahwa bagian yang diperoleh oleh ibu lebih besar dari ayah karena patokan yang digunakan dan tersebut dalam al-Qur'an bagian ayah itu jika pewaris tidak meninggalkan anak, yang ada hanya ayah dan ibu, disitu ibu dapat 1/3 sedangkan ayah dapat sisa 2/3 atau dengan perbandingan bagian ayah 2:1 dengan bagian ibu.

Menyikapi hal tersebut, Umar juga memutuskan dengan memberikan bagian untuk ibu 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh istri. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3 dari Sisa	3
Ayah	'Aṣabah binnaḥsi	6

Keterangan: penyebut (*maqām*) setiap ahli waris adalah 4, dan 3, merupakan bentuk *tabayun*, maka asal masalahnya 12. Bagian istri $1/4 \times 12 = 3$, jadi sisanya adalah $(12 - 3 = 9)$, ibu mendapatkan bagian 1/3 dari sisa setelah diambil oleh istri, yaitu $1/3 \times 9 = 3$, dan ayah mendapatkan sisa 6. Disini, diketahui bahwa bagian ayah dan ibu sudah sesuai dengan aturan al-Qur'an.

Perlu diingat, bahwa untuk memudahkan dalam penyelesaiannya, tempatkan suami atau istri di tempat yang paling atas, sebab 1/3 dari sisa merekalah (setelah dikeluarkan bagian mereka) untuk bagian ibu.

Apabila dalam sebuah kasus, istri lebih dari satu, maka akan mengakibatkan perbandingan jumlah waris (istri) dengan jumlah bagian yang mereka peroleh tidak akan pas (pecahan), maka untuk

penyelesaiannya haruslah di *taṣḥīḥ* (mencari asal masalah baru yang tidak memunculkan bilangan pecah ketika dibagi dengan jumlah ahli waris).

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 istri, ibu dan ayah. Harta yang ditinggalkan 240 juta.

Ahli Waris	Bagian	12×4	48
4 Istri	1/4	3	12
Ibu	1/3 dari Sisa	3	12
Ayah	‘Aṣabah binnaḥsi	6	24

Keterangan: penyebut (*maqām*) setiap ahli waris adalah 4, dan 3, merupakan bentuk *tabayun*, maka asal masalahnya 12. Bagian istri $1/4 \times 12 = 3$, jadi sisanya adalah $(12 - 3 = 9)$, ibu mendapatkan bagian $1/3$ dari sisa setelah diambil oleh 4 istri, yaitu $1/3 \times 9 = 3$, dan ayah mendapatkan sisa 6. Oleh karena bagian istri adalah 3 dan mereka berjumlah 4 orang maka 3 jika dibagikan untuk 4 orang menghasilkan bilangan pecah. Sehingga perlu di *taṣḥīḥ*, dengan cara mengalikan asal masalah 12 dengan jumlah mereka (*‘adadur ruus*), $12 \times 4 = 48$ (asal masalah baru), kemudian 4 dikalikan dengan semua bagian ahli waris. 4 orang istri, $4 \times 3 = 12$ setiap satu orang dapat bagian 3. Bagian ibu, $3 \times 4 = 12$. Dan bagian ayah $6 \times 4 = 24$.

Kadar satu bagian = harta: asal masalah
 $= 240 \text{ juta} : 48 = 5 \text{ juta}$.

Bagian 4 istri	$= 12 \times 5 \text{ juta}$	$= 60 \text{ juta}$
Bagian ibu	$= 12 \times 5 \text{ juta}$	$= 60 \text{ juta}$
Bagian ayah	$= 24 \times 5 \text{ juta}$	$= 120 \text{ juta}$
		<u>240 juta</u>

Jadi, Setiap 1 istri dapat 15 juta.

4. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Gharrawain*.

Setidaknya ada tiga pendapat ulama terhadap kasus ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Umar bin Khatṭab, jumhur sahabat, dan empat imam mazhab, dan para ulama generasi selanjutnya, bahwa jika dalam sebuah kasus terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, maka bagian ibu tidak mengambil $1/3$ bagian dari harta waris, akan tetapi $1/3$ dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri.¹⁴³

Alasan dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama, firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 11:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... ﴿١١﴾

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; ... (Q.S. An-Nisa’: 11)

Dari ayat di atas jelas bahwa, ayah dan ibu jika hanya berdua dalam mewarisi, maka ibu mendapatkan bagian $1/3$ dan ayah sisa $2/3$ yaitu bagian ibu setengah dari bagian ayah (2:1).

Kedua, kaidah waris yaitu jika berkumpul laki-laki dan perempuan dalam satu kasus dan derajat mereka dinisbatkan kepada pewaris sama dekatnya. Maka, bagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan. Jika diberikan kepada ibu $1/3$ bagian secara sempurna yaitu $1/3$ dari harta waris, maka ibu mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari ayah jika bersama suami, dan ibu mendapatkan bagian yang selisihnya dekat sekali dengan ayah jika bersama istri. Maka

¹⁴³ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Musyārī al-Gḥāmidī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*,... h. 198.

solusinya diberikanlah bagian ibu 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri agar perolehan bagian ibu setengah dari bagian ayah.

2. Pendapat Ibnu ‘Abbas, Ibnu Mas’ud, Syurairi dan Daud al-Zahiri, bahwa jika dalam sebuah kasus terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah, maka ibu tetap mendapatkan bagiannya 1/3 dari harta peninggalan pewaris.¹⁴⁴ Alasan yang dikemukakan oleh pendapat ini adalah:

Pertama: keumuman firman Allah an-Nisa’ ayat 11: “*jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga*”. Ibu mendapat bagian 1/3.

Kedua: Berdasarkan sabda Rasul saw. “*Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.*” (HR. Bukhari).¹⁴⁵ Ayah menjadi ‘*aṣabah*’ karena itu, ia mendapatkan sisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*), baik sedikit atau banyak.¹⁴⁶

3. Pendapat Muhammad Ibnu Sīrain, bahwa ibu mendapatkan 1/3 dari sisa, jika ada suami dari pewaris, sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama. Dan ibu mendapatkan 1/3 secara sempurna, yaitu 1/3 dari harta waris, jika bersama dengan istri dari pewaris, sesuai dengan pendapat Ibnu ‘Abbas. Alasannya adalah jika memberikan bagian ibu 1/3 dari harta waris pada masalah pertama, pasti ibu akan mendapat bagian dua kali lipat dari ayah. Berbeda halnya jika memberikan ibu 1/3 dari harta waris pada masalah kedua, dalam masalah itu, ibu tidak mendapatkan bagian lebih besar sampai 2:1 dari ayah, akan tetapi ayah mendapatkan bagian lebih dari ibu yaitu setengah dari seperenam.¹⁴⁷

Jika dalam sebuah kasus ahli waris yang ditinggalkan adalah kakek, ibu dan ayah. Maka ini bukanlah kasus *gharrawain* dan ibu mengambil bagian tetapnya 1/3 dari harta yang ditinggalkan pewaris. Karena kedudukan ibu lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Dan kakek tidak akan bisa mempengaruhi bagian ibu. Ini merupakan salah satu perbedaan antara kewarisan kakek dan ayah.

❖ Tinjauan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menyikapi masalah *gharrawain*, maka dalam kompilasi hukum islam pasal 177, disebutkan bahwa “*Ayah mendapatkan bagian sepertiga (1/3) apabila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam (1/6) bagian*”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompilasi hukum islam di Indonesia juga mengambil pendapat Umar bin khattab dan jumhur ulama, bahwa bagian ayah tidak boleh kurang dari 1/3. Karena dalam kasus *gharrawain* apabila diselesaikan menurut pendapat Ibnu ‘Abbas maka bagian ayah 1/6 sementara dalam kasus tersebut pewaris tidak meninggalkan anak. Oleh sebab itu, untuk menjadikan bagian ayah tidak kurang dari 1/3, maka bagian untuk ibu dalam kasus ini diberikan 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh di bawah ini.

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan ayah.

• Penyelesaian menurut Ibnu ‘Abbas.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Ayah	‘Aṣabah binnaḥsi	1

¹⁴⁴ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, 166.

¹⁴⁵ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāid, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII ..., h. 12

¹⁴⁶ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, 167.

¹⁴⁷ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, 267.

Keterangan: dalam kasus ini ayah mendapatkan bagian 1/6 dan hal ini tidak sesuai dengan kaidah al-Quran, dimana bagian ayah semestinya dua kali lebih besar dari bagian ibu.

- **Penyelesaian menurut Umar bin Khattab, jumbuh ulama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.**

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3 dari Sisa	1
Ayah	‘Aṣabah binnaḥsi	2

Keterangan: ayah mendapatkan bagian 2/6, yaitu sama dengan 1/3. Sesuai dengan kaidah al-Quran 2:1 anantara bagian ayah dan ibu. Dan juga diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam pasal 177, bagian ayah 1/3 jika tidak ada anak.

B. Musytarakah dan Pembahasannya.

1. Pengertian Musytarakah (berserikat) atau Ḥajariyyah (terhalang).

Masalah *musyarrakah*, atau *musytarakah*, berarti bersekutu/berserikat bersama antara saudara laki-laki kandung dengan beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan seibu dalam menerima bagian sepertiga (1/3), karena saudara laki-laki sebagai penerima ‘*aṣabah* tidak mendapatkan bagian apa-apa. Dan disebut juga dengan ‘*Umarīyyah*, karena yang memberikan putusan terhadap kasus ini adalah Umar. Disebut juga dengan *yamiyyah*, *hajariyyah*, *himariyyah*, karena ada sebuah riwayat ketika Umar memutuskan kasus kewarisan saudara laki-laki kandung, berkata sebagian sahabat kepadanya: “*wahai Amirul Mukminin, andaikan bapak kami adalah seekor keledai atau seongkah batu yang dilempar kelaut, bukankah ibu kami tetap sama?*” Maka Umar memutuskan mereka sama-sama dapat bagian yang mereka bagi rata. Karena itulah sebagian sahabat menamakan kasus ini dengan nama-nama tadi.¹⁴⁸

2. Rukun Masalah Musytarakah

Rukun musytarakah ada empat, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁹

- 1) Suami penerima bagian *fard* 1/2.
- 2) Penerima bagian 1/6, yaitu ibu, atau nenek.
- 3) Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, penerima bagian 1/3.
- 4) Saudara laki-laki kandung satu orang atau lebih penerima ‘*aṣabah*, atau saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, dua orang atau lebih penerima bagian ‘*aṣabah bil ghair*.

Keempat syarat di atas harus terpenuhi semua (*kumulatif*). Jika tidak terpenuhi maka dipastikan itu bukan masalah *musytarakah*. Karena masalah ini erat kaitannya dengan bagian saudara laki-laki kandung penerima ‘*aṣabah* yang tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalan pewaris.

Jika tidak ada suami atau tidak ada ibu atau tidak ada nenek, atau saudara seibu hanya satu orang, maka dalam masalah ini tidak ada *musyarakah* karena masih ada sisa setelah pembagian tetap untuk saudara kandung. begitu juga ketika saudara kandung diganti oleh saudara seayah atau saudara laki-laki dan perempuan seayah, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa karena *aṣḥābul furūd* mengambil semuanya dan tidak berlaku *musytarakah* pada saudara seibu untuk saudara seayah. Dan juga jika saudara laki-laki kandung diganti oleh saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah, atau dua saudara perempuan seayah, maka masalahnya menjadi ‘*aul* dengan 1/2 atau 2/3 dan tidak ada *musytarakah*.

3. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Musytarakah.

¹⁴⁸ Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī’ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāīd*..., h. 94-95

¹⁴⁹ Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī’ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāīd*..., h. 94-96

Masalah *musytarakah* dalam pandangan sahabat dan ulama fikih dibagi kepada dua kelompok, sebagai berikut:

1. Pendapat Umar bin Khattab di akhir hayatnya, disepakati oleh sebagian besar para sahabat, Usman bin 'Affan, Zaid bin Tsabit, Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyyah, bahwa saudara laki-laki kandung baik sendiri atau banyak atau saudara laki-laki dan perempuan kandung berkongsi/berserikat dengan dua orang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan seibu pada bagian sepertiga ($1/3$), dimana mereka membaginya secara sama rata, tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan.¹⁵⁰

Alasan pendapat ini hadis yang diriwayatkan oleh hakam Ibnu Mas'ud berkata, “*Saya melihat Umar bin Khattab memberikan bagian untuk saudara laki-laki kandung bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan bagian sepertiga ($1/3$). Maka berkata seorang lelaki kepadanya, Umar dulu memutuskan bukan seperti itu. Ibnu Mas'ud bertanya: “bagaimana beliau putuskan? dijawab, Beliau memberikan bagian untuk dua orang saudara seibu dan tidak memberikan bagian bagi saudara laki-laki kandung. Ibnu Mas'ud berkata: itu adalah putusan beliau yang dulu dan sekarang adalah putusan beliau yang baru.*”¹⁵¹

2. Pendapat Ali Bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abi Musa al-Asy'ari, Ibnu Munzir dan lainnya, mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah, bahwa saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan apa-apa, karena seluruh bagian telah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥāb al-furūd*), yaitu $1/2$ untuk suami, $1/6$ untuk ibu atau nenek, dan $1/3$ untuk dua orang atau lebih saudara saudara seibu laki-laki atau perempuan.¹⁵²

Alasan pendapat ini adalah firman Allah surah an-Nisa' ayat 12: “*jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*”. Tidak ada khilaf diantara para ulama tentang maksud ayat ini, bahwa saudara seibu mendapatkan bagian $1/6$ jika sendiri dan mendapatkan bagian $1/3$ jika dua orang atau lebih. Maka, ketika tidak diberikan sebagaimana mestinya, tentu menyalahi al-Qur'an.

4. Cara Pembagian Warisan *Musytarakah*.

Adapun ahli waris yang terlibat dalam kasus *musytarakah* adalah suami, ibu/nenek, dua atau lebih saudara laki-laki/perempuan seibu, dan saudara laki-laki atau saudara laki-laki dan perempuan kandung. Dalam hal ini akan diselesaikan menurut dua pendapat ulama fikih, sebagaimana pembahasan di atas tadi.

1. Menurut pendapat Umar bin Khattab dan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah.

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami, ibu, dua saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung. harta yang ditinggalkan adalah 144 juta.

Ahli Waris	Bagian	6^{x3}	18
Suami	$1/2$	3	9
Ibu	$1/6$	1	3
2 Saudara Pr. Seibu	$1/3$	2	4
Saudara Lk. Kandung			2

¹⁵⁰ Nashir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 266

¹⁵¹ Dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitab Faraid, Bab Musyarrakah, Hadis no. 12467. Lihat Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1414), jilid VI, h. 417-419.

¹⁵² Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 785-786.

Keterangan: bagian suami $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$, dan 2 saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung berkongsi/berserikat (*musyarakah*) dengan bagian yang sama yaitu $\frac{1}{3}$. Penyebut dari ketiganya adalah 2, 6 dan 3, merupakan bentuk *tadākhul*, asal masalahnya adalah 6. Kemudian bagian suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$, bagian ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ dan bagian 2 saudara Perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung adalah $\frac{1}{3} \times 6 = 2$, dimana bagian 2 tidak bisa dibagi untuk 3 orang, maka perlu di *taṣhīh*, yaitu dengan mengalikan asal masalah dengan jumlah mereka (*‘adadur ruus*), $6 \times 3 = 18$ asal masalah baru. Selanjutnya setiap bagian dikalikan dengan *‘adadur ruus* yaitu bagian suami $3 \times 3 = 9$, bagian ibu $1 \times 3 = 3$, dan bagian 2 saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung adalah $2 \times 3 = 6$ bagian, dimana setiap 1 orang saudara seibu dapat 2 bagian dan saudara laki-laki dapat 2 bagian.

Kadar satu bagian = harta:asal masalah

$$= 144 \text{ juta} : 18 = 8 \text{ juta.}$$

Bagian suami = $9 \times 8 \text{ juta} = 72 \text{ juta}$

Bagian ibu = $3 \times 8 \text{ juta} = 24 \text{ juta}$

Bagian 2 Sdr.Pr.Seibu = $4 \times 8 \text{ juta} = 32 \text{ juta}$

Bagian Sdr.Lk. Kandung = $2 \times 8 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

144 juta

Jadi, Setiap 1 saudara perempuan seibu dapat 16 juta.

Beginilah cara penyelesaian kasus *musyarakah* menurut pendapat Umar dan para sahabat diikuti juga oleh Mazhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Yang memberikan bagian kepada saudara laki-laki kandung $\frac{1}{3}$, dari sebelumnya penerima *‘aṣabah* dan tidak ada sisa apa-apa setelah diambil oleh *aṣḥābul furūd* yang ada, sehingga pada akhirnya Umar berijtihad untuk menjadikan bagian $\frac{1}{3}$ dari dua orang saudara perempuan seibu dibagi bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung.

Ini merupakan sebuah keputusan yang bijaksana dan lebih dekat kepada nilai keadilan, mengingat kedekatan dengan pewaris antara ahli waris saudara kandung dengan saudara seibu, jauh lebih dekat saudara kandung karena melalui dua jalur (ayah dan ibu), sementara saudara seibu hanya melalui jalur ibu saja. Dan putusan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an.

2. Penyelesaian menurut Ali bin Abi Thalib dan diikuti oleh Mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanbaliyah.

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami, ibu, dua saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung. harta yang ditinggalkan adalah 144 juta.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
2 Saudara Pr. Seibu	$\frac{1}{3}$	2
Saudara Lk. Kandung	<i>‘aṣabah binnaḥsi</i>	0

Keterangan: suami dapat bagian 3, ibu mendapat bagian 1 dan 2 saudara perempuan seibu dapat bagian 2, setiap satu orang bagiannya 1. Sedangkan saudara laki-laki kandung mengambil hukum *‘aṣabah* tidak mendapatkan apa-apa, jika setelah dibagikan kepada penerima bagian tetap, bagiannya habis semua tidak bersisa.

Kadar satu bagian = harta:asal masalah

$$= 144 \text{ juta} : 6 = 24 \text{ juta.}$$

Bagian suami = $3 \times 24 \text{ juta} = 72 \text{ juta}$

Bagian ibu = $1 \times 24 \text{ juta} = 24 \text{ juta}$

Bagian 2 Sdr.Pr.Seibu = $2 \times 24 \text{ juta} = 48 \text{ juta}$

144 juta

Jadi, Setiap 1 saudara perempuan seibu dapat 24 juta.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1414), jilid VI
- Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṣ, 1409), Jilid XII, Jilid V
- Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010)
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
- Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī’ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāiḍ*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1421)
- Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraiḍ*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007)

MATERI 8. KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. Pengertian Kakek dan Saudara.

Makna kakek dalam hukum waris terbagi dua macam, yaitu:

1. Kakek *ṣaḥīḥ*, adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan pewaris tidak diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ayah, ayah dari ayahnya ayah dan seterusnya ke atas.¹⁵³
2. Kakek *fāsid*, adalah kakek yang nasabnya dengan pewaris diselingi oleh perempuan. seperti ayahnya ibu, ayah dari ibunya ayah.¹⁵⁴ Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa apabila di antara orang laki-laki dimasuki orang perempuan, maka kakek itu bukan sejati. Apabila tidak dimasuki orang perempuan, maka merupakan kakek sejati. Sekalipun tinggi derajatnya, seperti ayahnya ayah, ayahnya dari ayahnya ayah, ayahnya ayah dari ayahnya ayah. Demikianlah seterusnya sampai Nabi Adam as.

Jadi yang dimaksud dengan kakek dalam pembahasan ini adalah kakek *ṣaḥīḥ*, yaitu kakek yang sah, atau sering pula disebut dengan istilah kakek sejati, merupakan orang yang bisa menempati kedudukan ayah dalam menerima warisan di saat ayah pewaris tidak ada.

Sementara itu, yang dimaksud dengan saudara disini adalah saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan, dan juga saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan, sendiri atau banyak. Adapun saudara seibu laki-laki atau perempuan, mereka terhibah oleh kakek, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama.

B. Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara

Persoalan pembagian warisan antara kakek bersama saudara ini dianggap sebagai suatu permasalahan yang rumit dalam perkembangan hukum waris Islam. Karena merupakan persoalan dua golongan keluarga nasabiyah dengan pewaris melalui jalur laki-laki yang sama, yakni ayah pewaris, dimana kakek adalah orang tua dari ayah dan saudara merupakan turunan dari ayah.

Masalah ini tidak terdapat penjelasannya baik dalam al Qur'an ataupun hadits Nabi saw., sehingga mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Bahkan mereka cenderung sangat berhati-hati untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kasus ini. Ini terungkap dalam beberapa pernyataan sahabat seperti Ibnu 'Umar berkata:

أَجْرُكُمْ عَلَى قِسْمَةِ الْجَدِّ أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

*"Orang yang paling berani diantara kalian untuk membagikan warisan kakek dengan saudara, maka dialah orang yang paling berani masuk dalam neraka"*¹⁵⁵

Demikian juga halnya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan dengan:

مَنْ سَرَهُ أَنْ يَفْقَحَ جَرَائِمَ جَحَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

*"Barang siapa yang senang terjun ke dalam neraka Jahannam, maka putuskanlah kewarisan kakek yang bersama dengan saudara."*¹⁵⁶

Ketentuan dan kehati-hatian mereka memang sangat beralasan, karena di samping tidak adanya *naṣ* yang menjelaskan mengenai masalah dimaksud, juga didasarkan pada adanya kekhawatiran tentang hasil ijtihad yang salah. Terlebih lagi dalam masalah yang berhubungan dengan

¹⁵³ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*..., h. 169

¹⁵⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*..., h. 169

¹⁵⁵ Dikeluarkan oleh 'Abdu al-Razzaq, dalam kitab *farā'id*, bab bagian tetap kakek, Hadis no. 19047, Lihat Abu Bakar 'Abdu al-Razzaq bin Hammam al-Ṣun'anī, *al-Muṣannif*, (Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1403), Jilid X, h. 262.

¹⁵⁶ Dikeluarkan oleh 'Abdu al-Razzaq, dalam kitab *farā'id*, bab bagian tetap kakek, Hadis no. 19048, Lihat Abu Bakar 'Abdu al-Razzaq bin Hammam al-Ṣun'anī, *al-Muṣannif*..., Jilid X, h. 262-263.

materi/hak kepemilikan. Mereka takut akan berbuat zalim atau aniaya dengan memberikan hak waris kepada orang yang tidak berhak atau sebaliknya.

C. Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara

Meski sebelumnya ada semacam kekhawatiran dari para sahabat untuk melakukan ijtihad mengenai masalah kewarisan kakek bersama saudara ini, tetapi akhirnya kekhawatiran itupun hilang bersamaan dengan munculnya ijtihad para salaf al-ṣāliḥīn dan imam mujtahidin yang telah dibukukan secara lengkap dan detail beserta dalil-dalilnya. Kaitannya dengan ijtihad ini, para imam mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan hukum kewarisan kakek bersama dengan saudara, yang terbagi kepada dua pendapat yaitu:

1. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, ‘Usman, Ibnu al-Zabīr, ‘Ubadah bin Ṣamit, Ibnu Sirin, Ibnu ‘Umar dan Abu Ḥanīfah, bahwa kedudukan kakek sama dengan ayah, jika ayah tidak ada, sehingga dapat menghibah saudara kandung dan seayah secara mutlak.¹⁵⁷

Alasan kelompok pendapat pertama ini adalah, **Pertama**, firman Allah surah an-Nisa’ ayat 176, yang menjelaskan bahwa syarat mendapatkan warisan saudara laki-laki atau perempuan itu jika dalam masalah *kalālah*, yaitu barangsiapa yang meninggal dan tidak meninggalkan anak dan ayah, maka kakek juga termasuk ayah. **Kedua**, bahwa penggunaan kata “*Ab*” (ayah) dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah menunjuk kata “*jadd*” (kakek) sebagaimana terdapat dalam firman-Nya surah al-Hajj ayat 78, “(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim..” dan dalam surah Yusuf ayat 38, “Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim.”¹⁵⁸

Ketiga, di saat ayah tidak ada, kakek menempati kedudukan ayah. Ini sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bisa menempati posisi anak laki-laki, jika ia tidak ada. Sehingga wajar kiranya kalau kakek menghalangi saudara untuk mewarisi. Selain itu alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini adalah mendasarkan pada segi derajat kekerabatan, kakek menempati derajat *uṣul* (asal), sedangkan saudara berada dalam “*jihat*” menyamping (*ukhuwwah*) dalam prinsip penerimaan ‘*aṣabah* binnaṣfi. Yang demikian inipun sejalan dengan perintah Rasulullah saw.: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Bukhari).¹⁵⁹ Artinya kakek lebih dekat kekerabatannya, sehingga lebih berhak untuk mendapatkan bagian sisa (‘*aṣabah*) dibandingkan dengan saudara laki-laki kandung atau seayah.¹⁶⁰

2. Pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Imam Auzā’ī, Imam Malik, Imam Syāfi’ī, dan Imam Hanbali, bahwa kakek tidak bisa menghibah saudara kandung atau saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi hanya dapat menghibah saudara seibu saja.¹⁶¹

Alasan mereka adalah **pertama**, firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

¹⁵⁷ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 774, 781, 786.

¹⁵⁸ Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Farāid*,... h. 308

¹⁵⁹ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāid, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadīṣ 6732, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII,... h. 12

¹⁶⁰ Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Farāid*,... h. 309

¹⁶¹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 781, 786.

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, bisa mendapatkan warisan karena sebab kekerabatan, maka saudara laki-laki dan perempuan kandung dan seayah jika bersama dengan kakek, mereka tergolong dalam kekerabatan. Sehingga barangsiapa yang berkata tidak ada bagian bagi mereka karena terhibab oleh kakek, sungguh telah meninggalakan makna *zahir* al-Qur'an.¹⁶²

Alasan **kedua**, bahwa kewarisan saudara kandung ditetapkan melalui naş yang jelas. Berbeda dengan kewarisan kakek, tidak dijumpai dalil yang jelas mengenai bagiannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi ditetapkan melalui ijtihad yaitu menggantikan posisi/kedudukan ayah ketika pewaris tidak meninggalkan ayah.¹⁶³ **Ketiga**, bahwa kakek dan saudara kandung atau seayah laki-laki dan perempuan sama-sama dihubungkan kekerabatannya melalui perantaraan ayah pewaris, dimana kakek sebagai orang tua dari ayah dan dan saudara adalah anaknya. Maka mereka sama-sama mendapatkan waris.

Mazhab ini merupakan mazhab *ṣaḥīḥ*, lebih rajih dan pantas ditonjolkan. Para hakim agama di berbagai negara Islam telah mengambil pendapat ini karena lebih mendekati keadilan, kuat argumentasinya, dan lebih nyata mewujudkan kemaslahatan umum.

D. Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara.

Ada dua prinsip yang digunakan dalam menyelesaikan masalah kewarisan kakek bersama saudara ini, yaitu:¹⁶⁴

1. Apabila bersama kakek salah satu golongan dari saudara. Baik saudara kandung laki-laki dan perempuan saja, atau saudara seayah, laki-laki dan perempuan saja. Akan dibedakan kewarisan mereka dengan dua perkara.
 - a. Jika tidak ada bersama kakek dan saudara kandung saja atau saudara seayah saja, penerima bagian tetap lain (*ṣāḥibul farḍ*), maka dalam hal ini, kakek dapat memilih salah satu dari dua kemungkinan yang lebih menguntungkan dan banyak bagiannya, yaitu mengambil ***muqāsamah***¹⁶⁵ atau mendapat **1/3 (sepertiga)** dari jumlah keseluruhan harta. Ini tidak terlepas dari tiga gambaran.
 - 1) ***Muqāsamah*** lebih menguntungkan kakek dari pada 1/3, dalam lima keadaan, yaitu :
 1. Kakek bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung. Dalam keadaan ini, kakek mengambil dua pertiga dari seluruh harta.
 2. Kakek bersama dua orang saudara perempuan sekandung. Dalam keadaan ini, kakek mendapat seperdua bagian.
 3. Kakek bersama tiga orang saudara perempuan sekandung. Dalam keadaan ini, kakek mendapat dua per lima bagian.

¹⁶² Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 1421), Jilid IX, h. 91

¹⁶³ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i*..., h. 91

¹⁶⁴ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i*, Jilid IX,... h. 92

¹⁶⁵ *Muqāsamah* berarti menganggap kakek seakan-akan saudara laki-laki sekandung. Ia mengambil bagian sebagaimana saudara laki-laki sekandung, dan ia diperlakukan sebagaimana saudara laki-laki dan saudara yang lain, yakni apabila kakek menerima warisan bersama dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, maka bagian laki-laki sama dengan dua kali lipat bagian wanita. Apabila cara *muqasamah* ini ternyata merugikan kakek (bagiannya kurang dari sepertiga), kakek berhak mengambil sepertiga dari semua harta.

4. Kakek bersama seorang saudara laki-laki sekandung. Dalam keadaan ini, kakek mendapat setengah.
 5. Kakek bersama seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan kandung. Dalam keadaan ini, kakek mendapat bagian dua per lima.
- 2) **Muqāsamah dan 1/3 (sepertiga)** dari seluruh harta **sama besarnya**, yaitu :
1. Kakek bersama dua orang saudara laki-laki sekandung. Asal masalah 3, setiap mereka dapat bagian 1/3.
 2. Kakek bersama empat orang saudara perempuan kandung. Asal masalah 6, kakek dapat 1/3, dan empat saudara perempuan kandung 4/6.
 3. Kakek bersama seorang saudara laki-laki kandung dan dua orang saudara perempuan kandung. Asal masalah 6, kakek dapat bagian 1/3, saudara laki-laki kandung 1/3 dan dua saudara perempuan kandung 1/3.
- 3) Kakek lebih untung mengambil bagian **1/3** daripada muqāsamah. **Patokannya**, jika saudara yang bersama kakek jumlahnya lebih banyak dari kakek. Dan tidak ada gambaran pasti, karena banyak contoh-contohnya, paling sedikit kakek bersama dengan dua saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, atau kakek bersama tiga orang saudara laki-laki kandung dan dua saudara perempuan kandung, dan seterusnya ke atas. Seperti kakek bersama lima saudara perempuan kandung, maka asal masalah 3, bagian kakek 1/3 dan lima saudara perempuan kandung 2/3 dan ditashih masalah menjadi 15, kakek dapat bagian 5 dan lima saudara perempuan kandung dapat bagian 10.
- b. Jika bersama kakek dan saudara kandung saja atau saudara seayah saja, ada penerima bagian tetap lain (*ṣāhibul farḍ*), maka kakek dalam hal ini memilih mana bagian yang paling menguntungkan untuknya, apakah dengan **muqāsamah**, atau **1/3 dari sisa**, dan **1/6**. Maka untuk mengetahui bagian yang lebih menguntungkan kakek dengan salah satu dari tujuh keadaan di bawah ini.¹⁶⁶
- a. Mengambil **muqāsamah** lebih menguntungkan kakek, karena lebih besar dari 1/3 dari sisa dan 1/6. **Patokannya**: jika bersama penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) 1/2, jumlah saudara yang bersama dengan kakek satu orang. **Contoh**: Ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, kakek dan saudara laki-laki seayah.

Ahli Waris	Bagian	2 ^{x2}	4
Suami	1/2	1	2
Kakek	Muqāsamah	1	2
Saudara Lk. Seayah			1

- b. Mengambil **1/3 dari sisa** lebih menguntungkan bagi kakek, karena lebih besar dari muqāsamah dan 1/6. **Patokannya**: jika penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) bagiannya lebih kecil dari 1/2, dan saudara yang bersama kakek tiga orang atau lebih. **Seperti**, ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, kakek, dan 5 saudara laki-laki kandung.

Ahli Waris	Bagian	6 ^{x6}	36
Ibu	1/6	1	6
Kakek	1/3 dari sisa	5	10
5 Saudara Lk.Kdng.	‘aṣabah		20

Keterangan: ibu mendapat bagian 1/6, kakek 1/3 dari sisa harta waris, 5 saudara kandung ‘aṣabah, merupakan bentuk *tadākhul*, asal masalahnya adalah 6. Bagian ibu 1/6x6=1, bagian kakek dan 5

¹⁶⁶ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i*, Jilid IX,... h. 94-95

saudara adalah 5. Kemudian 5 tidak bisa dibagi dengan $\frac{1}{3}$ akan menghasilkan bilangan pecah, maka perlu dita \mathring{s} hih, yaitu dengan mengalikan jumlah mereka 6 (orang) dengan asal masalah, $6 \times 6 = 36$ sebagai asal masalah baru. Dan bagian ibu $1 \times 6 = 6$, bagian kakek dan 5 saudara $5 \times 6 = 30$. Selanjutnya kakek mendapat $\frac{1}{3} \times 30$ (sisanya) = 10, dan 5 saudara sisanya 20, setiap satu orang dapat 4 bagian.

- c. Mengambil **$\frac{1}{6}$** , lebih menguntungkan bagi kakek, karena lebih besar dari *muqāsamah* dan $\frac{1}{3}$ dari sisa. **Patokannya**, jika penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) bagiannya $\frac{2}{3}$, dan jumlah saudara yang bersama kakek lebih banyak satu orang darinya meskipun ada perempuan. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan suami, ibu, kakek dan dua saudara laki-laki seayah.

Ahli Waris	Bagian	6^{x2}	12	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	6	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	2	
Kakek	$\frac{1}{6}$	1	2	
2 Saudara Lk. Seayah	‘aṣabah	1	2	1
				1

- d. **Sama bagian** yang diperoleh oleh kakek baik mengambil *muqāsamah* atau $\frac{1}{3}$ dari sisa, dan kedua bagian ini lebih besar daripada $\frac{1}{6}$. **Patokannya**, jika penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) bagiannya lebih kecil dari $\frac{1}{2}$, dan saudara yang bersama kakek dua orang. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, kakek, dan 2 saudara laki-laki kandung.

- Mengambil secara *muqāsamah*.

Ahli Waris	Bagian	6^{x3}	18	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	3	
Kakek	Muqāsamah	5	15	5
2 Saudara Lk.Kdng.				10

- Mengambil secara $\frac{1}{3}$ dari sisa

Ahli Waris	Bagian	6^{x3}	18	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	3	
Kakek	$\frac{1}{3}$ dari sisa	5	15	5
2 Saudara Lk.Kdng.	‘aṣabah			10

Keterangan: kedua-duanya memeberikan bagian yang sama untuk kakek yaitu $\frac{5}{18}$.

- e. **Sama bagian** yang diperoleh oleh kakek baik mengambil *muqāsamah* atau $\frac{1}{6}$, dan kedua bagian ini lebih besar daripada $\frac{1}{3}$ dari sisa. **Patokannya**, jika penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) bagiannya $\frac{2}{3}$, dan saudara yang bersama kakek jumlahnya sama. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, nenek, kakek, dan saudara laki-laki kandung.

- Mengambil secara *muqāsamah*.

Ahli Waris	Bagian	6^{x2}	12	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	6	
Nenek	$\frac{1}{6}$	1	2	
Kakek	Muqāsamah	2	4	2
Saudara Lk. Kndg.				2

- Mengambil secara $\frac{1}{6}$.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Nenek	$\frac{1}{6}$	1

Kakek	1/6	1
Saudara Lk. Kndg.	‘aşabah	1

Keterangan: kedua-duanya memberikan bagian yang sama untuk kakek yaitu 1/6.

- f. **Sama bagian** yang diperoleh oleh kakek baik mengambil **1/6 atau 1/3 dari sisa**, dan kedua bagian ini lebih besar daripada muqāsamah. **Patokannya**, jika penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) bagiannya 1/2, dan saudara yang bersama kakek jumlahnya tiga orang atau lebih. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, kakek, dan 3 saudara laki-laki seayah.

- Mengambil secara **1/6**.

Ahli Waris	Bagian	6 ^{x3}	18
Suami	1/2	3	9
Kakek	1/6	1	3
3 Sdr. Lk. Seayah	‘aşabah	2	6

- Mengambil secara **1/3 dari sisa**.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Kakek	1/3 dari sisa	1
3 Sdr. Lk. Seayah	‘aşabah	2

Keterangan: kedua-duanya memberikan bagian yang sama untuk kakek yaitu 1/6.

- g. **Sama bagian** yang diperoleh oleh kakek baik mengambil **muqāsamah, 1/6 atau 1/3 dari sisa**. **Patokannya**, jika penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) bagiannya 1/2, dan saudara yang bersama kakek jumlahnya dua orang. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, kakek, dan 2 saudara laki-laki kandung.

- Mengambil secara **muqāsamah**.

Ahli Waris	Bagian	2 ^{x3}	6
Suami	1/2	1	3
Kakek	Muqāsamah	1	3
2 Sdr. Lk. Kandung			1

- Mengambil secara **1/6**.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Kakek	1/6	1
2 Sdr. Lk. Kandung	‘aşabah	2

- Mengambil secara **1/3 dari sisa**.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Kakek	1/3 dari sisa	1
2 Sdr. Lk. Kandung	‘aşabah	2

Keterangan: ketiga-tiga bagian tersebut, memberikan bagian yang sama untuk kakek yaitu 1/6.

2. Apabila bersama kakek ada dua golongan dari saudara, baik saudara kandung laki-laki dan perempuan, atau saudara seayah, laki-laki dan perempuan. Boleh jadi ada penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) atau tidak. Akan dibedakan kewarisan mereka dengan beberapa perkara di bawah ini.

- a. Saudara-saudara kandung butuh kepada saudara-saudara seayah, untuk menyempurnakan bagiannya bagaikan dua bagian kakek, atau untuk menyempurnakan bagian yang lebih sedikit dari dua bagian kakek. **Patokannya**, terdapat sisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap

lebih besar dari $\frac{1}{4}$, bagian saudara-saudara kandung lebih kecil dari dua bagian kakek, dan masalah ini dinamakan dengan ***al-Mu'addah*** (diperhitungkan) karena saudara-saudara kandung mempengaruhi bagian kakek (bisa menjadi lebih sedikit) dengan saudara seayah jika dibutuhkan, jika kakek telah mengambil bagian sesuai dengan kadarnya, dalam hal ini ***muqāsamah*** atau $\frac{1}{3}$, kemudian saudara kandung mengambil seluruh sisa harta, sedangkan saudara seayah terhalang oleh saudara kandung. kecuali jika saudara seayah bersama dengan seorang saudara perempuan kandung yang mengambil bagian $\frac{1}{2}$, sisanya diberikan untuk saudara seayah.¹⁶⁷

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris kakek, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah.

Ahli Waris	Bagian	3
Kakek	$\frac{1}{3}$	1
Saudara Lk.Kandung	'aṣabah	2
Saudara Lk. Seayah		0

Keterangan: sekiranya dalam kasus ini saudara laki-laki kandung langsung menghibab saudara laki-laki seayah, tentu kakek akan lebih diuntungkan jika mengambil bagian *muqāsamah*, karena bisa mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, akan tetapi saudara laki-laki kandung dalam hal ini tidak langsung menghibab saudara laki-laki seayah, melainkan ia butuh kepada saudara laki-laki seayah untuk mempengaruhi bagian yang diterima oleh kakek, sehingga jika dibagi secara *muqāsamah* atau $\frac{1}{3}$, bagian yang diterima oleh kakek adalah menjadi $\frac{1}{3}$, dan saudara laki-laki kandung mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dan bagian ini bagaikan dua bagian kakek, sementara saudara laki-laki seayah terhibab oleh saudara laki-laki kandung.

Jadi, kasus yang terdapat di dalamnya saudara laki-laki kandung, baik laki-laki atau perempuan dan saudara laki-laki dan perempuan seayah, bersama dengan kakek. Tidak akan pernah terlepas dari tiga keadaan, yaitu;¹⁶⁸

- 1) Jika ada saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seayah tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kondisi apapun. Meskipun keberadaan saudara laki-laki seayah dapat mempengaruhi bagian kakek.

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah kakek, saudara laki-laki kandung dan 2 saudara laki-laki seayah. Maka dalam kasus ini bagian yang paling menguntungkan kakek adalah $\frac{1}{3}$, karena jumlah saudara lebih dari dua jumlah kakek.

Ahli Waris	Bagian	3^x3	9
Kakek	$\frac{1}{3}$	1	3
Sdr. Lk. Kandung	'aṣabah	2	6
2 Sdr. Lk. Seayah		0	0

Keterangan: dalam kasus ini kakek mendapatkan bagian terbesar dengan mengambil $\frac{1}{3}$. Jadi asal masalah adalah 3. Bagian kakek $\frac{1}{3} \times 3 = 1$, sementara saudara laki-laki kandung dengan 2 saudara laki-laki seayah mendapat bagian sisa yaitu 2. Sementara 2 tidak bisa dibagi untuk 3 orang akan menghasilkan bilangan pecah, maka perlu di *taṣhīh*, yaitu mengalikan asal masalah dengan jumlah mereka, $3 \times 3 = 9$ asal masalah baru. Bagian kakek $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$. Bagian saudara laki-laki kandung adalah $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. Dan 2 saudara laki-laki seayah terhibab oleh saudara laki-laki kandung. Namun bisa mempengaruhi bagian kakek, untuk jelasnya kita lihat tabel di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	4
Kakek	<i>muqāsamah</i>	1

¹⁶⁷ Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī'ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farā'id*..., h. 105-107

¹⁶⁸ Naṣhīr bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Farā'id*..., h. 327-329.

Sdr. Lk. Kandung		1	3
2 Sdr. Lk. Seayah		2	

Seandainya penyelesaian kasus tadi dengan *muqāsamah*, maka bisa dilihat hasilnya sebagai mana dalam tabel di atas, bahwa kakek mendapatkan $1/4$, sedangkan saudara laki-laki kandung dapat bagian $3/4$, karena menghibab 2 saudara laki-laki seayah. Dan hal ini, merugikan kekek, sehingga diselesaikanlah menurut bagian yang paling menguntungkan kakek yaitu dengan $1/3$.

- 2) Jika saudara kandung perempuan saja, dua orang atau lebih, bersama dengan saudara laki-laki seayah. Maka tidak bisa dianggap bahwa masih ada sisa setelah kakek dan dua orang/lebih saudara perempuan kandung mengambil bagian. Hal ini juga menjadikan saudara laki-laki seayah tidak dapat bagian. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah kakek, 2 saudara perempuan kandung dan 2 saudara laki-laki seayah.

Ahli Waris	Bagian	3
Kakek	$1/3$	1
2 saudara Pr. Kandung	$2/3$	2
2 Sdr. Lk. Seayah	‘aşabah	0

Keterangan: dalam kasus ini kakek mengambil bagian $1/3$, karena lebih menguntungkan baginya daripada mengambil *muqāsamah* yang hanya mendapatkan bagian $1/4$.

- 3) Jika saudara perempuan kandung sendiri saja, dan terdapat saudara seayah laki-laki atau perempuan, sendiri atau banyak. Setelah kakek dan saudara perempuan kandung mengambil bagiannya, maka saudara laki-laki atau perempuan seayah mengambil sisa bila ada, kalau tidak ada lagi berarti mereka tidak dapat bagian apa-apa.

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah kakek, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah.

Ahli Waris	Bagian	4
Kakek	Muqāsamah	2
Saudara Pr. Kandung		1
Sdr. Pr. Seayah		0

Keterangan: dalam kasus ini, kakek lebih untung menggunakan bagian *muqāsamah*, yaitu $2/4=1/2$ dari pada mengambil bagian $1/3$, setelah kakek mendapatkan bagiannya maka diberikan bagian penuh untuk saudara perempuan kandung yaitu $1/2$, sehingga saudara perempuan seayah tidak dapat lagi bagian.

- b. Saudara-saudara kandung tidak butuh kepada saudara-saudara seayah untuk mempengaruhi bagian kakek. **Patokannya**, terdapat sisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap yaitu $1/4$ atau lebih kecil, bagian saudara-saudara kandung sama seperti bagian dua kakek atau lebih besar, dan dalam masalah ini tidak dibutuhkan *al-Mu’addah*, karena saudara-saudara kandung mewarisi tanpa saudara seayah. Sementara bagian kakek tetap diberikan yang paling menguntungkan baginya dengan mengambil $1/6$ atau $1/3$ dari sisa harta.

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, anak perempuan, kakek, dua saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah.

Ahli Waris	Bagian	12^{x2}	24
Suami	$1/4$	3	6
Anak Pr.	$1/2$	6	12
Kakek	$1/6$	2	4
2 Sdr. Lk. Kandung	‘aşabah	1	2
Sdr. Lk. Seayah	Terhibab	0	0

Daftar Pustaka

- Abu Bakar ‘Abdu al-Razzaq bin Hammam al-Şun’anī, *al-Muşanniḡ*, (Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1403), Jilid X
- Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafī’ī*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 1421), Jilid IX
- Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḡi Shahih al-Bukhāri*, (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaş, 1409), Jilid XII, Jilid V
- Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010)
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḡtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
- Muhammad bin Muhammad Sabṡ al-Mārdīnī al-Syafī’ī, *Şyarah Rahbiyyah Fi al-Farāiḡ*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1421)
- Naşhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaşah Fi ‘Ilmi al-Faraiḡ*, (Mekah: Dār Ṣibah al-Khuḡarā, 2007)

MATERI 9. KEWARISAN *MAFQŪD* (ORANG HILANG)

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. Pengertian *Mafqūd*.

Mafqūd secara etimologi merupakan *isim maf'ūl* yang diambil dari kata '*faqada*' (hilang) yaitu sesuatu yang pergi tanpa kembali. Firman Allah surah an-Naml ayat 20 "*dan Dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud"¹⁶⁹, Apakah Dia Termasuk yang tidak hadir.*"¹⁷⁰

Sedangkan *mafqūd* secara terminologi adalah orang yang terputus beritanya, yang tidak diketahui keadannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, boleh jadi karena melakukan *safar* (perjalan) atau menghadiri peperangan, atau ditawan oleh musuh, atau lain sebagainya dari bentuk kehilangan.¹⁷¹

B. Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu *Mafqūd*.

Sepakat fuqaha bahwa asal hukumnya orang yang hilang masih dianggap hidup, sampai jelas keadaannya, karena menentukan kematiannya itu adalah suatu perkara yang masih samar. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan masih tetap hak miliknya, dan harus dijaga sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Begitu juga tidak diwarisi hak-hanya sampai adanya bukti bahwa sudah meninggal, atau melihat kemungkinan besar bahwa tidak mungkin lagi selama masa tersebut masih hidup, atau seorang hakim telah memutuskan bahwa sudah meninggal, dan hakim memberikan wewenang harta peninggalan *mafqūd* kepada istrinya, anak-anaknya, orang tuanya dan kerabat dekatnya, dan mengumpulkan utang-utangnya, menjaga hartanya sampai jelas keadaannya. Jika terbukti masih hidup maka orang yang hilang tersebut berhak mengambil hartanya, dan mendapatkan hak-haknya kembali. Begitu juga jika kematiannya sudah jelas dan ada bukti konkrit atau dengan surat resmi yang menegaskan kematiannya, dimana kematian itu adalah kematian hakiki. Maka, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung dari tanggal kematiannya.

Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang, kepada dua pendapat.

1. Pendapat Mazhab Hanafiyyah, masyhur dari Imam Malik, shahih dari Mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa masa tunggu orang yang hilang tidak dibatasi dengan waktu, akan tetapi batasan waktunya itu dipulangkan kepada ijtihad Hakim, terkait segala hal yang berkaitan dengan orang yang hilang tersebut.¹⁷²

Alasannya adalah asal hukum orang yang hilang masih dianggap hidup, maka tidak boleh dihukumi sudah meninggal seiring dengan perjalanan waktu, tanpa pembuktian dan ijtihad. Apalagi manusia berbeda-beda umurnya, ada yang panjang usianya dan ada yang pendek. Begitu juga dengan masa hidup orang yang hilang pasti berbeda antara satu sama lain, dari segi zaman, tempat dan keadaan orang yang hilang, karenanya tidak dijumpai batasan waktu terhadap masalah ini dalam hukum Islam, maka diletakkanlah perkara ini kepada ijtihad seorang Hakim.¹⁷³

2. Pendapat Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa harus diberikan batasan waktu untuk orang yang hilang, jika kembali pada batasan waktu tersebut berarti masih hidup tapi jika tidak artinya sudah meninggal dunia, dan dibagikan hartanya kepada ahli waris

¹⁶⁹ Hud-hud: sejenis burung pelatuk.

¹⁷⁰ Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al- 'Arab*,...Jilid X, h. 298

¹⁷¹ 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt*,...h. 288

¹⁷² Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 296-297

¹⁷³ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 297

ketika sudah diputuskan kematiannya.¹⁷⁴ Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang dianggap sudah meninggal atau hidup, sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa orang yang hilang dapat dianggap meninggal jika orang yang sepadan atau yang sama masa kelahirannya sudah meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa dihitung dengan sempurnanya 90 tahun dari masa kelahiran, ada juga pendapat 70 tahun, dan ada juga 120 tahun.¹⁷⁵
- b. Mazhab Malikiyyah, mengatakan bahwa orang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia jika dalam masa 70 tahun tidak kembali, ada juga yang berpendapat 75 tahun, ada juga 80 tahun dan 90 tahun dari masa kelahiran bersama dengan satu tahun masa hilangnya.¹⁷⁶
- c. Mazhab Syafi'iyyah, batas waktu tunggu adalah 70 tahun, ada juga yang berpendapat 90 tahun dari waktu kelahiran, yang merupakan waktu orang yang seusia dengannya atau satu generasi dengannya bisa dipastikan sudah meninggal dunia.¹⁷⁷

Dari ketiga mazhab di atas, pendapat yang mengatakan masa tunggu sampai dihukumi telah meninggal adalah 70 tahun. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

(أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ)

“Umur umatku adalah antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut”¹⁷⁸

- d. Mazhab Hanabilah, membedakan kepada dua keadaan:
 - 1) Orang yang hilang diperkirakan tidak selamat atau meninggal, di antaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan, perampokan, orang yang pergi perang, dan lainnya. Dalam kondisi ini, seluruh kerabat diharuskan menunggu selama empat tahun sejak orang tersebut hilang. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tetap tidak ada kabar, hakim boleh memberikan putusan mengenai kematiannya, dan dianggap meninggal sejak keputusan hakim ditetapkan.

Dalilnya adalah berdasarkan riwayat dari Malik dalam kitab Muwaṭṭa', Said bin Musayyaf menjelaskan bahwa Umar berkata: “Perempuan manapun yang kehilangan suami dan tidak mengetahui keberadaannya, harus menunggu selama empat tahun. Jika dalam masa itu belum juga ada kabar, dia harus melakukan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah masa ‘iddahnya selesai, perempuan itu boleh nikah kembali.”¹⁷⁹
 - 2) Orang yang hilang diperkirakan selamat, di antaranya adalah orang yang hijrah kenegara lain untuk mencari rezeki, bertamasya, berdagang, atau menuntut ilmu. Dalam kondisi yang demikian, tenggang waktu yang akan diputuskan hakim mengenai kematiannya diserahkan kepada wali al-amr (pemimpin) atau orang yang mewakilkannya. Itupun dilakukan jika proses pencariannya sudah dilakukan secara maksimal.

¹⁷⁴ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 296

¹⁷⁵ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 295-297

¹⁷⁶ Naṣhīr bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*,... h. 478.

¹⁷⁷ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i*,... Jilid IX, h. 35

¹⁷⁸ Dikeluarkan oleh al-Turmuḏī, dalam kitab al-Da’wāt, bab 102, Hadis no. 3550, Lihat Abu ‘Isā Muhammad bin ‘Isā al-Turmuḏī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.) Jilid V, h. 517.

¹⁷⁹ Ibnu Qudamah al-Ḥanbalī, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 187

Sementara itu, sebagian dari ulama Hanbilih memberikan batasan mengenai hal tersebut, di antara mereka ada yang mengatakan 90 tahun sejak orang itu hilang atau 70 tahun. Bahkan, ada yang sampai 120 tahun.¹⁸⁰

Pendapat yang lebih sesuai untuk menyelesaikan masalah *mafqud* adalah pendapat pertama, yang batasan waktunya diserahkan kepada seorang hakim. Walaupun demikian, praktek pelaksanaannya di pengadilan agama, bahwa mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menetapkan atau menghukumi status bagi orang yang hilang tersebut dengan menyatakan telah meninggal atau belum, masih bersifat dapat diperdebatkan.

Permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan hingga saat ini belum ada ketentuan-ketentuan kapan seseorang yang hilang dapat ditentukan statusnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan status bagi orang yang hilang diperlukan suatu pembuktian yang sangat cermat. Lalu yang menjadi permasalahan, kapan harta orang yang hilang dapat diwarisi oleh para ahli warisnya. Menurut para ulama setelah hakim memutuskan orang yang hilang telah meninggal dunia pada suatu tanggal yang ditentukan berdasarkan pada dalil-dalil yang menimbulkan dugaan kuat kematiannya, maka orang yang hilang itu dipandang meninggal dunia pada waktu keluarnya penetapan hakim.

C. Hak Waris *Mafqud*.

Apabila seseorang meninggal dan mempunyai ahli waris, dan di antara ahli warisnya ada yang hilang tidak dikenal rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya dalam tiga keadaan berikut ini:

1. Orang yang hilang adalah ahli waris satu-satunya bagi pewaris, atau bisa menghibah ahli waris lain secara hibah hirman, maka dalam keadaan ini, harta warisan peninggalan pewaris dibekukan, tidak diberikan kepada ahli waris untuk sementara hingga ahli waris yang hilang muncul atau diketahui tempatnya. Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila ternyata hakim telah memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagian atau *fard*-nya.¹⁸¹

Contoh keadaan ini, Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, dan anak laki-laki yang hilang. Posisi anak laki-laki dalam hal ini sebagai "penghalang" atau *hajib hirman* apabila masih hidup. Karena itu, seluruh harta waris yang ada untuk sementara dibekukan hingga anak laki-laki yang hilang telah muncul. Dan bila ternyata telah divonis oleh hakim sebagai orang yang telah meninggal, maka barulah harta waris tadi dibagikan untuk ahli waris yang ada.

2. Orang yang hilang tidak akan mendapatkan warisan dalam keadaan apapun, karena *terhijab hirman* oleh salah satu ahli waris yang ada. **Contohnya**, orang yang hilang adalah saudara laki-laki kandung, sementara ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris ada anak laki-laki. Maka dalam keadaan ini, harta peninggalan pewaris bisa langsung dibagikan kepada ahli waris yang ada, dan tidak ada pertimbangan untuk ahli waris yang hilang dalam masalah ini, sebab keberadaannya ada atau tidak sama saja, yaitu terhijab oleh ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.¹⁸²

¹⁸⁰ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*, ... Jilid IX, h. 186-187.

¹⁸¹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, ... Jilid IV, h. 298

¹⁸² Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-ʿImrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafī* 7, ..., Jilid IX, h. 35-37

3. Orang yang hilang bisa mewarisi bersama-sama dengan ahli waris yang ada, bagian tetapnya bahkan bisa mempengaruhi bagian ahli waris yang ada. Maka dalam keadaan ini, terdapat tiga pendapat ulama.

- 1) Orang yang hilang tidak dapat mewarisi dari pewaris jika meninggalnya pewaris pada saat keberadaannya belum diketahui. Karena salah satu sebab untuk bisa saling mewarisi adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Sementara orang hilang hidupnya itu merupakan suatu perkara yang masih samar, maka tidak berkah baginya untuk mendapatkan hak-hak positif seperti waris dan wasiat.

Pendapat ini, memperlakukan orang hilang melalui sudut pandang tidak mungkin untuk kembali, dan memperlakukan ahli waris secara sangat hati-hati, maka orang hilang tidak ditanggihkan sedikitpun baginya dari harta peninggalan pewaris. Seluruhnya dibagikan kepada ahli waris yang ada. Akan tetapi, jika suatu saat diketahui masih hidup. Ahli waris harus mengembalikan kembali hak-haknya berupa harta warisan.

- 2) Orang yang hilang diperkirakan masih hidup, karena hukum asal orang yang hilang itu hidup. Jadi, bagiannya tidak boleh dibagikan kepada ahli waris yang lain, akan tetapi dibekukan dulu untuk jangka waktu tertentu. Jika suatu saat orang yang hilang kembali, maka harta tersebut diberikan kepadanya. Namun, jika sudah meninggal dunia, harta yang ditanggihkan diberikan kepada ahli waris yang ada. Ini merupakan pendapat sebagian ulama Mazhab Malikiyyah, mazhab Syafi'iyyah dan mazhab Hanabilah.¹⁸³
- 3) Orang yang hilang diperkirakan dengan dua keadaan, yaitu masih hidup dan sudah meninggal. Kemudian membagikan sesuai dengan dua keadaan tersebut. Dan melihat siapa ahli waris yang bersama dengan orang hilang. Jika bagiannya tetap tidak dipengaruhi oleh orang hilang maka bagiannya diberikan sempurna. Jika bagiannya berubah-ubah, maka diberi bagian yang paling kecil. Jika mendapatkan warisan dengan salah satu keadaan saja, tidak diberikan dulu bagiannya. Sisa dari bagian yang telah diambil oleh ahli waris lain di bekukan untuk orang hilang sampai diketahui keadaannya. Jika orang hilang suatu saat diketahui masih hidup maka diberikan haknya, tapi kalau sudah meninggal, bagian tersebut disalurkan kembali untuk ahli waris yang ada. Ini adalah pendapat Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah.¹⁸⁴

D. Metode Penyelesaian Kasus *Mafqūd*.

Penyelesaian kasus *mafqūd* yaitu dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Orang yang hilang diperkirakan dengan dua keadaan, masih hidup dan sudah meninggal.
2. Menentukan bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada dan *mafqūd*, kemudian mencari asal masalah dari dua keadaan tersebut. Jika perlu untuk *ditaṣḥiḥ* maka lakukan *taṣḥiḥ*.
3. Membandingkan antara dua asal masalah yang ada dengan menggunakan pola hitung *tadākhul*, *tamāṣūl*, *tawāfuq* atau *tabāyun*.
4. Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut dan mengalikan silang guna mendapatkan *juzu' saḥam* (bagian *saḥam*).
5. Kalikan *juzu' saḥam* (bagian *saḥam*) dengan setiap bagian ahli waris yang ada.
6. Bandingkan semua bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris dalam dua masalah tersebut. Siapa yang mendapatkan warisan dari semua keadaan dan bagiannya tidak berubah, maka berikan bagian tersebut kepadanya. Dan siapa yang bagiannya pada satu keadaan lebih kecil

¹⁸³ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi'i*,..., Jilid IX, h. 36

¹⁸⁴ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi'i*,..., Jilid IX, h. 35-36

daripada keadaan kedua, berilah bagian terkecil untuknya. Dan siapa yang mendapat bagian pada keadaan pertama sementara tidak mendapat bagian pada keadaan kedua, tidak diberikan bagiannya sedikitpun.

- Jumlahkan bagian-bagian yang telah diberikan kepada ahli waris tadi yang bersama dengan orang hilang, dan sisanya itu yang ditangguhkan untuk tidak diberikan sementara waktu, sampai jelas keadaan orang yang hilang, apakah masih hidup atau meninggal. Jika masih hidup berikan bagian yang ditangguhkan tadi untuknya dan jika tidak berikan bagian tersebut kepada ahli waris lain sesuai dengan bagiannya.

E. Contoh dan Penyelesaian Pembagian Harta Untuk *Mafqūd*.

- Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ibu, dua saudara perempuan seayah, dan saudara laki-laki seayah yang hilang. Harta yang ditinggalkan adalah 216 juta.

6 ^{x4} /24				6/8		24	
Keadaan	Hidup			Meninggal		Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	1			3		Hidup	Meninggal
Suami	1/2	3	12	1/2	3	12	9
Ibu	1/6	1	4	1/6	1	4	3
2 Sdr.Pr.Seayah	‘aşabah	2	8	4	2/3	4	12
Sdr.Lk.Seayah Hilang			4	x	X	4	X

➤ Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=216 \text{ juta}:24 =9 \text{ juta.}$$

Bagian suami = 9x9 juta = 81 juta

Bagian ibu = 3x9 juta = 27 juta

Bagian 2 Sdr.Pr.Seayah = 4x9 juta = 36 juta

Jadi, Setiap 1 saudara perempuan seayah dapat 18 juta.

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 8 (*saham*)x9=72 juta; jika keberadaan orang hilang sudah jelas bahwa dia hidup, maka saudara laki-laki seayah yang hilang mendapat 4 (*saham*)x9=36 juta, ditambah untuk bagian ibu 1 (*saham*)x9= 9 juta dan untuk suami mendapat tambahan 3 (*saham*)x9=27 juta. Akan tetapi jika saudara laki-laki seayah yang hilang tersebut jelas statusnya telah meninggal, maka bagian yang ditangguhkan seluruhnya diberikan untuk 2 saudara perempuan seayah yaitu 8 (*saham*)x9=72 juta, dimana bagian satu orang adalah 4x9=36 juta.

- Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan, paman kandung, cucu perempuan, dan cucu laki-laki yang hilang. Harta yang ditinggalkan adalah 450 juta.

3 ^{x3} /9				3		9	
Keadaan	Hidup			Meninggal		Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	1			3		Hidup	Meninggal
2 Anak Pr.	2/3	2	6	2/3	2	6	6
Paman kandung	Terhijab	X	X	‘aşabah	1	X	3
Cucu Pr.	‘Aşabah	1	3	1	Terhija	X	X

				b			
Cucu Lk. Hilang			2	X	X	2	X

➤ Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 450 \text{ juta} : 9 = 50 \text{ juta.}$$

Bagian 2 anak perempuan = $6 \times 50 \text{ juta} = 300 \text{ juta}$ Jadi, Setiap 1 anak perempuan dapat 150 juta.

Keterangan: bagian yang ditanggihkan adalah 3 (*saham*) $\times 50 \text{ juta} = 150 \text{ juta}$; jika keberadaan orang hilang sudah jelas bahwa dia hidup, maka cucu laki-laki yang hilang mendapat 2 (*saham*) $\times 50 \text{ juta} = 100 \text{ juta}$, dan cucu perempuan mendapat 1 (*saham*) $\times 50 \text{ juta} = 50 \text{ juta}$. Akan tetapi cucu laki-laki yang hilang tersebut jelas statusnya telah meninggal, maka paman kandung mengambil seluruh bagian yang ditanggihkan yaitu 3 (*saham*) $\times 50 \text{ juta} = 150 \text{ juta}$.

F. Hukum Jika *Mafqūd* kembali Dalam Keadaan Hidup Setelah Dihukum Meninggal.

1. Harta Orang *Mafqūd*

Jika orang hilang kembali dalam keadaan hidup setelah diputuskan meninggal, dan harta waris telah dibagi kepada ahli waris lain, maka ahli waris yang telah menerima bagian dari harta yang ditinggalkannya harus mengembalikan harta tersebut. Apabila ada diantara ahli waris yang telah menggunakan seluruh atau sebagian harta yang diberikan kepadanya, orang hilang yang kembali itu tidak boleh menuntut sedikitpun atau meminta ganti karena ahli waris memiliki harta itu berdasarkan keputusan Hakim.¹⁸⁵

2. Istri Orang *Mafqūd*

Jika orang yang hilang mempunyai istri, Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa tidak membedakan antara orang yang hilang dengan istrinya, sehingga tidak halal istrinya bagi siapapun sampai berakhir waktu tunggu baginya, dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa masa tunggu tersebut adalah empat tahun, waktu ini khusus untuk istri. Jika masa tunggu selama empat tahun telah berakhir, sementara suami belum kembali dan tidak ada kejelasan akan keberadaannya. Maka Hakim menghukum orang yang hilang tersebut telah meninggal. Dan dia harus melakukan '*iddah* seorang yang ditinggal mati suami yaitu empat bulan sepuluh hari, statusnya telah terputus hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang dan boleh untuk menikah lagi jika dikehendaki.¹⁸⁶

G. Cara Menyelesaikan Kasus *Mafqūd* Yang Lebih Dari Satu Orang.

Jika orang yang hilang dalam satu kasus lebih dari satu orang, maka cara penyelesaiannya juga sama seperti pada keadaan sebelumnya, kecuali menambah masalah menurut banyaknya orang yang hilang dan keadaan-keadaannya, setiap bertambah satu orang maka bertambah pula dua keadaan, sehingga kasus dua orang yang hilang, terdapat empat keadaan, **pertama**, keduanya masih hidup, **kedua**, keduanya telah meninggal, **ketiga**, satu meninggal satu hidup, **keempat**, satu hidup satu meninggal.

Begitu juga, untuk tiga orang yang hilang, ada delapan keadaan, **pertama**, semuanya hidup, **kedua**, semuanya meninggal, **ketiga**, satu dan dua hidup, tiga meninggal, **keempat**, satu dan dua meninggal, tiga hidup, **kelima**, satu dan tiga hidup, dua meninggal, **keenam**, dua dan tiga hidup,

¹⁸⁵ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 297-298.

¹⁸⁶ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 293-294.

satu meninggal, **ketujuh**, satu hidup, dua dan tiga meninggal, **kedelapan**, dua hidup, satu dan tiga meninggal.¹⁸⁷

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan, istri, ibu, anak perempuan yang hilang, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah yang hilang.

Keadaan	Hidup semua		Mati semua		Mati anak perempuan saja		Mati saudara Pr.seayah saja	
Asal masalah	24		12/13		12/13		24	
Istri	1/8	3	1/4	3	1/4	3	1/8	3
Ibu	1/6	4	1/3	4	1/6	2	1/6	4
Saudara Pr.Kndg	‘āṣabah	5	1/2	6	1/2	6	‘āṣabah	4
Anak Pr. Hilang	1/2	12	X	X	x	X	1/2	12
Saudara Pr.Seayah Hilang	Terhijab	X	X	X	1/6	2	X	x

Gabungan Masalah (312)

Keadaan	Hidup semua	Mati semua	Mati anak perempuan saja	Mati saudara Pr.seayah saja
Juzu’ saham	13	24	24	13
Istri	39	72	72	39
Ibu	52	96	48	52
Saudara Pr.Kndg	65	144	144	65
Anak Pr. Hilang	156	X	X	156
Saudara Pr.Seayah Hilang	X	X	48	X

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 160.

Jika orang yang hilang keduanya hidup, maka anak perempuan dapat bagian 156 *saham*. Dan saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa. Dan 4 *saham* ketambahkan untuk bagian ibu.

Jika orang yang hilang keduanya meninggal, maka bagian yang ditangguhkan tadi untuk ahli waris yang hidup, istri ditambah 33 bagian, ibu ditambah 48 bagian, dan saudara perempuan kandung ditambah 79 bagian.

Jika anak perempuan yang meninggal dan saudara perempuan seayah hidup, maka saudara perempuan seayah mendapat 48 bagian, saudara perempuan kandung ditambah 79 bagian, dan istri ditambah 33 bagian.

Jika saudara perempuan seayah yang meninggal dan anak perempuan hidup, maka anak perempuan mendapat bagian 156 *saham*, dan ibu mendapat tambahan 4 bagian.

Daftar Pustaka

- Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 1421), Jilid IX
 Abu ‘Īsā Muhammad bin ‘Īsā al-Turmuḏī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.) Jilid V

¹⁸⁷ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Musyarī al-Gḥāmidī, *al-Khullaṣah Fī ‘Ilmi al-Faraid*,... h. 492-493

‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1413)
Ibnu Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāš al-Islāmī, 1419), Jilid III, V, IX, X, XIV
Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX
Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007)

MATERI 10. KEWARISAN *AL-HAML* (ANAK DALAM KANDUNGAN)

Penulis: Muhibbussabry, Lc.,M.A.

A. Pengertian *al-Haml*.

Secara etimologi *al-haml* adalah apa yang ada di dalam perut perempuan yang mengandung pada semua makhluk. Jamaknya adalah *himālun*, dan *aḥmālun*, maksudnya adalah sesuatu yang ada di dalam perut perempuan yang mengandung. Orang Arab berkata: perempuan bisa disebut *ḥublā* jika dia sudah mengandung dan membawa beban. Apabila seorang perempuan membawa beban dipunggung atau di atas kepalanya, perempuan itu disebut *ḥāmilah*.¹⁸⁸

Sedangkan *al-ḥamlu* secara terminologi adalah sesuatu yang ada di dalam perut perempuan yang mengandung, mendapat warisan atau terhijab, atau membawa dampak kepada ahli waris lain dalam semua keadaan atau sebagiannya saja.¹⁸⁹

B. Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi.

Anak yang ada dalam kandungan dapat memperoleh warisan jika telah memenuhi tiga syarat di bawah ini:

1. **Syarat pertama**, Ketika meninggal pewaris, anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan keberadaannya, meskipun masih berbentuk embrio.

Untuk mewujudkan syarat pertama tersebut, anak yang ada dalam kandungan seorang ibu tidak boleh luput dari tiga keadaan.

- 1) Anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dilahirkan dalam keadaan hidup sebelum berakhir waktu paling minimal orang hamil semenjak meninggal pewaris.¹⁹⁰

Sepakat para ulama waktu minimal seorang mengandung adalah enam bulan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*”, dan dalam surah al-Aḥqāf ayat 15: “*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, yaitu dua tahun enam bulan. Sementara masa menyusui adalah dua tahun penuh, maka tersisa enam bulan yang merupakan masa paling minimal untuk seorang yang mengandung. Sepakat para Fuqaha bahwa perempuan tidak melahirkan pada masa yang lebih cepat dari enam bulan kecuali karena musibah seperti terjatuh yang menghendaki untuk segera dilahirkan anak yang ada dalam kandungan tersebut.¹⁹¹

- 2) Anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dilahirkan dalam keadaan hidup setelah berakhir waktu paling lama orang hamil semenjak meninggal pewaris. Maka dalam keadaan ini anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Karena dilahirkan setelah berakhir masa maksimal ini, tanda bahwa anak tersebut ada setelah meninggal pewaris dan sebagian mensyaratkan perempuan tersebut telah menikah lagi setelah meninggal pewaris.¹⁹²

Kemudian berbeda pendapat para ulama mengenai batasan waktu paling lama bagi orang yang hamil, yaitu sebagai berikut:

¹⁸⁸ Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab...*, Jilid III, h. 331-332.

¹⁸⁹ Maṣūr bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā’*, ... Jilid IV, h. 461

¹⁹⁰ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*, ... Jilid IX, h. 179-180.

¹⁹¹ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i*, ..., Jilid XI, h. 11

¹⁹² Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*, ... Jilid IX, h. 180.

1. Pendapat Qurṭubī, Abu Ubaid al-Qāsim bin Sallām, IbnuQayyim Al-Jauziyyah, Muhammad bin ‘Uṣaimīn, ‘Abdul Azīz bin Bāz, dan para ulama kontemporer, bahwa tidak ada batasan waktu paling lama untuk orang yang hamil, akan tetapi itu semua tergantung kepada kondisi yang ada, dimana setiap perempuan mengandung lebih mengetahui akan kondisinya.¹⁹³
2. Pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya Ibnu Syihāb al-Zurī, Rabī’ah al-Ra’yi, sebagian mazhab Malikiyyah, bahwa waktu paling lama seorang yang hamil itu adalah tujuh tahun.¹⁹⁴
3. Pendapat salah satu riwayat dari Imam Malik dan merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhab Malikiyyah, bahwa waktu paling lama seorang perempuan yang hamil adalah lima tahun.¹⁹⁵
4. Pendapat al-Laiṣi bin Sa’id, bahwa waktu paling lama bagi seorang perempuan hamil adalah tiga tahun.¹⁹⁶

Alasan yang digunakan oleh empat pendapat di atas adalah, mereka mendengar bahwa ada perempuan yang masa kehamilannya itu sampai pada waktu-waktu yang telah disebutkan di atas, dari itu, al-Laiṣi bin Sa’id, mengetahui bahwa hamba sahaya dari Umar bin ‘Abdullah mengandung selama tiga tahun dan ini merupakan periode maksimum bagi perempuan yang hamil.¹⁹⁷

5. Pendapat Imam Malik, mazhab Syāfi’iyyah, dan mazhab Hanabilah, bahwa waktu paling lama bagi seorang perempuan hamil adalah empat tahun.¹⁹⁸

Alasannya di dalam *naṣ* tidak disebutkan batasan waktu maksimal bagi perempuan yang hamil, untuk bisa mengetahui waktu paling lama itu adalah dengan melihat ‘*uruf* dan kasus-kasus yang ada, dijumpai bahwa yang paling banyak terjadi adalah empat tahun.

6. Pendapat mazhab al-Šūrī, al-Auza’ī, Hanafiyyah, al-Muzannī dan riwayat dari Imam Ahmad, bahwa waktu paling lama seorang yang hamil adalah dua tahun.¹⁹⁹
7. Pendapat mazhab al-Žahiriyyah, bahwa waktu paling lama untuk seorang yang hamil adalah sembilan bulan, tidak lebih dari itu.

Alasannya adalah surah al-baqarah ayat 233 dan surah al-ahqaf ayat 15, menurut Ibnu Hazm al-Žahiri, ketika memahami dua ayat tersebut, tidak dibolehkan seorang perempuan yang hamil melebihi waktu sembilan bulan dan tidak boleh kurang dari enam bulan, barangsiapa yang berpendapat bahwa orang yang mengandung sampai menyusianya melebihi waktu tiga puluh bulan, maka merupakan perkataan batil dan mustahil, karena menolak yang telah Allah jelaskan secara nyata.²⁰⁰

8. Pendapat mayoritas ulama kontemporer, dan kedokteran, bahwa waktu paling lama bagi seorang yang hamil adalah sepuluh bulan.²⁰¹

Alasannya telah dipastikan oleh banyak dokter spesialis kandungan bahwa masa normal seorang perempuan yang hamil adalah 280 hari, yang dihitung dari masa berakhir menstruasinya dan kehamilan biasanya terjadi sekitar 14 hari setelah berakhir menstruasi

¹⁹³ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid XI, h. 12

¹⁹⁴ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid XI, h. 12

¹⁹⁵ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid XI, h. 233.

¹⁹⁶ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid XI, h. 232-233.

¹⁹⁷ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid XI, h. 232-233.

¹⁹⁸ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid XI, h. 12

¹⁹⁹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid III, h. 540.

²⁰⁰ ‘Alī bin Ahmad bin Hazm al-Žahirī, *Al-Maḥallī bi al-Aṣār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), Jilid X, h. 131-132

²⁰¹ Muhammad Ali al-Bār, *Khalaqa al-Insān baina al-Ṭib wa al-Qur’an*, (Arab Saudi: Dār al-Su’udiyyah linnasyar, 1984), h. 451-452

tersebut, maka masa sebenarnya bagi seorang perempuan yang hamil adalah (280-14=266) hari.

Pendapat terakhir ini, lebih cocok digunakan pada masa sekarang ini, karena merupakan hasil penelitian ilmiah oleh para ahlinya.

- 3) Perempuan hamil melahirkan anaknya setelah enam bulan dari masa meninggal pewaris, dan sebelum berakhir masa paling lama seorang yang hamil, yaitu menurut pendapat jumhur empat tahun, dalam keadaan ini jika perempuan tersebut telah menikah lagi maka anak yang dilahirkan tidak mendapatkan warisan dari pewaris. Karena keberadaannya belum ada ketika meninggal pewaris dan mempertimbangkan telah terjadi hubungan badan dengan suami barunya semenjak pewaris meninggal.

Akan tetapi, jika selama selang waktu tersebut perempuan yang mengandung anaknya belum menikah lagi, maka anak dalam kandungan mendapat warisan dari pewaris. Karena anak tersebut telah ada semenjak pewaris meninggal.²⁰²

2. **Syarat kedua**, anak yang dilahirkan tersebut dalam keadaan hidup. Sebagaimana Rasul bersabda:

إِذَا اسْتَهْلَ الصَّبِيُّ وَرَثَ وَصَلَّى عَلَيْهِ

*“Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian meninggal) maka hendaklah dishalati dan berkah mendapat warisan.”*²⁰³

Menurut para ulama yang dimaksud dengan *istihlāl* (melahirkan) adalah keluarnya bayi dari rahim ibu dalam keadaan hidup, seperti gerakan yang lama, bersin, menguap, menyusu, bernafas yang lama dan tanda-tanda lain yang menunjukkan kehidupannya. Sedangkan gerakan yang sebentar, seperti gerakan binatang yang disembelih, tidak dapat dijadikan dasar bahwa anak itu hidup.²⁰⁴

3. **Syarat ketiga**, adanya sebab yang menunjukkan saling mewarisi antara bayi dalam kandungan dengan pewaris. Dan tidak melakukan sebuah perbuatan yang bisa menjadi penghalang untuk saling mewarisi.

C. Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris Hamil.

Jika pewaris meninggal dunia, sementara ada di antara ahli waris yang sedang hamil, dimana anak yang akan dilahirkan bisa mendapatkan warisan bersama-sama ahli waris yang ada atau terhibah oleh sebagian ahli waris. Apabila ahli waris yang lain sepakat untuk menunggu tidak membagikan dulu harta warisan sampai bayi tersebut dilahirkan dan jelas keadaannya, itu adalah sangat baik, karena bisa keluar dari prediksi yang salah dan kehati-hatian terhadap bagian bayi yang masih dalam kandungan, serta pembagiannya juga dilakukan sekali saja.

Namun, apabila sebagian atau seluruh ahli waris meminta agar dipercepat proses pembagian harta warisan, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait bolehnya membagi harta warisan bagi ahli waris sementara ada di antaranya yang belum diketahui secara pasti statusnya, diantara pendapat-pendapat yang masyhur adalah sebagai berikut.

1. Pendapat Mazhab Malikiyyah, dan Syafi’iyyah, bahwa tidak dibenarkan ahli waris membagi harta waris kecuali setelah ahli waris yang hamil melahirkan dan jelas statusnya. Karena pembagian warisan sebelum itu merupakan perkara yang masih samar dan bisa merugikan salah satu ahli waris yang ada. Boleh jadi anak yang dilahirkan tidak mendapatkan waris, boleh jadi juga anak

²⁰² Nashir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullāṣah Fi ‘Ilmi al-Farāid*,... h. 459.

²⁰³ Dikeluarkan oleh AbuDaud dari AbuHurairah dalam kitab farāid, bab bayi yang dilahirkan kemudian meninggal. hadis no 2918. Lihat Syamsul Haq al-‘Aẓīm Abādī, *‘Aun al-Ma’būt Syarah Sunan Abi Dawud*,..., jilid VIII, h. 95

²⁰⁴ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 800.

laki-laki dan perempuan, boleh jadi sendiri atau banyak, maka tunggulah sampai keluar dari rahim ibunya. Sehingga harta waris juga dilakukan sekali pembagian saja.²⁰⁵

2. Pendapat mazhab Hanafiyyah, Hanabilah, bahwa tidak mesti ahli waris harus menunggu sampai bayi dilahirkan, karena itu memberatkan mereka. Akan tetapi, harta waris dibagi dengan cara hati-hati dengan bagian yang mungkin diterima. Dan menanggguhkan bagian untuk bayi tersebut sampai jelas keadaannya, sehingga hilang keragu-raguan.²⁰⁶
3. Pendapat sebagian ulama Hanafiyyah, bahwa apabila waktu tidak lama, maka ditunggu sampai bayi tersebut dilahirkan. Karena tidak ada kemudharatan bagi ahli waris lain dalam hal ini. Dan pembagian cukup dilaksanakan sekali saja. Akan tetapi jika waktu tunggu lama, maka harta waris dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang mungkin diterima. Dan menyimpan bagian untuk bayi sampai jelas keadaannya.²⁰⁷

Pendapat yang ketiga ini, adalah lebih baik karena memperhatikan kedua kelompok baik ahli waris yang ada atau ahli waris yang akan ada (bayi). Jika diketahui masa kelahiran tidak lama lagi, alangkah baiknya ditunggu sampai bayi tersebut lahir. Namun, jika masih lama, harta waris boleh dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan mengambil bagian terkecil dari beberapa kemungkinan perkiraan yang ada.

D. Bagian yang Harus Ditanggguhkan Untuk Ahli Waris Hamil.

Berbeda pendapat ulama terkait pembagian harta waris yang ada ahli waris hamil di dalamnya, tanpa menunggu ahli waris tersebut lahir. Berapa jumlah yang diprediksikan akan dilahirkan, sehingga mengetahui bagian yang harus ditanggguhkan, terbagi kepada beberapa pendapat ulama, yaitu:

1. Pendapat mazhab Syafi'iyyah, bahwa tidak mungkin diprediksikan berapa jumlah bayi yang akan dilahirkan, karena ada perempuan yang melahirkan empat orang, lima orang, enam orang bahkan tujuh orang dalam rahim yang sama. Maka, pilihlah jumlah terbesar yang mempengaruhi bagian ahli waris yang ada.²⁰⁸
2. Pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian Malikiyyah, dan Syafi'i dalam satu pendapatnya, bahwa diprediksikan anak yang akan dilahirkan empat orang. Maka ditanggguhkan bagian untuk empat anak laki-laki atau empat anak perempuan, karena ini hal yang biasa akan terjadi, dan merupakan kemungkinan jumlah terbesar yang akan dilahirkan seorang perempuan. Dan ahli waris yang lain mengambil bagian terkecil dari kemungkinan anak yang akan dilahirkan tersebut laki-laki atau perempuan.²⁰⁹
3. Pendapat al-Laiṣ bin Sa'id, Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah, bahwa diprediksikan anak yang akan dilahirkan satu orang. Karena mayoritas terjadi seperti ini, dan lebih dari itu jarang sekali. Jadi, bagian satu orang yang akan ditanggguhkan, sementara ahli waris lain mengambil bagiannya masing-masing.²¹⁰
4. Mazhab Hanabilah, bahwa pembagian harta harus ditanggguhkan sejumlah bagian dua orang, baik dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Karena kebanyakan anak yang dilahirkan jika kembar adalah dua orang, lebih dari itu jarang sekali terjadi.

Menurut hemat penulis, pendapat yang paling kuat adalah pendapat al-Laiṣ bin Sa'id, Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah, bahwa bagian yang harus ditanggguhkan adalah bagian satu orang, baik laki-laki atau perempuan, karena yang sering terjadi janin yang dikandung hanya satu. Kemudian

²⁰⁵ Nashir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 463.

²⁰⁶ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 800.

²⁰⁷ Nashir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 464

²⁰⁸ Ibnu Qudamah al-Ḥanbalī, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 177

²⁰⁹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 800.

²¹⁰ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 800.

untuk mengantisipasi kandungan yang lebih dari satu janin, para ahli waris yang bagiannya berubah-ubah harus mengembalikan kelebihan harta waris yang didapatnya. Jika mereka tidak memberikan jaminan itu, pembagian tidak bisa dilakukan sampai saat kelahiran anak yang ada dalam kandungan tiba.

E. Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil

Bayi dalam kandungan dalam masalah waris, dihadapkan dengan berbagai macam keadaan, boeh jadi bayi tersebut bisa menghibah ahli waris yang ada secara hibah hirman, atau tehibah oleh ahli waris lain, atau mendapatkan bagian dalam satu keadaan dan tidak dapat dari keadaan lain, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Anak dalam kandungan, tidak dapat mewarisi dalam keadaan apapun, baik anak tersebut laki-laki atau perempuan. **Contohnya**, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Harta yang ditinggalkan 600 juta.

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan itu laki-laki, maka menjadi saudara laki-laki seibu, dan jika anak tersebut perempuan, menjadi saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu tidak bisa mendapatkan warisan, karena terhijab hirman oleh ayah pewaris. Oleh karena itu, tidak ada pembagian warisan yang ditangguhkan untuk bayi yang ada dalam kandungan. Dengan demikian, pembagian warisannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3	4
Ayah	‘aşabah	5

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=600 \text{ juta}:12 =50 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian istri} = 3 \times 50 \text{ juta} = 150 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian ibu} = 4 \times 50 \text{ juta} = 200 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian ayah} = 5 \times 50 \text{ juta} = \underline{250 \text{ juta}}$$

600 juta

2. Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dari salah satu diantara dua keadaan baik laki-laki atau perempuan dan tidak mendapatkan dari keadaan lain.

Contohnya, Seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris istri, paman kandung dan istri saudara kandung (ipar perempuan) yang sedang hamil. Harta yang ditinggalkan adalah 64 juta.

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka akan menjadi anak laki-laki dari saudara kandung, jika anak tersebut perempuan, menjadi anak perempuan dari saudara kandung, dimana anak perempuan dari saudara kandung merupakan *zawil arhām* (tidak mendapat warisan selama masih ada dalam suatu kasus *aşābul furūd* dan ‘aşabah). Dengan demikian, yang mendapat warisan dari anak yang akan dilahirkan adalah anak laki-laki saudara kandung. Pembagian warisnya adalah sebagai berikut.

Ahli Waris	Bagian	4
Istri	1/4	1
Anak laki-laki Sdr.Kandung	‘aşabah	3
Paman	Terhijab	X

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=64 \text{ juta}:4 =16 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian istri} = 1 \times 16 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$$

Bagian Anak Lk. Sdr. Kndg= $3 \times 16 \text{ juta} = 48 \text{ juta}$

64 juta

3. Anak dalam kandungan merupakan Ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun terhijab hak warisnya karena adanya janin.

Contohnya, Seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (Istri anak laki-laki hamil) dan saudara laki-laki seibu. Harta yang ditinggalkan adalah 200 juta.

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka akan menjadi cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan jika perempuan, menjadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Oleh karena itu, dalam dua keadaan tersebut kedua-duanya mendapat warisan. Bahkan, menghijab ahli waris lain. Pembagian warisnya di bawah ini.

- Jika yang dilahirkan laki-laki

Ahli Waris	Bagian	1
Cucu Lk.	'aşabah	1
Saudara Lk. Seibu	Terhijab	X

- Jika yang dilahirkan perempuan

Ahli Waris	Bagian	2	1
Cucu Pr.	1/2	1	1
Saudara Lk. Seibu	Terhijab	X	X

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 200 \text{ juta} : 1 = 200 \text{ juta.}$$

Bagian Cucu Lk. = $1 \times 200 \text{ juta} = \underline{200 \text{ juta}}$

Begitu juga dengan bagian cucu perempuan,

Bagian Cucu Pr. = $1 \times 200 \text{ juta} = \underline{200 \text{ juta}}$

Jika lahir cucu laki-laki mengambil seluruh harta waris 200 juta, begitu juga jika sekiranya dilahirkan cucu perempuan juga mendapatkan seluruh harta peninggalan 200 juta secara *fard* (bagian tetap) dan rad (pengembalian).

4. Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dalam segala keadaan yang bagiannya tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Contohnya, Seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung dan ibu hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris). Harta yang ditinggalkan 54 juta.

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika dilahirkan anak laki-laki, maka merupakan saudara laki-laki seibu, dan jika perempuan, merupakan saudara perempuan seibu. Mereka mendapatkan bagian dalam dua keadaan dimana bagian mereka sama. Pembagian warisannya.

	$\frac{6^3}{18}$			$\frac{6^3}{18}$			18	
Keadaan	Saudara Lk. Seibu			Saudara Pr. Seibu			Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	1			1			Saudara Lk. Seibu	Saudara Pr. Seibu
Hamil	1/6	1	3	1/6	1	3	3	3
Saudara kandung Lk.	'Aşabah	5	15	'Aşabah	5	15	10	10
Saudara kandung Pr.							5	5

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 3. Sementara saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung mendapatkan 15 bagian. Untuk saudara laki-laki kandung dapat 10 bagian, dan saudara perempuan kandung dapat 5 bagian.

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 54 \text{ juta} : 18 = 3 \text{ juta.}$$

Bagian Saudara Lk. Kandung = $10 \times 3 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$

Bagian Saudara Pr. Kandung = $5 \times 3 \text{ juta} = 15 \text{ juta}$

=

5. Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dalam segala keadaan baik laki-laki atau perempuan, dimana bagian laki-laki lebih besar dari perempuan.

Contohnya, Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Istri yang sedang hamil, ibu dan saudara laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkan 120 juta.

Penyelesaiannya, dari kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka merupakan anak laki-laki, dan jika perempuan berarti anak perempuan, keduanya bisa mendapatkan warisan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan.

	24		24		24	
Keadaan	Anak Lk.		Anak Pr.		Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	1		1		Anak Lk.	Anak Pr.
Hamil	'Aşabah	17	1/2	12	17	12
Istri	1/8	3	1/8	3	3	3
Ibu	1/6	4	1/6	4	4	4
Saudara Lk. Kandung	Terhijab	X	'Aşabah	5	X	5

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 17.

Anak yang hamil jika dilahirkan laki-laki, mengambil seluruh bagian yang ditangguhkan yaitu 17 bagian, dan saudara laki-laki kandung terhijab olehnya. Sedangkan, jika yang dilahirkan perempuan mendapat 12 bagian, sedangkan 5 bagian lagi diberikan untuk saudara laki-laki kandung.

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 120 \text{ juta} : 24 = 5 \text{ juta.}$$

Bagian istri = $3 \times 5 \text{ juta} = 15 \text{ juta}$

Bagian ibu = $4 \times 5 \text{ juta} = 20 \text{ juta}$

Harta yang ditangguhkan adalah $17 \times 5 \text{ juta} = 85 \text{ juta.}$

F. Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai penyelesaian kasus anak dalam kandungan yang merupakan ahli waris, dengan menggunakan enam kemungkinan yang akan terjadi, disadur dari berbagai macam pendapat ulama yang telah dibahas pada pembahasan terdahulu.

Keenam macam kemungkinan itu adalah jika anak tersebut meninggal, atau laki-laki, atau perempuan, atau dua orang laki-laki, atau dua orang perempuan dan atau laki-laki dan perempuan. Dari enam kemungkinan ini nantinya akan diketahui keadaan setiap ahli waris lain yang bersama dengan anak dalam kandungan. Jika mendapatkan warisan dalam setiap keadaan maka diberikah bagian penuh untuknya, jika mendapatkan bagian tidak tetap (berubah-ubah), maka diberikan bagian paling kecil, dan begitu juga jika ada ahli waris pada satu keadaan mendapatkan bagian tapi keadaan lain tidak, maka bagiannya ditangguhkan terlebih dahulu sampai anak yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dan jelas keadaannya.

Boleh juga, nanti kita hanya menyelesaikan dengan dua keadaan saja atau malah jika memang setelah pemeriksaan melalui USG, dan hasilnya sangat jelas, boleh dibagikan langsung sesuai dengan yang diprediksikan. Dengan catatan bila suatu waktu ada perubahan maka ahli waris yang telah mengambil bagian waris, bersedia untuk mengembalikan bagian yang telah diterima untuk anak yang dilahirkan. **Contohnya**, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri hamil, saudara laki-laki kandung. Berapa bagian seluruh ahli waris dalam masalah ini.

		4		8		8		8 ² /16		24		8 ³ /24	
Istri	1/4	1	1/8	1	1/8	1	1/8	1/2	1/8	3	1/8	1	3
Saudara Lk. Kandung	ع	3	ع	خ	ع	3	ع	خ	ع	5	ع	خ	خ
Hamil	خ	خ	ع	7	1/2	4	ع	7/14	2/3	16	ع	7	21
Prediksi hamil		Mati		Lk. (Anak Lk.)		Pr. (Anak Pr.)		2 Lk. (dua anak Lk.)		2 Pr. (dua anak Pr.)		Lk. Dan Pr. (anak Lk dan Pr)	

(Gabungan Masalah 2x24=48)

<i>Juz' saha m</i>	12	6	6	3	2	2
Istri	12	6	6	6	6	6
Sdr. Lk. Kandung	36	X	18	X	10	X
Hamil	X	42	24	42	32	42

Keterangan: pada kasus ini bagian yang harus ditanggguhkan adalah 42. Jika yang dilahirkan adalah anak laki-laki atau dua orang anak laki-laki atau anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian yang ditanggguhkan tersebut seluruhnya untuk mereka, yaitu 42 bagian. Jika yang dilahirkan anak perempuan maka mendapatkan 24 bagian, dan untuk saudara kandung 18 bagian. Jika yang dilahirkan dua anak perempuan, maka mereka mendapatkan 32 bagian, dan saudara laki-laki kandung 10 bagian. Begitu juga bagian istri dalam keadaan-keadaan ini tidak berubah mendapatkan 6 bagian. Kemudian jika anak yang dilahirkan meninggal maka istri dapat sisa 6 bagian lagi, dan saudara laki-laki kandung 36 bagian.

Daftar Pustaka

- Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-'Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi'i*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 1421), Jilid IX
- 'Alī bin Ahmad bin Hazm al-Ẓahirī, *Al-Maḥallī bi al-Aṣār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), Jilid X
- Ibnu Manẓūr al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāṣ al-Islāmī, 1419), Jilid III, V, IX, X, XIV
- Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX
- Maṣūr bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'*, (Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub, 1403) Jilid II, IV
- Muhammad Ali al-Bār, *Khalaqa al-Insān baina al-Ṭib wa al-Qur'an*, (Arab Saudi: Dār al-Su'udiyah linnasyar, 1984)
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
- Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fī 'Ilmi al-Faraiḍ*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007)

MATERI 11. KEWARISAN *KHUNSA*

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A.

A. Pengertian *Khunsa*

Secara etimologi *khunsa* adalah *al-takassur* (terpecah) dan *al-tasanni* (mendua). Sedangkan secara terminologi *khunsa* adalah orang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan sekaligus, atau tidak memiliki kedua-duanya sama sekali, hanya memiliki lubang untuk kencing.²¹¹

Khunsa musykil adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak tampak pada dirinya ciri-ciri seorang laki-laki atau perempuan, atau ciri-ciri yang dimiliki berlawanan dengan ciri umum seorang laki-laki dan perempuan, misalnya jenggot dan payudara.²¹² Dengan demikian, statusnya menjadi tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan.

B. Jalur-jalur Keturunan *khunsa*.

Para ulama *faraid* setelah mengadakan penyelidikan (*istiqla*'), menetapkan bahwa para ahli waris *khunsa* hanya diketahui melalui empat *jihat* (jalur) sebagai berikut:

- Jihat Bunuwah* (jalur anak), para ahli waris *khunsa* yang tergabung dalam *jihat bunuwah* ini yaitu anak dan cucu, boleh jadi laki-laki dan boleh jadi perempuan.
- Jihat Ukhuwah* (jalur saudara), mereka yang tergabung dalam *jihat ukhuwah* yakni saudara dan anak saudara, yaitu kemenakan, boleh jadi laki-laki dan boleh jadi perempuan.
- Jihat 'Umumah* (jalur paman), para ahli waris *khunsa* dari garis paman yakni paman dan anak paman (saudara sepupu).
- Jihat Wala'* (perwalian budak), ahli waris yang *khunsa* dari golongan ini hanya seorang saja yakni *maulal-mu'tiq* (tuan yang telah membebaskan budaknya).

Sementara *jihat Ubuwwah* (ayah, ibu, kakek dan nenek), *jihat Zaujiyyah* (suami dan isteri), tidak mungkin mereka sebagai *khunsa*. Sebab nikah mereka tidak sah dan tidak dapat mengadakan hubungan biologis sebagai media adanya keturunan. Andai kata ada mereka bukan *musykil* lagi.²¹³

C. Keadaan *Khunsa* dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan.

Khunsa tidak pernah lepas dari tiga keadaan, yaitu sebagai berikut.

- Merupakan *khunsa ghairu musykil*, yaitu *khunsa* yang telah jelas keadaannya, melalui alat kelamin yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dan dari segi munculnya tanda-tanda kelakiannya maka dia mengambil hukum laki-laki, begitu juga muncul tanda-tanda keperempuanannya maka dia mengambil hukum perempuan.

Tanda-tanda yang bisa membedakan *khunsa* ada dua, yaitu boleh secara *khalqiyyah* (lahiriah) dan *tibbiyyah* (medis). Tanda-tanda *khalqiyyah* (lahiriah) di antaranya ada yang terjadi sebelum baligh yaitu dari cara kencing, jika mengeluarkan air kencing melalui kelamin laki-laki dia adalah laki-laki begitu pula sebaliknya, jika air kencing keluar dari kelamin perempuan dia adalah perempuan. Karena manfaat asli dari alat kelamin pada masa kecil adalah untuk kencing saja, dan hal yang sama dari manfaat tersebut akan muncul ketika baligh.

Adapun tanda-tanda yang terjadi setelah baligh menurut fuqaha' yang menjadi pembeda antara baligh seorang laki-laki dengan perempuan adalah, tumbuhnya jenggot, kumis, jimak menggunakan kelamin laki-laki, keluarnya mani dari laki-laki dan suka kepada perempuan, semua tanda-tanda ini adalah indikasi bahwa dia adalah laki-laki. Sedangkan haid, payudara, jimak

²¹¹ 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*,...h. 137

²¹² Naṣhīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 464

²¹³ Muḥammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 727-728.

menggunakan kelamin perempuan, keluarnya susu dari payudara, suka kepada laki-laki, ini merupakan indikasi dia adalah perempuan.

Bisa juga mengetahui *khunsa* meskipun tertutupi oleh tanda-tanda tersebut, yaitu dengan cara *ṭibbiyyah* (medis). Berkonsultasi dengan ahli medis yang berpengalaman untuk meneliti apakah dia seorang laki-laki atau perempuan, bahkan tidak ada larangan jika medis melakukan tindakan operasi untuk memperjelas statusnya, karena ketentuan dari Allah menuntut agar seseorang tidak berkelamin ganda.

Para ulama sepakat mengenai *khunsa* yang memiliki dua alat kelamin, dan mungkin untuk dibedakan antara keduanya, maka dia mendapatkan warisan sesuai tanda-tanda yang dimiliki. Yang terpenting adalah cara kencing, jika dia kencing melalui kelamin laki-laki, maka dia mendapatkan warisan bagian laki-laki. Sedangkan jika dia kencing melalui kelamin perempuan, dia mendapatkan warisan bagian perempuan. Jika dia kencing melalui dua kelamin itu, maka ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Jika air kencing keluar dari kelamin laki-laki dahulu, kemudian kelamin perempuan, dia adalah laki-laki, namun jika air kencing keluar dari kelamin perempuan dahulu, kemudian kelamin laki-laki, dia adalah perempuan. Karena kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin yang sebenarnya. Jika tetap sama, maka menurut jumhur ulama, yang dilihat adalah yang terbanyak air kencingnya, karena jumlah yang lebih banyak diberlakukan untuk seluruhnya dan sebagai tanda keaslian serta kekuatan.²¹⁴

Dalilnya adalah riwayat dari ‘Ali ra. Bahwa ada yang bertanya tentang kasus seseorang yang memiliki dua kelamin sekaligus, laki-laki dan perempuan, bagaimana hukum warisnya, beliau menjawab: “*Dari kelamin mana dia kencing*”. Begitu juga ada riwayat dari al-Sya’biyyi dari ‘Ali tentang kasus *khunsa*, berkata: “*Dia mewarisi dari arah mana kencingnya*”.²¹⁵

Imam Ibnu al-Munzir, mengatakan ulama telah berijma’ bahwa *khunsa* mewarisi dari segi kencing, jika kencing dari kelamin laki-laki, maka dia mendapatkan hukum waris laki-laki, jika dia kencing dengan kelamin perempuan, maka dia mendapatkan bagian waris perempuan.²¹⁶

Dengan demikian, hukum kewarisan *khunsa* pada keadaan ini, mengikuti ketentuan umum dalam kewarisan, mendapatkan warisan sekali, boleh jadi bagiannya laki-laki atau perempuan.

2. Merupakan *khunsa musykil* (yang sulit ditentukan), yaitu *khunsa* yang memiliki dua kelamin dan melalui alat kelamin yang ada tidak dapat dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Akan tetapi kejelasan statusnya masih bisa diharapkan, seperti *khunsa* yang masih kecil, dimana pewaris meninggal sementara dia belum baligh.²¹⁷
3. Merupakan *khunsa musykil*, tidak jelas keadaannya, yaitu *khunsa* yang memiliki dua kelamin dan melalui alat kelamin yang ada tidak dapat dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Begitu juga kejelasan statusnya tidak bisa diharapkan lagi, karena sudah baligh dan tidak ada tanda-tanda untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Maka *khunsa* ini sama hukumnya dengan *khunsa* yang meninggal di waktu kecil sebelum baligh, namun belum terlihat tanda-tanda seorang laki-laki atau perempuan.²¹⁸

❖ Hukum Mewarisi Khunsa Dalam Dua Keadaan Ini.

²¹⁴ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid IX, h. 77

²¹⁵ Kedua hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Daramiyyu dalam kitab *al-farā’id*, bab kewarisan *khunsa*, hadis no. 125, 126. Lihat Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdu al-Rahman al-Dāramiyyu, *Sunan al-Dāramiyyu*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417), jilid II, h. 282.

²¹⁶ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 109.

²¹⁷ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid IX, h. 76-77.

²¹⁸ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid IX, h. 76-77.

Khunsa musykil baik laki-laki atau perempuan, dari dua keadaan di atas tadi, bagian kewarisannya tidak akan pernah luput dari lima keadaan di bawah ini:

- 1) *Khunsa musykil* tidak akan mendapatkan warisan dalam keadaan apapun, karena dia *terhijab hirman* oleh ahli waris lain. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah saudara laki-laki *khunsa musykil*, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam keadaan ini, *khunsa* tidak mendapatkan bagian dari peninggalan pewaris dan keberadaannya juga tidak membawa dampak bagi ahli waris lain, begitu juga statusnya jelas apakah laki-laki atau perempuan atau tidak jelas sama saja, karena dia akan *terhijab hirman* oleh anak laki-laki. Begitu juga cucu laki-laki *terhijab* oleh anak laki-laki.
- 2) *Khunsa musykil* adalah ahli waris tunggal, dia akan menghibab *hirman* ahli waris lain. **Contohnya** ahli waris yang ditinggalkan adalah anak laki-laki *khunsa musykil* dan saudara laki-laki seibu. Maka dalam keadaan ini *khunsa* mengambil bagian harta semuanya. Dan tidak perlu untuk mengetahui kejelasan statusnya apakah laki-laki atau perempuan.
- 3) *Khunsa musykil* mendapatkan bagian yang sama, baik dalam posisi laki-laki atau perempuan. Maka, bagian warisnya adalah sama, mendapat $\frac{1}{6}$ jika sendiri dan $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih. Maka dalam keadaan ini, tidak perlu untuk mengetahui kejelasan status *khunsa* tersebut laki-laki atau perempuan, karena mendapatkan bagian yang sama. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah saudara laki-laki kandung dan saudara *khunsa musykil* seibu. Bagian untuk saudara laki-laki kandung adalah 'aşabah, dan saudara seibu *khunsa* mendapat bagian $\frac{1}{6}$. Sama ada dia laki-laki atau perempuan. Karean bagiannya sama tidak perlu dicari kejelasan lagi apakah laki-laki atau perempuan.

Tiga keadaan di atas, tidak terdapat permasalahan di dalamnya karena merupakan kesepakatan diantara para ulama terhadap hukum yang telah disebutkan pada setiap keadaan.

- 4) *Khunsa musykil* mendapatkan warisan dari salah satu kemungkinan saja, dan tidak dari kemungkinan lain. Seperti anak saudara kandung *khunsa*, maka dia mendapatkan warisan dari bagian laki-laki saja (anak laki-laki saudara kandung), kalau perempuan tidak dapat karena masuk dalam *ẓawil arḥām*, dimana selama dalam satu kasus masih terdapat *aṣḥābul furūd* dan 'aşabah, maka *ẓawil arḥām* tidak dapat warisan.
- 5) *Khunsa musykil* mendapatkan warisan dari semua kemungkinan yang ada. Akan tetapi bagiannya berbeda. Seperti ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan dan cucu laki-laki *khunsa* (diperkirakan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, bagiannya 2:1).

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait kewarisan *khunsa musykil* pada dua keadaan di atas, yang terbagi ke dalam empat pendapat, yaitu:

1. Pendapat Jumhur Hanafiyyah, bahwa memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khunsa* dan memberi bagian terbesar kepada ahli waris lain.²¹⁹ Maksudnya dengan cara membandingkan terlebih dahulu berapa bagiannya apabila dia digolongkan sebagai laki-laki dan berapa pula bagiannya apabila dia digolongkan sebagai perempuan, setelah perbandingan ini diketahui, maka kepada orang yang *khunsa* tersebut diberi bagian terkecil dari 2 (dua) kemungkinan bagian tersebut. Karena inilah cara yang lebih meyakinkan, sedangkan cara lain masih meragukan.
2. Pendapat mazhab Syafi'iyah, bahwa memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khunsa* dan ahli waris yang lainnya, dan sisa harta ditangguhkan

²¹⁹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 730.

pembagiannya sampai ada kejelasan, atau penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan bersama para ahli waris.

3. Pendapat mazhab Malikiyyah, Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah, Ibnu ‘Abbas, bahwa memberikan separuh dari 2 (dua) perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khunsa musykil* dan ahli waris lain. Memproses *khunsa* dalam pembagian waris dengan proses yang buruk atau dengan pembagian yang paling sedikit, sama tidak bagiknya dengan proses yang sejenis untuk ahli waris yang lain. Padahal, hukum yang ditetapkan demikian tidak berdasarkan dalil.²²⁰
4. Pendapat mazhab Hanabilah, mempunyai dua pendapat mengenai kondisi *khunsa*.

Pertama, kondisi dimana kejelasan status *khunsa* masih bisa diharapkan. Kondisi ini terjadi ketika *khunsa* masih kecil. Oleh karena itu, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian paling kecil dan sisa harta waris ditangguhkan sampai status *khunsa* jelas. Jika statusnya sudah jelas dan berhak mendapatkan sisa, sisa itu diberikan kepadanya. Namun jika tidak, harta yang ditangguhkan itu diberikan kepada ahli waris yang lain. Sebagaimana pendapat mazhab Syafi’iyyah.

Kedua, kondisi dimana kejelasan status *khunsa* tidak bisa diharapkan lagi, misalnya karena dia meninggal di waktu kecil atau sudah baligh, namun tidak terlihat ciri-ciri seorang lelaki atau perempuan. Dalam keadaan ini, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian separuh, jika dia dianggap laki-laki atau perempuan. Sebagaimana mazhab Malikiyyah.²²¹

Pendapat yang keempat merupakan pendapat yang lebih kuat, karena mempertimbangkan keadaan *khunsa*, sekaligus keadaan para ahli waris yang lain.

D. Metode Penyelesaian Kasus *Khunsa*.

1. Metode penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya masih bisa diharapkan.

- 1) Memberikan bagian *khunsa* dalam dua keadaan, keadaan dia laki-laki dan keadaan dia perempuan.
- 2) Membagi asal masalah dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu *taṣḥīḥ* maka *ditaṣḥīḥ* (membulatkan).
- 3) Membandingkan di antara asal masalah yang ada dengan menggunakan pola empat yaitu *tadākhul*, *tamāṣul*, *tawāfuq* atau *tabāyun*.
- 4) Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut dan mengalikan silang guna mendapatkan *juzu’ saham* (bagian *saham*).
- 5) Kalikan *juzu’ saham* (bagian *saham*) dengan setiap bagian ahli waris yang ada, dan hasilnya adalah bagian (*saham*) mereka setelah digabungkan.
- 6) Berikan untuk *khunsa* dan ahli waris lainnya bagian terkecil dari dua masalah tersebut.
- 7) Bandingkan semua bagian-bagian yang diterima oleh *khunsa* dan ahli waris lain dalam dua masalah tersebut. Siapa yang mendapatkan warisan dari semua keadaan dan bagiannya tidak berubah, maka berikan bagian tersebut kepadanya. Dan siapa yang bagiannya pada satu keadaan lebih kecil daripada keadaan kedua, berilah bagian terkecil untuknya. Dan siapa yang mendapat bagian pada keadaan pertama sementara tidak mendapat bagian pada keadaan kedua, tidak diberikan bagiannya sedikitpun.
- 8) Jumlahkan bagian-bagian yang telah diberikan kepada *khunsa* dan ahli waris lain, dan sisanya itu yang ditangguhkan untuk tidak diberikan sementara waktu, sampai jelas keadaan *khunsa*.

²²⁰ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 730.

²²¹ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 110

Jika dia berhak mendapatkan tambahan berikan untuknya, tapi jika tidak maka kembalikan kepada ahli waris lain.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, ayah, ibu, anak perempuan dan anak *khunsa* yang statusnya masih bisa diharapkan.

	$6^x/18$			6		18	
Keadaan	Laki-laki			Perempuan		Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	1			3		Laki-laki	Perempuan
Ibu	1/6	1	3	1/6	1	3	3
Ayah	1/6	1	3	1/6+sisa	1	3	3
Anak Pr.	'Aṣabah	4	4	2/3	2	4	6
Anak Khunsa			8		2	8	6

Keterangan: bagian yang ditangguhkan dalam kasus ini adalah 2 bagian. Ibu mendapatkan bagian 3. Ayah mendapatkan 3 bagian, *khunsa* yang masih menunggu kejelasan statusnya jika laki-laki mendapat 6 bagian. Dan *khunsa* yang masih menunggu kejelasan statusnya jika perempuan mendapat 4 bagian.

Jika jelas status *khunsa* adalah laki-laki maka dia mendapatkan bagian yang ditangguhkan seluruhnya yaitu 2 bagian sehingga jumlah bagiannya menjadi 8.

Jika status *khunsa* adalah perempuan maka dia mendapatkan bagian yang ditangguhkan seluruhnya yaitu 2 bagian, sehingga jumlah *saham*nya menjadi sempurna terpenuhi yaitu 6.

Contoh lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ayah, ibu, dan anak *khunsa* yang kejelasan statusnya masih bisa diharapkan. Harta yang ditinggalkan adalah 192 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

	24			24		24	
Keadaan	Laki-laki			Perempuan		Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	1			1		Laki-laki	Perempuan
Istri	1/8	3	1/8	3	3	3	3
Ayah	1/6	4	1/6+sisa	4+1=5	4	4	5
Ibu	1/6	4	1/6	4	4	4	4
Anak Khunsa	'Aṣabah	13	1/2	12	13	13	12

➤ Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.

Kadar satu bagian = harta:asal masalah

= 192 juta:24 = 8 juta.

Bagian istri = 3×8 juta = 24 juta

Bagian ayah = 4×8 juta = 32 juta

Bagian ibu = 4×8 juta = 32 juta

Bagian anak *khunsa* = 12×8 juta = 96 juta

Keterangan: Bagian yang ditangguhkan adalah 1 *saham*, jadi 1 *saham* dikali dengan 8 juta adalah (1x8 juta=8 juta).

Jika status *khunsa* jelas adalah laki-laki maka 8 juta tersebut untuk dia. Tapi jika jelas status *khunsa* adalah perempuan, maka 8 juta diserahkan untuk ayah.

2. Metode penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan lagi.

- 1) Memberikan bagian *khunsa* dalam dua keadaan, keadaan dia laki-laki dan keadaan dia perempuan.
- 2) Membagi asal masalah dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu *taṣḥīh* maka *ditaṣḥīh* (membulatkan).
- 3) Membandingkan di antara asal masalah yang ada dengan menggunakan pola empat yaitu *tadākhul*, *tamāṣul*, *tawāfuq* atau *tabāyun*. Dan asal masalah yang dihasilkan dari dua perbandingan masalah tersebut dikalikan dengan 2 untuk mendapatkan gabungan asal masalah *khunsa*.
- 4) Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut guna mendapatkan *juzu' saham* (bagian *saham*).
- 5) Kalikan *juzu' saham* (bagian *saham*) dengan setiap bagian ahli waris yang ada, dan hasilnya adalah bagian (*saham*) mereka setelah digabungkan.
- 6) Gabungkan bagian setiap ahli waris dalam dua keadaan masalah tersebut, termasuk juga *khunsa*, kemudian dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan 2, sehingga hasil penjumlahan tersebut adalah bagian untuk masing-masing ahli waris yang ada.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, ayah, ibu, anak perempuan, anak *khunsa* yang statusnya tidak bisa diharapkan lagi. Harta yang ditinggalkan adalah 612 juta.

	6 ^{x3} /18			6		18x2=36	
Keadaan	Laki-laki			Perempuan		Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	2			6			
Ibu	1/6	1	3	1/6	1	6+6=12:2=6	
Ayah	1/6	1	3	1/6+sisa	1	6+6=12:2=6	
Anak Pr.	‘Aṣabah	4	12	2/3	4	2	8+12=20:2=10
Anak Khunsa			8			2	16+12=28:2=14

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=612 \text{ juta}:36 =17 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian ibu} = 6 \times 17 \text{ juta} = 102 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian ayah} = 6 \times 17 \text{ juta} = 102 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian anak perempuan} = 10 \times 17 \text{ juta} = 170 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian anak khunsa} = 14 \times 17 \text{ juta} = 238 \text{ juta}$$

$$\underline{\underline{612 \text{ juta}}}$$

Contoh lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki dan anak *khunsa* yang statusnya tidak bisa diharapkan lagi. Harta yang ditinggalkan adalah 728 juta.

	4		7		4x7x2=56	
Keadaan	Laki-laki		Perempuan		Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	14		8			
3 Anak Lk.	‘Aṣabah	3	‘Aṣabah	6	42+48=90:2=45	
Anak Khunsa		1		1	14+8=22:2=11	

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=728 \text{ juta}:56 =13 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian 3 Anak Lk.} = 45 \times 13 \text{ juta} = 585 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian anak khunsa} = 11 \times 13 \text{ juta} = 143 \text{ juta}$$

Jadi, bagian untuk satu orang anak laki-laki adalah 195 juta.

Daftar Pustaka

- Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafī’ī*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 1421), Jilid IX
- Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdu al-Rahman al-Dāramiyyu, *Sunan al-Dāramiyyu*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417), jilid II
- ‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1413)
- Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
- Naṣhīr bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraiḍ*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007)

MATERI 12. *MUNĀSAKHĀT*

Penulis: Muhibbussaby, Lc., M.A.

A. Pengertian *Munāsakhāt*.

Secara etimologi *munāsakhāt* adalah jamak dari *munāsakhah*, yang diambil dari kata *al-Naskhi*, yang memiliki banyak makna, di antaranya; *al-naql* (memindahkan), *al-taghyīr* (mengubah), *al-tabdīl* (mengganti), *al-izālah* (menghilangkan), dan membatalkan sesuatu, menetap pada selain tempatnya, seperti ungkapan: “*nasakhtul kitāb*” (aku menyalin dari buku itu), dan “*nasakhat al-āyah*” (menghilangkan hukumnya).²²² Sebagaimana firman Allah: “*Ayat mana saja yang Kami nasakhtkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*”, yakni kengganti dan mengubah hukumnya.

Sementara *munāsakhāt* secara terminologi adalah meninggalnya seorang pewaris dan harta warisannya belum dibagikan sampai meninggal ahli waris lain baik sendiri atau banyak.²²³

Dinamakan dengan *munāsakhāt* karena masalah yang pertama dipindahkan menjadi masalah yang kedua, sehingga hukumnya menjadi hilang dan berubah. Atau karena harta waris berpindah dari satu ahli waris kepada ahli waris lain.²²⁴

Munāsakhat terjadi pada harta peninggalan pewaris pertama yang belum sempat dibagikan, sementara ada diantara ahli waris tersebut yang meninggal dunia, kemudian harta peninggalan pewaris pertama ini dibagi untuk mengetahui bagian ahli waris yang meninggal tersebut, sekaligus dibagikan untuk ahli waris yang masih hidup. Adapun segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris yang meninggal kedua dari hartanya sendiri, yang diperoleh sebelum harta waris pewaris pertama dibagikan atau diperoleh setelah meninggalnya pewaris pertama sebelum dibagikan harta tersebut kepadanya, maka harta tersebut dibagikan untuk ahli waris dari yang meninggal kedua sebagaimana aturan umum dalam pembagian harta warisan.

B. Keadaan-keadaan kasus *Munāsakhāt*.

Terdapat tiga keadaan yang mungkin akan terjadi pada kasus *munāsakhāt*, yaitu:

1. Ahli waris dari yang meninggal kedua dan setelahnya adalah ahli waris yang mewarisi harta dari pewaris pertama juga. Dalam keadaan ini, masalahnya tidak berubah dan tidak berganti ahli warisnya. Keadaan ini menurut penelitian (*istiqrā'*) terbagi kepada lima gambaran.

- 1) Ahli waris terbatas pada penerima bagian yang sama, maka mendapatkan bagian warisan dari dua/lebih orang yang meninggal tersebut dengan satu cara. Boleh jadi hanya mendapatkan ‘*aṣabah*’ saja, atau bagian tetap saja (*farḍ*). **Contohnya** ahli waris yang ditinggalkan adalah 6 anak laki-laki, kemudian harta warisan tidak dibagikan, sampai meninggal beberapa orang di antara mereka. Sehingga ahli waris yang tersisa hanya 3 orang saja. Bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Jawab, harta waris yang ditinggalkan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup, tanpa melihat kepada ahli waris lain yang meninggal setelah meninggal pewaris pertama. Bagaikan ayah hanya meninggalkan ahli waris 3 orang anak saja. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	3
3 anak laki-laki	‘Aṣabah	1
		1

²²² Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab*..., Jilid XIV, h. 121.

²²³ Maṣūr bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā*’,... Jilid IV, h. 443.

²²⁴ Maṣūr bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā*’,... Jilid IV, h. 443.

		1
--	--	---

Contoh lain, ahli waris yang ditinggalkan adalah 8 anak perempuan, kemudian harta warisan tidak dibagikan, sampai meninggal beberapa orang di antara mereka. Sementara ahli waris yang tersisa 4 orang lagi. Bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Jawab, harta waris yang ditinggalkan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup, tanpa melihat kepada ahli waris yang meninggal setelah meninggal pewaris pertama. Bagaikan ayah hanya meninggalkan ahli waris 4 orang anak saja. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	3	4
4 anak perempuan	2/3	2	1
			1
			1
			1

- 2) Ahli waris terbatas pada penerima bagian yang sama, akan tetapi mereka mendapatkan bagian waris dari dua orang yang meninggal tersebut dengan ‘aṣabah dan bagian tetap (*farḍ*).

Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah 7 saudara laki-laki seibu dan 6 anak laki-laki paman seayah. Bagian harta waris tidak dibagikan sampai meninggal 2 orang dari saudara laki-laki seibu dan 1 orang anak laki-laki paman seayah. Bagaimana menyelesaikan kasus ini.

Jawab, membagi harta peninggalan kepada ahli waris yang tersisa, tanpa memperhatikan lagi ahli waris yang meninggal kemudian setelah meninggal pewaris pertama. Sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	3 ^{xs}	15
5 saudara Lk.Seibu	1/3	1	5
5 anak Lk. Paman seayah	‘Aṣabah	2	10

Keterangan: 5 saudara perempuan mendapatkan 5 bagian, setiap satu orang di antara mereka menerima 1 bagian, dan 5 anak laki-laki paman seayah mendapatkan 10 bagian, dimana setiap satu orang mendapatkan 2 bagian.

- 3) Ahli waris tidak terbatas pada penerima bagian yang sama, akan tetapi bagian mereka berbeda-beda, dan mendapatkan warisan dari bagian tetap saja (*farḍ*). **Contohnya** ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, harta peninggalan tidak dibagi untuk ahli waris tersebut, sampai saudara perempuan seayah menikah dengan seorang suami, kemudian dia meninggal dan juga meninggalkan saudara perempuan kandung. Bagaimana membagi masalah di antara mereka. **Jawab.**

- Masalah pewaris pertama.

Ahli Waris	Bagian	6	7
Suami	1/2	3	3
Saudara Pr.Kandung	1/2	3	3
Saudara Pr. Seayah	1/6	1	1

- Masalah pewaris kedua.

Ahli Waris	Bagian	2
Suami	1/2	1
Saudara Pr.Kandung	1/2	1

Keterangan: masalah pewaris pertama adalah kasus ‘aul dari asal masalah 6 menjadi 7. Bagian yang dimiliki oleh pewaris kedua dalam masalah pertama adalah 1, suami mengambil 3 bagian dan saudara perempuan kandung mengambil 3 bagian. Kemudian pada masalah kedua, membagi langsung bagian yang ditinggalkan oleh pewaris kedua

kepada ahli warisnya yang ada, yaitu suami mendapat 1 bagian dan saudara perempuan kandung mendapat 1 bagian.

- 4) Ahli waris memiliki bagian waris yang berbeda-beda. Dimana bagian waris mereka sebagai penerima ‘*aṣabah*’ yang di dalamnya juga terdapat penerima bagian tetap, kemudian berubah menjadi penerima bagian ‘*aṣabah*’ semua. **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri dan 5 orang anak laki-laki, harta waris tidak dibagi diantara mereka, sehingga meninggal 2 orang anak laki-laki tersebut dan setelah itu meninggal lagi ibunya (istri pewaris). Bagaimana membagi masalah ini.

Jawab, membagi masalah kepada tiga anak laki-laki yang masih hidup, umpamanya ayah mereka hanya meninggalkan mereka saja. Juga dengan memperhatikan siapa yang meninggal setelahnya. Jelasnya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	8^{x5}	40
Istri	1/8	1	5
5 anak laki-laki	‘Aṣabah	7	35

Setelah menyelesaikan kasus yang ditinggal 5 orang anak laki-laki dan istri, ternyata kemudian istri (ibu) mereka meninggal. Maka pembagiannya adalah seperti di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	3
3 anak laki-laki	‘Aṣabah	3

Keterangan: ahli waris dari pewaris pertama mendapatkan bagian waris darinya dengan ‘*aṣabah*’, dan terdapat juga penerima bagian tetap (*farḍ*) yaitu istrinya, begitu juga istri (ibu) mewarisi bersama dengan anak-anaknya dengan bagian tetap (*farḍ*). Kemudian meninggal ibu (istri) dari anak-anaknya yang tersisa. Sehingga beralihlah bagian warisan pewaris pertama kepada penerima ‘*aṣabah*’ saja. Kemudian membagi masalah untuk 3 anak laki-laki yang tersisa, mereka mendapatkan warisan dengan bagian ‘*aṣabah*’ saja.

- 5) Ahli waris memiliki bagian waris yang berbeda-beda. Dimana bagian waris mereka sebagai penerima bagian tetap (*farḍ*) yang di dalamnya juga terdapat penerima ‘*aṣabah*’, kemudian berubah menjadi penerima bagian tetap (*farḍ*). **Contohnya**, ahli waris yang ditinggalkan adalah anak laki-laki, dan 5 orang anak perempuan. Harta waris tidak dibagikan sehingga meninggal salah seorang anak perempuan, kemudian meninggal lagi anak laki-laki diantara mereka. Bagaimana membagi masalah ini.

Jawab, membagi masalah untuk empat anak perempuan saja, umpamanya ayah mereka hanya meninggalkan mereka saja. Juga dengan memperhatikan siapa yang meninggal setelahnya.

Ahli Waris	Bagian	7
Anak laki-laki	‘Aṣabah	2
5 anak perempuan		5

Setelah menyelesaikan kasus yang ditinggal anak laki-laki dan 5 anak perempuan, kemudian meninggal lagi satu orang anak perempuan, ternyata kemudian anak laki-laki juga meninggal. Maka pembagiannya adalah seperti di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	3	4
4 Anak perempuan	2/3	2	4

Keterangan: ahli waris dari pewaris pertama, mendapatkan warisan melalui bagian tetap yang terdapat di dalamnya penerima bagian ‘*aṣabah*’ yaitu anak laki-laki. Dimana mereka mendapatkan bagian waris dari ayahnya dan dari saudara perempuan kandungnya (anak perempuan) yang meninggal berikutnya juga dengan ‘*aṣabah*’, kemudian meninggal anak laki-laki di antara saudara-saudara perempuan kandungnya yang tersisa. Sehingga bagian ‘*aṣabah*’

yang diterima oleh ahli waris beralih menjadi penerima bagian tetap (*fard*). Maka dalam kasus ini membagi bagian waris untuk 4 anak perempuan saja, setiap mereka dapat 1 bagian (karena merupakan kasus *rad*).

2. Ahli waris dari seluruh pewaris yang meninggal dunia, tidak mendapatkan bagian waris kecuali dari pewaris pertama. Artinya bagian waris yang akan mereka salurkan untuk ahli waris mereka, merupakan bagian yang mereka terima dari pewaris pertama. Pada keadaan ini, ada empat persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Jumlah ahli waris yang meninggal dua orang atau lebih.
- 2) Ahli waris yang meninggal setelah meninggalnya pewaris pertama seluruhnya adalah penerima waris dari pewaris pertama.
- 3) Tidak saling mewarisi antara pewaris yang meninggal setelah meninggal pewaris pertama, sebagian mereka dengan sebagian yang lain.
- 4) Ahli waris dari seluruh pewaris yang meninggal, tidak saling mewarisi dengan yang lain.

Jika syarat di atas tidak terpenuhi, artinya salah satu tidak ada. Maka, masalah *munāsakhāt* diselesaikan dengan metode keadaan yang ketiga, yang akan dijelaskan setelah ini.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 anak laki-laki, harta waris tidak dibagikan untuk mereka sehingga meninggal salah seorang anak laki-laki yang bersamanya ada ahli waris anak laki-laki (anak dari pernikahannya), kemudian meninggal lagi anak laki-laki dari pewaris pertama yang meninggalkan ahli warisnya istri dan anak laki-lakinya, kemudian meninggal lagi anak laki-laki dari pewaris pertama dan meninggalkan ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 480 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

Jawaban:

Asal Masalah	4		2		8		3	Gabungan
Juzu' saham	24		12		3		8	96
ع	Anak Lk	1						24
	Anak Lk	1	ت					
	Anak Lk	1		ت				
	Anak Lk	1				ت		
	ع	2 Anak Lk	2					24
				1/8	Istri	1		3
				ع	Anak Lk	7		21
						ع	Anak Lk	2
							Anak Pr	1
								8

Kadar satu bagian = harta: asal masalah
= 480 juta: 96 = 5 juta.

Keterangan: jadi anak laki-laki mengambil bagian dari pewaris pertama yaitu 24 (bagian) x 5 juta = 120 juta. Kemudian anak laki-laki yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian waris kepada kedua anak laki-lakinya 24 (bagian) x 5 juta = 120 juta, dimana setiap satu orang mengambil 12 x 5 juta = 60 juta. Sementara anak yang meninggal dari pewaris pertama

memberikan bagian waris untuk istrinya 3 (bagian)x5 juta=15 juta, dan anak laki-lakinya 21 (bagian)x5 juta=105 juta. Begitu juga, anak laki-laki yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian untuk anak laki-lakinya 16 (bagian)x5 juta=80 juta, dan anak perempuan mendapat 8 (bagian)x5 juta=40 juta.

Contoh lain, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, 3 orang saudara laki-laki kandung, harta waris belum dibagi untuk mereka, sehingga meninggal satu saudara laki-laki kandung yang meninggalkan dua anak laki-lakinya, kemudian meninggal lagi saudara laki-laki kandung yang lain, meninggalkan ahli waris istri dan dua orang anak laki-lakinya, selanjutnya meninggal saudara laki-laki kandung terakhir yang meninggalkan ahli waris dua orang istri dan anak laki-laki. Bagaimana menyelesaikan kasus ini.

Jawaban.

Asal Masalah	4		2		$8^{x2}/16$		$8^{x2}/16$	Gabungan
Juzu' saham	16		8		1		1	64
1/4	Istri	1						16
ع	Sdr Lk	1	ت					
	Sdr Lk	3	1		ت			
	Sdr Lk	1				ت		
	ع	2						16
	Anak Lk	2						8
								8
	1/8	Istri	1	2				2
	ع	2						7
	Anak Lk	7	14					7
					1/8	2	Istri	1
						1	2	2
								1
	ع	Anak Lk	7	14				14

Keterangan: istri dari pewaris pertama mendapatkan 16 bagian. Kemudian saudara laki-laki kandung yang meninggal dari pewaris pertama memberikan untuk ahli warisnya 2 orang anak laki-laki 16 bagian, setiap satu orang mendapatkan 8 bagian. Selanjutnya saudara laki-laki kandung yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian waris untuk istrinya 2 bagian, dan 2 orang anak laki-lakinya 14 bagian, setiap satu orang mendapatkan 7 bagian. Kemudian saudara laki-laki kandung yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian waris untuk 2 orang istrinya 2 bagian, dimana setiap satu orang dapat 1 bagian, dan untuk anak laki-lakinya mendapatkan 14 bagian.

- Ahli waris dari yang meninggal kedua dan setelahnya adalah ahli waris yang mewarisi harta dari pewaris pertama juga, akan tetapi bagian mereka berbeda-beda, atau sebagian mendapat warisan dari mereka sebagian lagi tidak.²²⁵ Keadaan ketiga ini memiliki tiga gambaran umum, yaitu:
 - Boleh jadi ahli waris dari yang meninggal kedua bukan merupakan ahli waris dari yang meninggal pertama, dan tidak dijumpai masalah ini kecuali dua orang (pewaris) yang meninggal saja.
 - Boleh jadi ahli waris dari yang meninggal kedua sudah bercampur dengan ahli waris dari pewaris pertama dan dari selain mereka.

²²⁵ Yang telah mempopulerkan pembagian munāsakhāt kepada tiga keadaan adalah mazhab Hanabilah, sehingga lebih mudah dalam penyelesaian kasus-kasus munāsakhāt. Lihat Maşur bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'...*, Jilid IV, h. 443-444

- 3) Boleh jadi ahli waris dari pewaris kedua merupakan penerima waris dari pewaris pertama, akan tetapi berbeda bagian waris mereka dari dua pewaris yang meninggal.²²⁶

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri dan dua orang anak laki-laki. Sebelum harta waris dibagikan, meninggal salah seorang anak laki-laki yang juga meninggalkan ahli waris istri dan anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan adalah 768 juta.

8 ^{x2} /16				24			384	
Keadaan	Masalah Pertama				Masalah Kedua			Gabungan
Juzu' saham	24				7			
Istri	1/8	1	2		Ibu	1/6	4	48+28=76
Anak Lk.	ع	7	14	7	Saudara Lk. Kandung	Terhijab	x	168
Anak Lk.				7	Mati	X	x	X
					Istri	1/8	3	21
					Anak Lk.	ع	17	119

Kadar satu bagian =harta:asal masalah
=768 juta:384 =2 juta.

Masalah pertama:

Bagian istri = 76x2 juta = 152 juta

Bagian anak laki-laki = 168x2 juta = 336 juta

Masalah kedua:

Bagian istri = 21x2 juta = 42 juta Bagian anak laki-laki= 119x2 juta = 238 juta
768 juta

Contoh lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan dan anak laki-laki, sebelum harta dibagikan ternyata anak laki-laki dari pewaris pertama tersebut meninggal dan meninggalkan ahli warisnya istri dan anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan adalah 720 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

4			24			48		
Keadaan	Masalah Pertama			Masalah Kedua			Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	12			1				
Sumi	1/4	1		Ayah	1/6	4	12+4=16	
Anak Pr.	ع	3	1	Saudara Pr. Kandung	Terhijab	X	12	
Anak Lk.			2	Mati	X	X	X	
				Istri	1/8	3	3	
				Anak Lk.	ع	17	17	

Kadar satu bagian =harta:asal masalah
=720 juta:48 =15 juta.

²²⁶ Sebagian ulama berpendapat bahwa semua kasus-kasus munāsakhāt diselesaikan dengan metode dari keadaan yang ketiga ini, bahkan mereka tidak menyelesaikan dengan dua keadaan sebelumnya. Akan tetapi memperinci kasus munāsakhāt kepada tiga keadaan adalah untuk memudahkan dan mengetahui seluk beluk penyelesaian kasus munāsakhāt.

Masalah pertama:

Bagian sumi = 16×15 juta = 240 juta

Bagian anak perempuan = 12×15 juta = 180 juta

Masalah kedua:

Bagian istri = 3×15 juta = 45 juta Bagian anak laki-laki = 17×15 juta = 255 juta
720 juta

Daftar Pustaka

Ibnu Manẓūr al-Ifṛīqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-Islāmī, 1419), Jilid III, V, IX, X, XIV

Maṣūr bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā’*, (Beirut: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1403) Jilid II, IV

A. Pengertian Żawīl ArĤām

Secara etimologi lafaż *al-arĤām* adalah bentuk jamak dari *rahīm*, yang artinya hubungan kekerabatan atau sebab terjalin kekerabatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 1: "*dan (peliharalah) hubungan silaturrahim*". Kemudian dinamakan *rahīm*ul unṣā yaitu tempat janin di dalam perut ibunya, senada dengan firman Allah: "*Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya*". Dan begitu juga firman Allah dalam surah al-Haj ayat 5: "*Agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan*".²²⁷

Sedangkan *żawīl arĤām* secara terminologi adalah seluruh kerabat baik mendapat warisan atau tidak.²²⁸ Adapun pengertian *żawīl arĤām* menurut ulama *farāīḍ* adalah seluruh kerabat yang bukan penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan bukan penerima sisa (*'aṣabah*).²²⁹

B. Pengelompokan Żawīl ArĤām

Secara umum *żawīl arĤām* di kelompokkan kepada empat, yaitu:

1. *Furū' al-Mayyit* (cabang yang meninggal), yaitu semua yang dipertalikan kepada pewaris melalui perempuan, yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan *'aṣabah*. Ada dua yang termasuk dalam kelompok ini yaitu:
 - 1) Cucu dari anak perempuan dan keturunan di bawahnya. Seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.
 - 2) Cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan keturunan di bawahnya. Seperti cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki.

Kelompok ini dinamakan dengan kelompok *jihah al-bunuwwah* (jalur anak).

2. *Uṣūl al-Mayyit* (leluhur yang meninggal), yaitu semua yang dipertalikan kepadanya pewaris melalui perempuan, yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan *'aṣabah*. Orang yang termasuk dalam kelompok ini juga ada dua yaitu:
 - 1) Kakek leluhur, yaitu ayah dari ibu, dan uṣūl lainnya yang berada di atas kakek. Seperti ayah dari ibunya ayah, ayah dari ibunya ibu, dan ayah dari ayahnya ibu.
 - 2) Nenek leluhur dan uṣūl lainnya yang berada di atas nenek, yaitu yang berhubungan dengan pewaris. Seperti ibu dari ayahnya ibu.

Kelompok ini dinamakan dengan *jihah al-ubuwwah* (jalur ayah).

3. *Abawai al-Mayyit* (cabang dari ayah atau ibu yang meninggal), yaitu semua yang dipertalikan kepada ayah dan ibu pewaris, yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan *'aṣabah*. Orang yang termasuk dalam kelompok ini ada tiga yaitu:

²²⁷ Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*,..., Jilid V, h.175

²²⁸ Al-Ĥāfiẓ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Quran al-'Azīm* (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1422), Jilid IV, h. 99-100

²²⁹ 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*,...h. 145

- 1) Anak perempuan dari saudara kandung atau seayah. Seperti anak perempuan dari saudara kandung, anak perempuan dari saudara seayah dan seterusnya kebawah.
- 2) Anak dari saudara perempuan kandung atau seayah. Seperti anak laki-laki saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan seayah dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah, dan seterusnya kebawah.
- 3) Anak saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti anak laki-laki dari saudara seibu, anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya kebawah. Kelompok ini dinamakan dengan *jihah al-ukhuwwah* (jalur saudara).
4. *Furu'* dari kakek dan nenek, yaitu semua yang dipertalikan kepada kakek dan nenek pewaris yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan '*aṣabah*'. Ada enam kelompok yang termasuk dalam pembagian ini, yaitu:
 - 1) Paman dan bibi pewaris yang seibu dari pihak ayah, serta paman dan bibi kandung atau seayah pewaris dari pihak ibu.
 - 2) Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam kelompok pertama dan keturunan yang ada di bawahnya. Seperti anak-anak perempuan paman kandung, anak-anak perempuan paman seayah, anak-anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan seterusnya kebawah.
 - 3) Paman dan bibi dari ayah pewaris (dari pihak ayah), paman dan bibi dari ayah pewaris (dari pihak ibu), baik kandung atau salah satunya. Paman dan bibi dari ibu pewaris (dari pihak ayah), dan paman dan bibi dari ibu pewaris (dari pihak ibu), yang sekandung atau salah satunya saja.
 - 4) Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam kelompok ketiga dan keturunannya. Seperti anak-anak perempuan paman dari ayah pewaris (dari pihak ayah) yang sekandung atau seayah saja, cucu perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunannya.
 - 5) Paman dan bibi dari ayahnya ayah pewaris yang seibu (dari pihak ayah), paman dan bibi dari ayahnya ibu pewaris (dari pihak ayah), paman dan bibi dari ayahnya ayah dan ayahnya ibu pewaris (dari pihak ibu) yang sekandung, seayah atau seibu saja, paman dan bibi dari ibunya ayah pewaris (dari pihak ayah), paman dan bibi dari ibunya ibu dan ibunya ayah pewaris (dari pihak ibu) yang sekandung, seayah atau seibu.
 - 6) Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam kelompok lima, seperti anak-anak perempuan paman dari kakek pewaris dari pihak ayah yang sekandung, atau seayah saja. Anak-anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunan di bawahnya.

Kelompok ini disebut dengan *jihah al-'Umumah wal khuūwlah* (jalur paman dan bibi)

C. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan *Ẓawīl Arḥām*.

Sepakat para ulama bahwa *ẓawīl arḥām* tidak mendapatkan warisan jika pewaris meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan '*aṣabah*'. Sementara jika pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul furūd* atau '*aṣabah*', atau ada sisa harta setelah diambil oleh salah seorang suami atau istri, maka para ulama berbeda pendapat tentang kewarisan *ẓawīl arḥām* dalam kasus tersebut, kepada dua pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Jumhur Ulama, Sahabat dan *tabi'īn* dan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah, bahwa *ẓawīl arḥām* mewarisi jika tidak ada penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan penerima bagian sisa ('*aṣabah*').²³⁰

²³⁰ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 791

Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah firman Allah surah al-Ahzab ayat 6: “*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah*”. Ayat ini menunjukkan bahwa *ẓawīl arḥām* lebih berhak untuk mendapatkan warisan menurut ketentuan Allah swt. Betapa tidak, pada masa awal Islam sebab mewarisi karena sumpah tidak termasuk *qarābah* (kekerabatan), dan hukum ini telah *dinasakh*, kemudian menjadikan sebab saling mewaris pada waktu itu karena *hijrah*, dan hukum ini juga *dinasakh*. Dengan demikian, jelaslah bahwa *ẓawīl arḥām* lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari pada yang lainnya.²³¹

Dalil dari sunnah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma’di Karib, Rasulullah bersabda: “*Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku bisa mengikat dan mewarisi. Paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dia bisa mengikat dan mewarisi*”.²³² Nabi memberikan warisan kepada paman dari pihak ibu ketika tidak ada ahli waris penerima bagian tetap dan ‘*aṣabah*, padahal paman dari pihak ibu merupakan *ẓawīl arḥām*, maka dia lebih berhak dari yang lainnya.²³³

2. Pendapat Zaid bin Tsabit, Ibnu ‘Umar, Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Auza’ī, al-Zuhri, Abu Sūr, mazhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah, bahwa *ẓawīl arḥām* tidak dapat memperoleh warisan sedikitpun, akan tetapi harta diberikan kepada baitul mal, jika pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan ‘*aṣabah*.²³⁴

Dalil mereka adalah ayat-ayat waris, yang di dalamnya hanya menjelaskan bagian-bagian ahli waris penerima bagian tetap dan ‘*aṣabah* saja, tanpa menyebutkan tentang bagian *ẓawīl arḥām*. Sekiranya mereka berhak mendapatkan warisan pasti al-Qur’an akan menjelaskannya, karena warisan tidak bisa diperoleh melainkan dengan *naṣ*. Senanda dengan sabda Nabi saw. “*Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang hak mereka masing-masing, tidak ada wasiat untuk ahli waris.*”

Dalil lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi ditanyai tentang warisan paman dan bibi, beliau berkata: “*saya tidak tahu, sampai turun Jibril*”. Kemudian Rasul berkata: “*dimana orang yang menanyakan tentang warisan paman dan bibi tadi? Allah telah menurunkan wahyu melalui Jibril bahwa: “tidak ada warisan bagi mereka berdua*”.²³⁵

Pendapat yang lebih kuat dari kedua pendapat di atas adalah pendapat jumhur ulama, bahwa *ẓawīl arḥām* mendapatkan warisan jika tidak ada *aṣḥābul furūd* dan ‘*aṣabah*. Sebab, dalil yang digunakan lebih kuat dan *maṣlahat* bagi kerabat-kerabat pewaris.

D. Cara *Ẓawīl Arḥām* Mewarisi.

Ada tiga cara pewarisan *ẓawīl arḥām*, yaitu sebagai berikut.

1. Cara ***Ahlu al-Tanzīl***, yaitu dengan mengembalikan setiap *ẓawīl arḥām* ketempat yang dipertalikan dengannya, baik penerima bagian tetap atau ‘*aṣabah* bagaikan mereka masih hidup. Maka bagian ahli waris asal (induk) itu adalah bagiannya. Jika silsilahnya terlalu jauh maka dikembalikan sedikit demi sedikit sampai dijumpai asalnya, dan mengambil bagian tersebut untuk warisannya. Jika *ẓawīl arḥām* hanya sendiri maka mengambil warisan seluruhnya, jika banyak maka dibagi

²³¹ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*, ... Jilid IX, h. 83

²³² Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *farāid*, bab *ẓawīl arḥām*, hadis no 2738, Lihat Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ... h. 395

²³³ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*, ... Jilid IX, h. 83-84

²³⁴ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*, ..., Jilid IX, h. 13.

²³⁵ Dikeluarkan oleh Dār Quṭniy dalam kitab *farāid*, Lihat ‘Ali bin ‘Umar, *Sunan Dār Quṭniy* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1386), Jilid XXXIV, h. 99.

sesuai dengan bagian yang diterima oleh ahli waris asal (induknya), dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 dengan perempuan dan ketentuan waris lainnya. Ini merupakan cara yang digunakan oleh jumhur sahabat dan tabi'in, juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya dan digunakan juga oleh pengikut Malikiyyah dan Syafi'iyah.²³⁶

Dalil mereka adalah tidak terdapat *naṣ* dari al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tata cara pembagian warisan *ẓawīl arḥām*, maka tidak mungkin untuk menetapkan warisan mereka dengan akal. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi masalah ini, kecuali dengan memberikan bagian untuk *ẓawīl arḥām* sesuai dengan bagian ahli waris asalnya jika masih hidup.

Cara ini juga dilakukan oleh para sahabat, yang sudah populer dikalangan mereka, dimana mengembalikan posisi *ẓawīl arḥām* kepada posisi ahli waris asalnya, kemudian memberi bagian tersebut untuk mereka. Perkara ini sudah pernah terjadi seperti menurunkan bibi dari ayah menjadi posisi ayah, bibi dari ibu menjadi posisi ibu, cucu perempuan dari anak perempuan menjadi posisi anak perempuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan kandung menjadi posisi saudara perempuan kandung.²³⁷

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bibi kandung dari pihak ayah, bibi seayah dari pihak ayah, bibi kandung dari pihak ibu, bibi seayah dari pihak ibu, dan 4 orang cucu laki-laki dari anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 552 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

Ahli Waris	Tanzil	Bagian	6 ^{x4}	24
Bibi kandung dari ayah	Ayah	1/6+sisa	1+1=2	8
Bibi seayah dari ayah				4
Bibi kandung dari ibu	Ibu	1/6	1	4
Bibi seayah dari ibu				2
4 cucu Lk dari anak Pr.	Anak Pr.	1/2	3	12

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

=552 juta:24 =23 juta.

Bagian bibi kandung dari ayah= 4x23 juta = 92 juta
 Bagian bibi seayah dari ayah = 4x23 juta = 92 juta
 Bagian bibi kandung dari ibu = 2x23 juta = 46 juta
 Bagian bibi seayah dari ibu = 2x23 juta = 46 juta
 Bagian 4 cucu Lk dari anak Pr.=12x23 juta = 276 juta
552 juta

Setiap satu orang cucu laki-laki dari anak perempuan mendapatkan 69 juta.

Contoh lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak laki-laki dari saudara perempuan seibu, dan anak perempuan dari paman kandung. harta yang ditinggalkan adalah 162 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

Ahli Waris	Tanzil	Bagian	6
Anak perempuan dari saudara perempuan kandung	Saudara perempuan kandung	1/2	3
Anak perempuan dari saudara perempuan seayah	Saudara perempuan seayah	1/6	1

²³⁶ ‘Abdullah bin Muhammad asy-Syansyurī, *Al-Fawāid al-Syansyuriyah Fi Syarḥi al-Manẓumah al-Ruḥbiyyah*,...h. 169

²³⁷ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 85.

Anak laki-laki dari saudara perempuan seibu	Saudara perempuan seibu	1/6	1
Anak perempuan dari paman kandung	Paman kandung	‘aṣabah	1

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 162 \text{ juta} : 6 = 27 \text{ juta.}$$

Bagian Ank. Pr. Sdr. Pr. Kandung = $3 \times 27 \text{ juta} = 81 \text{ juta}$

Bagian Ank. Pr. Sdr. Pr. Seayah = $1 \times 27 \text{ juta} = 27 \text{ juta}$

Bagian Ank. Lk. Sdr. Seibu = $1 \times 27 \text{ juta} = 27 \text{ juta}$

Bagian Ank. Pr. Paman Kandung = $1 \times 27 \text{ juta} = 27 \text{ juta}$
162 juta

2. Cara **Ahlu al-Qarābah**, yaitu prinsip pembagian waris untuk *ẓawil arḥām* didasari atas pemilihan ahli waris yang terkuat dan terdekat di antara mereka. Adapun ahli waris yang terkuat dan terdekat adalah mereka yang lebih kuat jalur keturunannya, yang lebih tinggi derajatnya dan yang kuat hubungan kekerabatannya, sesuai dengan susunan ‘aṣabah nasabiyah. Oleh karena itu mereka membagi *ẓawil arḥām* kepada empat kelompok sebagaimana ‘aṣabah dibagi kepada empat jalur keturunan. Kelompok-kelompok tersebut juga sesuai dengan prioritas dalam mewarisi, seperti jalur keturunan ‘aṣabah yaitu dengan mendahulukan *furu’* (keturunan), *uṣul* (leluhur), kemudian *furu’ ajdad wa jaddat* (keturunan kakek dan neneknya).

Jika semua sama dalam jalur keturunan, yang didahulukan adalah yang terdekat dalam derajat. Jika tetap sama, yang paling kuat hubungan kekerabatannya, itu yang didahulukan. Jika masih sama juga harta waris itu dibagikan untuk mereka dengan ketentuan laki-laki mendapat bagian sebanyak dua kali bagian perempuan. Pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan juga digunakan oleh jumhur Hanafiyyah, dan sebagian Syafi’iyyah dan imam Ahmad pada satu riwayat.²³⁸

Dalil kelompok ini adalah pertama, dalil yang dipegang oleh para ulama yaitu, bibi dari pihak ayah mewarisi dua per tiga ($2/3$) dan bibi dari pihak ibu mewarisi sepertiga ($1/3$), menunjukkan kekuatan hubungan kekerabatan. Dimana bibi dari ayah memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris karena ayah, sementara bibi dari pihak ibu mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris karena ibu, dan ibu hanya mewarisi bagian tetap.²³⁹

Dalil lain juga diqiyaskan kepada penerima ‘aṣabah, dimana keduanya sama-sama mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Apabila tidak ada ahli waris yang lain, seorang *ẓawil arḥām* bisa mengambil seluruh harta waris atau sisanya. Dengan kata lain, dalam ‘aṣabah ada *tarjih* dengan melihat kekuatan *jihat* (jalur), seperti mendahulukan *al-bunuwah* dari pada *al-ubuwah*, dan *al-ubuwah* dari pada *al-ukhuwwah*, *al-ukhuwwah* dari pada *al-‘umumah*, begitu juga dengan derajat yang lebih dekat, seperti anak laki-laki lebih didahulukan dari pada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan dengan melihat kekuatan kekerabatan (*quwwatil qarābah*), seperti saudara kandung lebih di dahulukan dari pada saudara seayah.

Contoh kasus, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan kandung dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu. Harta yang ditinggalkan adalah 54 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

²³⁸ Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*,... h. 572.

²³⁹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 791-792.

Ahli Waris	Bagian	3
Cucu laki-laki dari anak perempuan	2/3	2
Cucu perempuan dari anak perempuan	1/3	1
Anak perempuan dari saudara perempuan kandung	Terhijab	X
Anak laki-laki dari saudara perempuan seibu	Terhijab	X

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 54 \text{ juta} : 3 = 18 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian Cucu Lk. Ank.Pr.} = 2 \times 18 \text{ juta} = 36 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian Cucu Lk. Ank.Pr.} = 1 \times 18 \text{ juta} = \underline{18 \text{ juta}}$$

$$\underline{\underline{54 \text{ juta}}}$$

Contoh lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris paman seibu dari pihak ayah, bibi seibu dari pihak ayah, paman kandung dari pihak ibu, bibi kandung dari pihak ibu, dan paman seibu dari pihak ibu. Harta yang ditinggalkan adalah 108 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

Ahli Waris	Bagian	3 ^{x3}	9	
Paman seibu dari pihak ayah	2/3	2	6	4
Bibi seibu dari pihak ayah				2
Paman kandung dari pihak ibu	1/3	1	3	2
Bibi kandung dari pihak ibu				1
Paman seibu dari pihak ibu	Terhijab	X	X	

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 108 \text{ juta} : 9 = 12 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian Paman seibu pihak ayah} = 4 \times 12 \text{ juta} = 48 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian Bibi seibu pihak ayah} = 2 \times 12 \text{ juta} = 24 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian Paman Kndg. pihak ibu} = 2 \times 12 \text{ juta} = 24 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian Bibi kndg. pihak ibu} = 1 \times 12 \text{ juta} = \underline{12 \text{ juta}}$$

$$\underline{\underline{108 \text{ juta}}}$$

Contoh lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari paman kandung. Harta yang ditinggalkan adalah 36 juta.

Ahli Waris	Bagian	4
Istri	1/4	1
Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah	3/4	3
Anak laki-laki dari saudara perempuan seibu	Terhijab	X
Anak perempuan dari paman kandung	Terhijab	X

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 36 \text{ juta} : 4 = 9 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian Istri} = 1 \times 9 \text{ juta} = 9 \text{ juta}$$

Bagian Ank. Pr.Sdr.Lk.Seayah= 3x9 juta = 27 juta
36 juta

3. Cara **Ahlu al-Rahim**, yaitu memberikan warisan kepada seluruh *ẓawil arhām* yang ada, jika tidak ada *aṣḥābul furūd* dan *‘aṣabah*, dengan bagian yang sama. Tidak ada perbedaan antara yang dekat kekerabatannya dengan yang jauh, begitu juga antara laki-laki dan perempuan, siapa yang dipertalikan dengan pewaris dan siapa yang tidak. Semuanya dibagi sama rata. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah dan ditolak oleh para ulama karena tidak rasional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.²⁴⁰

❖ Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Jika diamati bunyi pasal perpasal dari kompilasi hukum islam di Indonesia, maka dalam pasal 185, dijumpai bahwa penyelesaian kasus *ẓawīl arḥām* dengan menggunakan pola *ahlu al-tanzīl*, sama seperti bunyi pasal tersebut. Dimana bunyi pasal 185 adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Daftar Pustaka

- ‘Abdullah bin Muhammad asy-Syansyurī, *Al-Fawāid al-Syansyuriyah Fi Syarḥi al-Manẓumah al-Ruḥbiyyah* (Mekah: Dār ‘Ālim al-Fawāid, 1422)
- Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Syafi’ī*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 1421), Jilid IX
- Al-Ḥāfiẓ Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Quran al-‘Aẓīm* (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1422), Jilid IV
- ‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1413)
- ‘Ali bin ‘Umar, *Sunan Dār Quṭniy* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1386), Jilid XXXIV
- Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-Islāmī, 1419), Jilid III, V, IX, X, XIV
- Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
- Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyāḍ: Dār al-Salām, 1420)
- Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007)

²⁴⁰ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h. 281

MATERI 14. WASIAT DAN HIBAH

Penulis: Muhibbussabry, Lc., M.A

A. Wasiat dan Pembahasannya.

1. Pengertian Wasiat.

Wasiat secara etimologi berasal dari bahasa arab *al-waṣīyah* (jamaknya *waṣaya*), secara harfiyah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Sementara secara terminologi ulama' fikih mendefinisikan wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.²⁴¹

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar-dasar pengambilan hukum mengenai wasiat adalah berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan *Ijma'*.

1. Al-Qur'an.

a. Surat Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf²⁴², (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang dekat, yaitu hanya kepada ahli waris (kedua orang tua dan karib kerabat) yang tidak mendapatkan harta waris baik karena *ṣawil arhām* dan *mahjub* yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maupun karena *mahram* (kecuali pembunuh).²⁴³

Namun ketetapan itu menjadi sunah sesudah turunnya ayat tentang pembagian waris, maka ayat tentang kewajiban berwasiat menjadi *mansukh*. Di samping ada ayat yang *menasakh* tentang wasiat juga ada hadis Nabi yang berbunyi “Tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

b. Surat Al-Maidah ayat 106.

يَتَأْتِي الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang sekiranya dapat merusak tujuan dari wasiat tersebut, maka hendaklah wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

2. Al-Hadis

a. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar.

²⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1926.

²⁴² *Ma'ruf* ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini *dinasakhkan* dengan ayat mawaris.

²⁴³ Superman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 175-176.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبْيِثُ لِيَلْتَنِينَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. ²⁴⁴

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang miliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah tertulis di sisinya”.

Dalam hal ini Imam Syafi’i memberikan komentarnya bahwa orang Islam yang berwasiat sebaiknya wasiat tersebut ditulis dan berada di sisinya, sebab hal tersebut dapat menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila tidak berhati-hati dalam berwasiat, bisa jadi cita-cita si pewasiat tidak tercapai karena kematian seseorang hanya Allah yang mengetahui.

3. *Ijma’*

Umat Islam, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang masih banyak yang menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak ada yang mengingkarinya dan telah menunjukkan adanya *ijma’*. ²⁴⁵

Para ulama pun telah sepakat dalam menanggapi hadis Nabi tentang kadar wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan pewasiat.

3. Hukum Wasiat

Para ulama telah melakukan ijtihad dalam menetapkan status hukum wasiat, yaitu:

1. Wajib

Wasiat dianggap wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban *syara’* yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, amanat yang belum disampaikan, hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, titipan yang belum dipersaksikan. ²⁴⁶

2. Sunah

Berwasiat hukumnya sunah bila diberikan kepada karib kerabat atau ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang-orang shaleh atau kepada orang yang tidak menerima pusaka yang motifnya untuk kepentingan sosial. ²⁴⁷

3. Haram

Berwasiat hukumnya haram bila bertujuan untuk maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pelacuran atau hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. ²⁴⁸

4. Makruh

Berwasiat hukumnya makruh, bila orang yang berwasiat itu sedikit hartanya, sedangkan mempunyai ahli waris yang banyak yang membutuhkan hartanya. Demikian juga berwasiat kepada orang-orang fasiq jika diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta tersebut dalam kefasikan dan kerusakan. Namun bila orang yang memberi wasiat itu mengetahui dan menduga bahwa orang akan diberi wasiat itu menjadi baik, maka hal ini menjadi sunah. ²⁴⁹

5. Mubah

Wasiat itu diperbolehkan bila ditujukan kepada kerabat, tetangga atau yang lain yang penghidupannya tidak kekurangan. ²⁵⁰

²⁴⁴ Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab wasiat, bab al-waṣāyā, hadis no 2738. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhārī*, Jilid V, ...,h. 419

²⁴⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*,...h. 57

²⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma’arif, 1990), Jilid IV, h. 217

²⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*...,h. 449

²⁴⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,...,h. 25

²⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, ...,h. 223

²⁵⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1981), h. 57-58

4. Rukun dan Syarat Wasiat

Terdapat perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan rukun wasiat di antaranya ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya rukun wasiat hanya satu yaitu *ijab* (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat). Karena menurut mereka wasiat adalah suatu akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat, tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. Oleh sebab itu *qabul* tidak diperlukan.²⁵¹

Akan tetapi jumhur ulama fikih menyatakan, bahwa rukun wasiat itu ada empat, yaitu:²⁵²

1. *Al-Mūṣī* (orang yang berwasiat)

Bagi orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*ahli tabarru'*) yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena adanya kedunguan dan kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu adalah seseorang yang kurang kompetensinya, yaitu karena masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya tidak sah. Untuk itu imam Syafi'i menghukumi tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum baligh.

2. *Al-Mūṣā lah* (yang menerima wasiat)

Bagi orang atau badan hukum yang menerima wasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harus dapat diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat tersebut, nama orang tersebut, atau badan organisasi tersebut.
- 2) Telah wujud (ada) pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada secara yuridis misalnya anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Bukan tujuan kemaksiatan.

3. *Al-Mūṣā bih* (harta yang diwasiatkan)

Sesuatu yang diwasiatkan (*al-musha bihi*) dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atau dapat menjadi objek perjanjian.
- 2) Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan.
- 3) Hak milik itu betul kepunyaan si pewasiat

4. *Ṣīghat* (lafaz atau ucapan)

Ṣīghat adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang diucapkan oleh pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda terima atas *ijab* wasiat. *Ijab* dan *qabul* ini didasarkan atas unsur kerelaan tanpa ada paksaan.

Penjelasan tentang rukun dan syarat wasiat juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni:

Pasal 194

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

²⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,...,h. 1927

²⁵² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136-237

Pasal 195

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua saksi dihadapan Notaris.

5. Kadar Wasiat

Telah diketahui kadar atau batas maksimal memberikan wasiat itu adalah sepertiga dari harta peninggalan. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: *“Hendaklah engkau berwasiat sepertiga saja dari hartamu, karena sepertiga itu sudah cukup banyak. Bila engkau pergi meninggalkan ahli warismu yang kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi tidak punya apa-apa, menjadi beban orang lain dan selalu tengadahkan tangan memohon belas kasihan orang”*.²⁵³

Hadis di atas menjelaskan bahwa wasiat yang utama itu kurang dari sepertiga harta, karena sepertiga harta saja sudah dalam kategori banyak, sehingga dikhawatirkan berdampak kurang bagus pada keturunan yang ditinggalkan.

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 201 disebutkan bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

6. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang batalnya wasiat, yaitu terdapat pada pasal 197, sebagai berikut:

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. Mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

7. Mekanisme Pencabutan Wasiat

²⁵³ Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitab wasiat bab wasiat sepertiga harta. Hadis no. 2744. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhāri*, ... Jilid V, h. 434-435.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang mekanisme pencabutan wasiat, yaitu terdapat pada pasal 197, sebagai berikut:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

8. Wasiat Dalam Keadaan Tertutup

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 203, juga telah mengatur bagaimana proses pelaksanaan wasiat dengan keadaan tertutup, sebagai berikut:

1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
2. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

9. Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat.

Ketentuan teknis wasiat dalam kompilasi hukum Islam tertuang dalam pasal 204-205, sebagaimana di bawah ini:

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
2. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

10. Larangan-larangan Wasiat.

Larangan wasiat diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 207 dan 208, sebagai berikut:

1. Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
2. Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

11. Wasiat Wajibah.

Pada dasarnya pemberian wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtiyariyah*, yaitu wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum wasiat. Wasiat adalah *ijab* kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada *ijab* kepemilikan barang-barang dan *taṣarruf* lainnya baik jual beli, hibah, atau yang sejenisnya. Oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam tentang pelaksanaan *wasiat wajibah* menurut pendapat jumhur fuqaha’.

Akan tetapi menurut sebagian fuqaha’, *tabi’in*, imam-imam fiqh dan hadiṣ seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Ṭāwūs, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahwa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib,²⁵⁴ mereka bersandarkan kepada firman Allah yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٦٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf²⁵⁵, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Jumhur fuqaha’ mengatakan bahwa ayat di atas telah *dinasakhkan* oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah an-Nisa’ ayat 11,12, dan 176 oleh itu kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah *dinasakhkan* hukumnya.

Manakala menurut sebahagian fuqaha’ yang lain bahwa ayat di atas tidak pernah di *nasakhkan*, bahkan ayat di atas boleh dipahami sebagai kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat bagian harta warisan. Tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep *wasiat wajibah* dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terhalangi dari mendapat bagian pusaka .

Wasiat wajibah, yaitu tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dalam keadaan tertentu pula.²⁵⁶ Sementara menurut Andi Syamsu Alam, *wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara’*.²⁵⁷

Dinamakan *wasiat wajibah*, disebabkan dua hal yaitu:

1. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan.²⁵⁸

Wasiat wajibah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatchur Rahman mempunyai titik singgung yang sangat erat dengan hukum kewarisan Islam yang apabila dilaksanakan akan menimbulkan banyak persoalan yang memerlukan solusi penyelesaian dengan sebaik-baiknya agar

²⁵⁴ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, h. 53

²⁵⁵ *Ma'ruf* ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini *dinasakhkan* dengan ayat mawaris.

²⁵⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 166.

²⁵⁷ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 79.

²⁵⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 120.

prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat ditegakkan sebagaimana yang di kehendaki oleh hukum kewarisan.²⁵⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2, sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengertian *wasiat wajibah* sebagaimana dikemukakan sama dan disejajarkan dengan pengertian *wasiat wajibah* yang terdapat dalam Undang-Undang Mesir²⁶⁰, kuat dugaan bahwa rumusan wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, mengikuti pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Undang-Undang Wasiat Mesir.

Ahmad Kamil mengemukakan bahwa pemberian hak *wasiat wajibah* kepada anak angkat oleh Kompilasi Hukum Islam, dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam Hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 171 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

Dilihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan *wasiat wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah persoalan Ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum *maṣlaḥah al-mursalah* yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.²⁶¹

❖ Metode Penyelesaian Wasiat Wajibah.

Wasiat Wajibah sebagaimana dalam Undang-undang negara Mesir diperuntukkan untuk para cucu baik laki-laki atau perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada kakek atau nenek, dimana mereka tidak mendapatkan warisan karena terhibab oleh anak (paman) dari pewaris. Menurut undang-undang Mesir juga bahwa *wasiat wajibah* lebih didahulukan dari pada bentuk wasiat yang lain, karena dalam *wasiat wajibah* terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia.

Sementara mengenai besar bagian yang bisa diterima oleh para cucu yang diberikan *wasiat wajibah* adalah dengan melihat kepada bagian tetap yang diterima oleh ayah mereka jika masih hidup, dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) harta peninggalan pewaris, setelah digunakan untuk pengurusan jenazah dan melunasi hutang. Jika bagian asal yang diterima oleh orang tua penerima *wasiat wajibah* tersebut melebihi kadar 1/3 maka dikembalikan pada batasan 1/3.²⁶²

Begitu juga dalam pasal 209 ayat 1 dan 2, kompilasi hukum Islam, disebutkan bahwa penerima *wasiat wajibah* yaitu ayah angkat dan anak angkat, kadar bagian yang mereka bisa dapatkan juga sama yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya atau orang tua angkatnya.

²⁵⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,...,h. 167

²⁶⁰ Menurut Undang-Undang Mesir, No.71 tahun 1946 dalam Pasal 76 yang dimaksud dengan *wasiah wajibah* adalah wasiat seorang kakek yang diperuntukkan untuk cucu-cucunya yang ayah (anak kakek) mereka terlebih dahulu meninggal dunia. Sekiranya tidak ada wasiat wajibah maka cucu tersebut akan terhalang (*terhibab*) oleh anak-anak lelaki kakek tersebut. Lihat Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...,h. 53

²⁶¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 148.

²⁶² Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...,h. 54-55.

Untuk membagikan *wasiat wajibah* kepada para penerimanya, ada tiga langkah yang harus diikuti:²⁶³

1. Menjadikan anak yang lebih awal meninggal masih hidup, kemudian memberikan bagian waris yang diperolehnya dan juga bagian ahli waris lain yang ada dalam kasus tersebut.
2. Mengeluarkan bagian yang diperoleh oleh anak yang dianggap masih hidup tadi, untuk mengetahui bagiannya itu lebih dari 1/3 harta peninggalan pewaris atau 1/3. Apabila melebihi kadar 1/3 maka dikembalikan kepada kadar 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Kemudian bagian inilah yang diberikan untuk anak-anaknya (cucu dari pewaris) dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan.
3. Membagikan sisa dari harta peninggalan setelah diambil oleh cucu pewaris melalui jalur *wasiat wajibah*, kepada ahli waris lain yang ada dalam kasus tersebut. Dengan perhitungan baru tanpa melihat lagi kepada bagian anak laki-laki yang dianggap hidup tadi.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ibu, kakek, 3 anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ayah mereka meninggal pada saat pewaris masih hidup. Harta yang ditinggalkan adalah 216 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

➤ Menganggap ayah dari cucu perempuan pewaris masih hidup dan memberikan bagiannya.

Ahli Waris	Bagian	6
Ibu	1/6	1
Kakek	1/6	1
4 Anak laki-laki	'Aṣabah binnaḥsi	4

Kadar satu bagian =harta:asal masalah
 $=216 \text{ juta}:6 =36 \text{ juta}.$

Maka, setiap anak laki-laki mengambil bagian 36 juta, sama dengan mereka mengambil bagian 1/6 dari harta peninggalan pewaris. Artinya tidak melebihi batasan 1/3 untuk wasiat. Jadi cucu perempuan mengambil bagian *wasiat wajibah*nya adalah 36 juta.

- Mengeluarkan bagian anak yang masih dianggap hidup tersebut dari harta peninggalan, yaitu $216 \text{ juta}-36 \text{ juta}=180 \text{ juta}.$
- Membagikan sisa harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup setelah dikeluarkan bagian *wasiat wajibah*.

Ahli Waris	Bagian	6 ^{x3}	18
Ibu	1/6	1	3
Kakek	1/6	1	3
3 Anak laki-laki	'Aṣabah binnaḥsi	4	12

Kadar satu bagian =harta:asal masalah
 $=180 \text{ juta}:18 =10 \text{ juta}.$

Bagian ibu $= 3 \times 10 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$
 Bagian kakek $= 3 \times 10 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$
 Bagian 3 anak laki-laki $= 12 \times 10 \text{ juta} = \underline{120 \text{ juta}}$
 $\underline{180 \text{ juta}}$

Jadi, setiap satu orang anak laki-laki dapat bagian 40 juta.

Contoh lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, dua saudara laki-laki seibu dan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan yang meninggal ibunya pada masa

²⁶³ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...,h. 55-56.

ayahnya masih hidup. Harta yang ditinggalkan adalah 900 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

- Menganggap ibu dari cucu laki-laki dan perempuan pewaris masih hidup dan memberikan bagiannya.

Ahli Waris	Bagian	8	8
Istri	1/8	1	1
Anak perempuan	1/2	5	7
2 saudara pr.seibu	Terhijab	x	x

Jadi istri mengambil bagian 1/8, anak perempuan 1/2, 2 saudara perempuan seibu terhijab oleh anak perempuan, asal masalahnya adalah 8, istri dapat 1 bagian dan anak perempuan dapat 5 bagian. Ini merupakan masalah rad, jika kita selesaikan dengan pendapat jumhur ulama maka istri tidak bisa mendapatkan kelebihan dari sisa harta karena bukan penerima rad (*aṣḥābul rad*), sehingga asal masalah baru diambil dari penyebut (*maqām*) istri yaitu 8. Istri tetap mengambil bagian *farḍ*nya 1/8 dan anak perempuan mengambil bagian 7/8, dimana kadar ini sudah melebihi ketetapan wasiat yaitu 1/3. Maka oleh karena diberikan bagian untuk cucu laki-laki dan perempuan penerima *wasiat wajiah* dengan kadar 1/3, yaitu 900 juta:1/3=300 juta. Inilah bagian untuk wasiat wajibah bagi cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan. Dimana cucu laki-laki mengambil 200 juta dan cucu perempuan 100 juta (ketentuan 2:1).

- Mengeluarkan bagian anak yang masih dianggap hidup tersebut dari harta peninggalan, yaitu 900 juta-300 juta=600 juta.
- Membagikan sisa harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup setelah dikeluarkan bagian *wasiat wajibah*.

Ahli Waris	Bagian	12	4 ^{x2}	8
Istri	1/4	3	1	2
2 saudara pr.seibu	1/3	4	3	6
				3
				3

Kadar satu bagian =harta:asal masalah
=600 juta:8 =75 juta.

Bagian istri = 2x75 juta = 150 juta

Bagian 2 saudara pr.seibu = 6x75 juta = 450 juta
600 juta

Jadi, setiap satu orang saudara perempuan seibu dapat bagian 225 juta.

B. Hibah dan Pembahasannya.

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti suatu pemberian atau melewati atau menyalurkan. Sedangkan hibah secara terminologi, Jumhur Ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama Mazhab Hanbali lebih detail lagi mendefinisikannya, yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya diserahkan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan.²⁶⁴

²⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,...,h. 540

Menurut Abdul Aziz Dahlan hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat orang tersebut masih hidup, tanpa adanya imbalan.²⁶⁵ Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa ada imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁶⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela atau tidak ada sebab dan musababnya tanpa ada kontra prestasi apapun dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu di langsunngkan pada saat si pemberi hibah masih hidup dan kemudian inilah yang membedakan antara hibah dengan wasiat yang mana wasiat di berikan setelah si pewasiat meninggal dunia.

Dengan demikian, diketahui bahwa keluarnya harta derma (pemberian) biasa berupa hibah, hadiah, dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akherat, maka di namakan sedekah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi, dan dapat memanfaatkannya, maka itu dinamakan hibah. Kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyariatkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat.²⁶⁷

2. Dasar Hukum Hibah

a. Surat Al-Baqarah ayat 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

b. Surat Al-Munafiqūn ayat 10.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

c. Surat an-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

d. Surat Al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... ﴿١٧٧﴾

²⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 76

²⁶⁶ Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam

²⁶⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syāfi'i, 2008), h. 105

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.

3. Hukum Hibah.

Hibah hukumnya *mandub* (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasul saw. bersabda: “*Saling memberi hadiahlah kalian niscaya akan saling mencintai*”.

Hadiah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasul saw. bersabda: “*Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah, maka sayangilah orang yang ada dimuka bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit, rahim berasal dari rahman (Allah) siapa yang menyambungny, maka Allah akan menyambungny dan siapa yang memutuskanny, maka Allah akan memutuskanny*”.²⁶⁸

4. Rukun dan Syarat Hibah.

Rukun dan syarat hibah yaitu sebagai berikut.²⁶⁹

1. Pemberi hibah (*al-Wāhib*)

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang di hibahkan dan pada waktu pemberian itu di lakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya, berakal sehat. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang di hibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Fuqaha telah sepakat bahwa setiap orang itu dapat memberikan hibah manakala memiliki barang yang dihibahkan, sedang hak pemilikan barang itu juga sah.

Sementara jika hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.²⁷⁰

2. Penerima hibah (*al-Mauhūb Lah*)

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang di hibahkan padanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum.

Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya. Apabila penerima hibah berlambat-lambat dalam memenuhi permintaan untuk menerima hibah sehingga pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka batallah hibah tersebut.

Apabila pemberi hibah menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya, yaitu apabila penerima hibah mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka akan memperoleh harganya saja. Akan tetapi apabila segera mengurusnya, maka berhak memperoleh barang yang dihibahkan itu.

3. Harta atau barang yang di hibahkan (*al-Mauhūb*)

Harta atau barang yang di hibahkan dapat terdiri dari segala barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat hibah atau hasil sesuatu barang yang dapat di hibahkan.

²⁶⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*,... h. 128.

²⁶⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 138.

²⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 213.

Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu barang itu nilainya jelas, barang itu ada sewaktu terjadi hibah, barang itu berharga menurut ajaran agama Islam, barang itu dapat diserahkan terimakan, dan barang itu di miliki oleh pemberi hibah. Jika seorang *al-wāhib* menghibahkan dengan cara *‘umrā* dan *ruqbā* maka barang tersebut juga menjadi milik *al-mauhūb lah*.²⁷¹

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada selain ahli waris. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang mengutamakan (pilih kasih terhadap) sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam soal hibah, atau dalam soal penghibahan seluruh hartanya kepada sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Jumhur fuqaha Amṣār (negeri-negeri besar) bahwa hibah semacam itu hukumnya makruh. Tetapi apabila terjadi, maka menurut pendapat mereka juga sah. Fuqaha Zuhairī berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak tidak boleh. Terlebih lagi penghibahan seluruh harta kepada sebagian mereka.²⁷²

4. Ijab dan qabul (*al-Ṣighah*)

Ijab artinya suatu penegasan dari *al-wahib* (yang memberi) atas pemberiannya, seperti: saya hibahkan benda ini untuk anda. Sedangkan qabul artinya suatu penegasan dari yang menerima hibah atas kerelaannya menerima hibah tersebut. Persyaratan adanya ketegasan ijab dan qabul kenyataannya tidak dispakati oleh ulama-ulama mujtahid.²⁷³

Imam Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan qabul bagi keabsahan hibah. Menurut mereka, orang yang menghibahkan harus secara tegas menyatakan ijab atau pemberiannya. Begitu pula yang menerima hibah harus secara tegas pula menyatakan dengan lisan atas penerimaannya. Sementara Hanafiyyah tidak menjadikan qabul sebagai rukun, cukup dengan ijab yang dilakukan oleh pemberi hibah saja, sementara qabul untuk tetapnya hukum hibah tersebut.

Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab qabul yaitu sesuai antara qabul dengan ijabnya, qabul mengikat ijab, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: “Aku hibahkan barang ini padamu, bila si fulan datang dari Makkah”.

5. Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat.

Perebedaan antara waris, hibah dan wasiat bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:²⁷⁴

	WARIS	HIBAH	WASIAT
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris	Bukan ahli waris

²⁷¹ *‘Umrā* adalah seseorang mengatakan: “Saya memberikan barang ini kepadamu dengan cara *‘Umrā*” artinya, saya menjadikan barang ini sebagai hak milikmu sepanjang umurmu. Jika engkau meninggal maka barang itu kembali kepadaku. Dan *Ruqbā* adalah seseorang mengatakan, “Saya memberikan barang ini kepadamu dengan cara *ruqbā*. Jika engkau meninggal sebelumku, maka barang ini kembali kepadaku. Jika saya meninggal sebelum dirimu, maka barang itu tetap menjadi milikmu. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 1625 dari Jabir bahwa Rasul saw. bersabda: “Siapa saja yang memberikan barang kepada orang lain secara *‘umrā*, maka *‘umrā* tersebut menjadi miliknya dan anak keturunannya. Seorang berkata, Saya memberikan barang ini kepadamu dan anak keturunanmu. Tidak ada seorangpun yang tersisa di antara kalian. Maka, barang itu menjadi milik orang yang diberi dan tidak kembali kepada pemberinya, karena pemberi tersebut memberikan sesuatu yang bisa diwarisi.” Lihat Musthafa Dīb al-Bughā, *Fikih Islam Lengkap Mazhab Syafi’i*, (Solo:Media Zikir, 2009), h. 315.

²⁷² Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujahtid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Jilid III, h. 433

²⁷³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana 2004), h. 475

²⁷⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia...*, h. 130.

Nilai	Sesuai faraid	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

6. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kompilasi hukum Islam juga telah mengatur tentang ketentuan hibah, yang dijadikan sebagai acuan hukum khususnya di Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan hibah, yang tertuang dalam pasal 210 sampai dengan 214, adalah sebagai berikut:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan
2. Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
3. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
4. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
5. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
6. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
7. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

7. Hikmah Disyariatkan Hibah.

Hibah mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:²⁷⁵

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhāri*, (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṣ, 1409), Jilid XII, Jilid V
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma’arif, 1975)

²⁷⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*,..., h. 121

- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1981)
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Jilid III
- Komite Fakutas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari'ah wal Qanun, 2010)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Mazhab Syafi'i*, (Solo:Media Zikir, 2009)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Jilid IV
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syāfi'i, 2008)
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

BAGIAN VI

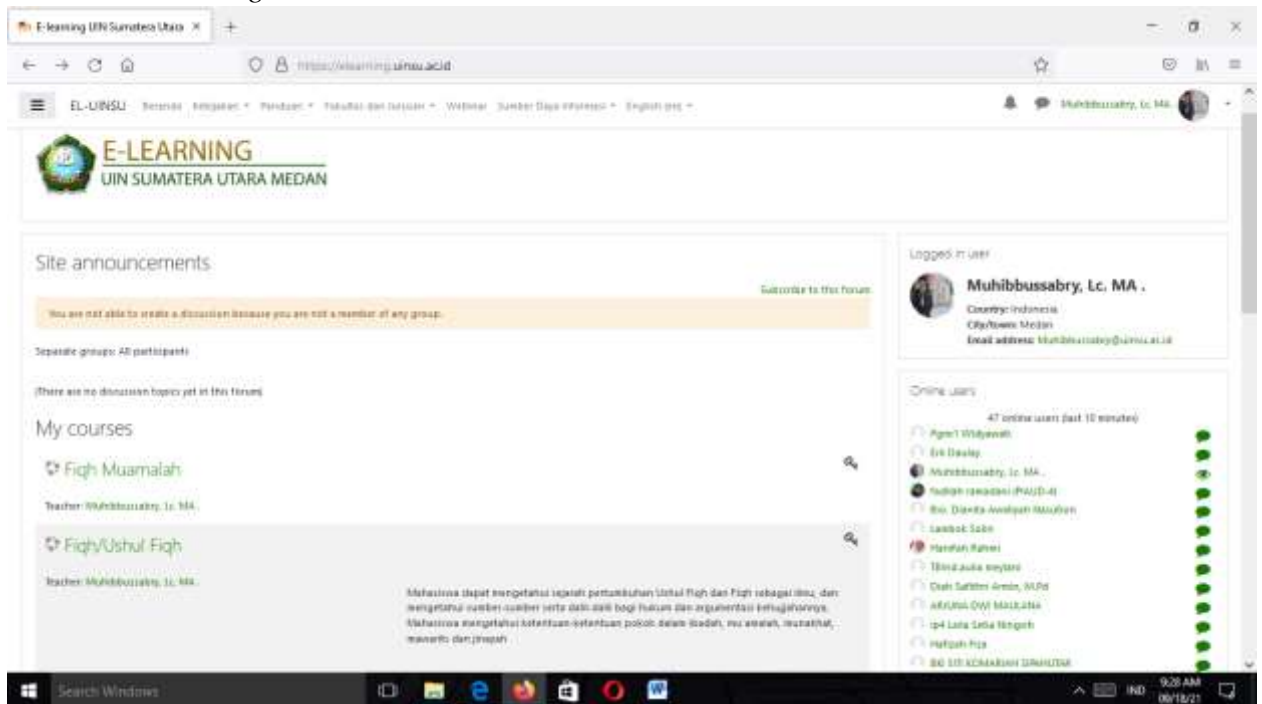
MEDIA PEMBELAJARAN

A. Online

1. Media pembelajaran melalui *Zoom Meeting*.



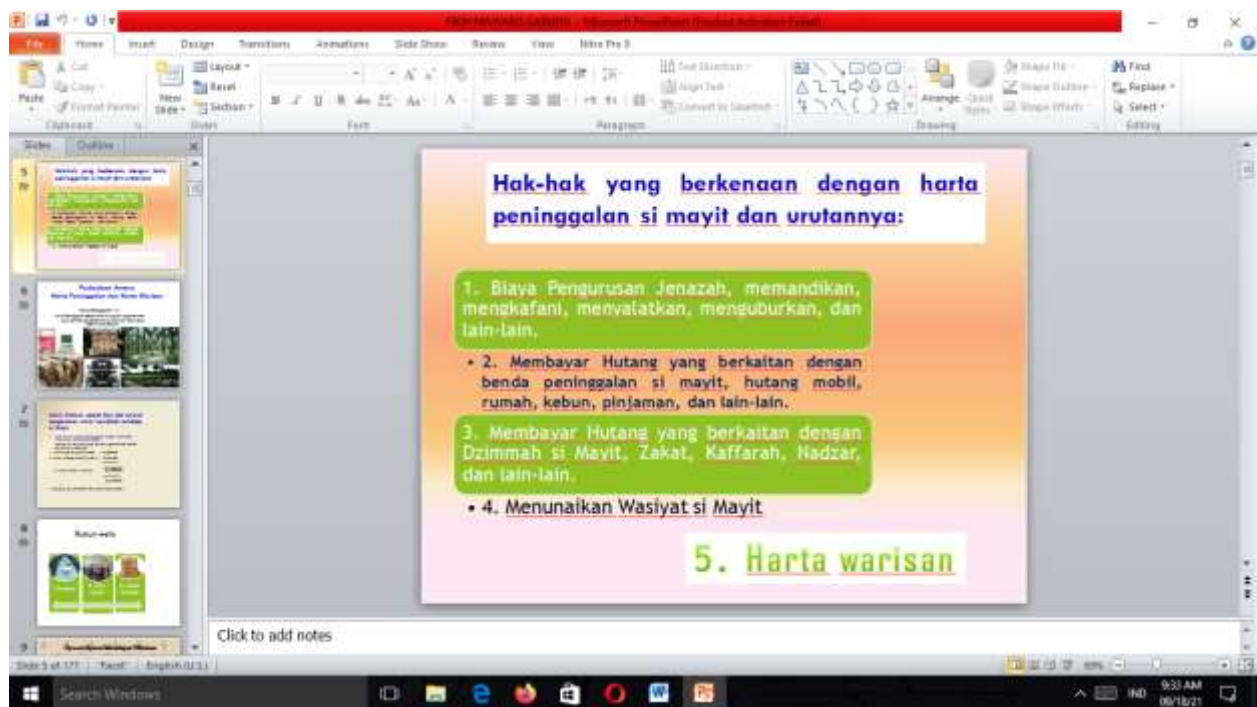
2. Melalui *E-Learning* UIN SU



<https://elearning.uinsu.ac.id/>

B. Offline

Power Point Presentation



BAGIAN VII

DAFTAR TUGAS

Tugas Terstruktur

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB	
	RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM	
Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.
Program Studi	: Perbandingan Mazhab	
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris	
Kode	:	
SKS	: 2	
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.	
Tugas Ke	1 (Satu)	
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup fikih mawaris	
Uraian Tugas	1. Jelaskan pengertian dan objek fikih mawaris? 2. Jelaskan secara ringkas sejarah fikih mawaris dari masa sebelum Islam samapai Islam datang! 3. Jelaskan secara sistematis bagaimana urgensi belajar dan mengajar fikih mawaris?	
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi	
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	2 (Dua)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan rukun, syarat, sebab, dan penghalang dalam hukum kewarisan Islam? 2. Jelaskan hak-hak apa saja yang terkait dengan harta penginggalan (<i>tirkah</i>)?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	3 (Tiga)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan penerima bagian tetap karena sebab pernikahan beserta dengan bagian mereka masing-masing? 2. Jelaskan penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan; a. Saudara perempuan kandung b. Kakek c. Saudara laki-laki/prempuan seibu.		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	4 (Empat)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan pengertian ‘aṣabah dan pembagiannya? 2. Jelaskan pengertian hijab dan pembagiannya?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	5 (Lima)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan metode dalam menentukan asal masalah? 2. Jelaskan pengertian tashīh al mas’alah dan bagaimana metode yang digunakan agar di dalam pembagian harta warisan tidak terjadi <i>inkisar</i> (bilangan pecah)?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	6 (Enam)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan pengertian rad dan bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang rad? 2. Jelaskan pengertian ‘aul dan bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang ‘aul? 3. Bualah 2 contoh kasus <i>rad</i> dan ‘ <i>aul</i> lengkap dengan penyelesaiannya?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	7 (Tujuh)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan pengertian <i>gharrawain</i> bagaimana perbedaan pendapat ulama terkait masalah <i>gharrawain</i> ? 2. Jelaskan pengertian <i>musytarakah</i> dan bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang masalah <i>musytarakah</i> ? 3. Buatlah 1 contoh kasus <i>gharrawain</i> dan <i>musytarakah</i> beserta metode penyelesaiannya!		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	8 (Delapan)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang kewarisan kakek bersama saudara? 2. Jelaskan tatacara penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	9 (Sembilan)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang masa tunggu <i>mafqud</i> ? 2. Buatlah satu contoh kasus penyelesaian pembagian harta warisan untuk <i>mafqud</i> ? 3. Jelaskan bagaimana hukumnya jika suatu saat <i>mafqud</i> kembali dalam keadaan hidup setelah diputuskan meninggal dunia?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	10 (Sepuluh)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan apa saja syarat yang harus terpenuhi agar janin dalam kandungan bisa diperkirakan sebagai ahli waris? 2. Jelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai berapa besar bagian yang harus ditanggungkan untuk ahli waris janin yang masih ada dalam kandungan? 3. Jelaskan metode penyelesaian kasus warisan janin dalam kandungan?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	11 (Sebelas)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan khunsa dan jalur-jalur keturunan <i>khunsa</i> ? 2. Jelaskan metode penyelesaian kasus <i>khunsa</i> ?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	12 (Dua Belas)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan pengertian <i>munasakhat</i> ? 2. Buatlah 2 contoh kasus <i>munasakhat</i> beserta dengan metode penyelesaiannya?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	13 (Tiga Belas)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan pengertian <i>zawil arham</i> dan bagaimana pandangan ulama mazhab tentang warisan <i>zawil arham</i> ? 2. Buatlah 2 kasus kewarisan <i>zawil arham</i> dan tata cara penyelesaiannya?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

RANCANGAN TUGAS DAN PRAKTIKUM

Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:	
Muhibbussabry, Lc., M.A.		Aripin Marpaung, M.A.	
Program Studi	: Perbandingan Mazhab		
Mata Kuliah	: Fikih Mawaris		
Kode	:		
SKS	: 2		
Dosen Pengampu	: Muhibbussabry, Lc., M.A.		
Tugas Ke	14 (Empat Belas)		
Tujuan Tugas	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sejarah Pendidikan Islam		
Uraian Tugas	1. Jelaskan perbedaan antara waris, wasiat dan hibah? 2. Apakah yang dimaksud dengan wasit wajibah? Buatlah 1 contoh kasus wasiat wajibah dan motode penyelsaannya ?		
Kriteria Penilaian	Ketepatan, Kelengkapan dan Kejelasan Isi		
Bobot Penilaian	1. Kuis (0-100) Bobot Nilai 10, Nilai Individu 2. Tugas terstruktur 1 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 3. Tugas terstruktur 2 (75-100) Bobot Nilai 10, Nilai Kelompok 4. UTS (0-100) Bobot Nilai 30, Nilai Individu 5. UAS (0-100) Bobot Nilai 40, Nilai Individu		

BAGIAN VIII
KISI–KISI TES DAN TES HASIL
BELAJAR

KISI-KISI TES, TES HASIL BELAJAR, DAN KUNCI JAWABAN

A. Kisi-kisi Tes

Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Mata Kuliah : Fikih Mawaris
 Kode :
 SKS : 2
 Dosen Pengampu : Muhibbussabry, Lc., M.A.

No.	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator	Aspek						Bentuk Soal	No Soal	Kunci Jawaban	Jml Soal
					C1	C2	C3	C4	C5	C6				
1	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup fikih mawaris	Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup fikih mawaris	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Perkuliahan - RPS - Pengertian Fikih Mawaris - Objek Ilmu Fikih Mawaris - Sumber Hukum Fikih Mawaris - Sejarah Fikih Mawaris - Urgensi Belajar dan Mengajarkan Fikih Mawaris. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengertian fikih mawaris; - Menjelaskan objek kajian ilmu fikih mawaris; - Menjelaskan sumber hukum fikih mawaris; - Menjelaskan sejarah fikih mawaris; dan - Menjelaskan urgensi belajar dan mengajar fikih mawaris. 		✓	✓				Essay			3

2	Mahasiswa mampu menjelaskan Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya.	Mahasiswa dapat menjelaskan Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang Dalam Hukum Waris, <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) dan Hak-hak Yang Terkait Dengannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Rukun Waris - Syarat Waris - Sebab Mendapatkan Waris - Penghalang Dalam Hukum Waris - Defenisi dan Unsur-Unsur <i>Tirkah</i> - Hak-hak yang Terkait dengan <i>Tirkah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan rukun waris; - Menjelaskan syarat waris; - Menjelaskan sebab mendapatkan waris; - Menjelaskan penghalang dalam hukum waris; dan - Menjelaskan konsep tirkah dan hak-hak yang terkait dengannya. 		✓	✓					Essay			2
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaannya Dalam Warisan	Mahasiswa dapat menjelaskan Kewarisan Secara <i>Farḍu</i> Dan Keadaannya Dalam Warisan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Aṣḥābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan) - <i>Aṣḥābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan <i>Aṣḥābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan); dan - Menjelaskan <i>Aṣḥābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan) 		✓	✓					Essay			2

4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>'Aṣabah</i> Dan Hijab (<i>Al-Ḥajb</i>) Dalam Waris Islam	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep <i>'Aṣabah</i> Dan Hijab (<i>Al-Ḥajb</i>) Dalam Waris Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi <i>'Aṣabah</i> - Pembagian <i>'Aṣabah</i> - Pengertian <i>Hijab</i> - Macam-macam <i>Hijab</i> - Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengertian <i>'Aṣabah</i>; - Menjelaskan Pembagian <i>'Aṣabah</i>; - Menjelaskan Macam-macam <i>Hijab</i>; dan - Menjelaskan Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i> 		✓	✓					<i>Essay</i>			2
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Akuntansi Kewarisan	Mahasiswa dapat menjelaskan Akuntansi Kewarisan	<ul style="list-style-type: none"> - Asal Masalah (<i>aṣl al-mas'alah</i>), metode dan patokannya - <i>Tashīḥ Mas'alah</i> dalam waris. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Asal Masalah (<i>aṣl al-mas'alah</i>), metode dan patokannya; dan - Menjelaskan <i>Tashīḥ Mas'alah</i> dalam waris. 		✓	✓					<i>Essay</i>			2

6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep 'Aul Dan Rad Dalam Kewarisan.	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep 'Aul Dan Rad Dalam Kewarisan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian 'Aul - Latar Belakang Terjadinya 'Aul - Perselisihan Pendapat Tentang 'Aul - Asal Masalah yang Dapat di 'Aulkan dan yang Tidak - Pengertian Rad - Pendapat Ulama Tentang Rad - Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Rad - Syarat-syarat Terjadinya Rad - Ahli waris yang Berhak Mendapat Rad - Ahli Waris yang Tidak Mendapat Rad - Macam-Macam Kasus Rad dan Metode Penyelesaiannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengertian 'Aul; - Menjelaskan Latar Belakang Terjadinya 'Aul; - Menjelaskan Perselisihan Pendapat Tentang 'Aul; - Menjelaskan Asal Masalah yang Dapat di 'Aulkan dan yang Tidak; - Menjelaskan Pengertian Rad; - Menjelaskan Pendapat Ulama Tentang Rad; - Menjelaskan Syarat-syarat Terjadinya Rad; - Menjelaskan Ahli waris yang Berhak Mendapat Rad; - Menjelaskan Ahli Waris yang Tidak Mendapat Rad; dan - Menjelaskan Macam-Macam Kasus Rad dan Metode Penyelesaiannya 		✓	✓						Essay				3
---	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	---

8	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Kakek dan Saudara - Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara - Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara - Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Pengertian Kakek dan Saudara - Menjelaskan Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara - Menjelaskan Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara - Menjelaskan Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara 		✓	✓					Essay			2
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang)	Mahasiswa dapat menjelaskan Kewarisan <i>Mafqūd</i> (Orang Hilang)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Mafqūd - Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu Mafqūd - Hak Waris Mafqūd - Metode Penyelesaian Kasus Mafqūd - Contoh dan Penyelesaian Pembagian Harta 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Pengertian Mafqūd - Menjelaskan Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu Mafqūd - Menjelaskan Hak Waris Mafqūd - Menjelaskan Metode Penyelesaian 		✓	✓					Essay			3

			<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Mafqūd Hukum Jika Mafqūd kembali Dalam Keadaan Hidup Setelah Dihukum Meninggal - Cara Menyelesaikan Kasus Mafqūd Yang Lebih Dari Satu Orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus Mafqūd Menjelaskan Contoh dan Penyelesaian Pembagian Harta Untuk Mafqū - Menjelaskan Hukum Jika Mafqūd kembali Dalam Keadaan Hidup Setelah Dihukum Meninggal - Menjelaskan Cara Menyelesaikan Kasus Mafqūd Yang Lebih Dari Satu Orang 										
10	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kewarisan <i>Al-Haml</i> (Anak Dalam Kandungan)	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Kewarisan <i>Al-Haml</i> (Anak Dalam Kandungan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian <i>al-Haml</i> - Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi - Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris Hamil - Bagian yang Harus 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Pengertian <i>al-Haml</i> - Menjelaskan Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi - Menjelaskan Mekanisme Pembagian Harta Waris 		✓	✓					<i>Essay</i>		3

			<p>Ditangguhkan Untuk Ahli Waris Hamil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil - Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil 	<p>Terdapat Ahli Waris Hamil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Bagian yang Harus Ditangguhkan Untuk Ahli Waris Hamil - Menjelaskan Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil - Menjelaskan Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil 										
11	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kewarisan <i>Khunsa</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Kewarisan <i>Khunsa</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian <i>Khunsa</i> - Jalur-jalur Keturunan <i>Khunsa</i> - Keadaan <i>Khunsa</i> dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan - Metode Penyelesaian Kasus <i>Khunsa</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Pengertian <i>Khunsa</i> - Menjelaskan Jalur-jalur Keturunan <i>Khunsa</i> - Menjelaskan Keadaan <i>Khunsa</i> dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan - Menjelaskan Metode 		✓	✓					<i>Essay</i>		2

				Penyelesaian Kasus Khunṣa										
12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>Munāsakhāt</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep <i>Munāsakhāt</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian <i>Munāsakhāt</i> - Keadaan-keadaan kasus <i>Munāsakhāt</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Pengertian <i>Munāsakhāt</i> - Menjelaskan Keadaan-keadaan kasus <i>Munāsakhāt</i> 		✓	✓					Essay		2
13	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>Ẓawīl Arḥām</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep <i>Ẓawīl Arḥām</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian <i>Ẓawīl Arḥām</i> - Pengelompokan <i>Ẓawīl Arḥām</i> - Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan <i>Ẓawīl Arḥām</i> - Cara <i>Ẓawīl Arḥām</i> Mewarisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Pengertian <i>Ẓawīl Arḥām</i> - Menjelaskan Pengelompokan <i>Ẓawīl Arḥām</i> - Menjelaskan Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan <i>Ẓawīl Arḥām</i> - Menjelaskan Cara <i>Ẓawīl Arḥām</i> Mewarisi 		✓	✓					Essay		2
14	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Wasiat Dan Hibah	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Wasiat Dan Hibah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Wasiat - Dasar Hukum Wasiat - Hukum Wasiat - Rukun dan Syarat Wasiat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Pengertian Wasiat - Menjelaskan Dasar Hukum Wasiat - Menjelaskan 		✓	✓					Essay		2

			<ul style="list-style-type: none"> - Kadar Wasiat - Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat - Mekanisme Pencabutan Wasiat - Wasiat Dalam Keadaan Tertutup - Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat - Larangan-larangan Wasiat - Wasiat Wajibah - Pengertian Hibah - Dasar Hukum Hibah - Hukum Hibah - Rukun dan Syarat Hibah - Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat - Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam - Hikmah Disyariatkan 	<p>Hukum Wasiat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Rukun dan Syarat Wasiat - Menjelaskan Kadar Wasiat - Menjelaskan Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat - Menjelaskan Mekanisme Pencabutan Wasiat - Menjelaskan Wasiat Dalam Keadaan Tertutup - Menjelaskan Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat - Menjelaskan Larangan-larangan Wasiat - Menjelaskan Wasiat Wajibah - Menjelaskan Pengertian Hibah 										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Hibah	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Dasar Hukum Hibah - Menjelaskan Hukum Hibah - Menjelaskan Rukun dan Syarat Hibah - Menjelaskan Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat - Menjelaskan Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam - Menjelaskan Hikmah Disyariatkan Hibah 											
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Tes Hasil Belajar

Dalam mata kuliah Fikih Mawaris, diberikan latihan soal pada setiap akhir pembelajaran. Latihan soal ini berupa *essay* yang diberikan ke mahasiswa untuk ditelaah, dianalisis, serta dipraktikkan setelah mendapat topik materi pembelajaran. Indikator penilaian pada setiap soal latihan dilihat dari ketepatan dalam menjawab soal latihan yang diberikan dan rata-rata soal latihan yang diberikan ke mahasiswa berupa *essay*.

C. Jawaban Soal Latihan

Jawaban Materi 1

1. Jelaskan pengertian dan objek fikih mawaris?

Secara terminologi, ilmu *farā'id* memiliki beberapa definisi, yaitu:

1. Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
2. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqih dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.
3. Disebut juga dengan *fiqh al-Mawāris* dan '*ilmu al-hisāb* untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
4. Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *farā'id* atau ilmu mawāris, yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur'ān, sunnah, Ijma' Ulama dan Ijtihad Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.

Objek ilmu *farā'id* adalah harta peninggalan pewaris. Dari segi adanya penjelasan terhadap bagian-bagian untuk ahli waris yang berhak menerimanya, tatacara penghitungan harta waris, sampai jumlah bagian harta yang diterima oleh seluruh ahli waris, sesuai dengan al-Quran, sunah, ijma' dan ijtihad ulama.

2. Jelaskan secara ringkas sejarah fikih mawaris dari masa sebelum Islam samapai Islam datang!

Orang Arab jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukan melalui dua sebab yaitu:

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (*al-nasab*), adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan mereka memberikan kepada ahli waris '*ashabah* yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara lelaki, paman, anak lelaki paman dan lainnya. Dengan demikian bangsa Arab jahiliyah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.²⁷⁶

²⁷⁶ Naṣhīr bin Muḥammad Bin Muṣyārī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Farā'id*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007), h. 44

2. Berdasarkan sebab atau alasan tertentu, adalah warisan yang diberikan kepada ahli waris melalui jalur adopsi (*al-tabannā*). Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang mewarisi dari ayahnya. Adopsi ditetapkan pada waktu itu melalui dua cara; *Pertama*, menjadikan adopsi sebagai salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan istri atau dengan anak perempuan dari orang tua yang mengadopsinya. *Kedua*, menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris.

Selain itu, sebab untuk saling mewarisi pada masa Arab Jahiliyah adalah adanya perjanjian (*al-mu'āhadah*). Misalnya dua pihak saling berjanji dengan mengatakan, “*Darahku adalah darahmu, penyeranganku adalah penyeranganmu, kamu menolongku aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu.*” Sebagai akibat, jika salah satu pihak meninggal dunia maka pihak lainnya yang masih hidup berhak mendapatkan harta peninggalannya.

Ketika Islam datang, orang-orang Arab dengan cepat meninggalkan kebiasaan mereka tentang warisan. Kemudian, Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi (*al-tabanna*). Seperti dalam firman Allah:

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)....Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)

Adapun persoalan mewarisi karena adanya perjanjian (*al-mu'āhadah*), yang terdapat dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 33; “*dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya*”. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukum waris seperti ini telah dinasakh oleh surah an-Nisa' ayat yang sama 33, “*bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.* Dengan turunnya ayat ini, Allah perintahkan untuk memberi hadiah kepada mereka yang membuat perjanjian dan perjanjian tidak bisa menjadi alasan untuk mewarisi lagi, setelah salah satu diantara yang membuat perjanjian meninggal dunia.

Pada masa awal Islam, *muākhāh* atau persaudaraan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Terhadap kaum Muhajirin dan Anshar juga menjadi sebab terjadinya pewarisan. Kemudian Islam menghapus hijrah dan persaudaraan sebagai sebab terjadinya pewarisan, sebagaimana firman Allah. Q.S Al-Ahzab: 6:

dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Dengan demikian, persoalan warisan menurut Islam didasarkan atas tiga sebab yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan dan al-walā, sesuai keterangan yang terperinci dalam al-Quran dan sunnah Nabi saw. serta penjelasan pembagiannya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Itulah prinsip dasar hukum waris yang diajarkan Islam kepada perempuan sejak 14 Abad lalu. Hukum yang memberi hak waris kepada mereka, seperti hak waris kaum lelaki. Islam juga memberi waris kepada anak-anak kecil atau yang belum dewasa, yang pada masa jahiliyah mereka dizalimi dan dirampas hak-haknya.

3. Jelaskan secara sistematis bagaimana urgensi belajar dan mengajar fikih mawaris?

Ilmu *Farā'id* merupakan ilmu yang digunakan untuk mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Ini karena ilmu *farā'id* merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qurani dan produk agama. Hanya Allah lah yang menguasai ketentuan *farā'id* secara detail, Allah tidak menyerahkan hal tersebut kepada seorang raja maupun kepada para Nabi-Nya.

Terdapat banyak hadis-hadis Rasul saw. yang menjelaskan urengensi dan keutamaan ilmu *farā'id*, dan mengajak umatnya supaya cinta dalam mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain, di antaranya adalah:

1. Hadīs yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

قوله صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوَهَا، فَإِنَّهُ نَصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَّعُ مِنْ أُمَّتِي.
Rasulullah saw. bersabda, "Wahai Abu Hurairah! pelajirlah ilmu farā'id dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah)

2. Hadīs yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Amrū bin al-'Ās

ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ، آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَائِلَةٌ.

Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Amrū bin al-'Ās ra. Bahwa Rasul saw. bersabda: "Ilmu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu farā'id.

Jawaban Materi 2

1. Jelaskan rukun, syarat, sebab, dan penghalang dalam hukum kewarisan Islam?

Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

1. **Al-Muwarriṣ** (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun hukmī (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti mafqūd (orang yang hilang).
2. **Al-Wāris** (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
3. **Al-Maurūs** (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qīṣaṣ* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki*, *hukmī*, dan *taqdirī*.
2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *hukmī*.
3. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan.

Sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu sebagai berikut:

4. **Pernikahan.**

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawatir (tinggal berdua).

5. **Qarabah (kekerabatan).**

Hubungan *qarabah* atau disebut juga hubungan *nasab* (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan pewaris (*furu' al-warīs*), kedua orang tua pewaris (*ushul al-warīs*), saudara-saudara pewaris (*Hawasyī*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (*'Umumah*) baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta pemerdeka budak (*wala'*) laki-laki atau perempuan. Atau dengan sebab *rahm* (*ẓawil arḥām*) seperti anak laki-laki dan perempuan dari anak perempuan dan lain-lain.

6. **Wala' (memerdekakan budak)**

Para ulama sepakat bahwa *wala'* (memerdekakan budak) merupakan sebab untuk saling mewarisi. Sehingga orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan warisan dari yang dimerdekakan, jika yang dimerdekakan tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali baik berdasarkan hubungan pernikahan atau kekerabatan.

Sebab-sebab yang menghalangi untuk mendapatkan waris yang telah disepakati oleh ulama ada tiga, yaitu:

1. **Al-Riqqu (perbudakan)**

Perbudakan secara etimologi berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sementara dalam terminologi adalah kelemahan secara hukum yang ada pada diri manusia disebabkan kekufurannya kepada Allah.

2. **Al-Qatlu (Pembunuhan)**

Sepakat para ulama fikih bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mendapatkan warisan. Dengan demikian, ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan menerima harta peninggalannya, berdasarkan hadis:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

Seorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta sedikitpun. (H.R. Malik)

3. **Ikhtilāf al-Dīn (Berbeda Agama)**

Jumhur ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya seorang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah, atau perkawinan, atau karena memerdekakan budak (*wala'*). Senada dengan sabda Rasul saw.

حَدَّثَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Hadīs Usamah Bin Zaid, Rasulullah saw. Bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, demikian juga orang Kafir tidak mewarisi dari orang Muslim. (H.R. Bukhari).

2. **Jelaskan hak-hak apa saja yang terkait dengan harta peninggalan (tirkah)?**

Para jumhur fuqaha sepakat bahwa hak-hak yang berkaitan dengan tirkah itu ada empat yang harus dilaksanakan secara berurutan (*tartib*), yaitu sebagai berikut:

1. **Tajhīz al-Mayyit (biaya-biaya pengurusan mayit)**

Biaya pengurusan mayit adalah segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak meninggal dunia

sampai dikebumikan, yaitu berupa biaya untuk memandikan, mengafani, mengusung, menggali kuburan dan menguburkan. Biaya ini diambil menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan dan dikurang-kurangi, dengan tetap menjaga perintah dan larangan agama.

2. *Qaḍā al-Duyūn* (Pelunasan Utang)

- c. Utang yang terkait dengan Harta Waris. Termasuk dalam hak-hak ini adalah utang yang digadaikan, utang pembelian suatu barang, zakat yang diwajibkan atas harta benda sebelum jadi *tirkah*.
- d. Utang yang terkait dengan Tanggungan Pewaris. Utang-utang berupa utang kepada Allah, seperti *kifarat*, zakat, haji yang wajib, nazar dan utangnya kepada manusia, seperti utang *qirad*, harga, upah, dan lain sebagainya.

3. *Al-Waṣīyyah* (wasiat)

Ulama mazahab Hanafiyyah mendefinisikan wasiat adalah pemberian yang dilakukan seseorang setelah kematian, dengan jalan *tabarru'* (sedekah), baik dalam bentuk harta benda ataupun manfaat. Menurut Mazhab Malikiyyah, wasiat adalah akad yang mengalihkan kepemilikan harta kepada orang lain dengan batasan sepertiga dari harta kekayaan yang dimilikinya, dilakukan setelah meninggal pewasiat. Sementara menurut mazhab Syafi'iyyah, wasiat merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain setelah meninggal dunia. Sedangkan mazhab Hanabilah mendefinisikan wasiat sebagai suatu perkara untuk mengalihkan harta bendanya setelah kematian.

4. *Al-Mīrās* (Pembagian Waris)

Setelah selesai seluruh hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris, mulai dari pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat, maka sisa harta tersebut baru dibagikan kepada ahli waris yang ada.

Jawaban Materi 3

1. Jelaskan penerima bagian tetap karena sebab pernikahan beserta dengan bagian mereka masing-masing?

Aṣhābul furūd sababiyah ada dua orang yaitu suami dan istri.

1. Bagian Suami (الزوج)

Suami mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan istrinya:

- a. **Setengah (1/2)**: Jika tidak meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).
- b. **Seperempat (1/4)**: Jika meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman Allah saw. Q.S. An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ... ﴿١٢﴾

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...(Q.S. an-Nisa': 12)

2. Bagian Istri (الزوجة)

Istri mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan suaminya:

- a. **Seperempat (1/4):** Jika tidak meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).
- b. **Seperdelapan (1/8):** Jika meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman Allah saw. Q.S. An-Nisa' ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ﴿١٢﴾

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...(Q.S. an-Nisa': 12)

2. Jelaskan penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan;

- a. Saudara perempuan kandung
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki/perempuan seibu.

a) Saudara Perempuan Kandung (الأخت الشقيقة)

Saudara perempuan kandung akan mewarisi harta peninggalan pewaris dengan lima bagian, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

- a. **Setengah (1/2):** saudara perempuan kandung berhak mendapatkan setengah dengan empat syarat yaitu:
 - 1) Sendiri.
 - 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),
 - 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
 - 4) Tidak ada *uṣūl muṣakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Dalil kewarisannya adalah:

إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... ﴿١٧٦﴾

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...(Q.S. an-Nisa': 176)

- b. **Dua Per Tiga (2/3):** saudara perempuan kandung berhak mendapatkan bagian dua per tiga, dengan tiga syarat yaitu:
 - 1) Dua orang atau lebih.
 - 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*),

- 3) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 4) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... ﴿١٧٦﴾

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...(Q.S. an-Nisa': 176)

c. **'Aṣabah bil Ghair (penerima sisa):** saudara perempuan kandung, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan *'aṣabah bil ghairi*, yang ketentuannya 2:1, dengan tiga syarat:

- 1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

Sebagaimana firman Allah:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١٧٦﴾

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan...(Q.S. an-Nisa': 176)

d. **'Aṣabah Ma'al Ghair (penerima sisa):** saudara perempuan kandung, satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan *'aṣabah ma'al ghair*, dengan empat syarat:

- 1) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih.
- 2) Tidak ada *far'ul waris muzakkar* (cabang waris laki-laki) yaitu, anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.
- 4) Bersama dengan *far'ul waris muannaṣ* (cabang waris perempuan) satu orang atau lebih yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَتِ النِّصْفَ وَلِابْنَتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.

e. **Al-hajbu (terhijab):** saudara perempuan kandung terhijab dengan dua keadaan, yaitu:

- 1) Ada *far'ul waris muzakkar* (cabang waris laki-laki) yaitu, anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya ke bawah.
- 2) Ada *uṣūl muzakkar* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah. Sementara kakek dan seterusnya ke atas terdapat khilaf para ulama.

b) **Bagian Kakek (الجدّ) .**

Yang dimaksud dengan kakek disini adalah kakek *ṣaḥīḥ*, yaitu kakek yang hubungan nasabnya dengan pewaris tidak diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ayah, ayah dari

ayahnya ayah dan seterusnya ke atas. Kewarisan kakek sama seperti kewarisan ayah, kecuali pada kasus *gharrawain*. Kakek dalam warisan memiliki empat bagian, yaitu:

a. Seperenam (1/6): kakek berhak memperoleh bagian 1/6 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki, baik itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jalur lelaki. Atau jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seterusnya kebawah.
- 2) Tidak ada ayah.

Sebagaimana firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ... (Q.S.An-Nisa': 11)

b. Seperenam dan 'Ashabah (1/6+sisa): kakek mendapatkan 1/6+sisa dengan tiga syarat, yaitu:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yang perempuan, satu orang atau lebih. Baik itu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 2) Jika tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki, baik itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jalur lelaki.
- 3) Tidak ada ayah.

Sebagaimana firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; ... (Q.S.An-Nisa': 11)

Dan dalil dari sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa Rasul bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR. Bukhari)

c. 'Ashabah: kakek akan mendapatkan bagian 'ashabah dengan dua syarat:

- 1) Jika sama sekali tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yang laki-laki dan perempuan seterusnya kebawah.
- 2) Tidak ada ayah. Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; ... (Q.S.An-Nisa': 11)

d. Al-hajbu (terhijab): Kakek terhijab hirman oleh ayah dan setiap kakek yang lebih dekat pertaliannya dengan pewaris. Dalilnya adalah *ijma'* sahabat bahwa kakek mendapatkan warisan ketika tidak ada ayah.

c) Saudara Seibu (الإخوة لأم)

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan waris dalam tiga bagian, yaitu:

a. Seperenam (1/6): saudara seibu (laki-laki atau perempuan) berhak mendapatkan seperenam dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Sendiri, artinya ahli waris boleh jadi satu orang saudara laki-laki seibu, atau satu orang saudara perempuan seibu.

- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muḥakkak* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah dan kakek seterusnya ke atas.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ... ﴿١٢﴾

jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta... (Q.S. an-Nisa': 12)

b. Sepertiga (1/3): saudara seibu (laki-laki atau perempuan) berhak mendapatkan sepertiga dengan tiga syarat yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih, artinya ahli waris boleh jadi dua saudara laki-laki seibu, atau dua orang saudara perempuan seibu atau mereka bersama-sama (laki-laki dan perempuan).
- 2) Tidak ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Tidak ada *uṣūl muḥakkak* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah dan kakek seterusnya ke atas.

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... ﴿١٣﴾

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.... (Q.S. an-Nisa': 12).

c. Al-hajbu (terhijab): saudara seibu (laki-laki atau perempuan) terhijab oleh dua keadaan:

- 1) Jika ada *far'ul waris* (cabang waris) yaitu, anak lelaki dan anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 2) Jika ada *uṣūl muḥakkak* (asal waris yang laki-laki) yaitu ayah dan kakek seterusnya ke atas.

Dalilnya adalah Allah menjadikan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan dengan jalur *kalalah*, dimana menurut jumhur ulama *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan ayah, sementara anak mencakup di dalamnya laki-laki dan perempuan seterusnya ke bawah. Begitu juga ayah mencakup di dalamnya ayah dan kakek seterusnya ke atas.

Jawaban Materi 4

1. Jelaskan pengertian 'aṣabah dan pembagiannya?

Secara etimologi, 'aṣabah adalah laki-laki dari kerabat pewaris, yang nisabnya kepada pewaris tidak ada perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris seapak. Sedangkan 'aṣabah menurut terminologi adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil, dari segi jika sendiri mengambil seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima aṣhabul

furud, mengambil sisa setelah diambil oleh *aṣḥabul furud*, jika seluruh harta telah diambil oleh *aṣḥabul furud*, maka penerima *‘aṣabah* tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan.

Aṣabah terbagi kepada dua, yaitu:

1. **‘Aṣabah Nasabiyah**, yaitu *‘aṣabah* yang ditetapkan karena sebab nasab (keturunan), seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dan qarabah (kekerabatan), seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah.
2. **‘Aṣabah Sababiyah**, yaitu *‘aṣabah* yang terjadi karena sebab memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Jelaskan pengertian hijab dan pembagiannya?

Hijab secara etimologi adalah *al-man’u* (terhalang), seperti firman Allah: “*Sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. (Q.S.Al-Muṭaffifin:15)*”, artinya mereka terhalang untuk melihat Allah pada hari akhirat kelak. Jadi, *hijab* secara bahasa adalah mencegah atau menutupi.

Sedangkan *hijab* menurut terminologi adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh atau sebagian.

Hijab terbagi kepada dua macam yaitu:

1. **Hajbu Auṣāf** (hijab karena sifat), yaitu menghalangi orang yang mempunyai sebab untuk mendapatkan warisan secara total, karena melakukan sesuatu perbuatan yang menjadi penghalang mendapat warisan, seperti membunuh pewaris dan murtad.
2. **Hajbu Asykhāṣī** (hijab karena ada orang lain), yaitu menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan secara total atau dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. *Hijab* ini dibagi kepada dua:
 - a. **Hijab Nuqṣan**, yaitu menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya yang sempurna. Seperti, suami seharusnya mendapatkan bagian terbanyak $\frac{1}{2}$, tapi karena mempunyai keturunan (anak), maka menjadi $\frac{1}{4}$, istri yang seharusnya mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$, karena pewaris mempunyai keturunan (anak).
 - b. **Hijab Hirman**, yaitu menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya secara keseluruhan, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Seperti, kakek yang terhalang karena adanya ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki, dan lain sebagainya.

Jawaban Materi 5

1. Jelaskan metode dalam menentukan asal masalah?

Metode yang bisa digunakan untuk mengetahui asal masalah adalah dengan cara membandingkan *maqāmāt* (penyebut-penyebut) yang ada dalam bagian tetap. Terdapat empat pola perbandingan yang digunakan yaitu *al-tamāṣṣul* (*al-mumāṣalah*), *al-tawāfuq* (*al-muwāfaqah*), *al-tadākhul* (*al-mudākhalah*) dan *al-tabāyun* (*al-mubāyanah*). Lengkapnya akan diuraikan satu persatu dari keempat pola tersebut:

- a) ***Al-tamāssul*** yaitu bilangan-bilangan yang sama dalam nilai. Seperti (2,2), (3,3), (4,4), (6,6) dan sebagainya. Contoh kasus seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ibu, saudara seibu dan saudara seayah, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$, saudara seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan saudara seayah mendapatkan '*aṣabah binnaḥsi*'. Asal masalah adalah 6 (*al-tamāssul*).
- b) ***Al-tabāyun***, yaitu bilangan-bilangan yang berbeda dan tidak bisa disatukan, maka harus dikalikan antara keduanya dan hasilnya menjadi asal masalah. Seperti (2,3), (3,4), (3,8) dan sebagainya. Contoh kasus jika ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, istri dan paman kandung. Maka ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, istri $\frac{1}{4}$, dan paman kandung mengambil '*aṣabah binnaḥsi*'. Asal masalahnya adalah $3 \times 4 = 12$.
- c) ***Al-tawāfuq***, yaitu bilangan-bilangan yang saling menyesuaikan, dimana penyebutnya bisa menerima angka lain dengan hasil pembagian yang genap, asal masalahnya adalah hasil pembagian dengan angka tersebut kemudian dikalikan dengan bilangan penyebut. Contohnya, jika dalam satu kasus ada bagian $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{6}$, dua bilangan penyebut itu (8 dan 6), bisa dibagi dengan satu angka yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah bilangan tidak tersisa ($8:2=4$) dan ($6:2=3$), kemudian hasilnya (4 dan 3) dikalikan penyebut (*maqām*) bilangan pecahan lawannya ($4 \times 6 = 24$) dan ($3 \times 8 = 24$). Dengan demikian asal masalah adalah 24.
- d) ***Al-tadākhul***, yaitu bilangan-bilangan yang lebih besar bisa dibagi oleh bilangan yang lebih kecil, dengan hasil pembagian yang tidak menyisakan bilangan pecah. Contohnya, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan dan saudara kandung. Maka anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan saudara kandung menerima bagian '*aṣabah binnaḥsi*'. Jika diperhatikan penyebut bilangan tersebut yaitu 2 masuk ke 6, karena 2 merupakan bagian dari 6. Sehingga ini merupakan *al-tadākhul* dan asal masalahnya dari bilangan yang paling besar yaitu 6.

2. Jelaskan pengertian *taṣḥīḥ al mas'alah* dan bagaimana metode yang digunakan agar di dalam pembagian harta warisan tidak terjadi *inkisar* (bilangan pecah)?

Taṣḥīḥ mas'alah adalah mencari bilangan asal masalah terkecil yang dapat menghasilkan bagian-bagian ahli waris tanpa bilangan pecah.

Terdapat beberapa keadaan yang menjadikan bagian *saham* ahli waris tidak bisa dibagi secara genap, akan tetapi menghasilkan bilangan pecah. Yaitu sebagai berikut:

- a. ***Taṣḥīḥ bilangan pecah yang terjadi pada satu kelompok penerima waris.*** Maksudnya adalah dalam sebuah kasus bagian *saham*nya tidak bisa dibagi genap untuk satu kelompok ahli waris tersebut, karena pembagiannya menghasilkan bilangan pecah. Maka untuk menyelesaikan kasus ini dengan metode *taṣḥīḥ* harus mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
 - 1) Lihatlah berapa banyak jumlah mereka ('*adadur ruus*') dan berapa *saham* (bagian) yang mereka terima, kemudian bandingkan keduanya apakah masuk ke dalam *tabāyun*, *tawāfuq*, atau *tadākhul*.
 - 2) Jika masuk dalam *tabāyun*, berarti *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka ('*adadur ruus*'), jika masuk kedalam *tawāfuq*, maka *juzu' saham*nya adalah hasil bagi jumlah mereka ('*adadur ruus*') dengan persekutuan pembagi yang sama. atau jika masuk

dalam *tadākhul*, berarti *juzu' saham*nya adalah hasil bagi dari jumlah mereka ('*adadur ruus*') dibagi oleh jumlah *saham*nya.

- 3) Mengambil *juzu' saham* dari yang telah ditetapkan tadi, dan mengalikannya dengan asal masalah, atau meng'aulkannya jika dalam kasus '*aul*'.
- 4) Mengalikan *juzu' saham* yang telah ditetapkan tadi dengan *saham* (bagian) seluruh ahli waris dalam kasus tersebut.

Contoh pertama, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan istri, anak perempuan, anak laki-laki. Bagian mereka masing-masing adalah:

Ahli Waris	Bagian	8^{x^3}	24
Istri	1/8	1	3
Anak laki-laki	'Aṣabah bil ghair	7	21
Anak Perempuan			14
			7

Keterangan:

1. Jumlah anak laki-laki dan perempuan dalam kasus ini adalah 3 (2 laki-laki, 1 perempuan dari kaidah 2:1) dan bagian *saham* mereka adalah 7. Dimana 7 tidak habis dibagi dengan 3 (menghasilkan bilangan pecah), maka perlu di *taṣḥīḥ*.
 2. 3 dan 7 merupakan bentuk *tabāyun*. Maka *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka ('*adadur ruus*') yaitu 3.
 3. Kemudian *juzu' saham* 3 dikalikan dengan asal masalah 8 hasilnya adalah 24 (asal masalah baru).
 4. *Juzu' saham* 3 dikalikan dengan semua bagian ahli waris, yaitu $3 \times 1 = 3$ untuk bagian istri, $3 \times 7 = 21$ untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dapat 14 bagian, sementara anak perempuan dapat 7 bagian. Sesuai dengan kaidah 2:1.
- b. **Taṣḥīḥ bilangan pecah (*al-inkisār*) yang terjadi pada banyak kelompok penerima waris.** maksudnya adalah jika terdapat dalam satu kasus, dua kelompok atau lebih yang tidak bisa dibagikan *saham* mereka kepada jumlah mereka ('*adadur ruus*'), kecuali dengan bilangan pecah. Untuk mentaṣḥīḥ bentuk yang kedua ini, dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
- 1) Lihatlah berapa banyak jumlah mereka ('*adadur ruus*') dan berapa *saham* (bagian) yang mereka terima, kemudian bandingkan keduanya apakah masuk ke dalam *tabāyun*, *tawāfuq*, atau *tadākhul*.
 - 2) Jika masuk dalam *tabāyun*, berarti *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka ('*adadur ruus*'), jika masuk kedalam *tawāfuq*, maka *juzu' saham*nya adalah hasil bagi jumlah mereka ('*adadur ruus*') dengan persekutuan pembagi yang sama. atau jika masuk dalam *tadākhul*, berarti *juzu' saham*nya adalah hasil bagi dari jumlah mereka ('*adadur ruus*') dibagi oleh jumlah *saham*nya, jika masuk kedalam *tamāṣṣul* berarti *juzu' saham* cukup salah satu di antaranya.
 - 3) Kemudian *juzu' saham* dari setiap perbandingan tersebut, digabungkan dan dianalisa masuk dalam pola jenis perhitungan yang mana. Apakah pola *tamāṣṣul*, *al-tawāfuq*, *al-tadākhul* atau *al-tabāyun*. Sehingga dapat diketahui *juzu' saham musytaraknya*.
 - 4) Mengambil *juzu' saham* dari yang telah ditetapkan tadi, dan mengalikannya dengan asal masalah, atau meng'aulkannya jika dalam kasus '*aul*'.
 - 5) Mengalikan *juzu' saham* yang telah ditetapkan tadi dengan *saham* (bagian) seluruh ahli waris dalam kasus tersebut.

Contoh pertama, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ibu, 6 anak perempuan dan 3 saudara perempuan seayah. Bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	$6^{\times 3}$	18
Ibu	1/6	1	3
6 Anak Perempuan	2/3	4	12
3 saudara Pr.Seayah	'Aṣabah ma'al ghair	1	3

Keterangan:

1. Jumlah anak perempuan dalam kasus ini adalah 6 dan bagian *saham* mereka adalah 4. Dimana 4 tidak habis dibagi dengan 6 (menghasilkan bilangan pecah), dan begitu juga dengan jumlah saudara perempuan seayah dalam kasus ini adalah 3 dan bagian *saham* mereka adalah 1. Dimana 1 tidak habis dibagi dengan 3 (menghasilkan bilangan pecah), maka perlu di *taṣḥīḥ*.
2. 6 dan 4 merupakan bentuk *tawāfuq* ($6:2=3$ dan $4:2=2$), Maka *juzu' saham* diambil dari hasil bagi jumlah mereka ('*adadur ruus*) dengan persekutuan pembagi yang sama, yaitu $6:2=3$. Kemudian, 3 dan 1 merupakan bentuk *tabāyun*. Maka *juzu' saham* diambil dari jumlah mereka ('*adadur ruus*) yaitu 3.
3. Kemudian *juzu' sahamnya* digabungkan secara berurutan, yaitu 3 dan 3, merupakan bentuk *tamaṣul*, oleh karena itu, *juzu' saham* musytaraknya adalah 3.
4. Selanjutnya, *juzu' saham* 3 dikalikan dengan asal masalah 6, hasilnya adalah 18 (asal masalah baru).
5. *Juzu' saham* 3 dikalikan dengan semua bagian ahli waris, yaitu $3 \times 1 = 3$ untuk bagian ibu, $3 \times 4 = 12$ untuk bagian 6 anak perempuan, dimana setiap satu orang diantara mereka mendapat 2 bagian. Dan $3 \times 1 = 3$ untuk bagian 3 saudara perempuan seayah, dimana setiap satu orang mendapatkan 1 bagian.

Jawaban Materi 6

1. Jelaskan pengertian rad dan bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang rad?

Rad secara etimologi memiliki beberapa makna, di antaranya: *al-ṣarf* (pertukaran), *al-irjā'u* (pengembalian), *al-i'ādah* (penambahan), *al-raḥḍu* (penolakan) dan *al-man'u* (pencegahan).

Sementara *rad* secara terminologi adalah kebalikan dari '*aul*, yaitu berkurangnya jumlah *saham* (bagian) ahli waris dan bertambahnya asal masalah waris. Atau *rad* adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian tetap (*aṣḥāb al-furūd*) kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada *aṣḥāb al-'aṣabah* (penerima sisa).

Meskipun sebagian ulama sepakat mengenai *rad* yaitu ketika terdapat sisa harta, dikembalikan kepada '*aṣḥābul furūd* jika tidak ada penerima '*aṣabah*, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai '*aṣḥābul furūd* mana saja yang berhak untuk menerima sisa setelah mereka mengambil bagiannya tersebut. Terbagi kepada empat pendapat para ulama, yaitu:

1. Pendapat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, jumhur sahabat dan tabi'in, Hanafiyah, Hanābilah dan ulama-ulama Syafi'iyyah generasi berikutnya, bahwa sisa harta *rad* tidak diserahkan kecuali kepada '*aṣḥābul furūd* secara nasab, dan tidak boleh diserahkan untuk '*aṣḥābul furūd* karena

sabab (sebab) yaitu suami atau istri.

2. Pendapat Usman bin ‘Affan bahwa pengembalian sisa diserahkan kepada seluruh penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) tanpa terkecuali. Beliau beralasan bahwa suami atau istri juga menanggung kekurangan pada bagian mereka ketika terjadi kasus ‘aul, mereka juga wajib menerima tambahan ketika ada pengembalian sisa, karena memberikan utang pasti selalu ada pengembaliannya.
3. Pendapat Ibnu ‘Abbas, bahwa pengembalian sisa *rad* diserahkan kepada *aṣḥābul furūd* selain suami istri dan nenek, jika nenek bersama dengan penerima bagian tetap yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab. Jika tidak ada, nenek bisa mendapatkan pengembalian sisa melalui jalur *rad*.
4. Pendapat Ibnu Mas’ud, ‘Alqamah, Imam Ahmad bin Hanbal dalam beberapa riwayat yang tidak terkenal, bahwa tidak ada pengembalian sisa kepada enam kelompok *aṣḥābul furūd*, yaitu suami, istri, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seapak dan saudara-saudara seibu.

2. Jelaskan pengertian ‘aul dan bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang ‘aul?

‘Aul secara etimologi mempunyai beberapa arti, di antaranya: *al-mailu* ‘*anil haq wa al-jaūr* (kecenderungan untuk takut dan tidak adil), *al-ziyādah* (bertambah), *al-irtifā*’ (naik/meluap), seperti dalam kata ‘*āla al-māu izā zāda wa irtafa’a* ‘*an ḥaddihi* (air yang naik jika ditambah dan melampaui batasannya), dan ‘aul dalam *farāid* yaitu bertambahnya hitungan dalam *farāid* dengan bertambah *sahamnya*, maka berkuranglah bagian bagi ahli *farāid*.

Sedangkan ‘aul secara terminologi adalah bertambahnya *saham* (bagian) masalah dari aslinya, yang menjadikan berkurangnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Dikatakan ‘aul karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil, karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta.

Perbedaan pendapat ulama tentang ‘aul;

1. Ibnu Abbas menyatakan bahwa pada lahirnya, ayat-ayat kewarisan itu telah menjelaskan *furūdul muqaddarah* (bagian tetap) secara sempurna, karena itu setiap *aṣḥab* (ahli waris) haknya harus dipenuhi selagi keadaan memungkinkan, jika tidak, maka hak sebagian waris, seperti anak-anak perempuan atau saudara perempuan hendaknya tidak dipenuhi haknya. Ini disebabkan karena mereka statusnya dapat berubah (dalam suatu keadaan) menjadi ahli waris *aṣḥab*.
2. Kelompok kedua merupakan pendapat Umar bin Khatṭab. Sebaliknya, mereka mengemukakan argumentasi bahwa *naṣ-naṣ* yang menjelaskan hak-hak waris tidak mengutamakan sebagian *aṣḥābul furūd* atas yang lainnya dan tidak membedakan antara harta warisan yang mepet dengan yang longgar.

3. Buatlah 2 contoh kasus *rad* dan ‘aul lengkap dengan penyelesaiannya?

2 contoh kasus *rad*;

Contoh pertama, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri dan anak perempuan.

Ahli Waris	Bagian	8	8
Istri	1/8	1	1
Anak perempuan	1/2	4	7

Keterangan: bagian istri adalah 1/8, anak perempuan 1/2, merupakan bentuk *tadākhul*, jadi asal masalahnya adalah 8. Setelah dibagi dengan setiap bagian ternyata ada sisa 3. Dan diketahui adalah kasus

rad. Penyelesaiannya dengan mengambil penyebut (*maqām*) istri yaitu 8 sebagai asal masalah baru. Dan istri mengambil bagian tetapnya yaitu 1/8, sementara sisa 7/8 diberikan untuk anak perempuan dengan jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

Contoh kedua, ahli waris yang ditinggalkan adalah, 4 orang istri, 3 orang nenek dan 8 orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 960 juta.

Ahli Waris	Bagian	24	8	6	5	8 ^{xs}	40 ^{x12}	480
4 Istri	1/8	3	1	X	X	1	5	60
3 Nenek	1/6	4	7	1	1	1	7	84
8 Anak Pr.	2/3	16		4	4	4	28	336

Keterangan: 4 istri mendapatkan bagian 60/480=1/8 (tetap mengambil bagian *farḍnya*), setiap satu orang 60:4=15 bagian. Kemudian 3 nenek mendapat bagian 84/480 (mengambil *farḍ* dan *rad*), setiap satu orang dapat 84:3=28 bagian. Sementara 8 anak perempuan dapat bagian 336/480 (mengambil *farḍ* dan *rad*), setiap satu orang 336:8=42 bagian.

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=960 \text{ juta}:480 =2 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian 4 istri} = 60 \times 2 \text{ juta} = 120 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian 3 nenek} = 84 \times 2 \text{ juta} = 168 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian 8 anak Pr.} = 336 \times 2 \text{ juta} = \underline{672 \text{ juta}}$$

$$\underline{960 \text{ juta}}$$

Jadi, Setiap 1 istri dapat 30 juta.

Setiap 1 orang nenek dapat 56 juta, dan

Setiap 1 orang anak perempuan dapat 84 juta.

2 contoh kasus ‘aul;

Contoh ‘Aul asal masalah 12 ke 15, ahli waris yang ditinggalkan istri, dua orang saudara perempuan kandung, ibu dan saudara perempuan seibu. Harta yang ditinggalkan 150 hektar.

Ahli Waris	Bagian	12	15
Istri	1/4	3	3
2 Saudara Pr. Kandung	2/3	8	8
Ibu	1/6	2	2
Saudara perempuan Seibu	1/6	2	2

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=150 \text{ hektar}:15 =10 \text{ hektar.}$$

$$\text{Bagian suami} = 3 \times 10 \text{ hektar} = 30 \text{ hektar}$$

$$\text{Bagian 2 saudara Pr.kndg.} = 8 \times 10 \text{ hektar} = 80 \text{ hektar}$$

$$\text{Bagian ibu} = 2 \times 10 \text{ hektar} = 20 \text{ hektar}$$

$$\text{Bagian Sdr. Pr. Seibu} = 2 \times 10 \text{ hektar} = \underline{20 \text{ hektar}}$$

$$\underline{150 \text{ hektar}}$$

Jadi, Setiap 1 saudara Pr. kandung 40 hektar.

Contoh ‘Aul asal masalah 12 ke 17, ahli waris yang ditinggalkan adalah tiga orang istri, dua orang nenek, delapan saudara perempuan kandung, dan empat orang saudara perempuan seibu.

Ahli Waris	Bagian	12	17
3 Istri	1/4	3	3
2 Nenek	1/6	2	2
8 saudara Pr.Kandung	2/3	8	8
4 Saudara Pr. Seibu	1/3	4	4

Kasus ini dinamakan dengan *sab'ata 'asyriyyah*, karena 'aul ke 17, dimana jumlah mereka 17 orang, dan dibagi dengan asal masalah setelah 'aul 17, sementara harta yang ditinggalkan juga 17 dinar. Dinamakan juga dengan *ummi al-Furūj*, *ummi al-Armāl*, karena ahli waris seluruhnya perempuan, yaitu seluruhnya janda. Sebagaimana juga dinamakan *dīnariyyah al-ṣugra*, karena terjadi pada masa sahabat, dan harta yang ditinggalkan 17 dinar.

Jawaban Materi 7

1. Jelaskan pengertian *gharrawain* bagaimana perbedaan pendapat ulama terkait masalah *gharrawain*?

Lafaz *gharrawain* adalah bentuk *tašniyyah* dari lafaz *gharra* yang berarti cemerlang, *gharrawain* berarti dua hal yang cemerlang, yaitu dua masalah waris yang sangat populer seperti bintang yang bersinar terang benderang.

Gharrawain disebut juga dengan *gharibatain*, karena kedua hal ini sangat jarang ditemukan dalam kasus waris, juga disebut dengan *gharimatain*, karena setiap istri bagaikan orang yang berhutang, dan ayah bagaikan ahli waris yang mengambil bagian lebih dari bagian waris mereka. Disebut juga dengan *Umariyatain*, karena Umar bin Khattab, orang pertama yang memutuskan bagian untuk ibu dalah $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Kemudian hal ini disepakati oleh jumhur sahabat, dan ulama-ulama setelahnya.

Setidaknya ada tiga pendapat ulama terhadap kasus ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Umar bin Khattab, jumhur sahabat, dan empat imam mazhab, dan para ulama generasi selanjutnya, bahwa jika dalam sebuah kasus terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, maka bagian ibu tidak mengambil $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris, akan tetapi $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri.
2. Pendapat Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, Syuraih dan Daud al-Žahiri, bahwa jika dalam sebuah kasus terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah, maka ibu tetap mendapatkan bagiannya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewaris. Alasan yang dikemukakan oleh pendapat ini adalah:
3. Pendapat Muhammad Ibnu Sīrain, bahwa ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa, jika ada suami dari pewaris, sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama. Dan ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ secara sempurna, yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta waris, jika bersama dengan istri dari pewaris, sesuai dengan pendapat Ibnu 'Abbas. Alasannya adalah jika memberikan bagian ibu $\frac{1}{3}$ dari harta waris pada masalah pertama, pasti ibu akan mendapat bagian dua kali lipat dari ayah. Berbeda halnya jika memberikan ibu $\frac{1}{3}$ dari harta waris pada masalah kedua, dalam masalah itu, ibu tidak mendapatkan bagian lebih besar sampai 2:1 dari ayah, akan tetapi ayah mendapatkan bagian lebih dari ibu yaitu setengah dari seperenam.

2. Jelaskan pengertian *musytarakah* dan bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang masalah *musytarakah*?

Masalah *musyarrakah*, atau *musytarakah*, berarti bersekutu/berserikat bersama antara saudara laki-laki kandung dengan beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan seibu dalam menerima bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$), karena saudara laki-laki sebagai penerima *'aṣabah* tidak mendapatkan bagian apa-apa. Dan disebut juga dengan *'Umariyyah*, karena yang memberikan putusan terhadap kasus ini adalah Umar. Disebut juga dengan *yamiyyah*, *hajariyyah*, *himariyyah*, karena ada sebuah riwayat

ketika Umar memutuskan kasus kewarisan saudara laki-laki kandung, berkata sebagian sahabat kepadanya: “*wahai Amirul Mukminin, andaikan bapak kami adalah seekor keledai atau seongkah batu yang dilempar kelaut, bukankah ibu kami tetap sama?*” Maka Umar memutuskan mereka sama-sama dapat bagian yang mereka bagi rata. Karena itulah sebagian sahabat menamakan kasus ini dengan nama-nama tadi.

Masalah musytarakah dalam pandangan sahabat dan ulama fikih dibagi kepada dua kelompok, sebagai berikut:

1. Pendapat Umar bin Khattab di akhir hayatnya, disepakati oleh sebagian besar para sahabat, Usman bin ‘Affan, Zaid bin Tsabit, Ibnu ‘Abbas, Ibnu Mas’ud, mazhab Syafi’iyyah dan mazhab Malikiyyah, bahwa saudara laki-laki kandung baik sendiri atau banyak atau saudara laki-laki dan perempuan kandung berkongsi/berserikat dengan dua orang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan seibu pada bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$), dimana mereka membaginya secara sama rata, tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan.
2. Pendapat Ali Bin Abi Thalib, Ubay bin Ka’ab, Abi Musa al-Asy’ari, Ibnu Munzir dan lainnya, mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah, bahwa saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan apa-apa, karena seluruh bagian telah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥābūl furūd*), yaitu $\frac{1}{2}$ untuk suami, $\frac{1}{6}$ untuk ibu atau nenek, dan $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih saudara saudara seibu laki-laki atau perempuan.
3. **Buatlah 1 contoh kasus *gharrawain* dan *musytarakah* beserta metode penyelesaiannya!**

Contoh Penyelesaian *Gharrawain*;

Penyelesaian menurut Umar bin Khattab, jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$ dari Sisa	1
Ayah	‘Aṣabah binnaḥsi	2

Keterangan: ayah mendapatkan bagian $\frac{2}{6}$, yaitu sama dengan $\frac{1}{3}$. Sesuai dengan kaidah al-Quran 2:1 anatara bagian ayah dan ibu. Dan juga diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam indonesia dalam pasal 177, bagian ayah $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak.

Contoh Peyeleasaan Musytarakah;

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami, ibu, dua saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung. harta yang ditinggalkan adalah 144 juta.

Ahli Waris	Bagian	$6^{\times 3}$	18
Suami	$\frac{1}{2}$	3	9
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	3
2 Saudara Pr. Seibu	$\frac{1}{3}$	2	6
Saudara Lk. Kandung			2

Keterangan: bagian suami $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$, dan 2 saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung berkongsi/berserikat (*musytarakah*) dengan bagian yang sama yaitu $\frac{1}{3}$. Penyebut dari ketiganya adalah 2, 6 dan 3, merupakan bentuk *tadākhul*, asal masalahnya adalah 6. Kemudian bagian suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$, bagian ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ dan bagian 2 saudara Perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung adalah $\frac{1}{3} \times 6 = 2$, dimana bagian 2 tidak bisa dibagi untuk 3 orang, maka perlu di *taṣḥīh*, yaitu dengan mengalikan asal masalah dengan jumlah mereka (*‘adadur ruus*), $6 \times 3 = 18$ asal masalah baru. Selanjutnya setiap bagian dikalikan dengan *‘adadur ruus* yaitu bagian suami $3 \times 3 = 9$, bagian ibu $1 \times 3 = 3$, dan bagian 2 saudara perempuan seibu

dan saudara laki-laki kandung adalah $2 \times 3 = 6$ bagian, dimana setiap 1 orang saudara seibu dapat 2 bagian dan saudara laki-laki dapat 2 bagian.

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 144 \text{ juta} : 18 = 8 \text{ juta.}$$

Bagian suami = $9 \times 8 \text{ juta} = 72 \text{ juta}$

Bagian ibu = $3 \times 8 \text{ juta} = 24 \text{ juta}$

Bagian 2 Sdr.Pr.Seibu = $4 \times 8 \text{ juta} = 32 \text{ juta}$

Bagian Sdr.Lk. Kandung = $2 \times 8 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

144 juta

Jadi, Setiap 1 saudara perempuan seibu dapat 16 juta.

Beginilah cara penyelesaian kasus *musytarakah* menurut pendapat Umar dan para sahabat diikuti juga oleh Mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah. Yang memberikan bagian kepada saudara laki-laki kandung $1/3$, dari sebelumnya penerima *'aşabah* dan tidak ada sisa apa-apa setelah diambil oleh *aşhābul furūd* yang ada, sehingga pada akhirnya Umar berijtihad untuk menjadikan bagian $1/3$ dari dua orang saudara perempuan seibu dibagi bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung.

Jawaban Materi 8

1. Jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang kewarisan kakek bersama saudara?

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan hukum kewarisan kakek bersama dengan saudara, yang terbagi kepada dua pendapat yaitu:

1. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, 'Usman, Ibnu al-Zabīr, 'Ubadah bin Samit, Ibnu Sirin, Ibnu 'Umar dan Abu Ḥanīfah, bahwa kedudukan kakek sama dengan ayah, jika ayah tidak ada, sehingga dapat menghibah saudara sekandung dan seayah secara mutlak. Alasan kelompok pendapat pertama ini adalah, **Pertama**, firman Allah surah an-Nisa' ayat 176, yang menjelaskan bahwa syarat mendapatkan warisan saudara laki-laki atau perempuan itu jika dalam masalah *kalālah*, yaitu barangsiapa yang meninggal dan tidak meninggalkan anak dan ayah, maka kakek juga termasuk ayah.
2. Pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Imam Auzā'i, Imam Malik, Imam Syāfi'i, dan Imam Hanbali, bahwa kakek tidak bisa menghibah saudara kandung atau saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi hanya dapat menghibah saudara seibu saja.

Alasan mereka adalah **pertama**, firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Jelaskan tatacara penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara?

Ada dua prinsip yang digunakan dalam menyelesaikan masalah kewarisan kakek bersama saudara ini, yaitu:

1. Apabila bersama kakek salah satu golongan dari saudara. Baik saudara kandung laki-laki dan perempuan saja, atau saudara seayah, laki-laki dan perempuan saja. Akan dibedakan kewarisan mereka dengan dua perkara.
 - a. Jika tidak ada bersama kakek dan saudara kandung saja atau saudara seayah saja, penerima bagian tetap lain (*ṣāhibul farḍ*), maka dalam hal ini, kakek dapat memilih salah satu dari dua kemungkinan yang lebih menguntungkan dan banyak bagiannya, yaitu mengambil **muqāsamah** atau mendapat **1/3 (sepertiga)** dari jumlah keseluruhan harta. Ini tidak terlepas dari tiga gambaran.
 - 1) **Muqāsamah** lebih menguntungkan kakek dari pada 1/3, dalam lima keadaan, yaitu :
 1. Kakek bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung. Dalam keadaan ini, kakek mengambil dua pertiga dari seluruh harta.
 2. Kakek bersama dua orang saudara perempuan sekandung. Dalam keadaan ini, kakek mendapat seperdua bagian.
 3. Kakek bersama tiga orang saudara perempuan sekandung. Dalam keadaan ini, kakek mendapat dua per lima bagian.
 4. Kakek bersama seorang saudara laki-laki sekandung. Dalam keadaan ini, kakek mendapat setengah.
 5. Kakek bersama seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan kandung. Dalam keadaan ini, kakek mendapat bagian dua per lima.
 - 2) **Muqāsamah dan 1/3 (sepertiga)** dari seluruh harta **sama besarnya**, yaitu :
 1. Kakek bersama dua orang saudara laki-laki sekandung. Asal masalah 3, setiap mereka dapat bagian 1/3.
 2. Kakek bersama empat orang saudara perempuan kandung. Asal masalah 6, kakek dapat 1/3, dan empat saudara perempuan kandung 4/6.
 3. Kakek bersama seorang saudara laki-laki kandung dan dua orang saudara perempuan kandung. Asal masalah 6, kakek dapat bagian 1/3, saudara laki-laki kandung 1/3 dan dua saudara perempuan kandung 1/3.
 - 3) Kakek lebih untung mengambil bagian **1/3** daripada muqāsamah. **Patokannya**, jika saudara yang bersama kakek jumlahnya lebih banyak dari kakek. Dan tidak ada gambaran pasti, karena banyak contoh-contohnya, paling sedikit kakek bersama dengan dua saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, atau kakek bersama tiga orang saudara laki-laki kandung dan dua saudara perempuan kandung, dan seterusnya ke atas. Seperti kakek bersama lima saudara perempuan kandung, maka asal masalah 3, bagian kakek 1/3 dan lima saudara perempuan kandung 2/3 dan ditashih masalah menjadi 15, kakek dapat bagian 5 dan lima saudara perempuan kandung dapat bagian 10.
 - b. Jika bersama kakek dan saudara kandung saja atau saudara seayah saja, ada penerima bagian tetap lain (*ṣāhibul farḍ*), maka kakek dalam hal ini memilih mana bagian yang paling menguntungkan untuknya, apakah dengan **muqāsamah**, atau **1/3 dari sisa**, dan **1/6**.
2. Apabila bersama kakek ada dua golongan dari saudara, baik saudara kandung laki-laki dan perempuan, atau saudara seayah, laki-laki dan perempuan. Boleh jadi ada penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) atau tidak. Akan dibedakan kewarisan mereka dengan beberapa perkara di bawah ini.

- a. Saudara-saudara kandung butuh kepada saudara-saudara seayah, untuk menyempurnakan bagiannya bagaikan dua bagian kakek, atau untuk menyempurnakan bagian yang lebih sedikit dari dua bagian kakek. **Patokannya**, terdapat sisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap lebih besar dari $1/4$, bagian saudara-saudara kandung lebih kecil dari dua bagian kakek, dan masalah ini dinamakan dengan ***al-Mu'āddah*** (diperhitungkan) karena saudara-saudara kandung mempengaruhi bagian kakek (bisa menjadi lebih sedikit) dengan saudara seayah jika dibutuhkan, jika kakek telah mengambil bagian sesuai dengan kadarnya, dalam hal ini ***muqāsamah*** atau $1/3$, kemudian saudara kandung mengambil seluruh sisa harta, sedangkan saudara seayah terhalang oleh saudara kandung. kecuali jika saudara seayah bersama dengan seorang saudara perempuan kandung yang mengambil bagian $1/2$, sisanya diberikan untuk saudara seayah.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris kakek, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah.

Ahli Waris	Bagian	3
Kakek	$1/3$	1
Saudara Lk.Kandung	'aṣabah	2
Saudara Lk. Seayah		0

Jawaban Materi 9

1. Jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang masa tunggu *mafqud*?

Mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang, kepada dua pendapat;

1. Pendapat Mazhab Hanafiyyah, masyhur dari Imam Malik, shahih dari Mazhab Syafi'iyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa masa tunggu orang yang hilang tidak dibatasi dengan waktu, akan tetapi batasan waktunya itu dipulangkan kepada ijtihad Hakim, terkait segala hal yang berkaitan dengan orang yang hilang tersebut.

Alasannya adalah asal hukum orang yang hilang masih dianggap hidup, maka tidak boleh dihukumi sudah meninggal seiring dengan perjalanan waktu, tanpa pembuktian dan ijtihad. Apalagi manusia berbeda-beda umurnya, ada yang panjang usianya dan ada yang pendek. Begitu juga dengan masa hidup orang yang hilang pasti berbeda antara satu sama lain, dari segi zaman, tempat dan keadaan orang yang hilang, karenanya tidak dijumpai batasan waktu terhadap masalah ini dalam hukum Islam, maka dilegalkanlah perkara ini kepada ijtihad seorang Hakim.

2. Pendapat Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, bahwa harus diberikan batasan waktu untuk orang yang hilang, jika kembali pada batasan waktu tersebut berarti masih hidup tapi jika tidak artinya sudah meninggal dunia, dan dibagikan hartanya kepada ahli waris ketika sudah diputuskan kematiannya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang dianggap sudah meninggal atau hidup, sebagai berikut:
 - a. Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa orang yang hilang dapat dianggap meninggal jika orang yang sepadan atau yang sama masa kelahirannya sudah meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa dihitung dengan

sempurnanya 90 tahun dari masa kelahiran, ada juga pendapat 70 tahun, dan ada juga 120 tahun.

- b. Mazhab Malikiyyah, mengatakan bahwa orang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia jika dalam masa 70 tahun tidak kembali, ada juga yang berpendapat 75 tahun, ada juga 80 tahun dan 90 tahun dari masa kelahiran bersama dengan satu tahun masa hilangnya.
- c. Mazhab Syafi'iyah, batas waktu tunggu adalah 70 tahun, ada juga yang berpendapat 90 tahun dari waktu kelahiran, yang merupakan waktu orang yang seusia dengannya atau satu generasi dengannya bisa dipastikan sudah meninggal dunia.

Dari ketiga mazhab di atas, pendapat yang mengatakan masa tunggu sampai dihukumi telah meninggal adalah 70 tahun. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

(أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ)

“Umur umatku adalah antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut”

- d. Mazhab Hanabilah, membedakan kepada dua keadaan:
 - 1) Orang yang hilang diperkirakan tidak selamat atau meninggal, di antaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan, perampokan, orang yang pergi perang, dan lainnya. Dalam kondisi ini, seluruh kerabat diharuskan menunggu selama empat tahun sejak orang tersebut hilang. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tetap tidak ada kabar, hakim boleh memberikan putusan mengenai kematiannya, dan dianggap meninggal sejak keputusan hakim ditetapkan.

Dalilnya adalah berdasarkan riwayat dari Malik dalam kitab Muwaṭṭa', Said bin Musayyaf menjelaskan bahwa Umar berkata: “Perempuan manapun yang kehilangan suami dan tidak mengetahui keberadaannya, harus menunggu selama empat tahun. Jika dalam masa itu belum juga ada kabar, dia harus melakukan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah masa ‘iddahnya selesai, perempuan itu boleh nikah kembali.”

- 2) Orang yang hilang diperkirakan selamat, di antaranya adalah orang yang hijrah kenegara lain untuk mencari rezeki, bertamasya, berdagang, atau menuntut ilmu. Dalam kondisi yang demikian, tenggang waktu yang akan diputuskan hakim mengenai kematiannya diserahkan kepada wali al-amr (pemimpin) atau orang yang mewakilkannya. Itupun dilakukan jika proses pencariannya sudah dilakukan secara maksimal.

Sementara itu, sebagian dari ulama Hanbilah memberikan batasan mengenai hal tersebut, di antara mereka ada yang mengatakan 90 tahun sejak orang itu hilang atau 70 tahun. Bahkan, ada yang sampai 120 tahun.

2. Buatlah satu contoh kasus penyelesaian pembagian harta warisan untuk mafqud?

Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ibu, dua saudara perempuan seayah, dan saudara laki-laki seayah yang hilang. Harta yang ditinggalkan adalah 216 juta.

	6 ^{x4} /24			6/8		24	
Keadaan	Hidup			Meninggal		Gabungan	
Juzu' saham	1			3		Hidup	Meninggal
Suami	1/2	3	12	1/2	3	12	9
Ibu	1/6	1	4	1/6	1	4	3

2				4	2/3	4	4	12
Sdr.Pr.Seayah	‘aşabah	2	8					
Sdr.Lk.Seayah Hilang				4	x	X	4	X

➤ Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 216 \text{ juta} : 24 = 9 \text{ juta.}$$

Bagian suami = $9 \times 9 \text{ juta} = 81 \text{ juta}$

Bagian ibu = $3 \times 9 \text{ juta} = 27 \text{ juta}$

Bagian 2 Sdr.Pr.Seayah = $4 \times 9 \text{ juta} = 36 \text{ juta}$

Jadi, Setiap 1 saudara perempuan seayah dapat 18 juta.

3. Jelaskan bagaimana hukumnya jika suatu saat *mafqud* kembali dalam keadaan hidup setelah diputuskan meninggal dunia?

1. Harta Orang *Mafqud*

Jika orang hilang kembali dalam keadaan hidup setelah diputuskan meninggal, dan harta waris telah dibagi kepada ahli waris lain, maka ahli waris yang telah menerima bagian dari harta yang ditinggalkannya harus mengembalikan harta tersebut. Apabila ada diantara ahli waris yang telah menggunakan seluruh atau sebagian harta yang diberikan kepadanya, orang hilang yang kembali itu tidak boleh menuntut sedikitpun atau meminta ganti karena ahli waris memiliki harta itu berdasarkan keputusan Hakim.

2. Istri Orang *Mafqud*

Jika orang yang hilang mempunyai istri, Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa tidak membedakan antara orang yang hilang dengan istrinya, sehingga tidak halal istrinya bagi siapapun sampai berakhir waktu tunggu baginya, dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa masa tunggu tersebut adalah empat tahun, waktu ini khusus untuk istri. Jika masa tunggu selama empat tahun telah berakhir, sementara suami belum kembali dan tidak ada kejelasan akan keberadaannya. Maka Hakim menghukum orang yang hilang tersebut telah meninggal. Dan dia harus melakukan 'iddah seorang yang ditinggal mati suami yaitu empat bulan sepuluh hari, statusnya telah terputus hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang dan boleh untuk menikah lagi jika dikehendaki.

Jawaban Materi 10

1. Jelaskan apa saja syarat yang harus terpenuhi agar janin dalam kandungan bisa diperkirakan sebagai ahli waris?

Anak yang ada dalam kandungan dapat memperoleh warisan jika telah memenuhi tiga syarat di bawah ini:

1. **Syarat pertama**, Ketika meninggal pewaris, anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan keberadaannya, meskipun masih berbentuk embrio.

Untuk mewujudkan syarat pertama tersebut, anak yang ada dalam kandungan seorang ibu tidak boleh luput dari tiga keadaan.

1. Anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dilahirkan dalam keadaan hidup sebelum berakhir waktu paling minimal orang hamil semenjak meninggal pewaris.
2. Anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dilahirkan dalam keadaan hidup setelah berakhir waktu paling lama orang hamil semenjak meninggal pewaris.
3. Perempuan hamil melahirkan anaknya setelah enam bulan dari masa meninggal pewaris, dan sebelum berakhir masa paling lama seorang yang hamil, yaitu menurut pendapat jumhur empat tahun, dalam keadaan ini jika perempuan tersebut telah menikah lagi maka anak yang dilahirkan tidak mendapatkan warisan dari pewaris.

2. Syarat kedua, anak yang dilahirkan tersebut dalam keadaan hidup. Sebagaimana Rasul bersabda:

إِذَا اسْتَهْلَ الصَّبِيُّ وَرَثَتْ وَصَلَّى عَلَيْهِ

“Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian meninggal) maka hendaklah dishalati dan berkah mendapat warisan.”

Menurut para ulama yang dimaksud dengan *istihlāl* (melahirkan) adalah keluarnya bayi dari rahim ibu dalam keadaan hidup, seperti gerakan yang lama, bersin, menguap, menyusu, bernafas yang lama dan tanda-tanda lain yang menunjukkan kehidupannya. Sedangkan gerakan yang sebentar, seperti gerakan binatang yang disembelih, tidak dapat dijadikan dasar bahwa anak itu hidup.

3. Syarat ketiga, adanya sebab yang menunjukkan saling mewarisi antara bayi dalam kandungan dengan pewaris. Dan tidak melakukan sebuah perbuatan yang bisa menjadi penghalang untuk saling mewarisi.

2. Jelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai berapa besar bagian yang harus ditangguhkan untuk ahli waris janin yang masih ada dalam kandungan?

Berbeda pendapat ulama terkait pembagian harta waris yang ada ahli waris hamil di dalamnya, tanpa menunggu ahli waris tersebut lahir. Berapa jumlah yang diprediksikan akan dilahirkan, sehingga mengetahui bagian yang harus ditangguhkan, terbagi kepada beberapa pendapat ulama, yaitu:

1. Pendapat mazhab Syafi’iyyah, bahwa tidak mungkin diprediksikan berapa jumlah bayi yang akan dilahirkan, karena ada perempuan yang melahirkan empat orang, lima orang, enam orang bahkan tujuh orang dalam rahim yang sama. Maka, pilihlah jumlah terbesar yang mempengaruhi bagian ahli waris yang ada.
2. Pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian Malikiyyah, dan Syafi’i dalam satu pendapatnya, bahwa diprediksikan anak yang akan dilahirkan empat orang. Maka ditangguhkan bagian untuk empat anak laki-laki atau empat anak perempuan, karena ini hal yang biasa akan terjadi, dan merupakan kemungkinan jumlah terbesar yang akan dilahirkan seorang perempuan. Dan ahli waris yang lain mengambil bagian terkecil dari kemungkinan anak yang akan dilahirkan tersebut laki-laki atau perempuan.
3. Pendapat al-Laiṣ bin Sa’id, Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah, bahwa diprediksikan anak yang akan dilahirkan satu orang. Karena mayoritas terjadi seperti ini, dan lebih dari itu jarang sekali.

Jadi, bagian satu orang yang akan ditangguhkan, sementara ahli waris lain mengambil bagiannya masing-masing.

4. Mazhab Hanabilah, bahwa pembagian harta harus ditangguhkan sejumlah bagian dua orang, baik dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Karean kebanyakan anak yang dilahirkan jika kembar adalah dua orang, lebih dari itu jarang sekali terjadi.

3. Jelaskan metode penyelesaian kasus warisan janin dalam kandungan?

Berikut akan dijelaskan mengenai penyelesaian kasus anak dalam kandungan yang merupakan ahli waris, dengan menggunakan enam kemungkinan yang akan terjadi, disadur dari berbagai macam pendapat ulama yang telah dibahas pada pembahasan terdahulu.

Keenam macam kemungkinan itu adalah jika anak tersebut meninggal, atau laki-laki, atau perempuan, atau dua orang laki-laki, atau dua orang perempuan dan atau laki-laki dan perempuan. Dari enam kemungkinan ini nantinya akan diketahui keadaan setiap ahli waris lain yang bersama dengan anak dalam kandungan. Jika mendapatkan warisan dalam setiap keadaan maka diberikah bagian penuh untuknya, jika mendapatkan bagian tidak tetap (berubah-ubah), maka diberikan bagian paling kecil, dan begitu juga jika ada ahli waris pada satu keadaan mendapatkan bagian tapi keadaan lain tidak, maka bagiannya ditangguhkan terlebih dahulu sampai anak yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dan jelas keadaannya.

Boleh juga, nanti kita hanya menyelesaikan dengan dua keadaan saja atau malah jika memang setelah pemeriksaan melalui USG, dan hasilnya sangat jelas, boleh dibagikan langsung sesuai dengan yang diprediksikan. Dengan catatan bila suatu waktu ada perubahan maka ahli waris yang telah mengambil bagian waris, bersedia untuk mengembalikan bagian yang telah diterima untuk anak yang dilahirkan. **Contohnya**, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri hamil, saudara laki-laki kandung. Berapa bagian seluruh ahli waris dalam masalah ini.

		4			8			8	8 ² /16				24			8 ³ /24
Istri	1/4	1	1/8	1	1/8	1	1/8	1/2	1/8	3	1/8	1	3			
Saudara Lk.Kandung	ع	3	ع	خ	ع	3	ع	خ	ع	5	ع	خ	خ			
Hamil	خ	خ	ع	7	1/2	4	ع	7/14	2/3	16	ع	7	21			
Prediksi hamil	Mati		Lk. (Anak Lk.)		Pr. (Anak Pr.)		2 Lk. (dua anak Lk)		2 Pr. (dua anak Pr.)		Lk. Dan Pr. (anak Lk dan Pr)					

(Gabungan Masalah 2x24=48)

Juzu' saha m	12	6	6	3	2	2
Istri	12	6	6	6	6	6

Sdr.L k.Kan dung	36	X	18	X	10	X
Hamil	X	42	24	42	32	42

Keterangan: pada kasus ini bagian yang harus ditanggung adalah 42. Jika yang dilahirkan adalah anak laki-laki atau dua orang anak laki-laki atau anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian yang ditanggung tersebut seluruhnya untuk mereka, yaitu 42 bagian. Jika yang dilahirkan anak perempuan maka mendapatkan 24 bagian, dan untuk saudara kandung 18 bagian. Jika yang dilahirkan dua anak perempuan, maka mereka mendapatkan 32 bagian, dan saudara laki-laki kandung 10 bagian. Begitu juga bagian istri dalam keadaan-keadaan ini tidak berubah mendapatkan 6 bagian. Kemudian jika anak yang dilahirkan meninggal maka istri dapat sisa 6 bagian lagi, dan saudara laki-laki kandung 36 bagian.

Jawaban Materi 11

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan *khunsa* dan jalur-jalur keturunan *khunsa*?

Secara etimologi *khunsa* adalah *al-takassur* (terpecah) dan *al-tasanni* (mendua). Sedangkan secara terminologi *khunsa* adalah orang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan sekaligus, atau tidak memiliki kedua-duanya sama sekali, hanya memiliki lubang untuk kencing.

Khunsa musykil adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak tampak pada dirinya ciri-ciri seorang laki-laki atau perempuan, atau ciri-ciri yang dimiliki berlawanan dengan ciri umum seorang laki-laki dan perempuan, misalnya jenggot dan payudara. Dengan demikian, statusnya menjadi tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan.

Para ulama *faraid* setelah mengadakan penyelidikan (*istiqra'*), menetapkan bahwa para ahli waris *khunsa* hanya diketahui melalui empat *jihat* (jalur) sebagai berikut:

- Jihat Bunuwah* (jalur anak), para ahli waris *khunsa* yang tergabung dalam *jihat bunuwah* ini yaitu anak dan cucu, boleh jadi laki-laki dan boleh jadi perempuan.
- Jihat Ukhuwah* (jalur saudara), mereka yang tergabung dalam *jihat ukhuwah* yakni saudara dan anak saudara, yaitu kemenakan, boleh jadi laki-laki dan boleh jadi perempuan.
- Jihat 'Umumah* (jalur paman), para ahli waris *khunsa* dari garis paman yakni paman dan anak paman (saudara sepupu).
- Jihat Wala'* (perwalian budak), ahli waris yang *khunsa* dari golongan ini hanya seorang saja yakni *maulal-mu'tiq* (tuan yang telah membebaskan budaknya).

Sementara *jihat Ubuwwah* (ayah, ibu, kakek dan nenek), *jihat Zaujiyyah* (suami dan isteri), tidak mungkin mereka sebagai *khunsa*. Sebab nikah mereka tidak sah dan tidak dapat mengadakan hubungan biologis sebagai media adanya keturunan. Andai kata ada mereka bukan *musykil* lagi.

2. Jelaskan metode penyelesaian kasus *khunsa*?

1. Metode penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya masih bisa diharapkan.

- 1) Memberikan bagian *khunsa* dalam dua keadaan, keadaan dia laki-laki dan keadaan dia perempuan.

- 2) Membagi asal masalah dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu *tashīh* maka *ditaṣḥīh* (membulatkan).
- 3) Membandingkan di antara asal masalah yang ada dengan menggunakan pola empat yaitu *tadākhul*, *tamāṣul*, *tawāfuq* atau *tabāyun*.
- 4) Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut dan mengalikan silang guna mendapatkan *juzu' saham* (bagian *saham*).
- 5) Kalikan *juzu' saham* (bagian *saham*) dengan setiap bagian ahli waris yang ada, dan hasilnya adalah bagian (*saham*) mereka setelah digabungkan.
- 6) Berikan untuk *khunṣa* dan ahli waris lainnya bagian terkecil dari dua masalah tersebut.
- 7) Bandingkan semua bagian-bagian yang diterima oleh *khunṣa* dan ahli waris lain dalam dua masalah tersebut. Siapa yang mendapatkan warisan dari semua keadaan dan bagiannya tidak berubah, maka berikan bagian tersebut kepadanya. Dan siapa yang bagiannya pada satu keadaan lebih kecil daripada keadaan kedua, berilah bagian terkecil untuknya. Dan siapa yang mendapat bagian pada keadaan pertama sementara tidak mendapat bagian pada keadaan kedua, tidak diberikan bagiannya sedikitpun.
- 8) Jumlahkan bagian-bagian yang telah diberikan kepada *khunṣa* dan ahli waris lain, dan sisanya itu yang ditangguhkan untuk tidak diberikan sementara waktu, sampai jelas keadaan *khunṣa*. Jika dia berhak mendapatkan tambahan berikan untuknya, tapi jika tidak maka kembalikan kepada ahli waris lain.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, ayah, ibu, anak perempuan dan anak *khunṣa* yang statusnya masih bisa diharapkan.

	6 ^{x3} /18			6		18	
Keadaan	Laki-laki			Perempuan		Gabungan	
<i>Juzu' saham</i>	1			3		Laki-laki	Perempuan
Ibu	1/6	1	3	1/6	1	3	3
Ayah	1/6	1	3	1/6+sisa	1	3	3
Anak Pr.	‘Aṣabah	4	12	2/3	4	2	4
Anak Khunṣa			8			2	6

2. Metode penyelesaian kasus *khunṣa* yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan lagi.

- 1) Memberikan bagian *khunṣa* dalam dua keadaan, keadaan dia laki-laki dan keadaan dia perempuan.
- 2) Membagi asal masalah dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu *tashīh* maka *ditaṣḥīh* (membulatkan).
- 3) Membandingkan di antara asal masalah yang ada dengan menggunakan pola empat yaitu *tadākhul*, *tamāṣul*, *tawāfuq* atau *tabāyun*. Dan asal masalah yang dihasilkan dari dua perbandingan masalah tersebut dikalikan dengan 2 untuk mendapatkan gabungan asal masalah *khunṣa*.
- 4) Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut guna mendapatkan *juzu' saham* (bagian *saham*).

- 5) Kalikan *juzu' saham* (bagian *saham*) dengan setiap bagian ahli waris yang ada, dan hasilnya adalah bagian (*saham*) mereka setelah digabungkan.
- 6) Gabungkan bagian setiap ahli waris dalam dua keadaan masalah tersebut, termasuk juga khunsa, kemudian dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan 2, sehingga hasil penjumlahan tersebut adalah bagian untuk masing-masing ahli waris yang ada.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, ayah, ibu, anak perempuan, anak khunsa yang statusnya tidak bisa diharapkan lagi. Harta yang ditinggalkan adalah 612 juta.

Kadar masalah

satu

			6^{x3}/18		6		18x2=36	
Keadaan	Laki-laki				Perempuan			Gabungan
<i>Juzu' saham</i>	2				6			
Ibu	1/6	1	3		1/6	1	6+6=12:2=6	
Ayah	1/6	1	3		1/6+sisa	1	6+6=12:2=6	
Anak Pr.	‘Aṣabah	4	12	4	2/3	4	2	8+12=20:2=10
Anak Khunṣa				8			2	16+12=28:2=14

=612 juta:36

=17 juta.

bagian =harta:asal

$$=612 \text{ juta}:36 =17 \text{ juta.}$$

Bagian ibu = 6×17 juta = 102 juta
 Bagian ayah = 6×17 juta = 102 juta
 Bagian anak perempuan = 10×17 juta = 170 juta
 Bagian anak khunsa = 14×17 juta = 238 juta
612 juta

Jawaban Materi 12

1. Jelaskan pengertian *munasakhāt*?

Secara etimologi *munāsakhāt* adalah jamak dari *munāsakhah*, yang diambil dari kata *al-Naskhi*, yang memiliki banyak makna, di antaranya; *al-naql* (memindahkan), *al-taghyīr* (mengubah), *al-tabdīl* (mengganti), *al-izālah* (menghilangkan), dan membatalkan sesuatu, menetap pada selain tempatnya, seperti ungkapan: “*nasakhtul kitāb*” (aku menyalin dari buku itu), dan “*nasakhat al-āyah*” (menghilangkan hukumnya).

Sementara *munāsakhāt* secara terminologi adalah meninggalnya seorang pewaris dan harta warisannya belum dibagikan sampai meninggal ahli waris lain baik sendiri atau banyak.

2. Buatlah 2 contoh kasus *munasakhāt* beserta dengan metode penyelesaiannya?

Contoh Pertama, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 anak laki-laki, harta waris tidak dibagikan untuk mereka sehingga meninggal salah seorang anak laki-laki yang bersamanya ada ahli waris anak laki-laki (anak dari pernikahannya), kemudian meninggal lagi anak laki-laki dari pewaris pertama yang meninggalkan ahli warisnya istri dan anak laki-lakinya, kemudian meninggal lagi anak laki-laki dari pewaris pertama dan meninggalkan ahli

warisnya anak laki-laki dan anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 480 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

Jawaban:

Asal Masalah		4		2		8		3	Gabungan	
Juzu' saham		24		12		3		8	96	
ع	Anak Lk	1							24	
	Anak Lk	1	ت							
	Anak Lk	1			ت					
	Anak Lk	1					ت			
	ع	2 Anak Lk	2						24	12
										12
			1/8	Istri	1				3	
	ع	Anak Lk	7						21	
	ع	Anak Lk					2		16	
		Anak Pr					1		8	

Kadar satu bagian = harta: asal masalah
= 480 juta: 96 = 5 juta.

Keterangan: jadi anak laki-laki mengambil bagian dari pewaris pertama yaitu 24 (bagian) x 5 juta = 120 juta. Kemudian anak laki-laki yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian waris kepada kedua anak laki-lakinya 24 (bagian) x 5 juta = 120 juta, dimana setiap satu orang mengambil 12 x 5 juta = 60 juta. Sementara anak yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian waris untuk istrinya 3 (bagian) x 5 juta = 15 juta, dan anak laki-lakinya 21 (bagian) x 5 juta = 105 juta. Begitu juga, anak laki-laki yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian untuk anak laki-lakinya 16 (bagian) x 5 juta = 80 juta, dan anak perempuan mendapat 8 (bagian) x 5 juta = 40 juta.

Contoh Kedua, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, 3 orang saudara laki-laki kandung, harta waris belum dibagi untuk mereka, sehingga meninggal satu saudara laki-laki kandung yang meninggalkan dua anak laki-lakinya, kemudian meninggal lagi saudara laki-laki kandung yang lain, meninggalkan ahli waris istri dan dua orang anak laki-lakinya, selanjutnya meninggal saudara laki-laki kandung terakhir yang meninggalkan ahli waris dua orang istri dan anak laki-laki. Bagaimana menyelesaikan kasus ini.

Jawaban.

Asal Masalah	4		2		$8^{x2}/16$		$8^{x2}/16$	Gabungan
<i>Juzu' saham</i>	16		8		1		1	64
1/4	Istri	1						16
ع	Sdr Lk	1	ت					
	Sdr Lk	3	1		ت			
	Sdr Lk		1			ت		
	ع	2 Anak Lk	2					16
								8
								8
			1/8	Istri	1	2		2
			ع	2 Anak Lk	7	14		14
								7
								7
					1/8	2 Istri	1	2
							1	2
								1
					ع	Anak Lk	7	14
								14

Keterangan: istri dari pewaris pertama mendapatkan 16 bagian. Kemudian saudara laki-laki kandung yang meninggal dari pewaris pertama memberikan untuk ahli warisnya 2 orang anak laki-laki 16 bagian, setiap satu orang mendapatkan 8 bagian. Selanjutnya saudara laki-laki kandung yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian waris untuk istrinya 2 bagian, dan 2 orang anak laki-lakinya 14 bagian, setiap satu orang mendapatkan 7 bagian. Kemudian saudara laki-laki kandung yang meninggal dari pewaris pertama memberikan bagian waris untuk 2 orang istrinya 2 bagian, dimana setiap satu orang dapat 1 bagian, dan untuk anak laki-lakinya mendapatkan 14 bagian.

Jawaban Materi 13

1. Jelaskan pengertian *zawil arham* dan bagaimana pandangan ulama mazhab tentang warisan *zawil arham*?

Secara etimologi lafaz *al-arḥām* adalah bentuk jamak dari *raḥim*, yang artinya hubungan kekerabatan atau sebab terjalin kekerabatan. Adapun pengertian *zawil arḥām* menurut ulama *farā'id* adalah seluruh kerabat yang bukan penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan bukan penerima sisa (*‘aṣabah*).

Sepakat para ulama bahwa *zawil arḥām* tidak mendapatkan warisan jika pewaris meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan *‘aṣabah*. Sementara jika pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul*

furūd atau ‘*aṣabah*, atau ada sisa harta setelah diambil oleh salah seorang suami atau istri, maka para ulama berbeda pendapat tentang kewarisan *ẓawīl arḥām* dalam kasus tersebut, kepada dua pendapat yaitu sebagai berikut:

- Pendapat Jumhur Ulama, Sahabat dan *tabi’in* dan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah, bahwa *ẓawīl arḥām* mewarisi jika tidak ada penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan penerima bagian sisa (‘*aṣabah*). Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah firman Allah surah al-Ahzab ayat 6: “*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah*”. Ayat ini menunjukkan bahwa *ẓawīl arḥām* lebih berhak untuk mendapatkan warisan menurut ketentuan Allah swt. Betapa tidak, pada masa awal Islam sebab mewarisi karena sumpah tidak termasuk *qarābah* (kekerabatan), dan hukum ini telah *dinasakh*, kemudian menjadikan sebab saling mewaris pada waktu itu karena *hijrah*, dan hukum ini juga *dinasakh*. Dengan demikian, jelaslah bahwa *ẓawīl arḥām* lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari pada yang lainnya.
- Pendapat Zaid bin Tsabit, Ibnu ‘Umar, Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Auza’ī, al-Zuhri, Abu Sūr, mazhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah, bahwa *ẓawīl arḥām* tidak dapat memperoleh warisan sedikitpun, akan tetapi harta diberikan kepada baitul mal, jika pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan ‘*aṣabah*. Dalil mereka adalah ayat-ayat waris, yang di dalamnya hanya menjelaskan bagian-bagian ahli waris penerima bagian tetap dan ‘*aṣabah* saja, tanpa menyebutkan tentang bagian *ẓawīl arḥām*. Sekiranya mereka berhak mendapatkan warisan pasti al-Qur’an akan menjelaskannya, karena warisan tidak bisa diperoleh melainkan dengan *naṣ*. Senanda dengan sabda Nabi saw. “*Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang hak mereka masing-masing, tidak ada wasiat untuk ahli waris.*”

2. Buatlah 2 kasus kewarisan *ẓawīl arḥām* dan tata cara penyelesaiannya?

Contoh Pertama, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bibi kandung dari pihak ayah, bibi seayah dari pihak ayah, bibi kandung dari pihak ibu, bibi seayah dari pihak ibu, dan 4 orang cucu laki-laki dari anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 552 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

Ahli Waris	Tanzil	Bagian	$6^{\times 4}$	24
Bibi kandung dari ayah	Ayah	$1/6 + \text{sisa}$	$1 + 1 = 2$	4
Bibi seayah dari ayah				4
Bibi kandung dari ibu	Ibu	$1/6$	1	2
Bibi seayah dari ibu				2
4 cucu Lk dari anak Pr.	Anak Pr.	$1/2$	3	12

Kadar satu bagian = harta: asal masalah

$$= 552 \text{ juta} : 24 = 23 \text{ juta.}$$

$$\text{Bagian bibi kandung dari ayah} = 4 \times 23 \text{ juta} = 92 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian bibi seayah dari ayah} = 4 \times 23 \text{ juta} = 92 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian bibi kandung dari ibu} = 2 \times 23 \text{ juta} = 46 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian bibi seayah dari ibu} = 2 \times 23 \text{ juta} = 46 \text{ juta}$$

$$\text{Bagian 4 cucu Lk dari anak Pr.} = 12 \times 23 \text{ juta} = 276 \text{ juta}$$

$$\underline{552 \text{ juta}}$$

Setiap satu orang cucu laki-laki dari anak perempuan mendapatkan 69 juta.

Contoh Kedua, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris paman seibu dari pihak ayah, bibi seibu dari pihak ayah, paman kandung dari pihak ibu, bibi kandung dari pihak

ibu, dan paman seibu dari pihak ibu. Harta yang ditinggalkan adalah 108 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

Ahli Waris	Bagian	3^{xs}	9	
Paman seibu dari pihak ayah	$\frac{2}{3}$	2	6	4
Bibi seibu dari pihak ayah				2
Paman kandung dari pihak ibu	$\frac{1}{3}$	1	3	2
Bibi kandung dari pihak ibu				1
Paman seibu dari pihak ibu	Terhijab	X	X	

Kadar satu bagian = harta: asal masalah
 = 108 juta: 9 = 12 juta.

Bagian Paman seibu pihak ayah = 4×12 juta = 48 juta
 Bagian Bibi seibu pihak ayah = 2×12 juta = 24 juta
 Bagian Paman Kndg. pihak ibu = 2×12 juta = 24 juta
 Bagian Bibi kndg. pihak ibu = 1×12 juta = 12 juta
108 juta

Jawaban Materi 14

1. Jelaskan perbedaan antara waris, wasiat dan hibah?

Perebedaan antara waris, hibah dan wasiat bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

	WARIS	HIBAH	WASIAT
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraid	Bebas	Maksimal $\frac{1}{3}$
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

2. Apakah yang dimaksud dengan wasit wajibah? Buatlah 1 contoh kasus wasiat wajibah dan motode penyelesaiannya ?

Wasiat wajibah, yaitu tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ibu, kakek, 3 anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ayah mereka meninggal pada saat pewaris masih hidup. Harta yang ditinggalkan adalah 216 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing.

➤ Menganggap ayah dari cucu perempuan pewaris masih hidup dan memberikan bagiannya.

Ahli Waris	Bagian	6
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Kakek	$\frac{1}{6}$	1
4 Anak laki-laki	'Aṣabah binnaḥsi	4

Kadar satu bagian = harta: asal masalah
 = 216 juta: 6 = 36 juta.

Maka, setiap anak laki-laki mengambil bagian 36 juta, sama dengan mereka mengambil bagian $\frac{1}{6}$ dari harta penginggalan pewaris. Artinya tidak melebihi batasan $\frac{1}{3}$ untuk wasiat. Jadi

cucu perempuan mengambil bagian *wasiat wajibah*nya adalah 36 juta.

- Mengeluarkan bagian anak yang masih dianggap hidup tersebut dari harta peninggalan, yaitu 216 juta-36 juta=180 juta.
- Membagikan sisa harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup setelah dikeluarkan bagian *wasiat wajibah*.

Ahli Waris	Bagian	6^x	18
Ibu	1/6	1	3
Kakek	1/6	1	3
3 Anak laki-laki	'Aṣabah binnaḥsi	4	12

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

$$=180 \text{ juta}:18 =10 \text{ juta.}$$

Bagian ibu = $3 \times 10 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$

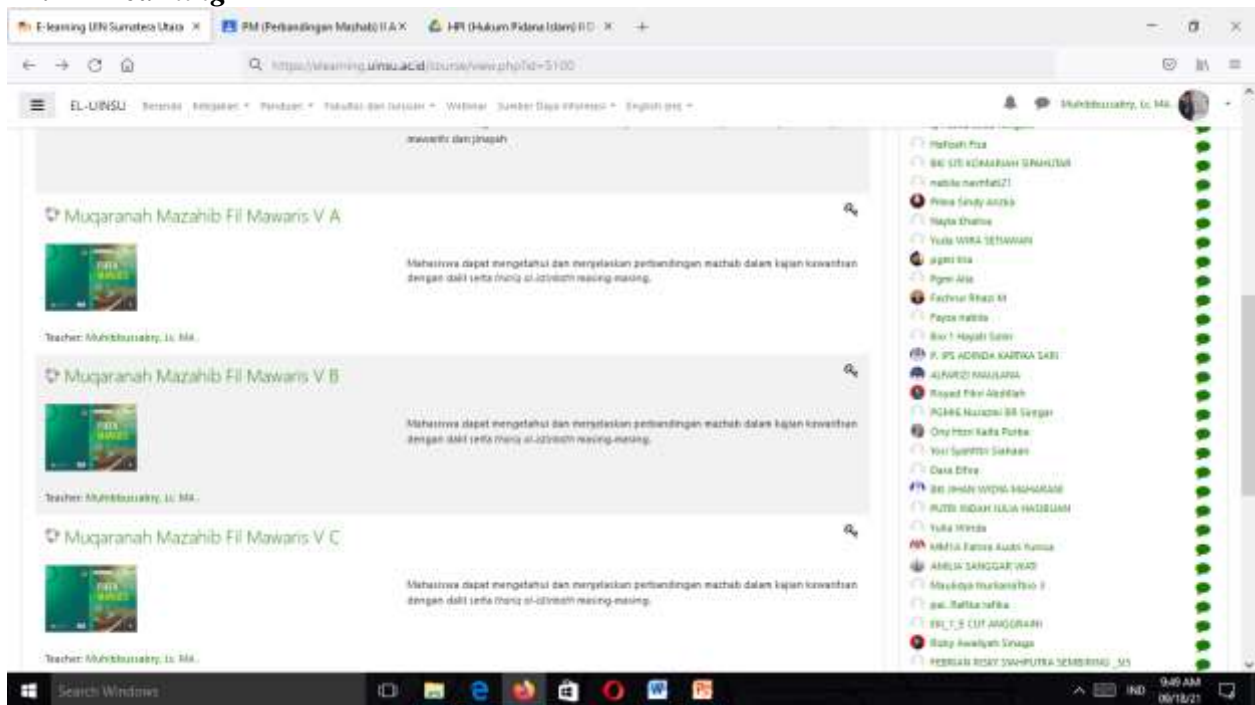
Bagian kakek = $3 \times 10 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$

Bagian 3 anak laki-laki = $12 \times 10 \text{ juta} = \underline{120 \text{ juta}}$
 $\underline{180 \text{ juta}}$

Jadi, setiap satu orang anak laki-laki dapat bagian 40 juta.

PLATFORM

1. E-Learning



<https://elearning.uinsu.ac.id/>

2. Zoom Meeting



3. Classroom

The screenshot shows a Google Forms interface for a quiz titled "UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) HUKUM WARIS ISLAM". The form is displayed in a web browser window with multiple tabs open. The form includes a title, a subtitle "Jawablah pertanyaan di bawah ini:", and three input fields for "NAMA", "NIM", and "JUDULAN". Each input field has a "Teks jawaban singkat" label. The form is set to "Pertanyaan" (Question) mode. The browser's address bar shows the URL: https://docs.google.com/forms/d/14SGgvAZuWi5n38xTS_wWEMaQUTTDlcEsHVh1Jhaq9M8/edit. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 9:54 AM on 06/12/21.

https://docs.google.com/forms/d/14SGgvAZuWi5n38xTS_wWEMaQUTTDlcEsHVh1Jhaq9M8/edit

VIDEO PEMBELAJARAN

1. Video Pembelajaran Materi Ruang Lingkup Fikih Mawaris
<https://drive.google.com/file/d/1j2bJSryBELM5LFALvv01CKvmWQXql8RU/view?usp=sharing>
2. Video Pembelajaran Materi Tanya Jawab Permasalahan Kewarisan
https://drive.google.com/file/d/1vR82Gmx_juRNbIoxl0FZgfEyJ2Cd9DW8/view?usp=sharing
3. Video Pembelajaran Materi Konsep Rad Dalam Kewarisan dan Metode Penyelesaiannya.
https://drive.google.com/file/d/19VPGagpu1hxSy_Kl4G_vBF3LrY79WZwE/view?usp=sharing